



LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA

*DAMPAK ADANYA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)
TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA PANDEMI*

2021



LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA

*DAMPAK ADANYA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)
TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DI MASA PANDEMI*

2021



LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021

Indonesian Economic Report, 2021

ISSN: 1858-0963

No. Publikasi/*Publication Number*: 07300.2114

Katalog/*Catalog*: 9199007

Ukuran Buku/*Book Size*: 17,6x25 cm

Jumlah Halaman/*Number of Pages*: xx+188 hlmn

Naskah/*Manuscript*:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Directorate of Statistical Analysis and Development

Penyunting/*Editor*:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Directorate of Statistical Analysis and Development

Desain Kover Oleh/ *Cover Designed by*:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Directorate of Statistical Analysis and Development

Penerbit/ *Published by*:

Badan Pusat Statistik

©BPS RI/*BPS-Statistics Indonesia*

Dicetak oleh/*Printed by*:

BADAN PUSAT STATISTIK/ *BPS-Statistics Indonesia*

Sumber Ilustrasi/*Graphics by*: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purposes without permission from BPS-Statistics Indonesia

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Ali Said

Editor :

Windhiarso Ponco Adi P

Sofaria Ayuni

Penulis :

Sofaria Ayuni

Putri Larasaty

Aprilia Ira Pratiwi

Tika Meilaningsih

Muhammad Ihsan

Erna Yulianingsih

Riyadi

Desain/layout :

Chairul Anam

Infografis :

Erna Yulianingsih

Muhammad Ihsan

Riyadi

Tika Meilaningsih

Kontributor Data :

- Direktorat Neraca Produksi
- Direktorat Neraca Pengeluaran
 - Direktorat Statistik Harga
 - Direktorat Statistik Distribusi
- Direktorat Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

KATA PENGANTAR

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2021 merupakan publikasi rutin tahunan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini memberikan gambaran perkembangan kinerja perekonomian Indonesia. Publikasi ini mengulas kondisi perekonomian selama terjadi Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan perkembangan perekonomian di tahun berjalan atau selama tahun 2021, yang dicerminkan melalui indikator makro terpilih.

Statistik yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari data yang dihimpun oleh BPS maupun institusi lain seperti Bank Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga lainnya yang dapat memberikan gambaran perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Publikasi ini menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran negara, pertumbuhan ekonomi, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), laju inflasi, perdagangan luar negeri, investasi, pariwisata, dan ketenagakerjaan.

Akhirnya, penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan publikasi ini. Saran membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi sejenis di masa mendatang, dan semoga publikasi ini bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2021
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xiii
Penjelasan Umum	xv
Penjelasan Teknis	xvi
Singkatan	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. APBN DAN KEBIJAKAN NEGARA DI DALAM ANGGARAN PENANGANAN PANDEMI	9
Kebijakan Pemberian Insentif Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi	12
Pendekatan <i>Spending Better</i> Untuk Optimalisasi Belanja Negara	17
Utang Negara Masih Tinggi Untuk Menutupi Defisit Anggaran	21
Pemerintah Menganggarkan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional di Tahun 2020 dan 2021	23
BAB III. PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMULIHANEKONOMI NASIONAL (PEN)	25
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	27
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program PEN	29
Klasterisasi Program PEN	30
Program Padat Karya	40
Dampak PEN Tahun 2020: Sinyal Positif dari Indikator Ekonomi Makro	42
Dampak PEN Tahun 2020: Sebagai Penahan Tingkat Kemiskinan	44
BAB IV. PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL DAN REGIONAL	45
Perekonomian Nasional Terkontraksi Terdampak Covid-19	47
Sektor Jasa Kesehatan dan Infokom Mampu Bertahan di Tengah Pandemi, sedangkan Sektor Akomodasi dan Transportasi Terpukul	48
PDB Menurut Penggunaan	53
Bali Paling Terkontraksi, Maluku Utara Tetap Tumbuh	62
Pendapatan Per Kapita	67
Ekonomi Indonesia Masih Terkontraksi di Triwulan I Tahun 2021	69
BAB V. KONDISI UMKM DI SAAT PANDEMI	75
Perkembangan UMKM	78

Transformasi Digital.....	83
Kebijakan Masa Pandemi	84
BAB VI. INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT	87
Pergerakan Inflasi Inti dan Non Inti	89
Pergerakan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	92
Laju Inflasi yang Terjadi di Kota IHK d Saat Pandemi	96
Inflasi, Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi	100
BAB VII. PERDAGANGAN INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID-19...	103
Neraca Perdagangan Surplus di Masa Pandemi	106
Ekspor Indonesia Turun di Masa Pandemi	108
Pertumbuhan Ekspor Hasil Pertanian Tertinggi di Masa Pandemi.....	112
Ekspor ke Tiongkok Meningkat di Masa Pandemi	114
Kinerja Impor Turun Terdampak Pandemi.....	116
BAB VIII. PROGRAM INVESTASI INDONESIA DI TENGAH PANDEMI COVID-19	123
Kekuatan Investasi Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19 .	125
Penanaman Modal Asing (PMA) yang Bertahan di Masa Pandemi Covid-19	131
BAB IX. PARIWISATA	139
Masih Adakah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Saat Wabah Covid-19	144
Tingkat Hunian Kamar Merosot, Provinsi Bali Paling Terpuruk.....	150
BAB X. KETENAGAKERJAAN	157
Angkatan Kerja Indonesia.....	159
Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi	164
Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja	166
Peralihan Sektor Pekerjaan di Masa Pandemi.....	167
Penurunan Upah Pekerja Di Tengah Pandemi.....	169
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja .	172
Produktivitas tenaga kerja di Indonesia	174
Dominasi Pekerja Informal Di Pasar Tenaga Kerja.....	177

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Penerimaan Negara Tahun 2017-2021 (triliun rupiah)	15
Tabel 2.2.	Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri (triliun rupiah) ..	16
Tabel 2.3.	Pengeluaran APBN Tahun 2017–2021 (triliun rupiah)	18
Tabel 2.4.	Realisasi Pengeluaran Program PEN (triliun rupiah), Tahun 2020 dan 2021.....	23
Tabel 3.1.	Program-program dalam Klaster Perlindungan Sosial	33
Tabel 3.2	Daftar BUMN yang Mendapat PMN dan Pinjaman Investasi ..	39
Tabel 3.3	Berbagai Program Dukungan untuk Pemerintah Daerah dan Sektoral Kementerian/Lembaga	40
Tabel 4.1	PDB Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (Persen) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2020	49
Tabel 4.2	PDB Harga Berlaku (Miliar Rupiah) dan Distribusi PDB (Persen) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2020.....	50
Tabel 4.3	PDB Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (Persen) Menurut Penggunaan, Tahun 2017-2020.....	59
Tabel 4.4	PDB Harga Berlaku (Miliar Rupiah) dan Distribusi PDB (Persen) Menurut Penggunaan, Tahun 2017-2020	61
Tabel 4.5	Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Menurut Provinsi (persen), Tahun 2018-2020	64
Tabel 4.6	PDB Per Kapita dan GNI Per Kapita Tahun 2018-2020.....	68
Tabel 4.7	Klasifikasi Bank Dunia Berdasarkan Tingkat Pendapatan (US\$)	68
Tabel 4.8	Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2021....	70
Tabel 4.9	Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Triwulan I-2021	72
Tabel 5.1.	Jumlah Unit Usaha UMKM, Tahun 2015-2019	79
Tabel 5.2.	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor UMKM, Tahun 2015-2019	80
Tabel 5.3.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor UMKM, Tahun 2015-2019 (miliar rupiah)	81
Tabel 5.4	Total Ekspor Nonmigas Menurut Sektor UMKM, Tahun 2015-2019 (miliar rupiah)	82
Tabel 6.1	Inflasi dan Sumbangan Inflasi Inti dan Non Inti, Tahun 2018-2020	91
Tabel 6.2.	Laju Inflasi Indonesia Gabungan 90 Kota Menurut Kelompok Pengeluaran Januari 2020 - Juni 2021 (2018=100).....	94
Tabel 6.3	Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional (persen) tahun 2020.....	96

Tabel 6.4	Laju Inflasi 90 Kota di Indonesia (2018=100) Tahun 2018-2021 (Januari-Juni).....	97
Tabel 7.1	Neraca Perdagangan Indonesia (Juta US\$) Tahun 2017-2020	107
Tabel 7.2	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Migas dan Nonmigas (Juta US\$) Tahun 2017-2020	111
Tabel 7.3	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Komoditas Penting (Juta US\$) Tahun 2018- tw 1 2021	113
Tabel 7.4	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$) Tahun 2018- tw 1 2021	114
Tabel 7.5	Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (juta US\$) Tahun 2018-tw 1 2021	115
Tabel 7.6	Nilai Impor Indonesia Menurut Migas dan Nonmigas (juta US\$)	117
Tabel 7.7	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (Juta US\$) Tahun 2018-tw 1 2021	120
Tabel 7.8	Nilai Impor Indonesia Menurut Negara Asal (Juta US\$) Tahun 2018-tw 1 2021	121
Tabel 8.1	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Sektor (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2020	127
Tabel 8.2.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Pulau (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2020	130
Tabel 8.3.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Sektor (Juta US\$) Tahun 2018-2020	132
Tabel 8.4.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Pulau (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2020	134
Tabel 8.5.	Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Negara Asal (Miliar US\$) Tahun 2018-2020	137
Tabel 9.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Pintu Masuk Utama, 2018-2021 (kunjungan).....	146
Tabel 9.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan, 2018-2020 (kunjungan).....	147
Tabel 9.3	Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi, 2019-2020.....	150
Tabel 9.4	Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi 2016-2020 (persen).....	152

Tabel 10.1	Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2017– 2021	161
Tabel 10.2	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2017–2021	163
Tabel 10.3	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2017–2021	164
Tabel 10.4	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, 2017–2021 .	165
Tabel 10.5	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2017-2021	167
Tabel 10.6	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2017–2021	168
Tabel 10.7	Rata-Rata UMP (ribu rupiah) dan Pertumbuhan Rata-Rata UMP (persen), 2009–2021	170
Tabel 10.8	Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2018–2021.....	171
Tabel 10.9	Distribusi Pekerja ^x Menurut Upah dan Jenis Kelamin (persen), 2018–2021.....	172
Tabel 10.10	Elastisitas Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2018–2020.....	174
Tabel 10.11	Produktivitas Menurut Provinsi (juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2018– 2020	175
Tabel 10.12	Produktivitas Menurut Kategori Lapangan Usaha (juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2018–2020.....	177
Tabel 10.13	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2017–2021.....	178

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.	Kontribusi Penerimaan Negara, Tahun 2016-2020.....	14
Gambar 2.2.	10 Kementerian Lembaga dengan Pagu Terbesar (triliun rupiah), Tahun 2021	19
Gambar 2.3.	Anggaran Subsidi Tahun 2017-2021 (triliun rupiah)	19
Gambar 2.4	Rasio Utang Negara Terhadap PDB (persen), 2017-2021 ..	21
Gambar 2.5	Pembiayaan Utang Negara (triliun rupiah), 2017-2021	22
Gambar 3.1.	Alokasi Anggaran Program PEN	29
Gambar 3.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran Program PEN	30
Gambar 3.3	Rincian Realisasi Anggaran Program PEN Klaster Kesehatan .	31
Gambar 3.4	Tingkat Inflasi Bulanan Tahun 2020	32
Gambar 3.5	Persentase UMK Menurut Status Badan Usaha, 2017	35
Gambar 3.6	Rincian Realisasi Anggaran PEN Klaster UMKM	36
Gambar 3.7	Rincian Alokasi dan Realisasi Insentif Pajak pada Program PEN 2020 (triliun rupiah).....	37
Gambar 3.8	Realisasi Klaster Pembiayaan Korporasi pada Program PEN 2020	39
Gambar 3.9	Alokasi Anggran Program Padat Karya pada Empat Kementerian	41
Gambar 3.10	Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan secara <i>Q to Q</i> dan <i>Y o Y</i> Tahun 2020	42
Gambar 3.11	Indeks Keyakinan Konsumen Tahun 2020	43
Gambar 3.12	<i>Purchasing Manager Index</i> (PMI) Manufaktur Tahun 2020 ...	44
Gambar 4.1	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (Persen), Tahun 2017-2020.....	53
Gambar 4.2	Kontribusi Subkomponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen), Tahun 2020	54
Gambar 4.3	Kontribusi Subkomponen <i>Leisure</i> dan <i>Lifestyle</i> serta <i>NonLeisure</i> pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen), Tahun 2017-2020	55
Gambar 4.4	Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Persen), Tahun 2017-2020	56
Gambar 4.5	Kontribusi Subkomponen Bangunan dan Non Bangunan Pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen), Tahun 2017-2020.....	57
Gambar 4.6	Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (persen), Tahun 2017-2020.....	57
Gambar 4.7	Kontribusi Ekspor dan Impor Barang dan Jasa Terhadap Total PDB (persen), Tahun 2017-2020	58
Gambar 4.8	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen), Tahun 2017-2020.....	63
Gambar 4.9	Kontribusi Ekonomi Menurut Wilayah (persen), Tahun 2020	63

Gambar 5.1	Pertumbuhan Unit Usaha UMKM, Tahun 2016-2019.....	79
Gambar 5.2	Kontribusi Tenaga Kerja Unit Usaha UMKM, Tahun 2015-2019.....	80
Gambar 5.3	Kontribusi PDB Unit Usaha UMKM, Tahun 2015-2019.....	81
Gambar 5.4	Kontribusi Ekspor Nonmigas Unit Usaha UMKM, Tahun 2015-2019.....	82
Gambar 5.5	Penggunaan Aplikasi Pendukung Online Menurut Usia dan Jenis Kelamin, Tahun 2018	83
Gambar 6.1	Inflasi Inti dan Non Inti	91
Gambar 6.2	Laju Inflasi Indonesia Gabungan 82 Kota Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), Tahun 2017-2020	92
Gambar 7.1	Nilai Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia (Juta US\$) Bulanan 2019-2021	107
Gambar 7.2	Pertumbuhan Nilai Ekspor (persen) Negara-Negara di Dunia Tahun 2017-2020	109
Gambar 7.3	Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Januari 2020-Maret 2021 (Juta US\$).....	110
Gambar 7.4	Pertumbuhan Nilai Impor (persen) Indonesia Tahun 2017-2020.....	116
Gambar 7.5	Perkembangan Nilai Impor Migas dan Nonmigas Januari 2020-Maret 2021 (Juta US\$)	117
Gambar 7.6	Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi (Juta US\$) Tahun 2020	118
Gambar 7.7	Perkembangan Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi (Juta US\$) Jan 2020-Maret 2021	119
Gambar 8.1.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Sektor (Miliar Rupiah), Tw I dan Tw II 2021.....	128
Gambar 8.2	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Pulau (Miliar Rupiah), Tw I dan Tw II 2021.....	131
Gambar 8.3.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Sektor (Miliar US\$), TW-I & Tw_II 2021.....	133
Gambar 8.4.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Pulau (Miliar Rupiah), Tw I dan Tw II 2021.....	135
Gambar 8.5.	Lima Negara asal terbesar Investasi Asing di Indonesia, Tw I dan Tw II 2021	138
Gambar 9.1	Perkembangan kontribusi pariwisata terhadap PDB Indonesia, 2016-2019.....	141
Gambar 9.2	Laju Pertumbuhan Triwulanan (<i>y-on-y</i>), Tahun 2018-2020	143
Gambar 9.3	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia 2019-2021 (Ribu Kunjungan).....	145

Gambar 9.4	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tertinggi Menurut Kebangsaan, 2020-2021 (ribu kunjungan).....	148
Gambar 9.5	Jumlah keberangkatan penumpang penerbangan internasional (ribu orang).....	149
Gambar 9.6	Jumlah keberangkatan penumpang penerbangan domestik (ribu orang).....	149
Gambar 9.7	Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi Bulanan, 2020-2021	153
Gambar 9.8	Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia pada Hotel Berbintang menurut Provinsi, 2020	154
Gambar 10.1.	Persentase Pekerja Sektor Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, 2017-2020	179

<https://www.bps.go.id>

PENJELASAN UMUM

Tanda-tanda yang digunakan dalam publikasi ini, adalah sebagai berikut :

Data belum tersedia : ...

Data tidak tersedia : -

Data dapat diabaikan : 0

Tanda desimal : ,

<https://www.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

1. Daya saing menurut *World Economic Forum* (WEF) adalah daya saing suatu negara/ekonomi dengan pendekatan makro. Indeks daya saing diukur dari 12 pilar dan dikelompokkan ke dalam tiga kelompok faktor, yaitu persyaratan dasar, penopang efisiensi, dan inovasi dan kecanggihan bisnis.
2. Penghitungan PDB atas dasar harga konstan yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000, sejak tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2010. Penghitungan PDB dengan tahun dasar baru tersebut telah dihitung mundur sampai dengan tahun 2010.
3. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
4. Penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) mulai bulan Januari 2020 mencakup sekitar 248-473 komoditas dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di 90 kota tahun 2018. Dalam penyajian IHK metode baru, jenis barang/jasa dikelompokkan menjadi 11 kelompok yang sebelumnya 9 kelompok pada metode lama.
5. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 dengan melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, seperti membatasi aktivitas di tempat kerja/perkantoran, kegiatan belajar mengajar di sekolah, pusat perbelanjaan, dan tempat ibadah.
6. COVID-19 atau Coronavirus Disease-2019 adalah penyakit yang disebabkan Coronavirus jenis baru (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2/SARS-COV2) yang ditemukan pertama kali di Wuhan Cina pada Desember 2019. Coronavirus pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).
7. Program PEN: program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (PP Nomor 23 Tahun 2020).
8. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah.
Usaha mikro : Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria: a) kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (UU No 20 Tahun 2008).

Usaha kecil : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, dengan kriteria: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) (UU No 20 Tahun 2008).

Usaha Menengah : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, dengan kriteria: a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) (UU No 20 Tahun 2008).

9. Physical Distancing : upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di masyarakat dengan menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter dengan orang lain, atau istilah lainnya yaitu tidak berdekatan dan tidak berkumpul atau berkerumun.
10. Pencatatan Statistik Ekspor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang tertentu (PEBT), dan pencatatan Statistik Impor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang diterima BPS dari kantor-kantor Bea dan Cukai.
11. Sistem pengolahan adalah *Carry over* yaitu dokumen dari satu bulan tertentu penerimaannya ditutup setelah satu bulan pada bulan berikutnya, dokumen yang datang sesudah tanggal penutupan dianggap sebagai transaksi bulan berikutnya.
12. Beberapa Klasifikasi jenis/kelompok barang yang digunakan dalam statistik Ekspor dan Impor adalah:
 - a. *Harmonized System* (HS), untuk keperluan pengenaan tariff.
 - b. *Standard International Trade Clasification* (SITC), penyusunannya ditekankan untuk keperluan Statistik Ekonomi.
 - c. *International Standard Industrial Classification* (ISIC), untuk mengelompokkan lapangan usaha yang ada dalam kegiatan ekonomi atau asal lapangan usaha suatu komoditi dihasilkan.
 - d. *Broad Economic Category* (BEC), untuk mengetahui penggunaan akhir dari suatu barang yaitu barang konsumsi, bahan baku dan penolong, dan barang modal.
13. Sejak September 2007, Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) digabung (*merger*) menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).
14. Tamu Asing adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh suatu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.

15. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah banyaknya malam kamar yang dihuni dibagi dengan banyaknya malam yang tersedia dikalikan 100 persen.
16. Rata-rata lamanya tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap ke akomodasi.
17. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun lebih.
18. Pekerja adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan, paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu, kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
19. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja (pekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
21. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
22. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah. TKK diukur sebagai persentase orang yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
23. Produktivitas pekerja menurut provinsi diukur dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap provinsi.
24. Produktivitas pekerja menurut kategori lapangan usaha diukur dengan membagi PDB pada masing-masing kategori lapangan usaha dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap kategori lapangan usaha.
25. Penduduk yang bekerja menurut sektor formal/informal, ditentukan berdasarkan status dalam pekerjaan utama, yaitu;
 - a. Sektor Formal: Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.
 - b. Sektor informal : Berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

SINGKATAN

ADB	:	<i>Asian Development Bank</i>
ADO	:	<i>Asian Development Outlook</i>
ACFTA	:	<i>ASEAN China Free Trade Agreement</i>
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	:	<i>Association South East Asia Nation</i>
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BEI	:	Bursa Efek Indonesia
BI	:	Bank Indonesia
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
bps	:	<i>basis points</i>
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CIF	:	<i>Cost Insurance and Freight</i>
DTW	:	Daerah Tujuan Wisata
GKG	:	Gabah Kering Giling
IHK	:	Indek Harga Konsumen
IHSG	:	Indek Harga Saham Gabungan
IMF	:	<i>International Monetary Fund</i>
I - O	:	Input - Output
KHM	:	Kebutuhan Hidup Minimum
KHL	:	Kebutuhan Hidup Layak
NTP	:	Nilai Tukar Petani
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PUAB	:	Pasar Uang Antar Bank
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SBH	:	Survei Biaya Hidup
SITC	:	<i>Standard International Trade Classification</i>
TKK	:	Tingkat Kesempatan Kerja
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPK	:	Tingkat Penghunian Kamar
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
UMP	:	Upah Minimum Provinsi
Valas	:	Valuta Asing (<i>Foreign Currency</i>)
WEO	:	<i>World Economic Outlook</i>
Wisman	:	Wisatawan Mancanegara

Pendahuluan

1

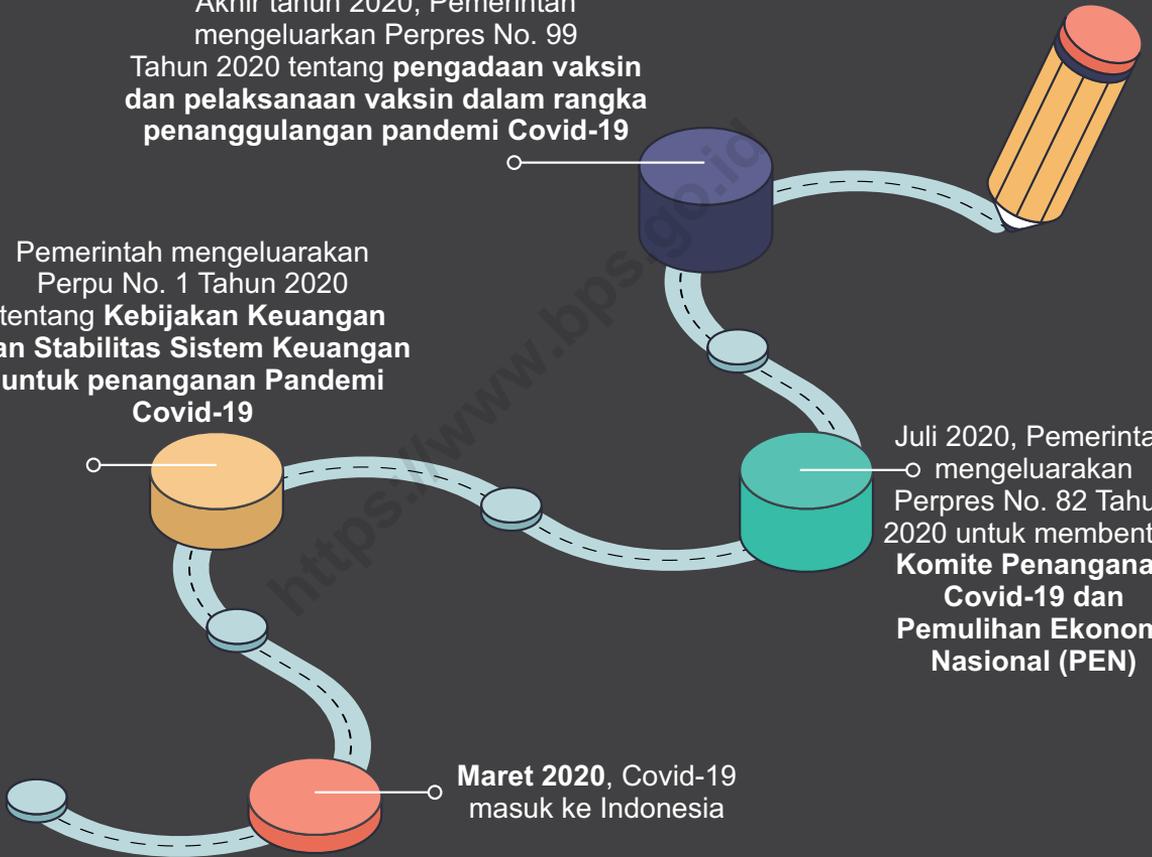


Akhir tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang **pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19**

Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang **Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19**

Juli 2020, Pemerintah mengeluarkan Perpres No. 82 Tahun 2020 untuk membentuk **Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Maret 2020, Covid-19 masuk ke Indonesia



<https://www.bps.go.id>

Wabah Covid-19 pertama kali terjadi di Wuhan salah satu wilayah negara Tiongkok menjelang akhir tahun 2019. Wabah ini penularannya sangat cepat sekali, orang yang tertular daya tahan tubuhnya akan menurun bahkan dapat membawa kematian bagi yg tertular. Agar tidak terjadi penularan yang lebih luas pemerintah Tiongkok melakukan *lockdown* wilayah, dimana penduduk Wuhan dilarang keluar dari wilayah Wuhan dan orang dari luar juga dilarang masuk ke wilayah tersebut. Wabah Covid-19 dalam waktu singkat telah menyebar tidak hanya di wilayah Negara Tiongkok tapi menyebar ke seluruh benua dari Benua Asia hingga ke Benua Amerika. Tahun 2020 menjadi tahun yang menyeramkan bagi hampir seluruh Negara di dunia.

Di Indonesia wabah ini mulai ditemukan sekitar bulan Maret 2020, namun sejak awal tahun pemerintah sudah melakukan berbagai antisipasi dengan menghentikan penerbangan dari dan ke Wuhan, kepada WNI yang berada di Wuhan dan WNA yang melakukan perjalanan dan pernah transit di Wuhan dilakukan isolasi dan pemerintah segera memasang alat pendeteksi suhu di beberapa Bandar udara, untuk mendeteksi suhu badan dari penumpang pesawat yang datang dari luar negeri. Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan pemerintah memberlakukan kebijakan *physical distancing*.

Ternyata wabah ini tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia saja tetapi juga berimbas pada kondisi perekonomian Negara. Dua Negara adidaya (Amerika Serikat dan Tiongkok) mengalami kontraksi perekonomian di tahun 2020. Tidak hanya 2 negara adidaya tapi hampir semua Negara mengalami perekonomian yang buruk di tahun 2020. Peningkatan kasus Covid-19 telah memaksa berbagai negara di dunia memberlakukan *lockdown* yang ketat demi memutus rantai penyebaran Covid-19 semakin meluas. Karena wabah tersebut membawa dampak negatif disegala sektor perekonomian dan kehidupan di masyarakat.

Kondisi di Indonesia sendiri apa yang sudah dirancang dan disusun oleh pemerintah mengenai anggaran Negara diakhir tahun 2019 yang akan dilaksanakan atau dijalankan di tahun 2020 terjadi perubahan baik dari sisi anggaran maupun dalam hal perencanaan. Pemerintah harus melakukan *refocusing* dan realokasi APBN tahun 2020, semua dijadwal ulang kembali oleh pemerintah sejak masuknya wabah Covid-19 dibulan Maret 2020. Pemerintah mengeluarkan Perpu pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020. Tentang Kebijakan keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Anggaran Negara sebagian besar dialihkan untuk bidang kesehatan dalam menangani kasus Covid-19, dimana pemerintah menanggung seluruh biaya kesehatan bagi semua masyarakat yang terpapar Covid-19

Sebagian anggaran pembangunan sementara dialihkan oleh pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19. Karena wabah ini membuat krisis kesehatan yang tak terhindarkan. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh *virus SARS-CoV2* yang menyerang sistem pernapasan. Penyebaran dan penularan wabah Covid-19 sangat cepat sekali membuat yang terpapar akan mengalami penurunan

daya tahan tubuh bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia. Belum ditemukannya vaksin atas penyakit Covid-19 memberikan ancaman serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang terus meningkat, dalam waktu singkat membuat terjadinya krisis kesehatan.

Langkah awal yang dilakukan di Indonesia sendiri untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut dengan dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan untuk menjaga kesehatan masyarakat pemerintah gencar mengkampanyekan kepada masyarakat untuk mematuhi dan melakukan protokol kesehatan yaitu 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir dan Menjaga jarak). Untuk mengurangi penularan yang cepat dan tinggi di masyarakat akhirnya pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk daerah-daerah yang tingkat penularannya cukup tinggi.

Semua kegiatan mulai dibatasi, memindahkan kegiatan dan aktivitas diluar rumah menjadi semuanya dilakukan di rumah saja. bekerja dilakukan dari rumah atau WFH, sekolah ditiadakan dan pembelajaran dilakukan secara daring, kegiatan ibadah dimasjid tidak boleh dilakukan (sholat jumat, sampai sholat tarawih dibulan puasapun ditiadakan dan berlanjut sampai dengan sholat Idul Fitri), bahkan pemerintah sampai melarang mudik lebaran, pembatasan kegiatan ditempat/fasilitas umum, pembatasan di moda transportasi dan pembatasan lainnya. Dampak pemberlakuan PSBB terhadap kegiatan ekonomi sangat terasa sekali membuat aktivitas ekonomi menurun tajam karena adanya pembatasan dalam proses produksi, distribusi dan kegiatan operasional lainnya.

Pemberlakuan PSBB membuat banyak sektor yang terdampak cukup signifikan akibat pandemi, seperti sektor pariwisata, perdagangan dan perhotelan. Pembatasan ini membuat pemilik usaha harus mengurangi jam kerja dan juga mengurangi pegawai yang melakukan proses produksi. Namun ada sejumlah sektor yang bertahan di masa pandemi, terutama sektor-sektor yang sangat dibutuhkan seperti sektor kesehatan, telekomunikasi, dan layanan pesan antar dan ekspedisi.

Pembatasan-pembatasan ini, memaksa dunia usaha mengurangi jam kerja bahkan sampai pada pengurangan jumlah pegawai yang melakukan proses produksi pada usaha mereka. *Work From Home* atau kerja dari rumah merupakan salah satu langkah yang wajib diterapkan. Lebih dari itu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan mulai merebak disana sini akibat tidak adanya pemasukan dan pendapatan dari kegiatan usaha, sementara biaya terus membengkak. Merumahkan pegawai merupakan langkah yang dilakukan untuk memangkas biaya produksi guna mengimbangi adanya penurunan pendapatan yang drastis. Hal ini jelas memukul perekonomian Indonesia.

Karena wabah ini tidak hanya berimbas pada sektor kesehatan tapi juga merambah sektor lainnya membuat pemerintah harus mengeluarkan beragam regulasi dan berbagai kebijakan/program selain kebijakan dibidang kesehatan pemerintah juga membuat kebijakan dengan berbagai program dalam rangka agar pelaku usaha dapat terlindungi yaitu dengan memberikan keringanan kredit

bagi sejumlah kalangan, bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta Kebijakan Fiskal yaitu Insentif Pajak dilakukan pemerintah untuk para pengusaha. program Padat Karya; serta Program pemberian bantuan usaha mikro, dan pemberian kredit kepada UMKM.

Selain itu pemerintah juga berusaha untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi bagi masyarakat melalui program perlindungan sosial bagi masyarakat antara lain :

1. Pemerintah menyalurkan logistik sembako dan kebutuhan pokok bagi warga yang sangat berdampak,
2. Pemberian PKH bagi penduduk miskin,
3. Kartu Prakerja bagi penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp 1 juta,
4. Program bantuan tunai,
5. Subsidi tagihan listrik dengan membebaskan biaya listrik 3 bulan untuk pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900VA,
6. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 5.000.000 dengan bantuan sebesar Rp 600.000,-.

Tujuannya adalah agar penduduk miskin tidak semakin terpuruk dan perekonomian di dalam negeri masih dapat berjalan. Respon pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 dan penanganan Covid-19 masih terus dilakukan.

Masih berlanjutnya kasus Covid-19 di semester ke II tahun 2020 membuat pemerintah mengeluarkan PERRES no 82 tahun 2020 untuk membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuan pembentukan KPCPEN dalam rangka menurunkan penyebaran Covid-19 dan mengurangi kematian karena Covid-19 serta pemulihan perekonomian. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Pandemi Covid-19 tidak hanya menciptakan krisis kesehatan tapi juga secara nyata mengganggu aktivitas perekonomian. Keberadaan pandemi yang belum diketahui kapan akan berlalu atau berakhir, bahkan penyebarannya semakin cepat membuat pemerintah mengeluarkan Inpres No 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19. Tidak hanya itu bahkan pemerintah yang sebelumnya mengkampanyekan 3 M saat itu ditambahkan menjadi 5 M dengan menambahkan mengurangi/membatasi mobilitas dan menjauhi keramaian. Agar masyarakat mematuhi aturan tersebut pemerintah memberikan aturan hukum untuk menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Pelanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administrasi, penghentian sampai penutupan sementara tempat usaha.

Pemerintah menjelang akhir tahun 2020 mulai fokus pada rencana pengadaan vaksin Covid-19, untuk itu pemerintah menerbitkan Perpres No. 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin, dan pelaksanaan vaksin dalam rangka

penanggulangan pandemi Covid-19. Pemerintah mulai memesan jenis vaksin Sinovac, Astra Zeneca, Moderna, Pfizer. Sebelum vaksin diberikan ke masyarakat harus terlebih dahulu dilakukan uji klinis mengenai vaksin tersebut. Uji tersebut mengenai tingkat keefektifitasannya, di Indonesia sendiri juga harus dilakukan kehalalannya. Vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapat izin penggunaan vaksin Covid-19 dari BPOM. Jika izin tersebut sudah keluar, vaksinasi dapat segera diberikan secara bertahap.

Pemerintah mulai menetapkan program vaksinasi nasional pada awal tahun 2021, setelah vaksin Covid-19 mendapat izin dari BPOM. Tahap pertama yang akan mendapat vaksin adalah presiden dan seluruh tenaga kesehatan di 34 provinsi dan sisanya adalah petugas publik. Bahkan di tengah bangsa Indonesia mulai melakukan vaksinasi, pandemi Covid-19 makin menjadi, karena mulai masuk varian baru di Indonesia yaitu varian delta yang lebih cepat penularannya. Satuan Tugas Penangan Covid-19 melaporkan lebih dari 78 persen kasus baru yang dilaporkan dalam 24 jam terakhir terjadi di Pulau Jawa dan Bali. Bahkan di awal tahun 2021 kasus Covid-19 yang terjadi dalam kurun waktu 11 bulan pandemi, setelah kasus pertama dilaporkan pada 2 Maret 2020, masyarakat yang terinfeksi virus Covid-19 menembus angka 1 juta orang lebih yang tersebar di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota. Sedangkan tingkat kematian karena virus tersebut sudah mencapai 28.468 kematian.

Bahkan di tahun 2021 wabah Covid-19 di Indonesia memasuki gelombang ke dua pandemi, sehingga pemerintah lebih giat lagi mengkampanyekan kepada masyarakat harus taat protokol kesehatan tidak lagi 3 M tapi menjadi 5 M dan dalam kondisi di luar rumah kalau bisa memakai masker rangkap 2 untuk menghindari penularan. Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 pemerintah pusat meminta kepada kepala daerah agar membuat aturan turunan dari Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan. Bagi masyarakat yang melanggar disiplin protokol kesehatan akan diberikan sanksi, antara lain denda administrasi atau sanksi kerja membersihkan lingkungan sekitar. Wabah yang semakin mengganas membuat pemerintah kembali menerapkan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di Pulau Jawa dan Bali di bulan Januari 2021.

Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan *extraordinary* (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, diantaranya adalah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19. Sejak tahun 2020 sampai memasuki tahun 2021 APBN diprioritaskan untuk keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping tetap selalu menjaga ketahanan ekonomi.

Memasuki tahun 2021 tepatnya di Bulan Maret setahun sudah wabah Covid-19 melanda Indonesia dan bahkan Indonesia pun jadi salah satu negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di Asia dan tertinggi pertama di Asia Tenggara. Ketidakpastian mengenai kapan berakhirnya pandemi membuat proyeksi, dan

prediksi kondisi perekonomian Indonesia di tahun 2021 menjadi sangat sulit.

Dari sisi ekonomi program yang sudah dilakukan pemerintah melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program perlindungan sosial dan langkah-langkah lain yang telah dilakukan pemerintah sampai semester I 2021 menunjukkan perkembangan positif. Namun pemerintah masih melakukan *refocusing* kembali untuk APBN sebagai anggaran cadangan untuk tambahan pada program PEN dalam mengatasi kondisi perekonomian di dalam negeri. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan pemulihan ekonomi. PEN sendiri akan dibahas pada bab tersendiri.

<https://www.bps.go.id>

APBN dan Kebijakan Negara Dalam Penanganan Pandemi yang Dibahas Dalam APBN

2



APBN 2021 menjadi instrumen yang memberikan dukungan penuh untuk penanganan dampak Covid-19



Penerimaan Negara sebesar Rp. 1.743,65 Triliun mendukung PEN melalui insentif Pajak



Pengeluaran Negara sebesar Rp. 2.750,03 Triliun mendukung PEN melalui:

- ✓ Pengadaan **Vaksin**
- ✓ Kartu Sembako, PKH, Pra Kerja
- ✓ Subsidi bunga KUR, akses modal UMKM, dan program pada sektor terdampak



Defisit sebesar **5,7 persen** diantisipasi dengan pembiayaan utang sebesar **Rp.1.177,4 Triliun**



Kebijakan utama program PEN meliputi:

- ✓ Penanganan kesehatan
- ✓ Dukungan UMKM dan Korporasi
- ✓ Perlindungan sosial
- ✓ Program prioritas
- ✓ Insentif usaha



Pemerintah mengalokasikan dana sebesar **Rp. 744,77 Triliun** untuk program PEN

<https://www.bps.go.id>

Sudah lebih dari setahun sejak pandemi Covid-19 muncul diakhir tahun 2019, kondisi perekonomian global masih penuh risiko ketidakpastian yang tinggi. Meski demikian, berbagai forum dan organisasi Internasional memprediksi perekonomian global akan naik di tahun 2021. Hal tersebut didukung oleh membaiknya perekonomian Amerika dan Tiongkok pasca terdampak pandemi di tahun 2020 lalu. Selain itu, negara-negara di dunia juga secara bertahap pulih dari dampak pandemi virus Covid-19. Ditengah kondisi pemulihan ekonomi global yang membaik, kemunculan mutasi baru Covid-19 dan ketersediaan vaksin menimbulkan risiko baru yang dapat memengaruhi pemulihan ekonomi.

Kondisi pemulihan ekonomi global tentu memengaruhi perekonomian Indonesia. Pada Juli 2021, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi 2021 berkisar 3,5 hingga 4,3 persen (*y-o-y*), tumbuh signifikan jika dibandingkan kondisi di tahun 2020 yang pertumbuhannya terkontraksi dan bernilai negatif. Optimisme pertumbuhan ini ditopang oleh keberlanjutan program vaksinasi yang mendorong kenaikan mobilitas sehingga konsumsi rumah tangga membaik. Selain itu, laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan II-2021 juga memperlihatkan pertumbuhan yang perlahan membaik.

Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2021 tumbuh sebesar 7,07 persen (*y-o-y*). Pertumbuhan ekonomi perlahan membaik dibandingkan kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 yang terkontraksi hingga -5,32 persen (*y-o-y*). Ditengah pemulihan ekonomi yang berangsur membaik, ekonomi Indonesia menghadapi risiko dari melonjaknya kasus Covid-19 pada akhir Juni 2021. Lonjakan ini terjadi karena mutasi varian baru Covid-19 sehingga membuat pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas. Kebijakan ini tentu akan berpengaruh pada capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan mendatang.

Selain eskalasi Covid-19, risiko yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi ke depan adalah ketersediaan vaksin guna meningkatkan cakupan vaksinasi untuk pencegahan penularan Covid-19. Hingga 28 Juli 2021, persentase cakupan vaksinasi Covid-19 dosis 2 Indonesia baru 9,05 persen (KPCPEN, 2021). Disamping ketersediaan vaksin, efektivitas stimulus yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan pandemi, dan tensi geopolitik internasional terutama Amerika Serikat dan Tiongkok juga turut memengaruhi capaian ekonomi kedepan. Melihat risiko yang mungkin timbul, maka pemulihan ekonomi pada tahun 2021 diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi dan mengakomodasi tren digitalisasi yang meningkat sangat cepat dipicu oleh pandemi ini.

Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan hal krusial dalam memastikan perekonomian Indonesia dapat kokoh dari dampak buruk pandemi Covid-19. APBN 2021 menjadi instrumen dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menjadi tonggak untuk menyeimbangkan berbagai tujuan. Tujuan tersebut yaitu mendukung kelanjutan penanganan pandemi, mendorong pemulihan ekonomi, serta

mengkonsolidasikan fiskal. Pemerintah mengambil langkah kebijakan luar biasa untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk perubahan lebih baik, sehingga APBN 2021 mengambil tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

Adapun langkah dan strategi percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi pada APBN 2021 fokus pada aspek kesehatan, ekonomi, dan reformasi. Aspek kesehatan diarahkan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan kesehatan masyarakat melalui penyediaan vaksin guna mengendalikan penyebaran Covid-19 dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Aspek ekonomi diarahkan dengan memberikan kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif melalui dukungan program/kegiatan pada sektor terdampak, perluasan akses modal UMKM melalui subsidi bunga KUR, serta melanjutkan program perlindungan sosial yang dilakukan secara terarah dan terukur. Sementara aspek reformasi diarahkan pada penguatan reformasi struktural untuk membangun fondasi yang kuat dalam rangka pemulihan ekonomi dan keluar dari middle income trap.

Kebijakan yang diusung dalam APBN 2021 merupakan keberlanjutan dari program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi tahun 2020. Kebijakan *countercyclical* masih diterapkan pemerintah untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian Covid-19. Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi tersebut beberapa upaya dilakukan, seperti: (1) untuk mendorong pendapatan negara, pemerintah masih menerapkan kebijakan pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur, melakukan relaksasi prosedur, dan meningkatkan pelayanan PNPB kepada masyarakat. (2) untuk belanja negara masih fokus pada penanganan dampak pandemi berupa antisipasi pengadaan vaksin, melanjutkan program perlindungan sosial, dan memberikan dukungan program/kegiatan pada sektor ekonomi yang terdampak. (3) untuk pembiayaan negara, pemerintah akan mendukung restrukturisasi BUMN, BLU, *Sovereign Wealth Fund* (SWF); meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, insentif uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan melanjutkan dukungan terhadap pendidikan tinggi, penelitian, dan kebudayaan.

Sementara ekonomi makro yang ingin dicapai pada penerapan APBN 2021 adalah ekonomi tumbuh di angka 5,0 persen dengan inflasi sebesar 3,0 persen. Target ini berdasarkan pertimbangan dari upaya penanganan Covid-19, dukungan stimulus fiskal, dan pulihnya aktivitas konsumsi masyarakat. Pemerintah juga memprediksi nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.600 per US\$. Tingkat bunga SBN 10 Tahun sebesar 7,29 persen, harga minyak meningkat menjadi US\$ 45 per barel, *lifting* minyak 705 ribu barel per hari, dan *lifting* gas sebanyak 1.007 ribu barel setara minyak per hari.

Kebijakan Pemberian Insentif Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Penerimaan negara merupakan sumber utama dalam pendanaan program-program pembangunan nasional. Penerimaan negara yang sudah

ditargetkan pemerintah selama ini belum dapat sepenuhnya mencukupi target pengeluaran selama setahun. Untuk itu pemerintah terus menggali berbagai sumber pendapatan agar penerimaan negara dapat terus meningkat dan mengurangi ketergantungan pembiayaan dan pembangunan dari utang ke negara lain. Tahun 2021 penerimaan negara diperkirakan tumbuh positif 2,6 persen dari APBN Perpres 72/2020. Pertumbuhan ini didukung oleh kebijakan pemberian intensif yang sejalan dengan reformasi di perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Idealnya penerimaan negara selalu meningkat setiap tahun sejalan dengan belanja negara dan inflasi yang terus meningkat. Namun, pada 2020 terjadi perubahan penerimaan yang mengalami penurunan hingga 15,96 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena tekanan yang besar pada perekonomian nasional akibat pandemi. Menyongsong pemulihan perekonomian pasca pandemi dan hasil dari penanganan pandemi di tahun 2020, pada APBN 2021 pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 1.743,65 triliun, tumbuh positif dibandingkan tahun 2020 yang berkontraksi dan bernilai negatif.

Penerimaan negara terdiri dari komponen penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Penerimaan hibah adalah penerimaan negara yang terkecil karena hibah yang diterima oleh pemerintah sangat tergantung pada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah. Hibah yang diterima pemerintah baik dari dalam negeri maupun luar negeri digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah. Pada APBN 2021, penerimaan hibah diperkirakan sebesar Rp 0,9 triliun atau turun 95 persen dari realisasi tahun 2020.

Selama 2017-2020 realisasi penerimaan hibah berfluktuasi. Realisasi hibah yang diterima pada tahun 2020 adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar Rp 18,83 triliun. Tingginya hibah pada tahun 2020 bersumber dari dalam negeri dan berasal dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang digunakan untuk menyediakan protokol Covid-19 dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri yang digunakan untuk membiayai pendidikan, pengembangan desa dan sistem perkotaan, penyediaan air bersih dan subsidi, baik yang dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke daerah.

Penerimaan hibah tidak bisa diandalkan karena nilainya sangat kecil dan fluktuatif, maka untuk optimalisasi penerimaan negara dan percepatan PEN, pemerintah memberikan stimulusnya melalui Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP sebagai sumber kedua penerimaan negara memungkinkan menjalankan peran ganda dalam andilnya menyukseskan program PEN, yaitu menjalankan peran mengisi kas negara dan menjaga sisi penawaran dan permintaan ekonomi. Selain itu, PNBP tidak jauh berbeda besarnya setiap tahun karena berasal dari pemanfaatan SDA, pelayanan yang

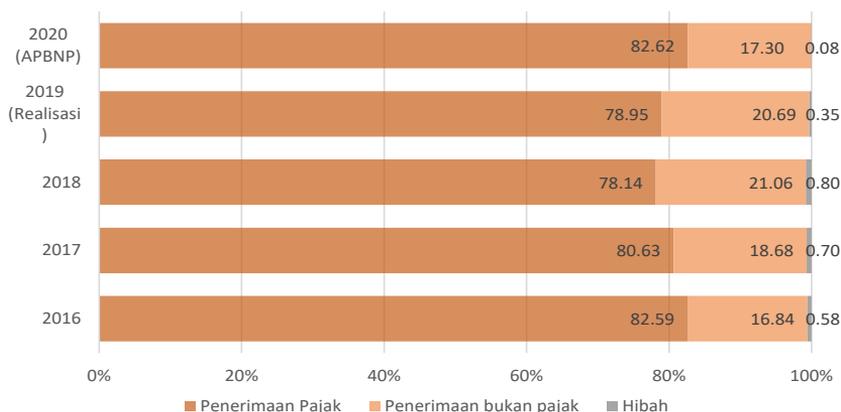
dilaksanakan pemerintah, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Meskipun sempat terkontraksi cukup signifikan karena pandemi di tahun 2020, seiring dengan peningkatan harga komoditas terutama minyak bumi dan optimalisasi PNBPN berbasis pelayanan, pemerintah optimis PNBPN 2021 dapat tumbuh realisasinya.

Selanjutnya, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBNPN tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 343,81 triliun atau turun 15,94 persen dari realisasi APBN tahun 2019. PNBPN sendiri berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Sumber inilah yang membuat PNBPN tidak jauh berbeda setiap tahunnya. Namun pada APBNPN 2020, PNBPN diperkirakan dipengaruhi oleh adanya pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi sehingga terjadi penurunan penerimaan SDA migas dan nonmigas, penurunan pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan terutama bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan penurunan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Pada APBN 2021, PNBPN dianggarkan sebesar Rp 298,20 triliun atau turun 13,27 persen dari realisasi tahun 2020. Target ini didukung oleh arah kebijakan PNBPN dalam rangka percepatan PEN. Arah kebijakan PNBPN tersebut meliputi untuk: (1) penyempurnaan tata kelola PNBPN; (2) optimalisasi *lifting* migas melalui peningkatan iklim investasi dan mengandalkan *cost recovery*; (3) optimalisasi penerimaan dividen; (4) insentif PNBPN dengan memberikan tarif Rp 0 atau 0 persen; (5) peningkatan layanan baik pada K/L atau BLU.

Selain PNBPN, sumber utama penerimaan negara adalah melalui perpajakan. Pajak memegang peran besar dalam pertumbuhan pendapatan negara, karena pajak memiliki kontribusi mencapai 80 persen lebih dari penerimaan negara setiap tahunnya. Pandemi ini juga memengaruhi penerimaan pajak negara. Gambar 2.1 memperlihatkan kontribusi penerimaan

Gambar 2.1. Kontribusi Penerimaan Negara, Tahun 2016- 2020



Sumber: Informasi APBN 2021, Kemenkeu RI

Tabel 2.1 Penerimaan Negara Tahun 2017-2021 (triliun rupiah)

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN
A. Penerimaan Negara dan Hibah	1666,38	1943,67	1960,63	1647,78	1743,65
1. Penerimaan Dalam Negeri	1654,75	1928,11	1955,13	1628,95	1742,75
1. Penerimaan Pajak	1343,53	1518,79	1546,14	1285,14	1444,54
2. Penerimaan bukan pajak	311,22	409,32	408,99	343,81	298,20
2. Hibah	11,63	15,56	5,50	18,83	0,90

Sumber : Informasi APBN 2021, LKPP 2017, 2018, 2019, dan 2020, Kemenkeu

negara dalam lima tahun terakhir. Pada APBNP tahun 2020 penerimaan pajak diperkirakan berkontribusi mencapai 82,62 persen dari pendapatan negara. Dilihat dari tren lima tahun terakhir, kontribusi penerimaan pajak cenderung meningkat setiap tahunnya. Penerimaan perpajakan dalam APBNP tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 1.285,14 triliun atau turun 16,88 persen dari realisasi tahun 2019. Penurunan anggaran ini sebagai bentuk respon pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di masa pandemi, pemerintah terus berupaya optimalisasi potensi perpajakan, peningkatan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, pengembangan sistem pelaporan pajak secara online, pemberian insentif pajak, dan berbagai kebijakan keringanan pajak selama pandemi.

Pada APBN tahun 2021 penerimaan pajak diperkirakan berkontribusi mencapai 82,85 persen dari pendapatan negara. Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp 1.444,54 triliun atau tumbuh 12,40 persen dari realisasi tahun 2020. Pertumbuhan tersebut didukung seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Selama kurun waktu 2017-2019 penerimaan negara selalu mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh peningkatan kinerja ekonomi dan harga komoditas utama. Namun, pada tahun 2020, penerimaan negara mengalami kontraksi yang signifikan sebesar 15,96 persen dari realisasi tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Secara umum, pada tahun 2021, penerimaan pajak akan melanjutkan dukungan pemulihan ekonomi secara lebih terukur dan diproyeksikan tumbuh positif sejalan dengan prospek membaiknya perekonomian dan dukungan kelanjutan reformasi administrasi pajak. Dalam rangka mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi pasca merebaknya pandemi di tahun 2020, pemerintah memberikan stimulus berupa pemberian insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang guna peningkatan kualitas SDM. Disamping itu, pemerintah juga melakukan penguatan sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi melalui pelayanan perpajakan yang berbasis digital. Sementara itu,

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan Pajak Dalam Negeri (triliun rupiah)

Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN
Pajak Penghasilan (PPh)	646,79	749,98	772,27	578,88	683,80
- PPh Migas	50,32	64,70	59,15	33,03	45,8
- PPh Nonmigas	596,48	685,28	713,11	545,85	638,0
PPN dan PPnBM	480,72	537,27	531,58	448,40	518,5
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16,77	19,44	21,15	20,95	14,8
Cukai	153,29	159,59	172,42	176,31	180,0
Pajak Lainnya	6,74	6,63	6,21	5,58	12,4

Sumber : Informasi APBN 2021, LKPP 2017, 2018, 2019, dan 2020, Kemenkeu

untuk optimalisasi dan reformasi perpajakan, pemerintah mengoptimalkan penerimaan melalui perluasan basis pajak, memperkuat pengawasan, meneruskan reformasi perpajakan melalui bidang pelayanan organisasi SDM, IT dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak.

Apabila dilihat secara lebih rinci menurut komponennya (Tabel 2.2), kontribusi utama pendapatan pajak dalam negeri berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Pada APBN 2021, pemerintah menargetkan penerimaan PPh sebesar Rp 683,80 triliun dan target PPN dan PPnBM sebesar Rp 518,50 triliun. Untuk PPh, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan PPh Nonmigas yang ditargetkan mencapai Rp 638 triliun atau tumbuh 16,88 persen dari realisasi tahun 2020. Sementara untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp 14,80 triliun atau turun 29,36 persen dari realisasi tahun 2020.

Selain itu, pendapatan pajak dalam negeri juga berasal dari cukai. Dilihat tren lima tahun terakhir pendapatan cukai terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan saat pandemi melanda pada tahun 2020 pendapatan cukai masih tumbuh sebesar 2 persen dari realisasi tahun 2019. Pemerintah memasang target penerimaan cukai sebesar Rp 180,00 triliun di tahun 2021, tumbuh 2 persen dari realisasi pada tahun 2020. Penerimaan yang berasal dari cukai tidak lepas dari peran industri rokok yang sangat besar di Indonesia. Pada APBN 2021, pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan pada kepabeanan dan cukai untuk mendukung PEN dan transformasi ekonomi. Dalam rangka mendukung PEN, pemerintah memberikan Insentif kepabeanan terutama untuk kemudahan ekspor dan impor memenuhi kebutuhan bahan baku lokal dan relaksasi bagi Kawasan Berikat (KB) & Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Sementara untuk mendukung transformasi ekonomi dilakukan dengan

mengembangkan sistem pengawasan cukai terintegrasi (*excise connection*) dan *Smart Customs dan Excise System*.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan penerimaan negara yang diterapkan pemerintah untuk percepatan PEN dan transformasi ekonomi masih merupakan keberlanjutan dari program tahun 2020. Insentif pajak masih diterapkan sebagai instrumen fiskal dalam mendukung hal tersebut. Hasil survei PEN tahap 1 juga menunjukkan bahwa insentif pajak berdampak positif pada program PEN (Kemenkeu, 2021). Pada tahun 2021, insentif pajak yang diberikan meliputi:

1. Percepatan Pengembalian Pendahuluan PPN, yang berperan membantu *cashflow* perusahaan untuk kembali melakukan aktivitas usaha;
2. Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP), yang berperan mendukung daya saing dan ekonomi sektor tertentu;
3. Insentif PPh 22 Impor, yang berperan memenuhi impor kebutuhan bahan baku produksi untuk sektor-sektor yang masih terdampak pandemi Covid-19; dan
4. *Tax Holiday & Tax Allowance*, yang berperan menarik penanaman modal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri dalam rangka mendorong diversifikasi ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan wilayah.

Selain insentif pajak, pemerintah juga melakukan transformasi ekonomi melalui proses bisnis layanan yang *user friendly* berbasis IT dan digital terutama pada sektor strategis.

Pendekatan *Spending Better* Untuk Optimalisasi Belanja Negara

Peran utama anggaran pengeluaran adalah untuk membiayai program-program pemerintah dan mencapai sasaran-sasaran pokok dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang direncanakan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pemerintah selalu berharap agar pengeluaran negara dapat seimbang dengan penerimaannya. Namun selama ini APBN masih selalu mengalami defisit, sehingga pembiayaan pembangunan masih tergantung pada utang negara. Sejak pandemi melanda awal tahun 2020, untuk menyelamatkan perekonomian dan kesehatan penduduk dari ancaman virus Covid-19, pemerintah memprioritaskan belanja negara untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Situasi ini akhirnya membuat pemerintah menganggarkan belanja negara lebih tinggi daripada penerimaan negara dengan defisit sebesar 5,7 persen terhadap PDB pada APBN 2021 (Kemenkeu, 2021). Angka ini melebihi batas defisit anggaran dalam Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003 yang mengatur maksimal defisit anggaran terhadap PDB adalah 3 persen. Untuk merespon hal ini, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Tabel 2.3 Pengeluaran APBN Tahun 2017–2021 (triliun rupiah)

Rincian	2017	2018	2019	2020	2021
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN
B, Belanja Negara	2 007,35	2 213,12	2 309,28	2 595,48	2 750,03
Pengeluaran Pemerintah Pusat	1 265,36	1 455,32	1 496,31	1 832,95	1 954,55
1, Belanja K/L	765,13	846,56	873,43	1 059,62	1 031,96
2, Belanja Non K/L	500,22	608,76	622,89	773,33	922,59
Pengeluaran untuk daerah	741,99	757,79	812,97	762,53	795,48
1, Transfer ke daerah	682,23	697,93	743,16	691,43	723,48
2, Dana Desa	59,77	59,86	69,81	71,10	72,00

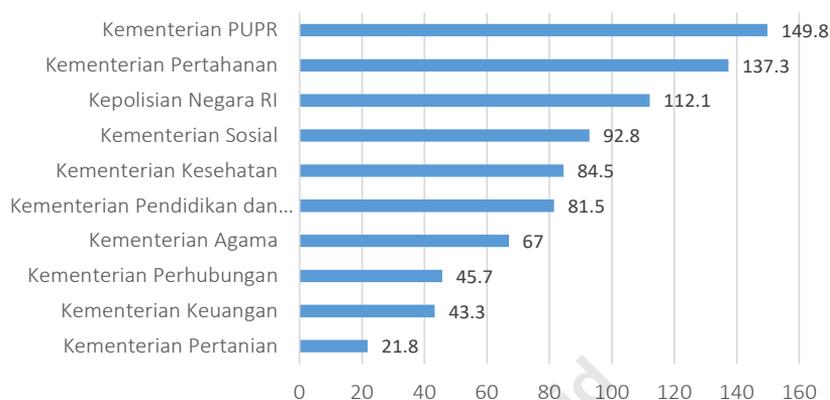
Sumber : Informasi APBN 2021, LKPP 2017, 2018, 2019, dan 2020, Kemenkeu

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam UU No.2/2020 pemerintah menargetkan defisit APBN 2020 sebesar 6,34 persen terhadap PDB. Kemudian pada 2021 akan diupayakan 5,7 persen dari PDB. Selanjutnya, defisit diproyeksikan terus menyusut hingga 2023 berada di posisi 3 persen terhadap PDB.

Untuk mencapai target defisit pada APBN 2021, selain melakukan optimalisasi pendapatan negara, pemerintah juga melakukan optimalisasi pada belanja negara melalui pendekatan *spending better*. Pendekatan *spending better* berupaya memfokuskan belanja negara yang berkualitas untuk pelaksanaan program prioritas yang berbasis hasil dan efisiensi kebutuhan dasar, serta antisipasi terhadap berbagai tekanan (*automatic stabilizer*). Pada APBN 2021, pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp 2.750,03 triliun atau tumbuh 5,95 persen dari realisasi tahun 2020 (Tabel 2.3). Apabila ditinjau selama lima tahun terakhir, anggaran belanja negara selalu tumbuh di tingkat moderat rata-rata kisaran 8 persen, dengan pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2020. Pertumbuhan yang besar di tahun 2020 terjadi karena dampak pandemi, dimana pemerintah melakukan belanja yang lebih besar untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian.

Menurut komponennya, pengeluaran negara terdiri dari pengeluaran untuk pemerintah pusat dan pengeluaran untuk daerah. Pengeluaran untuk pemerintah pusat mengambil porsi yang lebih besar di atas 70 persen dibanding pengeluaran untuk daerah. Anggaran untuk pemerintah pusat pada APBN 2021 mencapai Rp 1.954,55 triliun atau sekitar 71,07 persen dari total anggaran belanja Negara. Anggaran pengeluaran tersebut lebih tinggi dari anggaran pengeluaran daerah yang mencapai Rp 795,48 triliun atau 28,93 persen dari total anggaran belanja negara.

Gambar 2.2. 10 Kementerian Lembaga dengan Pagu Terbesar (triliun rupiah), Tahun 2021

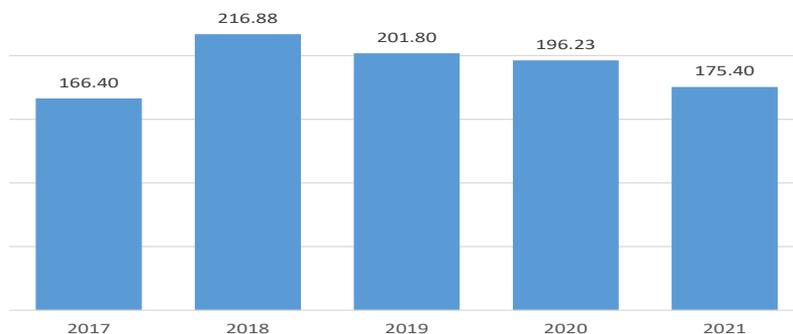


Sumber: Informasi APBN 2021, Kemenkeu RI

Secara umum, anggaran belanja pemerintah pusat pada APBN 2021 difokuskan untuk mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan program PEN, mengoptimalkan teknologi informasi, me-*redesign* sistem perencanaan dan penganggaran, serta mengefisienkan belanja melalui penajaman biaya operasional yang sejalan dengan perubahan proses kerja. Anggaran pengeluaran pemerintah pusat terdiri dari pengeluaran untuk kementerian/lembaga (K/L) dan untuk non kementerian/lembaga. Anggaran belanja K/L pada tahun 2021 ditargetkan turun 2,61 persen dari realisasi 2020, yaitu sebesar Rp 1.031,96 triliun. Anggaran K/L digunakan untuk menjalankan program dan atau kebijakan dari kementerian/lembaga. Adapun pada APBN 2021, belanja K/L diarahkan untuk kebijakan penguatan bantuan sosial, dan pendukung belanja modal untuk digitalisasi, dan pemulihan ekonomi. Untuk mendukung kebijakan tersebut, beberapa K/L memiliki anggaran besar. Gambar 2.2 menunjukkan 10 Kementerian/Lembaga dengan pagu terbesar, dimana K/L dengan anggaran besar tersebut adalah K/L yang bertindak sebagai jaring pengaman dan perlindungan sosial serta pembangunan infrastruktur.

Komponen lain pengeluaran pemerintah pusat adalah belanja non K/L. Anggaran belanja non K/L diperkirakan mencapai Rp 922.59 triliun pada tahun 2021, atau tumbuh 19,30 persen dari realisasi APBN 2020. Penggunaan utama belanja non K/L adalah untuk pemberian subsidi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19. Anggaran belanja subsidi selama 2017-2021 tergambar pada Gambar 2.3. Pada APBN 2021, anggaran subsidi dicanangkan sebesar Rp 175,40 triliun, angka ini lebih rendah 10,61 persen dari realisasi tahun 2020. Perubahan anggaran subsidi dipengaruhi perubahan ICP (*Indonesian Crude Price*), nilai tukar rupiah, dan perubahan parameter subsidi pembayaran kurang bayar tahun sebelumnya. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan mendukung UMKM dan Koperasi.

Gambar 2.3. Anggaran Subsidi Tahun 2017-2021 (triliun rupiah)



Sumber: Informasi APBN 2021, LKPP 2017, 2018, 2019, dan 2020

Selanjutnya, anggaran belanja negara yang juga mencuri perhatian adalah pengeluaran untuk daerah. Anggaran ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Sejak 2015, pemerintahan mulai menyediakan anggaran berupa dana desa untuk membangun fasilitas umum di desa yang dapat membuat desa menjadi lebih maju. Sebagai salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal, dana desa dikatakan cukup efektif dalam mendorong percepatan pembangunan pelayanan dasar hingga saat ini.

Selama 2017-2021 pengeluaran untuk daerah cenderung meningkat, meski sempat menurun di tahun 2020. APBN 2021 merencanakan pengeluaran daerah sebesar Rp 795,48 triliun atau tumbuh 4,32 persen dari realisasi 2020. Pengeluaran untuk daerah dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa. Pada saat pertama kali dimunculkan, anggaran dana desa disediakan dana sebesar Rp 20,77 triliun pada tahun 2015. Lalu di tahun berikutnya 2016, anggaran naik dua kali lipat menjadi Rp 46,68 triliun. Penganggaran terus ditingkatkan bahkan saat pandemi melanda. Pada APBN 2021 pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 72,00 triliun untuk pemulihan ekonomi desa, reformasi Pendidikan dan Kesehatan, dan pengembangan sektor prioritas di desa.

Kementerian Keuangan menyatakan pada tahun 2020 penerima dana desa ada sebanyak 74.953 desa dan rata-rata per desa mendapatkan sekitar Rp 960 juta kucuran dana. Angka ini meningkat pesat jika dibandingkan tahun 2015, dimana rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 280 juta. Pembangunan desa diarahkan untuk pembangunan sarana prasarana, pelayanan sosial dasar, sarana ekonomi desa, pembangunan embung, pelestarian lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana alam. Pada tahun 2021 ini dana desa difokuskan untuk pemulihan perekonomian desa melalui program padat karya tunai, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian, serta program desa digital.

Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi sebagai respon menangani dampak Covid-19. Berbagai

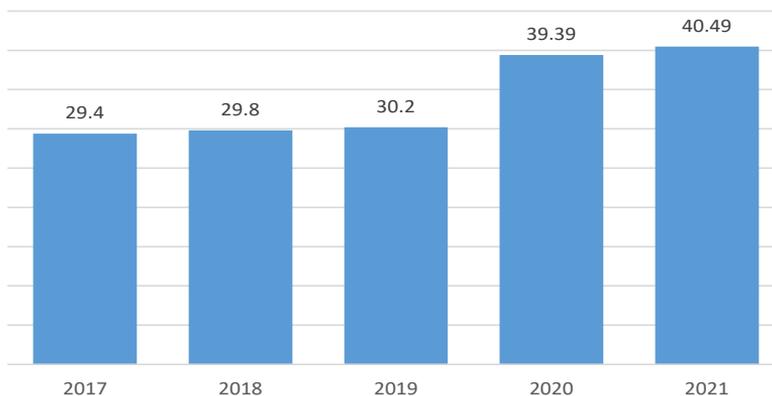
kebijakan fiskal dan bantuan sosial dikururkan untuk mencapai target PEN. Dalam hal ini APBN berperan sebagai instrumen PEN dan pencapaian tujuan pembangunan. Kebijakan yang diterapkan dalam APBN 2021 merupakan keberlanjutan dari program PEN tahun 2020, diantaranya adalah insentif pajak yang selektif dan terukur untuk optimalisasi pendapatan negara, serta melanjutkan program perlindungan sosial dengan pendekatan *spending better* untuk optimalisasi belanja negara. Ditengah geliat pemulihan ekonomi ini, risiko muncul dari eskalasi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan kasus penderita Covid-19 yang tinggi di bulan Juli 2021. Menghadapi risiko tersebut kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menghentikan penyebaran Covid-19, memperluas cakupan vaksinasi covid-19, dan memulihkan perekonomian nasional.

Utang Negara Masih Tinggi Untuk Menutupi Defisit Anggaran

Strategi kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif diperlukan untuk mendukung *recovery* sosial ekonomi menuju kondisi normal. Hal tercermin dari defisit anggaran yang sebesar 5,7 persen dari PDB. Untuk mendanai defisit tersebut, pemerintah bergantung pada utang. Pembiayaan utang dalam postur APBN selain berperan dalam membiayai defisit anggaran juga berperan untuk pembiayaan investasi dan pemberian pinjaman kepada BUMN dan Pemda. Utang yang dilakukan pemerintah dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya produktif dan investasi dalam jangka panjang.

Pada tahun 2021, pembiayaan utang diarahkan untuk mendukung kebijakan *countercyclical* dalam rangka PEN dan reformasi ekonomi. Pembiayaan utang dilakukan dengan prinsip (a) kehati-hatian, yaitu menjaga rasio utang terhadap PDB dan diusahakan menurun; (b) produktivitas, yaitu utang untuk mendukung pencapaian target pembangunan; (c) efisiensi, yaitu biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dan mendukung kesinambungan fiskal; dan (d) keseimbangan untuk menjaga komposisi utang dalam batas terkendali.

Gambar 2.4 Rasio Utang Negara Terhadap PDB (persen), 2017-2021

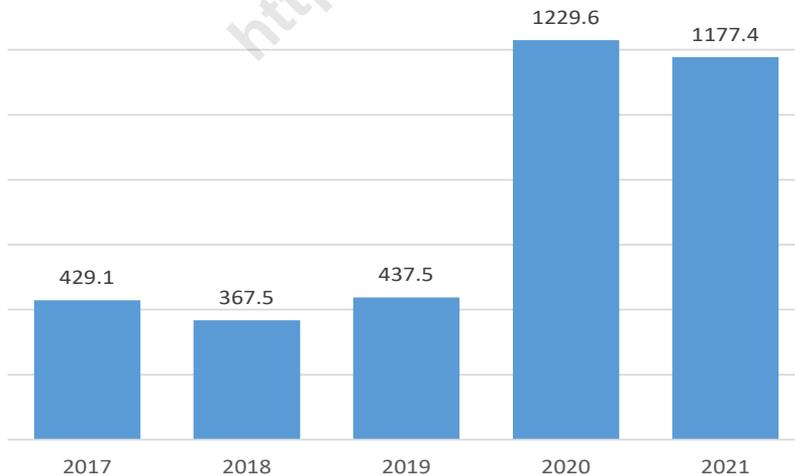


Sumber: LKPP 2017, 2018, 2019, 2020, dan APBN Kita Juni 2021

Selama 2017 hingga 2021, rasio utang negara terhadap PDB mengalami peningkatan. Rasio utang pada tahun 2017 sebesar 29,4 persen dari PDB, sementara pada tahun 2021 hingga bulan Juni, rasio utang mencapai 40,5 persen. Terjadinya peningkatan utang ini terjadi dikarenakan oleh meningkatnya belanja negara setiap tahunnya yang lebih agresif untuk infrastruktur, perlindungan sosial, dan dana desa, terutama tahun 2020 yang fokus pada penanganan pandemi. Meskipun dalam kurun waktu 2017-2021 utang pemerintah meningkat, namun tidak melanggar amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana rasio utang kurang dari 60 persen dari PDB.

Kemudian, melihat perkembangan pembiayaan utang negara, trend menunjukkan peningkatan tajam pada tahun 2020. Pembiayaan utang sebenarnya mulai terlihat menurun pada tahun 2018, dimana pada tahun tersebut kondisi perekonomian global sedang tidak stabil yang ditandai dengan adanya tren peningkatan suku bunga dan terjadinya depresiasi mata uang nasional terhadap Dolar Amerika Serikat. Namun, perlahan pembiayaan utang meningkat di tahun 2019, dan meningkat mencapai dua kali lipat lebih pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 terjadi karena dampak pandemi, dimana pembiayaan utang digunakan untuk membiayai defisit anggaran akibat penurunan kinerja ekonomi, yang membuat pendapatan negara menurun tetapi belanja negara meningkat untuk penanganan Covid-19.

Gambar 2.5 Pembiayaan Utang Negara (triliun rupiah), 2017-2021



Sumber: Informasi APBN 2021, LKPP 2017, 2018, 2019, dan 2020

Mempertimbangkan keseimbangan fiskal dan target percepatan PEN di tahun 2021 ini, pembiayaan utang negara dianggarkan masih cukup tinggi sebesar Rp 1.177,4 triliun. Anggaran ini turun 4,25 persen dari realisasi tahun 2020. Pembiayaan utang dalam APBN tahun 2021 akan dipenuhi dari penerbitan SBN (surat berharga negara) dan lelang SBN, dimana untuk penerbitan SBN menjadi sumber utama pembiayaan utang, namun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan pinjaman luar negeri dalam bentuk pinjaman tunai saat kondisi pasar dipenuhi ketidakpastian apalagi dengan risiko eskalasi Covid-19.

Pemerintah Menganggarkan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional di Tahun 2020 dan 2021

Terpukulnya perekonomian karena covid-19 membuat pemerintah melakukan respon adaptif untuk menciptakan kebijakan yang paling tepat menghadapi situasi yang dinamis. Program kebijakan yang akan dibuat haruslah yang komprehensif dan terkoordinasi untuk kesehatan dan keselamatan penduduk dan untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Maka, diciptakanlah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat Penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (PP No.23/2020). Program PEN berperan sangat krusial dalam situasi pandemi sehingga pemerintah sangat berhati-hati dan memegang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk menjaga asas keadilan sosial dan penggunaan PEN untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kementerian keuangan melaporkan total anggaran yang digunakan untuk membiayai program PEN adalah sebesar 744,77 triliun rupiah pada tahun 2021, angka ini tumbuh 7,13 persen dari anggaran PEN tahun 2020 yang sebesar Rp 695,20 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membiayai kebijakan

Tabel 2.4 Realisasi Pengeluaran Program PEN (triliun rupiah), Tahun 2020 dan 2021

Rincian	2020			Agustus 2021		
	Anggaran	Realisasi	Persentase	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pengeluaran Program PEN	695,20	575,85	82,8	744,77	320,35	43,0
Kesehatan	99,50	62,67	63,0	214,96	76,64	35,7
Perlindungan Sosial	230,21	216,59	94,1	186,64	97,18	52,1
Insentif Usaha	120,61	58,38	48,4	62,83	51,15	81,4
Dukungan UMKM dan Korporasi	177,04	112,26	63,4	162,4	48,00	29,6
Program Prioritas	67,86	65,22	96,1	117,94	48,39	41,0

Sumber: LKPP 2020 dan Laporan Monev Penanganan Covid-19 dan PEN 13 Agustus 2021, Kemenkeu

utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah atau yang sering disebut program prioritas. Tabel 2.4 memperlihatkan perkembangan realisasi penggunaan anggaran untuk program PEN dari tahun 2020 hingga tanggal 13 Agustus 2021.

Anggaran terbesar pada program PEN 2020 dialokasikan untuk penanganan perlindungan sosial, yaitu mengambil porsi sebesar 33,11 persen dari total anggaran. Secara proporsi anggaran, terlihat bahwa pada tahun 2020 pemerintah fokus pada penanganan penduduk yang sangat berdampak akibat wabah Covid-19, baik untuk kelompok masyarakat kelas menengah maupun masyarakat miskin. Tujuannya untuk melindungi penduduk miskin dan rentan miskin serta agar tidak semakin terpuruk. Namun di Tahun 2021 anggaran PEN untuk perlindungan sosial hanya sebesar Rp 186,64 triliun atau turun sekitar 18,93 persen.

Anggaran PEN berbeda dari kondisi tahun 2020, dimana anggaran terbesar dialokasikan untuk perlindungan sosial. Sedangkan pada tahun 2021, pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi melalui penyediaan vaksin, sebagian besar anggaran PEN dialokasikan untuk penanganan kesehatan sebesar 214,96 triliun atau sebesar 28,86 persen dari total anggaran.

Realisasi terbesar program PEN Agustus 2021 ada pada kebijakan insentif usaha, yaitu sebesar 81,4 persen. Realisasi ini merupakan hasil dari program pemberian insentif pajak, yaitu PPh 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, Pembebasan PPh Impor, Penurunan Tarif PPh Badan, PPN DTP, dan PPhBM Mobil. Sementara untuk realisasi terendah ada pada kebijakan dukungan UMKM, yaitu baru 29,6 persen. Dukungan UMKM diberikan berupa Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Imbal Jasa Penjaminan (IJP), dan Subsidi Bunga KUR. Rendahnya realisasi pada kebijakan ini hingga memasuki triwulan III 2021 mengindikasikan kurangnya jangkauan bagi UMKM dan Korporasi terhadap stimulus atau bantuan yang diberikan pemerintah. Padahal sektor UMKM merupakan sektor yang rentan terhadap gejolak ekonomi dan terdampak pandemi dari adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Di sisi lain, sektor UMKM sulit didata karena status usaha yang hilang timbul dalam perekonomian serta minimnya izin usaha.

Secara keseluruhan, realisasi pengeluaran program PEN hingga memasuki triwulan III 2021 adalah sebesar Rp 320,35 triliun atau 43 persen dari anggaran yang ditetapkan. Mengingat peran dan tujuan program PEN untuk menyelamatkan jiwa dan perekonomian, realisasi program ini bisa dikatakan masih minim bahkan belum mencapai setengahnya. Apalagi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang berhasil mencapai 82,8 persen. Berbagai tantangan tentu menjadi faktor penyebab masih minimnya realisasi ini terutama dalam menentukan pemberian program subsidi atau bantuan sosial yang tepat sasaran. Kerjasama seluruh pihak terutama masyarakat sangat diperlukan dalam menyukseskan program PEN agar Indonesia dapat segera pulih dari wabah Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan tidak semakin parah.

Program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

3

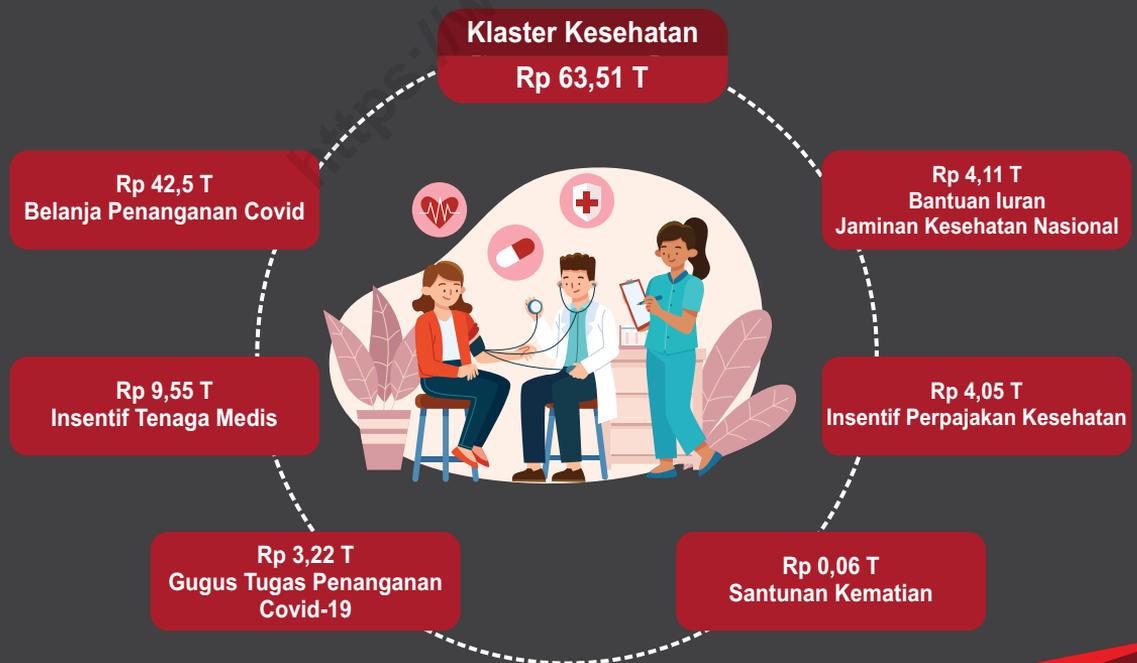


Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan serangkaian program pemerintah dalam bentuk paket stimulus fiskal untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian



Hingga akhir tahun 2020, realisasi anggaran Program PEN mencapai **Rp 579,8 Triliun** atau sebesar **83,4 persen**

Realisasi Anggaran Program PEN Klaster Kesehatan



<https://www.bps.go.id>

Pandemi Covid-19 merupakan krisis di sektor kesehatan yang memberi efek domino pada sektor ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembatasan mobilitas penduduk di berbagai daerah untuk menekan kasus penyebaran Covid-19 berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Secara umum, kinerja perekonomian Indonesia selama tahun 2020 merupakan yang terburuk dalam 20 tahun terakhir. Secara total, ekonomi Indonesia selama tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif atau berkontraksi sebesar -2,07 persen. Pelemahan perekonomian ini berdampak pada setiap pelaku ekonomi dari rumah tangga, korporasi, UMKM, hingga sektor keuangan. Berbagai kegiatan ekonomi juga tersendat seperti terhambatnya investasi, berkontraksinya ekspor impor yang mempengaruhi rantai pasokan, dan menurunnya konsumsi masyarakat.

Lesunya kinerja perekonomian makro Indonesia sejalan dengan kesejahteraan masyarakat yang mengalami penurunan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat berimbas pada menurunnya aktivitas operasional para pelaku usaha yang berujung pada keputusan untuk mengurangi jam kerja pegawai hingga jumlah pegawai yang bekerja. Akibatnya, jumlah pengangguran meningkat cukup tajam di tahun 2020 yakni bertambah 2,67 juta pekerja (Sakernas Agustus 2020) sedangkan jumlah tenaga kerja yang terkena dampak Covid-19 tercatat sebesar 29,12 juta pekerja. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga tercatat mengalami peningkatan sebanyak 1,63 juta orang di Maret 2020 dan 1,13 juta orang di September 2020.

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada merosotnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan kebijakan dalam memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi. Di satu sisi, upaya menurunkan kurva penyebaran virus akan menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat yang efeknya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, pelonggaran mobilitas masyarakat mampu mempercepat pemulihan ekonomi namun dapat mengekskalasi penyebaran virus yang mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya formulasi kebijakan pemerintah yang tidak hanya mampu mengatasi krisis kesehatan tetapi juga meminimalisir dampak ekonomi yang ditimbulkan. Upaya pengendalian penyebaran Covid-19 harus memperhitungkan biaya ekonomi yang ditimbulkan dan juga sebaliknya kerangka pemulihan ekonomi juga harus tetap dilaksanakan dalam kondisi pandemi yang terkendali.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Salah satu strategi kebijakan pemerintah dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional yakni dengan meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal meluncurkan paket stimulus PEN yang dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Selain itu,

program ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin agar tidak semakin terpuruk.

Program PEN dilaksanakan oleh pemerintah dengan menggunakan lima instrumen seperti yang diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2020 yakni sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Negara (PMN)

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penempatan Dana

Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu. Penempatan dana dilakukan kepada Bank Umum Mitra yakni bank umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam Penempatan Dana untuk pelaksanaan Program PEN yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada debitur dalam rangka mendukung UMKM dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

3. Investasi Pemerintah

Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau asset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

4. Penjaminan

Penjaminan dalam rangka Program PEN yang selanjutnya disebut Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin dalam rangka pelaksanaan Program PEN atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan. Penjaminan dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui badan usaha Penjamin yang ditunjuk.

5. Kebijakan pemerintah melalui belanja negara

Program PEN melalui belanja negara tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a) pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan; dan/atau
- b) jaring pengaman sosial (social safety net) termasuk bantuan sosial dan bantuan Pemerintah.

Program Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Pelaksanaan program PEN dan berbagai intervensi kebijakan penanganan pandemi menyebabkan pelebaran pada defisit anggaran. Beberapa langkah-langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah antara lain adalah *refocusing* dan realokasi anggaran dan revisi pada pelebaran defisit anggaran yang diizinkan. Untuk memberikan landasan hukum, pemerintah mengeluarkan PERPPU 1/2020 yang merevisi batas maksimum defisit anggaran yang diizinkan yang sebelumnya batas defisit yang diizinkan yakni maksimum 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), pada tahun 2020 hingga 2022 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) ditetapkan dapat melebihi 3 persen. Defisit anggaran pada APBN 2020 yakni sebesar 6,09 persen dan sebesar 5,70 persen untuk alokasi APBN 2021.

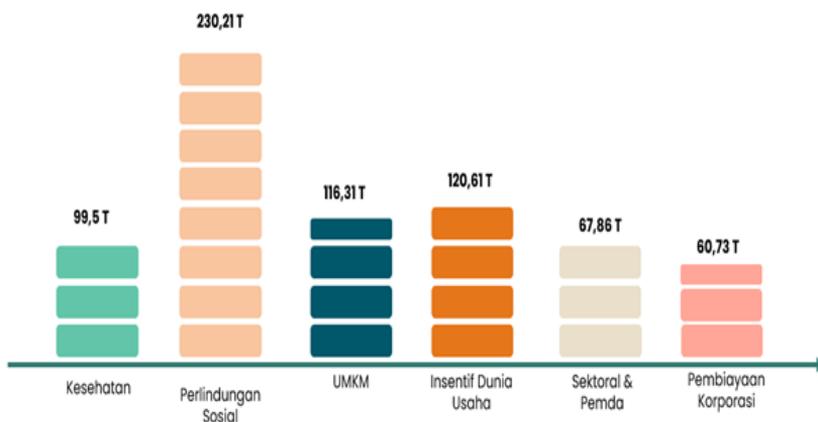
Dalam pelaksanaannya, program PEN harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut sesuai dengan Pasal 3 PP Nomor 23 Tahun 2020:

1. asas keadilan sosial;
2. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
3. mendukung Pelaku Usaha;
4. menerapkan kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. tidak menimbulkan moral hazard; dan
6. adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Program PEN

Untuk pelaksanaan yang lebih efektif dan tepat sasaran, program PEN dikelompokkan menjadi enam klaster berdasarkan tujuan penggunaan anggaran

Gambar 3.1 Alokasi Anggaran Program PEN

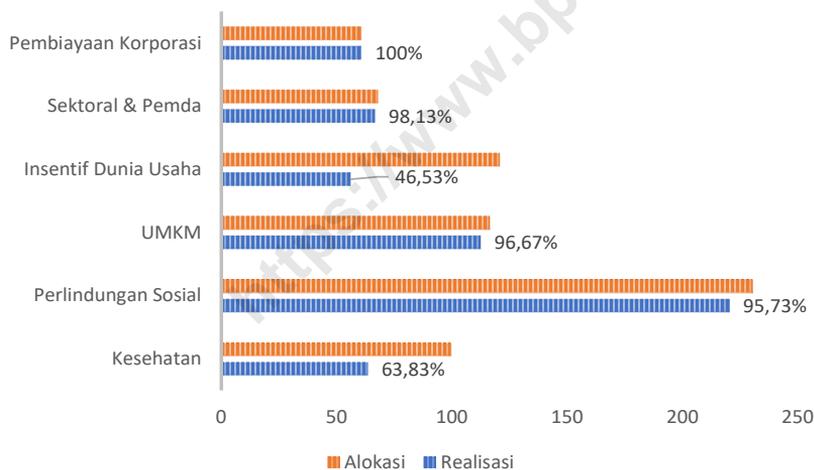


Sumber: Kementerian Keuangan

PEN yakni kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, insentif dunia usaha, dukungan sektoral K/L, dan pembiayaan korporasi dengan total alokasi pagu anggaran pada APBN 2020 sebesar Rp 695,20 triliun, dimana Rp 99,5 triliun dialokasikan untuk kesehatan dan Rp 595,70 triliun untuk memulihkan sektor ekonomi. Secara lebih rinci, alokasi anggaran program PEN untuk ekonomi meliputi perlindungan sosial Rp 230,21 triliun, UMKM Rp 116,31 triliun, insentif usaha yang terfokus pada insentif perpajakan Rp 120,61 triliun, insentif bagi sektoral dan pemda Rp 67,86 triliun, dan pembiayaan bagi korporasi Rp 60,73 triliun.

Hingga akhir 2020, anggaran program PEN yang terealisasi yakni sebesar Rp 579,8 triliun atau setara dengan 83,4 persen dari total alokasi anggaran. Realisasi anggaran tertinggi yakni 100 persen dicapai pada klaster pembiayaan korporasi sedangkan realisasi yang terendah terjadi pada klaster insentif dunia usaha yakni 46,53 persen dan klaster kesehatan sebesar 63,83 persen. Untuk klaster perlindungan sosial, UMKM, dan sektoral kementerian/Lembaga dan pemda, realisasinya mencapai lebih dari 95 persen.

Gambar 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Program PEN



Sumber: Kementerian Keuangan

Klasterisasi Program PEN

Klaster Kesehatan

Program PEN klaster kesehatan dirancang untuk memperkuat sektor kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Alokasi anggarannya dirancang untuk belanja penanganan Covid-19, insentif tenaga medis, gugus tugas penanganan Covid-19, santunan kematian tenaga kesehatan, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan insentif perpajakan kesehatan.

Dukungan anggaran untuk bidang kesehatan dalam program PEN yakni sebesar Rp 99,5 triliun pagu anggaran dengan realisasi sebesar 63,83 persen atau Rp 63,51 triliun. Sekitar 67 persen realisasi anggaran klaster kesehatan atau sebesar Rp 42,52 triliun dibelanjakan untuk penanganan Covid-19 yang meliputi klaim biaya perawatan, alat kesehatan, obat pasien, layanan laboratorium untuk keperluan diagnostik untuk *testing* dan *tracing*. Selain itu, anggaran klaster kesehatan juga terealisasi untuk membayar insentif tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien yang terjangkit virus yakni sebesar Rp 9,55 triliun. Peruntukkan realisasi anggaran lainnya yakni bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp 4,11 triliun, insentif perpajakan kesehatan termasuk PPh dan bea masuk vaksin sebesar Rp 4,05 triliun, gugus tugas penanganan Covid-19 sebesar Rp 3,22 triliun, dan santunan kematian tenaga medis sebesar Rp 0,06 triliun.

Gambar 3.3 Rincian Realisasi Anggaran Program PEN Klaster Kesehatan



Sumber: Kementerian Keuangan

Di luar alokasi untuk sektor kesehatan, program PEN secara garis besar bertujuan untuk memulihkan ekonomi nasional dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan tingkat konsumsi rumah tangga, mengingat komponen ini memiliki kontribusi yang paling besar pada pembentukan PDB yakni sekitar 57 persen di tahun 2020 dan menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan dari sisi penawaran, pemerintah berupaya untuk meningkatkan gairah sektor riil seperti dengan cara memberikan insentif pajak, kepabeanan dan cukai, dan memberikan kemudahan dan keringanan pembiayaan bagi UMKM.

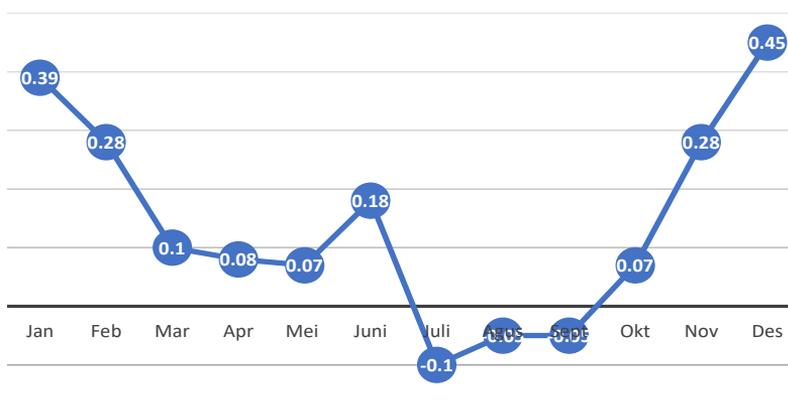
Pemulihan ekonomi dari sisi permintaan dan penawaran diimplementasikan pada lima klaster pada program PEN yakni perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan untuk UMKM, dukungan sektoral K/L, dan pembiayaan korporasi.

Klaster Perlindungan Sosial

Pandemi Covid-19 membawa ancaman tersendiri bagi rumah tangga Indonesia. Eskalasi penyebaran virus memberikan ancaman gangguan kesehatan bahkan nyawa pada jutaan jiwa yang berpotensi tertular. Mobilitas yang terbatas memaksa masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dan sektor informal tidak dapat bekerja sehingga mengalami penurunan hingga kehilangan pendapatan. Akibatnya, secara makro daya beli dan konsumsi masyarakat mengalami penurunan.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan penurunan daya beli masyarakat yakni tingkat inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi salah satunya disebabkan oleh peningkatan permintaan akan barang dan jasa. Oleh karena itu, inflasi yang relatif rendah atau bahkan deflasi dapat merefleksikan adanya penurunan daya beli atau tingkat konsumsi masyarakat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sepanjang tahun 2020 sebesar 1,68 persen yang merupakan inflasi terendah sejak tahun 2014. Apabila dilihat berdasarkan tingkat inflasi bulanan, Indonesia mengalami deflasi selama tiga bulan berturut-turut yakni Juli sampai September, Hal ini mempertegas bahwa konsumsi dan daya beli masyarakat berada memang berada pada level yang lebih rendah dari keadaan normal.

Gambar 3.4 Tingkat Inflasi Bulanan Tahun 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

Program Pemerintah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Di sisi lain, struktur perekonomian Indonesia berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2020 menurut pengeluaran menunjukkan bahwa Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 57,66 persen. Hal ini berarti memulihkan konsumsi masyarakat menjadi langkah penting untuk keberhasilan pemulihan ekonomi secara nasional. Mengingat hal tersebut, penting untuk menjaga dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat dalam rangka mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam.

Tabel 3.1. Program-program dalam Klaster Perlindungan Sosial

Nama Program	Penerima Manfaat dan Besaran yang Diterima
Program Keluarga Harapan (PKH)	<ul style="list-style-type: none">• Penerima Manfaat: Bertambah dari 9,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menjadi 10 juta KPM.• Besaran Manfaat: Naik 25 persen. Misalnya: komponen ibu hamil dan anak usia dini naik dari Rp 200.000/bulan menjadi Rp 250.000/bulan.• Frekuensi Penyaluran: Setiap bulan (sebelumnya PKH disalurkan setiap tiga bulan)
Program sembako	<ul style="list-style-type: none">• Penerima Manfaat: Bertambah dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM• Besaran Manfaat: Naik 30 persen, dari Rp150.000/KPM/bulan menjadi Rp 200.000/ KPM/bulan.
Kartu Pra Kerja	<ul style="list-style-type: none">• Penerima Manfaat: 5,6 juta orang terutama untuk pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid 19.• Besaran Manfaat: Anggaran naik dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun Rp 1 juta untuk biaya pelatihan dan Rp 600.000/bulan untuk insentif
Bantuan Sosial Tunai	<ul style="list-style-type: none">• Penerima Manfaat: 9 juta keluarga dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/non DTKS
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	<ul style="list-style-type: none">• Penerima Manfaat: 12,4 juta KPM
Bantuan Listrik	<ul style="list-style-type: none">• Penerima Manfaat:<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh pelanggan listrik 450 VA diberikan rekening listrik gratis.2. Pelanggan listrik 900 VA di DTKS akan diberikan diskon biaya listrik sebesar 50 persen.

Sumber : Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional

Perlindungan sosial pada program PEN secara khusus dirancang untuk memulihkan ekonomi dari sisi permintaan yakni untuk memulihkan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat terutama yang tergolong sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Langkah ini sekaligus upaya untuk menahan laju kenaikan angka kemiskinan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Mengingat pentingnya program ini, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi bahwa prioritas setelah penanganan kesehatan pada program PEN yakni pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 230,31 triliun untuk berbagai program perlindungan sosial masyarakat. Beberapa program dalam kluster ini merupakan peningkatan dan perluasan program pada jaring pengaman sosial (*Social Safety Net*) yang telah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Peningkatan dan perluasan pada program-program tersebut dapat berupa perluasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), peningkatan nilai bantuan, dan frekuensi pencairan, secara rinci dijabarkan pada tabel di bawah ini:

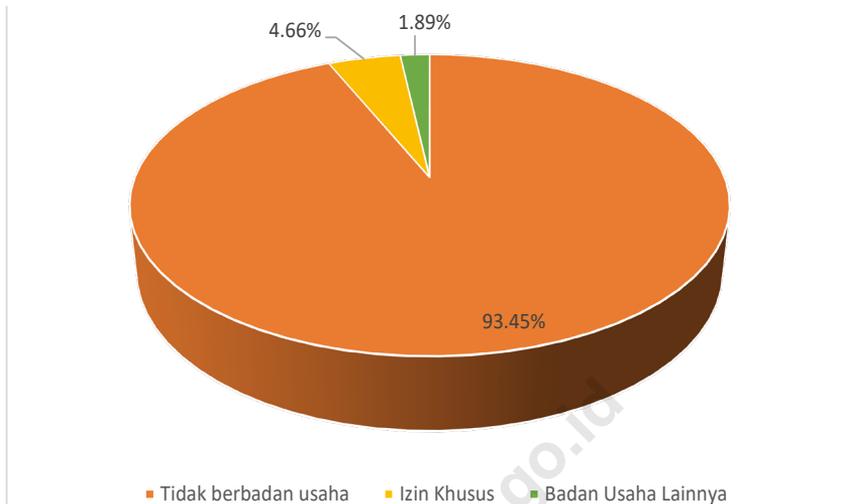
Intervensi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam kluster perlindungan sosial tak hanya melindungi masyarakat miskin dan rentan tetapi juga kelas menengah. Misalnya saja bantuan berupa Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Di sisi lain, perlindungan sosial merupakan kluster dengan realisasi anggaran yang hampir mencapai target yakni dengan realisasi sebesar 95,73 persen dari pagu anggaran.

Kluster UMKM

Usaha Mikro Kecil (UMK) memainkan peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, jenis usaha ini mendominasi jumlah usaha Indonesia yakni mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha nonpertanian. Jumlah UMK yang besar ini tentunya sangat berperan tidak hanya untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran melainkan juga dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebanyak 59 juta orang atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga kerja nonpertanian terserap oleh kegiatan UMK dengan kontribusi terhadap pembentukan PDB mencapai sekitar 53%.

UMK di Indonesia memiliki karakteristik informal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Hal ini didukung oleh Data Sensus Ekonomi 2016 yang menunjukkan bahwa 93,45 persen UMK tidak berbadan usaha.

Gambar 3.5 Persentase UMK Menurut Status Badan Usaha, Tahun 2017



Sumber: Sensus Ekonomi 2016-Lanjutan, BPS RI

Namun, dampak dari pandemi Covid-19 paling dirasakan oleh para pekerja informal termasuk UMK. Data nasabah yang dirilis oleh Kantor Riset Bank Mandiri pada akhir tahun 2020 diketahui bahwa dari tiga kategori pekerjaan nasabah; karyawan, wirausahawan, pekerja informal, yang terkena dampak penurunan pendapatan yang paling signifikan adalah pekerja informal. Pendapatan para pekerja informal konsisten mengalami penurunan di tahun 2020 dimana pada masa awal pandemi turun sekitar 10 persen dan di akhir 2020 penurunan pendapatan semakin besar menjadi 30 persen.

Aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan namun jenis kegiatan usaha inilah yang paling terdampak buruk oleh pandemi, Oleh sebab itu, dukungan kepada UMK menjadi salah satu sasaran dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha UMK.

Dukungan untuk UMK difokuskan untuk membantu dalam pemenuhan kewajiban kredit berupa penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga. Selama masa pandemi, UMK dihadapkan pada keterbatasan dalam menjalankan usaha akibat pembatasan mobilitas yang pada akhirnya mengganggu kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit. Kredit macet (*Non Performing Loan*) perbankan UMK berpotensi meningkat signifikan yang dikhawatirkan berimplikasi memperburuk kondisi perekonomian.

Untuk dukungan UMKM realisasinya mencapai Rp 112,44 triliun, atau 96,7 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 116,31 triliun yang ditujukan untuk menopang permodalan termasuk bantuan permodalan melalui perbankan maupun secara langsung. Subsidi Bunga mampu terealisasi Rp 12,83 triliun,

Gambar 3.6 Rincian Realisasi Anggaran PEN Klaster UMKM



Sumber: Kementerian Sosial

Program Penempatan Dana mampu menyerap Rp 66,75 triliun, Program Penjaminan Kredit UMKM dapat terealisasi Rp 2,50 triliun dan Program PPH Final UMKM merealisasikan Rp 670 miliar. Program Pembiayaan Investasi kepada Koperasi terealisasi Rp 1,29 triliun, begitu pula Program Banpres Pelaku Usaha Mikro (BPUM) mencapai Rp 28,80 triliun.

Klaster Insentif Usaha

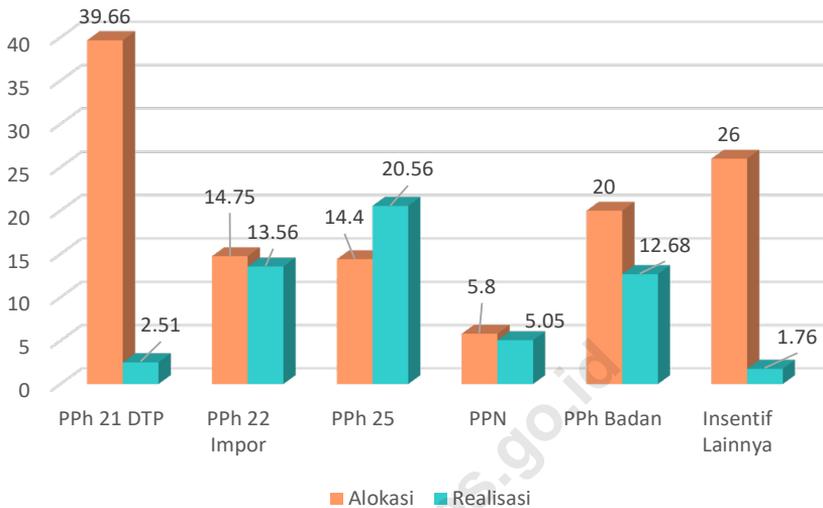
Kebijakan fiskal yang ekspansif melalui peningkatan belanja pemerintah dan relaksasi pemungutan pajak menjadi pilihan berbagai negara untuk memulihkan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Penurunan tingkat konsumsi rumah tangga (C), lesunya investasi (I), dan pelemahan kinerja ekspor (X) mendorong peran sentral pemerintah melalui kebijakan fiskal akan sangat menentukan kondisi perekonomian ke depan.

Klaster insentif usaha pada program PEN difokuskan untuk mendukung dunia usaha melalui berbagai relaksasi pajak. Tujuan yang ingin dicapai melalui relaksasi pajak tersebut, yakni:

1. Mendorong daya beli masyarakat, seperti melalui diskon pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada kendaraan bermotor DTP dan insentif PPN atas rumah DTP.
2. Membantu arus kas (*cash flow*) perusahaan agar dapat kembali melakukan aktivitas usaha
3. Memenuhi impor bahan baku produksi.

Namun, insentif usaha merupakan klaster pada PEN dengan realisasi yang paling rendah yakni hanya sekitar 46,5 persen dari pagu anggaran. Total alokasi anggaran untuk stimulus pajak pada dunia usaha mencapai Rp 120,61 triliun tetapi realisasinya hanya sebesar Rp 56,12 triliun. Rincian besaran alokasi dan realisasi program insentif pajak dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Rincian Alokasi dan Realisasi Insentif Pajak pada Program PEN 2020 (triliun rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Akbar (2020), pengamat pajak dari *Center for Indonesia Taxation Analysis* atau *CITA*, mengemukakan terdapat beberapa alasan mengapa realisasi insentif pajak sangat rendah. Pertama, para pelaku usaha memandang insentif pajak bukan menjadi hal yang krusial pada kelangsungan usaha melainkan peningkatan pada permintaan konsumen atau daya beli masyarakat. Selain itu, para pelaku usaha juga memandang besaran insentif pajak yang diberikan tidak terlalu signifikan. Kedua, adanya kekhawatiran dari para wajib pajak akan munculnya risiko pemeriksaan di masa yang akan datang karena adanya sistem pelaporan pajak yang berlaku saat ini. Ketiga, masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui adanya fasilitas insentif atau belum mengetahui cara melakukan realisasi insentif pajak secara daring. Hal ini besar dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Klaster Pembiayaan Korporasi

Pembiayaan korporasi pada program PEN dirancang untuk membantu perusahaan-perusahaan nasional terdampak pandemi Covid-19 untuk mengatasi problem manajemen arus kas, restrukturisasi, konsolidasi hutang, serta menyediakan modal kerja. Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN dipaparkan bahwa hampir 90 persen BUMN dari total 142 BUMN terkena dampak pandemi Covid-19. Tiga kelompok BUMN yang paling tertekan yakni energi, transportasi dan pariwisata, serta infrastruktur. Hanya beberapa sektor yang tahan terhadap guncangan pandemi, salah satunya yakni sektor telekomunikasi.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menyebabkan kinerja BUMN terdampak pandemi. Pertama, tersendatnya rantai pasok (*supply*) bahan baku yang menimbulkan gangguan pada proses produksi terutama dikarenakan masih tingginya ketergantungan pada bahan baku impor. Sedangkan kinerja perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor mengalami penurunan akibat banyak negara melakukan pembatasan.

Kedua, penurunan dari sisi permintaan (*demand*). Mayoritas BUMN membatasi jumlah produksi dikarenakan adanya pelemahan pada daya beli masyarakat. Penurunan aktivitas ekonomi dan bisnis yang diakibatkan oleh penerapan pembatasan kegiatan dan mobilitas berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat. Akibatnya, masyarakat membatasi konsumsinya yang secara makro berdampak pada pelemahan daya beli. Sebagai contoh, PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dan PT Pertamina yang merupakan perusahaan pelat merah yang paling terdampak energi. Kedua perusahaan tersebut bertanggung jawab dalam penyediaan energi listrik dan bahan bakar dimana konsumsi bahan bakar maupun konsumsi listrik mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan konsumsi saat normal.

Ketiga, dari sisi operasional. Pelarangan perjalanan (*travel ban*) dan segala bentuk kegiatan yang melibatkan banyak orang dan menimbulkan kerumunan masa seperti pesta, resepsi pernikahan, termasuk seminar, bimtek, dan pelatihan membuat aktivitas bisnis beberapa BUMN tersendat atau bahkan terhenti. Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia dan hotel-hotel BUMN yang bergerak pada lapangan usaha transportasi dan pariwisata yang mengandalkan mobilitas penduduk dalam kegiatan bisnisnya sangat merasakan dampak negatif pandemi. Jumlah pengguna layanan PT KAI juga hanya sekitar 15 persen dibandingkan pada kondisi sebelum Covid-19.

Keempat, dari sisi finansial yakni berupa penunggakan pembayaran, kenaikan *eksposure* pinjaman, penurunan likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas perusahaan. Merosotnya kinerja finansial BUMN selain dikarenakan penurunan operasional BUMN tetapi juga dikarenakan faktor eksternal salah satunya yakni penurunan kurs rupiah terhadap dollar. PT PLN (Persero) mengantongi laba bersih Rp 251,6 miliar di sepanjang semester I tahun 2020. Jumlah tersebut terkikis 96 persen dari periode serupa tahun sebelumnya yang sebesar Rp 7,3 triliun. Penurunan laba bersih itu terjadi lantaran rugi selisih kurs atau nilai tukar sebesar Rp 7,79 triliun. Padahal sebelumnya, perusahaan berhasil memperoleh laba selisih kurs Rp 5,03 triliun.

Strategi penyelamatan BUMN dilakukan melalui beberapa skema kebijakan seperti yang tercantum pada PP No. 23 Tahun 2020 yakni melakukan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN, penempatan dana, investasi pemerintah secara langsung, dan penjaminan. Pemerintah juga telah menetapkan sejumlah skala prioritas dalam membantu BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, pangan, transportasi, sumber daya alam, keuangan, manufaktur, energi, dan pariwisata.

Gambar 3.8 Realisasi Kluster Pembiayaan Korporasi pada Program PEN 2020



Sumber: Kementerian Keuangan

Kluster pembiayaan korporasi berhasil menjalankan empat programnya dengan maksimal dengan realisasi 100 persen yang meliputi Penyertaan Modal dengan realisasi Rp 24,07 triliun; Pemberian Pinjaman Investasi kepada BUMN sebesar Rp 19,65 triliun; Penjaminan Kredit Korporasi sebanyak Rp 2,01 triliun, dan Pembiayaan *Sovereign Wealth Fund* sebesar Rp 15 triliun. Daftar BUMN yang mendapatkan PMN dan pinjaman investasi dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Daftar BUMN yang Mendapat PMN dan Pinjaman Investasi

Penyertaan Modal Negara (PMN)	Pinjaman (investasi)
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	PT Garuda Indonesia
PT Hutama Karya (HK)	PT Kereta Api Indonesia
PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	PT Perkebunan Nusantara
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	PT Krakatau Steel
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Perum Perumnas
PT Bio Farma	

Klaster Sektorial Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang komprehensif dan terarah harus melibatkan semua elemen pemerintahan. Oleh karena itu, kolaborasi dan sinergi secara horizontal pada level pemerintah pusat yakni antar Kementerian/Lembaga dan secara vertikal yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan untuk sektoral K/L dan pemerintah menjadi salah satu kebijakan pada program PEN.

Total anggaran pada program PEN 2020 yang dialokasikan sebagai dukungan untuk sektoral K/L dan pemerintah daerah yakni sebesar Rp 67,86 triliun dengan realisasi sebesar 98,1 persen atau setara dengan Rp 66,59 triliun. Berikut program-program yang dirancang untuk sektoral K/L dan pemerintah daerah pada program PEN:

Tabel 3.3 Berbagai Program Dukungan untuk Pemerintah Daerah dan Sektorial Kementerian/Lembaga

Dukungan PEN untuk pemerintah daerah	Dukungan PEN untuk Sektorial K/L
<ul style="list-style-type: none"> • Insentif Daerah Tambahan • Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Padat Karya K/L • Insentif Perumahan
<ul style="list-style-type: none"> • Dana Hibah Pariwisata • Pinjaman PEN daerah sendiri senilai 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Pariwisata Kemenpar • Bantuan Pesantren • Perluasan PEN Kemen PUPR • Dampak Covid Bidang Naker • Peta Investasi Strategis • Restorasi terumbu karang Kementerian Kelautan dan Perikanan • Perluasan PEN Kementan

Program Padat Karya

Pada kelompok stimulus untuk sektoral K/L dan pemerintah daerah, padat karya merupakan salah satu program yang mendapat prioritas. Tercermin dari alokasi anggaran terbesar digelontorkan untuk program ini yakni mencapai Rp 18,8 triliun. Program padat karya dirancang untuk menahan laju bertambahnya pengangguran yang diakibatkan oleh pandemi. Secara khusus, program ini diprioritaskan untuk meringankan beban masyarakat terutama yang berasal dari keluarga miskin yang pekerjaannya terdampak pandemi.

Pandemi Covid-19 secara nyata mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Pemberlakuan pembatasan mobilitas penduduk berdampak pada proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut, pengurangan

Gambar 3.9 Alokasi Anggaran Program Padat Karya pada Empat Kementerian, Tahun 2020



Sumber: Kementerian Keuangan

tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan yang diambil oleh banyak perusahaan demi mengurangi biaya operasional akibat menurunnya operasional perusahaan. Di sisi lain, bertambahnya pengangguran berarti menurunnya pendapatan per kapita masyarakat yang akan membawa masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat seperti kemiskinan. Oleh karena itu, pengangguran merupakan masalah yang harus ditangani secara komprehensif.

Program padat karya dijalankan pada empat kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum/Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 11,3 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp 5,9 triliun, Kementerian Pertanian sebesar Rp 1,29 triliun, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 475 miliar. Dengan alokasi tersebut, program padat karya ditargetkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja sebesar 6,14 juta tenaga kerja.

Istilah 'padat karya' merujuk pada lapangan usaha yang melibatkan tenaga kerja dalam jumlah besar yang berbeda dari 'padat modal' dimana lebih merujuk pada penggunaan teknologi dan mesin-mesin canggih sehingga membutuhkan tenaga kerja berketerampilan khusus. Lapangan usaha yang bersifat padat karya memiliki potensi dalam membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak daripada lapangan usaha yang padat modal.

Sebagai contoh penerapan program padat karya pada Kementerian PUPR yakni Padat Karya Tunai (PKT) dengan berupaya meminimalisasi penggunaan alat dan mesin dalam melakukan program pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan agar banyak tenaga kerja yang direkrut dalam proyek pembangunan. Sasaran pelaksanaan PKT adalah para tenaga kerja yang berkategori pengangguran, setengah pengangguran, atau miskin dengan memanfaatkan pekerja yang ada di sekitar lokasi proyek. Anggaran PKT untuk bidang jalan dan jembatan pada tahun 2020 sebesar Rp 2,92 triliun, yang terdiri atas rutin jalan sebesar Rp 1,67 triliun, rutin jembatan Rp 250 miliar, dan revitalisasi drainase Rp 1 triliun.

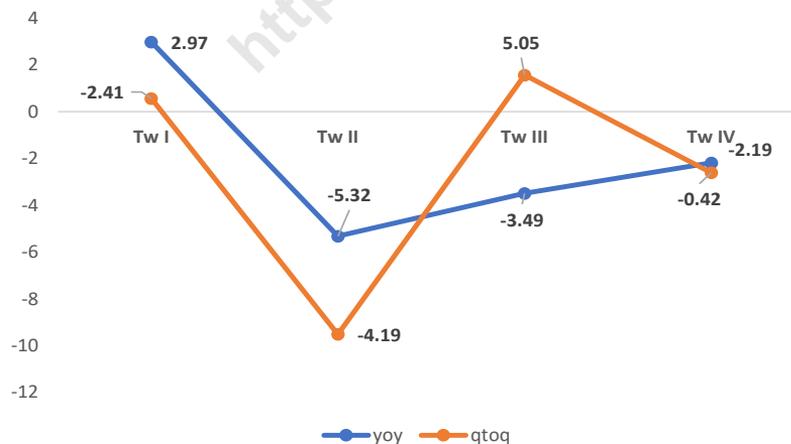
Implementasi program padat karya pada Kementerian Perhubungan meliputi pekerjaan kecil seperti pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api, serta fasilitas keselamatan transportasi.

Program padat karya yang dilakukan Kementan di antaranya gerakan pengendalian OPT secara massal, padat karya olah tanah dan percepatan tanam, padat karya perkebunan, dan padat karya rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT). Berikutnya adalah program padat karya pembangunan embung pertanian, padat karya optimasi lahan rawa, padat karya irigasi perpipaan dan perpompaan serta antisipasi kekeringan dan banjir, padat karya Sekolah Lapang Petani, penumbuhan jiwa kewirausahaan dan penyerapan tenaga kerja pertanian serta pembinaan UMKM pertanian. Sementara pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, program padat karya diterapkan untuk merestorasi terumbu karang (*Indonesian Coral Reef Gardden/ ICRG*) yang mencakup luas wilayah 74,3 hektar dengan mempekerjakan 10.171 tenaga kerja.

Dampak PEN Tahun 2020: Sinyal Positif dari Indikator Ekonomi Makro

Berbagai respons kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional memberi perkembangan positif pada perbaikan ekonomi domestik. Hal tersebut juga didukung oleh momentum kebangkitan ekonomi global seperti yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi berbagai negara yang mulai membaik pada triwulan III tahun 2020, keyakinan konsumen dan bisnis di Amerika Serikat dan Kawasan Eropa yang mulai pulih, dan PMI (*Purchasing Manager Index*) manufaktur dan jasa di AS dan Tiongkok yang terus meningkat. Akibatnya, terjadi kenaikan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global serta peningkatan aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia.

Gambar 3.10 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan secara *Q to Q* dan *Y o Y* Tahun 2020



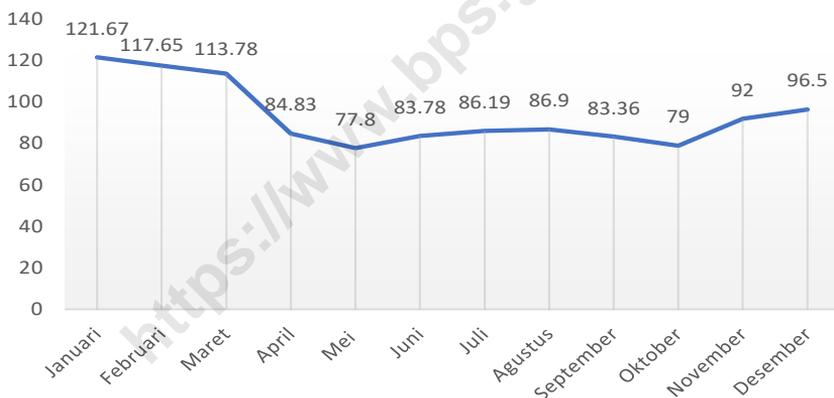
Sumber: Badan Pusat Statistik

Beberapa indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda adanya pemulihan ekonomi Indonesia di tahun 2020. Dapat dilihat pada Gambar 3.10, titik terendah ekonomi Indonesia terjadi pada triwulan II 2020 dimana ekonomi berkontraksi sebesar 4,19 persen (*q to q*) dan 5,32 persen (*y o y*). Hal ini mengingat

kasus pertama Covid-19 di Indonesia terdeteksi pada awal Maret 2020 yang memberikan pukulan kuat pada perekonomian Indonesia di triwulan II. Namun, pada triwulan III dan IV tahun 2020 pertumbuhan ekonomi negatif (*y o y*) konsisten mengalami penurunan. Bahkan pertumbuhan ekonomi secara *q to q* menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05 persen di triwulan III meskipun kembali sedikit terkontraksi 0,42 persen di triwulan berikutnya.

Sejalan dengan kinerja perekonomian nasional, permintaan masyarakat juga mulai bergeliat yang tercermin dari inflasi yang kembali terjadi pada Oktober sampai Desember tahun 2020 setelah sebelumnya terjadi deflasi selama tiga bulan berturut-turut. Hal tersebut didukung oleh adanya kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terutama di bulan November dan Desember 2020 yang mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi menguat, mendekati zona optimis.

Gambar 3.11 Indeks Keyakinan Konsumen Tahun 2020



Sumber: Bank Indonesia

Beberapa indikator yang berkaitan dengan dunia usaha juga menunjukkan adanya pemulihan ekonomi. *Purchasing Manager Index* (PMI) yang menunjukkan optimisme pelaku bidang usaha manufaktur terhadap prospek perekonomian ke depan mengalami trend meningkat menjelang akhir tahun 2020. Angka PMI Manufaktur di atas 50 menunjukkan bahwa sektor industri sedang bergerak ekspansif. Kenaikan tersebut sejalan dengan pelonggaran pembatasan mobilitas penduduk (*era new normal*) pada pertengahan Oktober yang mendorong perusahaan mulai meningkatkan produksi dan penjualan dan didukung permintaan yang meningkat.

Gambar 3.12 Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Tahun 2020



Sumber: HIS Markit

Dampak PEN Tahun 2020: Sebagai Penahan Tingkat Kemiskinan

Sasaran perlindungan sosial pada program PEN memang dirancang untuk menjaga kinerja perekonomian dari sisi permintaan utamanya dengan melindungi tingkat konsumsi masyarakat miskin dan rentan bahkan masyarakat kelas menengah. Implementasi dari program tersebut yakni berupa perluasan penerima dan manfaat jaring pengaman sosial yang telah ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Tunai, dan Kartu Pra Kerja. Selain itu, terdapat juga beberapa program tambahan perlindungan sosial yang diluncurkan pada PEN 2020 yakni diskon listrik, subsidi kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh, Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer.

Efektivitas dari berbagai program perlindungan sosial pada program PEN dapat dinilai dari sejauh mana angka kemiskinan dapat dijaga atau bahkan diturunkan. Tanpa adanya perlindungan sosial, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan dapat menyentuh angka 11,8 persen. Jika dibandingkan dengan kemiskinan September 2020 yang berada pada level 10,19 persen, dapat disimpulkan bahwa perlindungan sosial cukup efektif menahan angka kemiskinan. Lebih lanjut, dapat diartikan bahwa program PEN sepanjang tahun 2020 diperkirakan mampu menahan sekitar lebih dari lima juta orang menjadi 'miskin baru'.

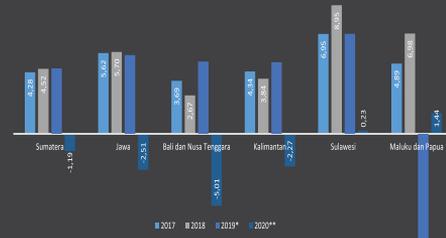
Lebih spesifik, PKH yang menyoar masyarakat miskin dengan kriteria tertentu salah satunya yakni keluarga yang memiliki anak usia sekolah berdampak pada tingkat kemiskinan anak. Hasil simulasi yang dilakukan UNICEF memperlihatkan bahwa rata-rata tingkat kemiskinan anak turun menjadi 10 persen, jauh di bawah tingkat kemiskinan anak pada skenario tanpa Covid-19 (*baseline*) sebesar 11,9 persen dan pada skenario adanya Covid-19 tanpa perlindungan sosial sebesar 13,5 persen. Hal ini berarti tindakan mitigasi perlindungan sosial, terutama PKH, dapat mengurangi 2,8 juta anak yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Regional

4



Pertumbuhan ekonomi regional **tertinggi** di tahun 2020 terjadi di **Kawasan Maluku dan Papua 1,44 persen**. Sedangkan pertumbuhan ekonomi **terendah** di tahun 2020 terjadi di **Kawasan Bali dan Nusa Tenggara -5,01 persen**



Tiongkok
2,3



Amerika
-3,5



Singapura
-5,8



Korea Selatan
-1,0



Indonesia
-2,1



Vietnam
2,9



Hongkong
-6,1



Uni Eropa
6,4

Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar **-2,1 persen** dengan pendapatan per kapita sebesar **56,9 juta rupiah (USD 3.911,7)**

Akibat pandemi Covid-19, pendapatan per kapita menurun sehingga Indonesia turun kelas menjadi negara **berpendapatan menengah bawah (lower-middle income)**



<https://www.bps.go.id>

Perekonomian Nasional Terkontraksi Terdampak Covid-19

Tahun 2020 merupakan tahun ujian atau krisis terberat yang terjadi dalam sejarah dunia karena adanya wabah pandemi Covid-19. Covid-19 memberikan dampak pada krisis kesehatan dan ekonomi serta berdampak sangat luas ke seluruh bidang kehidupan. Adanya Covid-19 menyebabkan banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan dan kehilangan pendapatan yang akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga yang dialami oleh Indonesia. Covid-19 yang awalnya ditemukan pada awal Maret 2021 semakin hari semakin meluas dan menyebar secara cepat ke seluruh wilayah Indonesia. Hingga akhir tahun 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai angka 743.198 jiwa dan mencatatkan kasus kematian sekitar 22.138 jiwa. Daerah dengan jumlah kasus positif dan kematian tertinggi sebagian besar berada di Pulau Jawa diantaranya Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Bank Indonesia, 2021).

Covid-19 memberikan pukulan yang sangat telak terhadap kondisi perekonomian nasional. Sepanjang sejarah perekonomian Indonesia sejak krisis ekonomi 2019, pada tahun 2020 inilah perekonomian Indonesia mengalami kontraksi perekonomian yang cukup dalam yaitu -2,07 persen. Bahkan selama tahun 2020, ekonomi Indonesia dapat dikatakan mengalami resesi ekonomi karena mengalami kontraksi ekonomi selama 3 kuartal berturut-turut sejak kuartal kedua tahun 2020 hingga akhir tahun 2020. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi pertumbuhan yang negatif pertama sejak krisis ekonomi tahun 1998. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang menurunkan kinerja sektor-sektor di dalam negeri, serta melemahkan permintaan baik dari dalam maupun luar negeri. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan masih cukup lebih baik dibandingkan Amerika Serikat, Singapura, Hongkong, dan Uni Eropa. Namun, dikatakan masih tidak lebih baik dari Korea Selatan, dan bahkan Vietnam serta Tiongkok yang angka pertumbuhan ekonominya positif.

Kinerja sektor dalam negeri Indonesia menjadi sangat terpukul dengan menurunnya kegiatan produksi akibat melemahnya permintaan. Diberlakukannya beberapa kebijakan dalam hal pengetatan dan pembatasan kegiatan selama pandemi Covid-19 berlangsung, kegiatan produksi di berbagai sektor menjadi terhambat. Sebagian besar sektor kegiatan produksi mengalami penurunan kinerja, kecuali sektor informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan dan sosial yang masih mampu bergeliat di tengah hadangan pandemi Covid-19. Akibat pandemi Covid-19, tidak sedikit jumlah usaha mengalami kebangkrutan dan akhirnya tutup beroperasi. Hal ini tentunya menyebabkan adanya peningkatan pengangguran. Dari sisi penggunaan, menurunnya konsumsi masyarakat serta kinerja ekspor yang terganggu juga menghambat tumbuhnya perekonomian nasional. Berbagai upaya dan kebijakan dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 agar tidak semakin dalam, salah satu diantaranya program PEN.

Sektor Jasa Kesehatan dan Infokom Mampu Bertahan di Tengah Pandemi, sedangkan Sektor Akomodasi dan Transportasi Terpukul

Dilihat berdasarkan PDB atas dasar harga konstan, sebagian besar sektor lapangan usaha (12 dari 17 sektor) di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020. Hanya 5 sektor lapangan usaha yang masih menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; sektor informasi dan komunikasi; serta pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor jasa keuangan dan asuransi; serta sektor real estat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 11,60 persen pada tahun 2020 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2019 yang sebesar 8,69 persen. Masih tumbuhnya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial di dorong oleh adanya pencairan pembayaran insentif Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk pelayanan Covid-19 (BPS, 2020). Tentunya sektor jasa ini menjadi garda terdepan dalam upaya memberikan penanganan dan pertolongan pada masyarakat yang terkonfirmasi terjangkit Covid-19. Dari sisi kontribusi terhadap total PDB, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memberikan kontribusi sekitar 1,30 persen terhadap total PDB. Memang dari sisi kontribusi relatif paling rendah dibandingkan sektor lainnya, namun kinerja sektor ini menunjukkan kinerja yang sangat baik di tengah hantaman pandemi Covid-19.

Sektor yang mengalami pertumbuhan positif lainnya yaitu sektor informasi dan komunikasi. Sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 10,58 persen pada tahun 2020 atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya pada tahun 2019 yang sebesar 9,42 persen. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi didukung oleh penjualan pulsa dan kuota data untuk penggunaan internet. Seperti telah diketahui, penggunaan internet di masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan karena beberapa aktivitas yang dilakukan masyarakat dilakukan secara daring atau *online*. Masyarakat yang sebagian besar bekerja atau sekolah dari rumah menggunakan jaringan internet untuk saling berkomunikasi. Selain itu, penggunaan internet yang meningkat juga disebabkan dari kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam mengakses konten-konten hiburan atau media sosial. Ditambah pula, akses belanja *online* bagi sebagian masyarakat yang tidak melakukan bepergian ke luar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Dari sisi kontribusinya, sektor informasi dan komunikasi memberikan kontribusi sebesar 4,51 persen terhadap total PDB dan menunjukkan peningkatan kontribusi selama tiga tahun terakhir.

Sementara itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga masih menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 1,75 persen. Pertumbuhan ini dapat dikatakan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,61 persen. Masih dapat tumbuhnya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh meningkatnya produksi palawija selama tahun 2020 seperti ubi kayu dan kacang hijau serta meningkatnya produksi hortikultura

Tabel 4.1 PDB Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (Persen) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	2017	2018	2019*	2020**
PDB Harga Konstan Tahun 2010 (miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 258 375.7 3.92	1 307 253.0 3.88	1 354 399.1 3.61	1 378 131.3 1.75
B. Pertambangan dan Penggalian	77 9678.4 0.66	79 6505.0 2.16	80 6206.2 1.22	79 0475.2 -1.95
C. Industri Pengolahan	2 103 466.1 4.29	2 193 368.4 4.27	2 276 667.8 3.80	2 209 920.3 -2.93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	101 551.3 1.54	107 108.6 5.47	111 436.7 4.04	108 826.4 -2.34
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7985.3 4.59	8429.4 5.56	9004.9 6.83	9449.3 4.94
F. Konstruksi	98 7924.9 6.80	1 048 082.8 6.09	1 108 425.0 5.76	1 072 334.8 -3.26
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 311 746.5 4.46	1 376 878.7 4.97	1 440 263.0 4.60	1 386 695.4 -3.72
H. Transportasi dan Pergudangan	406 679.4 8.49	435 336.5 7.05	463 157.5 6.39	393 481.9 -15.04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	298 129.7 5.41	315 068.6 5.68	333 306.8 5.79	299 248.0 -10.22
J. Informasi dan Komunikasi	503 420.7 9.63	538 762.7 7.02	589 536.1 9.42	651 930.9 10.58
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	398 971.4 5.47	415 620.6 4.17	443 093.1 6.61	457 482.0 3.25
L. Real Estate	289 568.5 3.60	299 648.2 3.48	316 901.1 5.76	324 259.4 2.32
M, N. Jasa Perusahaan	172 763.8 8.44	187 691.1 8.64	206 936.2 10.25	195 671.1 -5.44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	326 514.3 2.05	349 277.6 6.97	365 533.8 4.65	365 440.9 -0.03
P. Jasa Pendidikan	304 810.8 3.72	321 133.8 5.36	341 355.1 6.30	350 329.8 2.63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109 497.5 6.84	117 322.2 7.15	127 522.1 8.69	142 309.7 11.60
R, S, T, U, Jasa Lainnya	170 174.8 8.73	185 405.6 8.95	205 011.4 10.57	196 608.7 -4.10
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN	9 531 259.1 4.77	1 000 2892.8 4.95	1 04 98755.9 4.96	1 033 2595.1 -1.58
B. PAJAK DIKURANGI SUBSIDI ATAS PRODUK	381 669.0 13.28	422 959.1 10.82	450 281.9 6.46	389 847.6 -13.42
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	9 912 928.1 5.07	10 425 851.9 5.17	10 949 037.8 5.02	10 722 442.7 -2.07

Catatan: * Angka Sementara
 **Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

(buah-buahan dan sayuran) terutama pisang, mangga dan cabai rawit (BPS, 2021). Sektor ini juga merupakan kontributor tertinggi kedua dalam pembentukan PDB yaitu sebesar 13,70 persen. Kontribusi ini mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang selalu menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 sektor ini memberikan respon yang cukup baik dan mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 sehingga dapat menjadi sektor tumpuan perekonomian nasional.

Sektor selanjutnya yang masih mencatatkan pertumbuhan yang positif yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi. Sektor ini mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,25 persen. Namun demikian, dapat dikatakan melambat dibandingkan tahun 2019 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,61 persen. Pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi tahun 2020 ini disebabkan oleh masih tumbuhnya kinerja jasa perantara keuangan, asuransi, dan dana pensiun. Sektor lainnya yang juga mencatatkan pertumbuhan yang positif yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor real estat; dan jasa pendidikan yang masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,94 persen; 2,32 persen; dan 2,63 persen.

Tabel 4.2 PDB Harga Berlaku (Miliar Rupiah) dan Distribusi PDB (Persen) Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2017-2020

Lapangan Usaha	2017	2018	2019*	2020**
PDB Harga Konstan Tahun 2010 (miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1 787 963.2	1 900 621.7	2 012 742.8	2 115 086.1
	13.16	12.81	12.71	13.70
B. Pertambangan dan Penggalian	1 029 554.6	1 198 987.1	1 149 913.5	993 541.9
	7.58	8.08	7.26	6.44
C. Industri Pengolahan	2 739 711.9	2 947 450.8	3 119 593.8	306 8041.7
	20.16	19.86	19.70	19.88
D. Pengadaan Listrik dan Gas	162 339.8	176 640.3	185 115.3	179 741.6
	1.19	1.19	1.17	1.16
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9438.6	10 023.6	10 736.3	11 302.8
	0.07	0.07	0.07	0.07
F. Konstruksi	1 410 513.6	1 56 2297.0	1 701 741.2	1 652 659.6
	10.38	10.53	10.75	10.71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 768 865.2	1 931 813.0	2 060 378.8	199 5470.1
	13.02	13.02	13.01	12.93
H. Transportasi dan Pergudangan	735 229.6	797 777.0	88 1547.5	689 700.7
	5.41	5.38	5.57	4.47
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	387 013.1	412 709.7	440 211.2	394 230.9
	2.85	2.78	2.78	2.55
J. Informasi dan Komunikasi	513 715.9	558 938	626 532.6	695 839.1
	3.78	3.77	3.96	4.51
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	571 203.6	616 315.1	671 433.8	696 065.5
	4.20	4.15	4.24	4.51

Lanjutan

Lapangan Usaha	2017	2018	2019*	2020**
L. Real Estate	382 259.2	406 013.7	439 455.9	453 780.9
	2.81	2.74	2.78	2.94
M, N. Jasa Perusahaan	238 217.0	267 094.0	304 285.5	294 255.5
	1.75	1.80	1.92	1.91
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	499 343.6	541 685.6	571 622.3	580 175.2
	3.67	3.65	3.61	3.76
P. Jasa Pendidikan	447 137.6	481 747.0	522 375.2	549 396.5
	3.29	3.25	3.30	3.56
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144 830.7	158 070.1	174 740.0	201 149.0
	1.07	1.07	1.10	1.30
R, S, T, U, Jasa Lainnya	239 258.6	268 574.7	309 002.1	302 568.2
	1.76	1.81	1.95	1.96
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN	13 066 595.8	14 236 758.4	15 181 427.8	14 873 005.3
	96.15	95.94	95.89	96.36
B. PAJAK DIKURANGI SUBSIDI ATAS PRODUK	523 229.9	601 997.6	651 107.6	561 146.5
	3.85	4.06	4.11	3.64
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	13 589 825.7	14 838 756.0	15 832 535.4	15 434 151.8
	100.00	100.00	100.00	100.00

Catatan: * Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Di luar sektor yang telah dijelaskan di atas, sektor-sektor lain mengalami kontraksi pertumbuhan. Sektor yang mengalami kontraksi tertinggi yaitu sektor transportasi dan pergudangan. Sektor ini tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -15,04 persen. Sektor ini merupakan sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan mobilitas penduduk dengan diberlakukannya PSBB di sejumlah daerah menyebabkan adanya keterbatasan penduduk untuk melakukan kegiatan bepergian. Selain itu, adanya larangan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar rumah turut menurunkan kinerja sektor ini. Selain itu, adanya persyaratan yang sangat ketat untuk bepergian menyebabkan seseorang akan mengurungkan niatnya untuk bepergian. Ditambah pula menurunnya kegiatan pariwisata yang terkait dengan sektor transportasi dengan berkurangnya perjalanan dari para wisatawan serta menurunnya permintaan angkutan karena menurunnya jumlah wisatawan. Kontraksi sektor transportasi dan pergudangan ini tercermin dari terkontraksinya subsektor angkutan udara (-53,01 persen), angkutan rel (-42,34 persen), dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (-13,00 persen) serta subsektor lain yang juga terkontraksi. Dilihat dari sisi kontribusi terhadap perekonomian, sektor transportasi dan pergudangan memberikan kontribusi sebesar 4,47 persen terhadap total PDB.

Sektor dengan kontraksi pertumbuhan tertinggi kedua yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -10,22 persen. Akibat pandemi Covid-19 memberikan pukulan yang telak bagi sektor ini. Aktivitas sejumlah hotel dan restoran tutup selama pandemi. Meskipun masih ada yang beroperasi, ada penyesuaian yang dilakukan dengan pengurangan jam operasional. Selain itu, kegiatan operasional restoran yang tidak diperbolehkan makan di tempat dan harus *take away* turut menurunkan kinerja restoran. Dari sisi hotel, tingkat penghunian kamar hotel selama pandemi juga menunjukkan kinerja yang rendah. Hal ini juga disebabkan karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai tempat wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Selama tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu mencapai -75,03 persen. Dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, sektor ini mampu berkontribusi sebesar 2,55 persen terhadap total PDB.

Sektor berikutnya yang mengalami kontraksi ekonomi yaitu sektor industri pengolahan. Sektor ini mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,93 persen. Kontraksi pertumbuhan sektor industri pengolahan didorong oleh sebagian besar subsektor industri pengolahan yang juga mengalami kontraksi pertumbuhan dengan kontraksi tertinggi terjadi pada subsektor industri alat angkutan (-19,86 persen), subsektor industri mesin dan perlengkapan (-10,17 persen), dan subsektor industri barang galian bukan logam (-9,13 persen). Hal ini cukup dimengerti mengingat hampir semua produksi subsektor mengalami penurunan produksi seperti contohnya produksi kendaraan mobil -46,37 persen, produksi kendaraan sepeda motor -40,21 persen, produksi semen -9,26 persen dan produksi LNG -6,63 persen. Namun, masih ada kabar positif dimana terdapat subsektor yang dapat tumbuh positif di tengah pandemi khususnya terkait dengan kesehatan masyarakat yaitu subsektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional (9,39 persen), subsektor industri logam dasar (5,87 persen), dan subsektor industri makanan dan minuman (1,58 persen).

Dilihat dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, sektor industri pengolahan sebagai sektor penyumbang terbesar di perekonomian Indonesia. Di tahun 2020, kontribusi sektor ini mengalami peningkatan dengan persentase kontribusi sebesar 19,88 terhadap total PDB. Kontribusi sektor industri pengolahan di tahun 2020 salah satunya ditopang dari subsektor industri makanan dan minuman dengan kontribusi sebesar 6,85 persen terhadap total PDB. Selain itu, beberapa subsektor lainnya yang juga menopang besarnya sektor industri pengolahan di tahun 2020 dengan kontribusinya di atas satu persen terhadap total PDB adalah subsektor tekstil dan pakaian jadi; subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional; subsektor industri barang logam; komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik; serta subsektor industri alat angkutan.

Sektor berikutnya yang mengalami kontraksi yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (-3,72 persen). Kontraksi sektor ini didorong oleh terkontraksinya subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya yang cukup tinggi yaitu sebesar -14,10 persen. Penurunan kinerja ini ditandai dengan penjualan mobil "*wholesale*" sebesar -48,35 persen, penjualan

sepeda motor sebesar -43,57 persen, indeks penjualan riil suku cadang sebesar -23,00 persen. Selain itu subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor yang juga berkontraksi sebesar -1,30 persen juga turut mendorong penurunan kinerja sektor ini. Penurunan kinerja subsektor perdagangan besar dan eceran ini ditandai dengan indeks ritel yang sebesar -12,03 persen. Dilihat dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menjadi kontributor terbesar ketiga di perekonomian Indonesia tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 12,93 persen terhadap total PDB. Selanjutnya, sektor lainnya yang belum disebutkan di atas juga mencatatkan pertumbuhan yang negatif yaitu sektor jasa perusahaan (-5,44 persen); konstruksi (-3,26 persen); pengadaan listrik dan gas (-2,34 persen); pertambangan dan penggalian (-1,95 persen); dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (-0,03 persen).

PDB Menurut Penggunaan

Dilihat dari sisi penggunaan, lima dari enam komponen PDB mengalami kontraksi pertumbuhan. Kelima komponen tersebut yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, ekspor dan impor. Hanya komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami pertumbuhan tetapi mengalami perlambatan. Pengeluaran konsumsi pemerintah dapat tumbuh sebesar 1,94 persen atau lebih rendah dari capaian tahun 2019 sebesar 3,26 persen. Melambatnya komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan belanja pegawai dari 8,49 persen pada tahun 2019 menjadi 1,18 persen pada tahun 2020.

Gambar 4.1 Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (Persen), Tahun 2017-2020

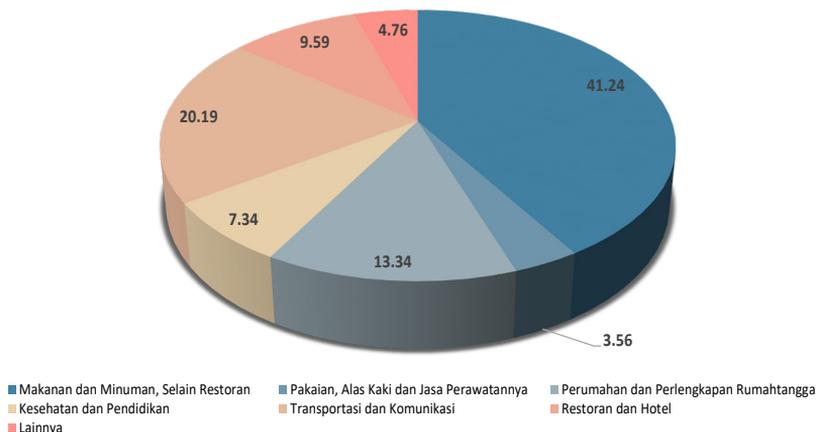


Catatan : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi dengan tingkat pertumbuhan sebesar -2,63 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Kontraksi yang terjadi pada komponen ini disebabkan oleh masih rendahnya daya beli masyarakat akibat terdampak pandemi Covid-19. Hal ini tercermin dari beberapa indikator seperti menurunnya penjualan eceran (tumbuh -12,03 persen), terkontraksinya impor barang konsumsi (tumbuh -10,93 persen), penurunan penjualan “*wholesale*” mobil penumpang (tumbuh -50,49 persen), serta penurunan penjualan sepeda motor (tumbuh -43,54 persen).

Dilihat dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, selama tahun 2017-2020, kontribusi komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian nasional berkisar antara 55 sampai 57 persen. Sementara itu dilihat dari penyusun komponen konsumsi rumah tangga, terlihat di Gambar 4.2, pada tahun 2020 kontribusi terbesar adalah subkomponen makanan dan minuman selain restoran dengan kontribusi sebesar 41,24 persen. Kontribusi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 39,37 persen disebabkan oleh selama pandemi Covid-19 pengeluaran untuk makanan relatif lebih banyak. Selanjutnya, subkomponen terbesar kedua adalah transportasi dan komunikasi dengan besar kontribusi 20,19 persen, namun dikatakan menurun dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini lebih disebabkan karena berkurangnya aktivitas perjalanan masyarakat akibat keterbatasan mobilitas penduduk selama pandemi Covid-19. Sementara itu, subkomponen dengan kontribusi terkecil adalah subkomponen untuk barang-barang tahan lama yaitu subkomponen pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya dengan besar kontribusi hanya 3,56 persen.

Gambar 4.2 Kontribusi Subkomponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen), Tahun 2020



Catatan : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber : Badan Pusat Statistik

Apabila dibedakan menurut sifatnya, pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi konsumsi yang bersifat *leisure* dan *lifestyle* (subkomponen transportasi dan komunikasi serta subkomponen restoran dan hotel) dan konsumsi yang bersifat non *leisure* (subkomponen makanan dan minuman, selain restoran; subkomponen pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; subkomponen perumahan dan perlengkapan rumahtangga; subkomponen kesehatan dan pendidikan; subkomponen lainnya). Pada tahun 2020 pengeluaran untuk konsumsi yang bersifat non *leisure* mencatatkan angka pertumbuhan yang masih positif tetapi melambat bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,79 persen. Sementara itu, pengeluaran konsumsi yang bersifat *leisure* dan *lifestyle* mengalami kontraksi dengan tingkat pertumbuhan sebesar -9,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, konsumsi yang bersifat *leisure* dan *lifestyle* yang paling terdampak. Hal ini disebabkan adanya pembatasan mobilitas penduduk sehingga biaya untuk transportasi dan pengeluaran hotel dan restoran semakin berkurang. Dilihat dari sisi kontribusinya terhadap komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, selama empat tahun berturut-turut, kontribusi subkomponen non *leisure* dua kali lebih besar dibandingkan dengan subkomponen *leisure* dan *lifestyle*. Selama 2017-2019 kontribusi subkomponen non *leisure* berada di angka 67 persen, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 70,23 persen. Sedangkan pada subkomponen *leisure* dan *lifestyle*, kontribusinya selama periode yang sama sebesar 32 persen dan menurun di tahun 2020 menjadi 29,77 persen.

Gambar 4.3 Kontribusi Subkomponen *Leisure* dan *Lifestyle* serta *NonLeisure* pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (persen), Tahun 2017-2020

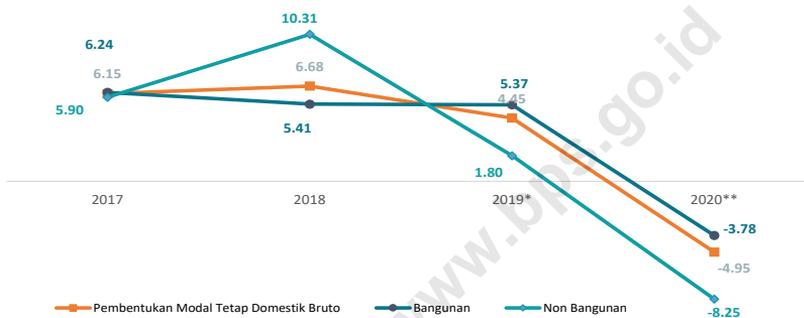


Catatan : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber : Badan Pusat Statistik

Komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR) juga mengalami kontraksi dengan tingkat pertumbuhan sebesar -4,29 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhannya pada tahun 2019 yang sebesar 10,62 persen. Sementara itu, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah justru dapat dikatakan masih

mencatatkan tingkat pertumbuhan yang positif. Namun demikian, pertumbuhan yang dicapai dapat dikatakan melambat bila dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 3,26 persen menjadi 1,94 persen di tahun 2020. Melambatnya pertumbuhan konsumsi pemerintah disebabkan adanya perlambatan pertumbuhan belanja pegawai yang hanya dapat tumbuh sebesar 1,80 persen dari sebelumnya sebesar 8,49 persen pada tahun 2019. Dilihat dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 1,30 persen terhadap total PDB atau relatif sama dibandingkan tahun 2019.

Gambar 4.4 Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (Persen), Tahun 2017-2020



Catatan : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber : Badan Pusat Statistik

Komponen pengeluaran selanjutnya yang juga terkontraksi yaitu komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB mengalami tingkat pertumbuhan -4,95 persen pada tahun 2020. Kontraksi PMTB tercermin dari menurunnya beberapa indikator seperti penjualan semen domestik (tumbuh -10,38 persen), volume penjualan kendaraan untuk barang modal (tumbuh -41,83 persen), serta nilai impor barang-barang modal (tumbuh -16,73 persen). Bila dilihat dari subkomponennya, komponen PMTB dapat dibagi menjadi 2 yaitu subkomponen bangunan dan subkomponen nonbangunan (subkomponen mesin dan perlengkapan; subkomponen kendaraan; subkomponen peralatan lainnya; subkomponen CBR; dan subkomponen produk kekayaan intelektual). Subkomponen bangunan mengalami kontraksi dengan tingkat pertumbuhan sebesar -3,78 persen, sedangkan subkomponen nonbangunan mengalami pertumbuhan -8,25 persen. Tingginya kontraksi pada subkomponen nonbangunan utamanya didorong oleh subkomponen mesin dan perlengkapan serta subkomponen kendaraan yang terkontraksi cukup tinggi yaitu masing-masing pertumbuhannya sebesar -11,56 persen dan -13,04 persen. Selanjutnya dilihat dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, komponen PMTB memberikan kontribusi sebesar 31,73 persen atau terendah selama empat tahun terakhir yang selalu di atas 32 persen. Sementara itu, dari sisi penyusun komponen PMTB, kontribusi subkomponen

bangunan lebih besar dibandingkan subkomponen nonbangunan. Kontribusi subkomponen bangunan terhadap PMTB sempat mengalami penurunan pada tahun 2018, namun meningkat selama tiga tahun berikutnya sampai tahun 2020 menjadi sebesar 75,95 persen. Sementara itu, subkomponen nonbangunan berada di angka 24 hingga 25 persen.

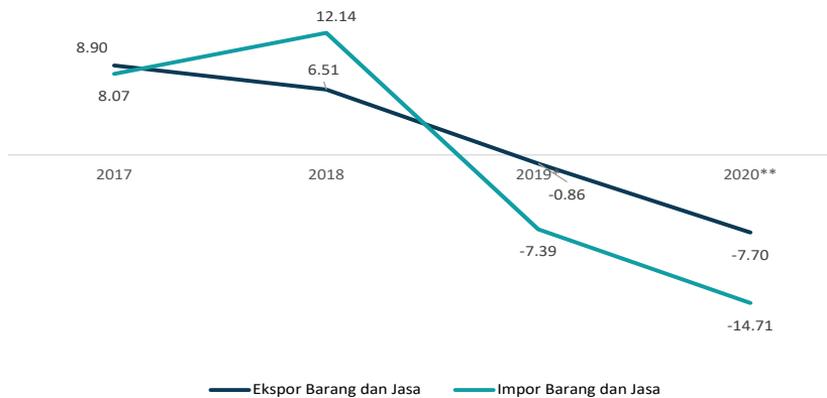
Gambar 4.5 Kontribusi Subkomponen Bangunan dan Non Bangunan Pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (persen), Tahun 2017-2020



Catatan : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber : Badan Pusat Statistik

Apabila kita mengaitkan ekonomi nasional dengan perdagangan internasional, kita dapat melihat perkembangan ekonomi dari sisi ekspor dan impor. Selama dua tahun terakhir pertumbuhan kedua komponen tersebut bernilai negatif (kontraksi). Pertumbuhan ekspor pada tahun 2019 sebesar -0,86

Gambar 4.6 Pertumbuhan Ekspor dan Impor Barang dan Jasa (persen), Tahun 2017-2020

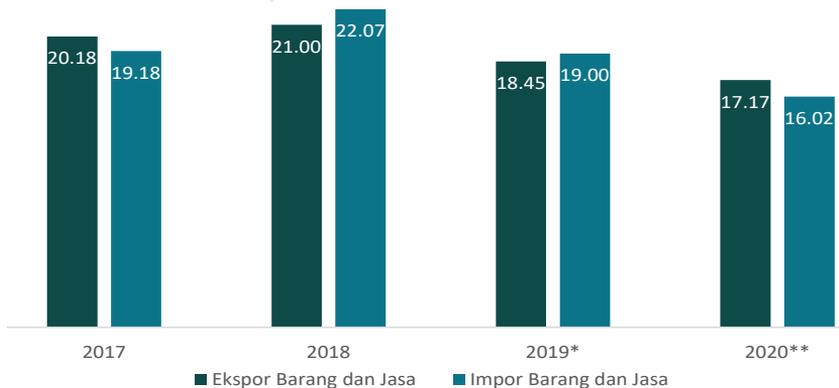


Catatan : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber : Badan Pusat Statistik

persen dan menurun pada tahun 2020 menjadi -7,70 persen. Pertumbuhan komponen ekspor yang masih negatif disebabkan terutama pada ekspor jasa yang berkontraksi pada tingkat pertumbuhan sebesar -48,69 persen. Hal ini disebabkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Indonesia terkait pembatasan kunjungan. Jika dibandingkan dengan komponen ekspor, kontraksi komponen impor justru lebih dalam lagi. Komponen impor mengalami pertumbuhan sebesar -14,71 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan impor tahun 2019 yang sebesar -7,39 persen. Kontraksi impor ini juga terjadi pada seluruh subkomponen baik impor barang migas dan non migas, serta terutama kontraksi pada subkomponen impor jasa yang mencapai pertumbuhan -34,66 persen. Hal ini disebabkan menurunnya jumlah penduduk Indonesia yang berwisata dan berkunjung ke luar negeri selama pandemi.

Dilihat dari sisi kontribusi terhadap perekonomian nasional, kontribusi ekspor dan impor barang dan jasa dapat dilihat pada Gambar 4.7. Selama tahun 2018-2020, kontribusi ekspor dan impor terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan. Kontribusi ekspor terhadap perekonomian nasional selama tiga tahun terakhir berturut-turut sebesar 21,00 persen; 18,45 persen dan 17,17 persen, sedangkan komponen impor memberikan kontribusi berturut-turut sebesar 22,07 persen; 19,00 persen dan 16,02 persen. Selain itu, hal menarik lainnya adalah walaupun dalam dua tahun terakhir komponen impor memberikan kontribusi yang lebih tinggi daripada komponen ekspor, pada tahun 2020 mengalami kondisi yang sebaliknya dimana komponen ekspor memberikan kontribusi yang lebih tinggi daripada komponen impor.

Gambar 4.7 Kontribusi Ekspor dan Impor Barang dan Jasa Terhadap Total PDB (persen), Tahun 2017-2020



Catatan : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 4.3 PDB Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (Persen) Menurut Penggunaan, Tahun 2017-2020

PDB Penggunaan	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5379628.64	5651454.19	5936399.56	5780218.14
	4.94	5.05	5.04	-2.63
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	1969261.34	2072120.58	2179119.14	2190235.64
	5.24	5.22	5.16	0.51
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	212345.95	221470.08	230920.26	221189.33
	3.37	4.30	4.27	-4.21
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	727237.1	760931.73	796376.21	814538.29
	4.19	4.63	4.66	2.28
d. Kesehatan dan Pendidikan	373129.39	391786.66	417643.65	430534.69
	5.46	5.00	6.60	3.09
e. Transportasi dan Komunikasi	1334374.09	1407370.97	1474685.23	1333624.33
	5.39	5.47	4.78	-9.57
f. Restoran dan Hotel	502070.85	530343.92	561967.67	516206.32
	5.40	5.63	5.96	-8.14
g. Lainnya	261209.92	267430.25	275687.39	273889.54
	2.30	2.38	3.09	-0.65
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	112664.35	122916.83	135973.85	130193.32
	6.93	9.15	10.62	-4.29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	790756.4	828682.96	855596.57	872558.31
	2.12	4.82	3.26	1.94
a. Konsumsi Kolektif	485455.62	506706.05	530215.2	526688.09
	1.63	4.65	4.62	-0.90
b. Konsumsi Individu	305300.78	321976.91	325381.37	345870.22
	2.92	5.10	1.12	6.60
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	3228763.01	3443242.17	3596363.73	3419704.2
	6.15	6.68	4.45	-4.95
a. Bangunan	2419271.82	2550271.59	2687303.09	2585622.97
	6.24	5.41	5.37	-3.78
b. Mesin dan Perlengkapan	308540.42	368823.71	387001.88	342253.06
	9.52	19.73	4.76	-11.56
c. Kendaraan	186458.53	202690.98	193520.2	168284.52
	8.86	8.24	-4.12	-13.04
d. Peralatan Lainnya	55375.99	59907.63	58113.51	51979.17
	9.25	8.34	-3.14	-10.56
e. CBR	175833.93	179386.29	188450.7	195940.49
	1.00	2.72	5.05	3.26

Lanjutan

PDB Penggunaan	2017	2018	2019*	2020**
f. Produk Kekayaan Intelektual	83282.32	82161.98	81974.36	75623.98
	-3.83	-1.35	-0.23	-7.75
5. Perubahan Inventori	126883.56	197369.64	129953.84	51334.13
	-	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	2146564.52	2287089.9	2267119.68	2092037.95
	8.90	6.51	-0.86	-7.70
a. Barang	1915737.26	2038154.06	2018127.8	1964536.72
	9.29	6.41	-1.00	-2.66
a.1. Barang Non-migas	1664739.51	1804911.63	1826643.44	1785523.63
	10.50	8.44	1.23	-2.30
a.2. Barang migas	250997.75	233242.43	191484.36	179013.09
	1.92	-7.07	-18.25	-6.12
b. Jasa	230827.26	248935.83	248991.88	127501.23
	5.73	7.40	0.23	-48.69
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1964819.17	2198263.32	2029279.68	1740166.33
	8.07	12.14	-7.39	-14.71
a. Barang	1694413.09	1915840.33	1746589.54	1551753.62
	8.73	13.05	-8.54	-11.43
a.1. Barang Non-migas	1355498.75	1585149.38	1475454.5	1321138.05
	9.54	16.93	-6.57	-10.78
a.2. Barang Migas	338914.34	330690.95	271135.05	230615.57
	5.62	-2.44	-17.96	-14.98
b. Jasa	270406.08	282422.99	282690.14	188412.71
	4.08	6.39	0.23	-34.66
Diskrepani Statistik	92486.79	92904.93	57116.15	116562.98
	-	-	-	-
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	9912928.1	10425397.3	10949243.7	10722442.7
	5.07	5.17	5.02	-2.07

Catatan: * Angka Sementara
 **Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 4.4 PDB Harga Berlaku (Miliar Rupiah) dan Distribusi PDB (Persen) Menurut Penggunaan, Tahun 2017-2020

PDB Penggunaan	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7623056.11	8274211.74	8965837.14	8900011.1
	56.09	55.76	56.63	57.66
a. Makanan dan Minuman, Selain Restoran	2986882.01	3255945.89	3529891.68	3669993.47
	21.98	21.94	22.30	23.78
b. Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	273621.29	296092.19	321704.99	316444.49
	2.01	2.00	2.03	2.05
c. Perumahan dan Perlengkapan Rumah tangga	980387.89	1060517.02	1144776.68	1186897.04
	7.21	7.15	7.23	7.69
d. Kesehatan dan Pendidikan	515134.08	558969.26	616504.64	652934.85
	3.79	3.77	3.89	4.23
e. Transportasi dan Komunikasi	1748905.24	1894009.9	2042268.5	1796642.85
	12.87	12.76	12.90	11.64
f. Restoran dan Hotel	755577.03	826225.85	903979.63	853206.73
	5.56	5.57	5.71	5.53
g. Lainnya	362548.57	382451.64	406711.02	423891.67
	2.67	2.58	2.57	2.75
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	160594.43	180815.16	206013.17	201276.29
	1.18	1.22	1.30	1.30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1239469.72	1336613.1	1385881.54	1433686.32
	9.12	9.02	8.81	9.29
a. Konsumsi Kolektif	761297.46	817850.34	857779.75	862505.73
	5.60	5.54	5.48	5.59
b. Konsumsi Individu	478172.26	518762.76	528101.79	571180.59
	3.52	3.48	3.33	3.70
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4370574.77	4789384.68	5119490.64	4897785.67
	32.16	32.29	32.35	31.73
a. Bangunan	3283435.9	3566926.73	3841446.57	3719738.79
	24.16	24.04	24.26	24.10
b. Mesin dan Perlengkapan	405943.79	498444.7	543300.62	477346.98
	2.99	3.37	3.43	3.09
c. Kendaraan	233934.3	258974.15	253821.79	223576.87
	1.72	1.73	1.60	1.45
d. Peralatan Lainnya	77498.95	85899.17	84941.1	75728.86
	0.57	0.59	0.54	0.49
e. CBR	254661.99	262701.92	276864.34	283819.9
	1.87	1.78	1.76	1.84
f. Produk Kekayaan Intelektual	115099.84	116438.01	119116.22	117574.27
	0.85	0.78	0.75	0.76
5. Perubahan Inventori	210636.31	338633.58	226922.8	97857.67
	1.55	2.28	1.43	0.63
6. Ekspor Barang dan Jasa	2742060.5	3111923.42	2914635.6	2649786.94
	20.18	21.00	18.45	17.17

Lanjutan

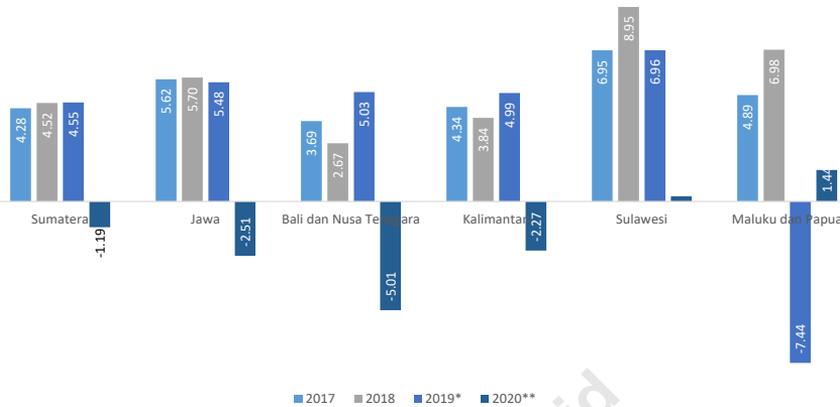
PDB Penggunaan	2017	2018	2019*	2020**
a. Barang	2386700.49	2708682.46	2500983.6	2435907.6
	17.56	18.25	15.79	15.78
a.1. Barang Nonmigas	2177008.7	2465166.5	2324590.21	2314298.26
	16.02	16.61	14.69	14.99
a.2. Barang migas	209691.79	243515.95	176393.38	121609.34
	1.54	1.64	1.11	0.79
b. Jasa	355360.02	403240.96	413652	213879.34
	2.61	2.75	2.65	1.39
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2606282.95	3268839	2991963.31	2472898.89
	19.18	22.07	19.00	16.02
a. Barang	2154432.48	2753480.5	2469827.21	2111631.71
	15.85	18.56	15.66	13.68
a.1. Barang Nonmigas	1820684.03	2317267.91	2153152.34	1903679.96
	13.40	15.62	13.66	12.33
a.2. Barang Migas	333748.45	436212.59	316674.86	207951.75
	2.46	2.94	2.00	1.35
b. Jasa	451850.47	515358.5	522136.1	361267.18
	3.32	3.52	3.34	2.34
Diskrepansi Statistik	-150283.19	75568.82	7125.82	-273353.3
	-1.10	0.50	0.03	-1.76
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	13589825.7	14838311.5	15833943.4	15434151.8
	100.00	100.00	100.00	100.00

Catatan: * Angka Sementara
 **Angka Sangat Sementara
 Sumber: Badan Pusat Statistik

Bali Paling Terkontraksi, Maluku Utara Tetap Tumbuh

Di tahun 2020, kontraksi perekonomian nasional juga dialami oleh perekonomian di 4 wilayah yaitu Sumatera; Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; dan Kalimantan. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah tersebut masing-masing sebesar -1,19 persen; -2,51 persen; -5,01 persen dan -2,27 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi dan Maluku-Papua mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif walaupun mengalami perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut yaitu Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,23 persen, sedangkan Maluku-Papua mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,44 persen.

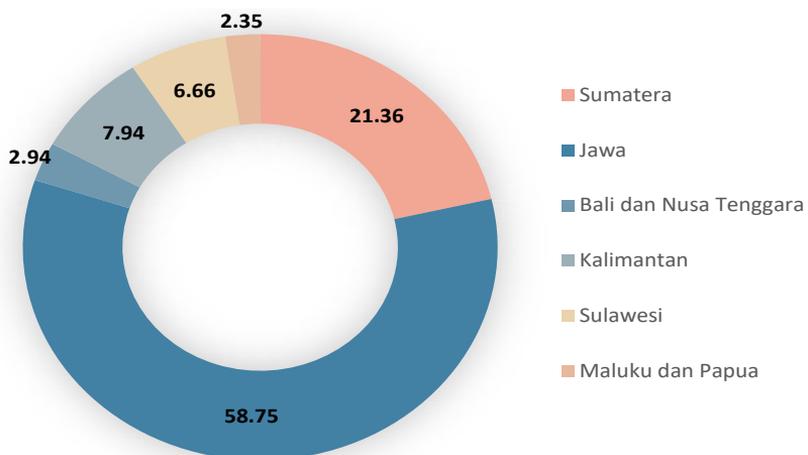
Gambar 4.8 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah (persen), Tahun 2017-2020



Catatan : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber : Badan Pusat Statistik

Dilihat berdasarkan kontribusi per wilayah, kontribusi wilayah Jawa masih mendominasi perekonomian nasional (Gambar 4.9). Di tahun 2020, kontribusi wilayah Jawa sebesar 58,75 persen dari perekonomian nasional. Kontribusi terbesar kedua ada di wilayah Sumatera sebesar 21,36 persen dari perekonomian nasional. Lalu, kontribusi terbesar ketiga adalah wilayah Kalimantan dengan kontribusi sebesar 7,94persen dari perekonomian nasional. Selanjutnya, ada kontribusi dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara; Sulawesi serta Maluku dan Papua dengan kontribusi masing-masing sebesar 2,94 persen; 6,66 persen dan 2,35 persen.

Gambar 4.9 Kontribusi Ekonomi Menurut Wilayah (persen), Tahun 2020



Catatan : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber : Badan Pusat Statistik

**Tabel 4.5 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Menurut Provinsi (persen),
Tahun 2018-2020**

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi			Kontribusi Ekonomi		
	2018	2019*	2020**	2018	2019*	2020**
Aceh	4.61	4.14	-0.37	1.04	1.02	1.05
Sumatera Utara	5.18	5.22	-1.07	4.95	4.98	5.14
Sumatera Barat	5.14	5.01	-1.60	1.54	1.53	1.53
Riau	2.35	2.81	-1.12	5.02	4.74	4.62
Jambi	4.69	4.37	-0.46	1.39	1.35	1.31
Sumatera Selatan	6.01	5.69	-0.11	2.80	2.83	2.90
Bengkulu	4.97	4.94	-0.02	0.44	0.45	0.46
Lampung	5.23	5.26	-1.67	2.22	2.22	2.25
Kep. Bangka Belitung	4.45	3.32	-2.30	0.49	0.47	0.48
Kep. Riau	4.47	4.84	-3.80	1.66	1.67	1.61
DKI Jakarta	6.11	5.82	-2.36	17.31	17.56	17.56
Jawa Barat	5.65	5.07	-2.44	13.09	13.24	13.23
Jawa Tengah	5.30	5.40	-2.65	8.47	8.49	8.54
Di Yogyakarta	6.20	6.59	-2.69	0.87	0.88	0.88
Jawa Timur	5.47	5.52	-2.39	14.61	14.62	14.57
Banten	5.77	5.29	-3.38	4.10	4.12	3.97
Bali	6.31	5.60	-9.31	1.56	1.57	1.42
Nusa Tenggara Barat	-4.50	3.90	-0.64	0.83	0.83	0.85
Nusa Tenggara Timur	5.11	5.24	-0.83	0.66	0.67	0.67
Kalimantan Barat	5.07	5.09	-1.82	1.30	1.32	1.36
Kalimantan Tengah	5.61	6.12	-1.40	0.93	0.93	0.96
Kalimantan Selatan	5.08	4.08	-1.81	1.15	1.13	1.13
Kalimantan Timur	2.64	4.74	-2.85	4.24	4.06	3.85
Kalimantan Utara	5.36	6.90	-1.11	0.57	0.60	0.64
Sulawesi Utara	6.00	5.65	-0.99	0.80	0.81	0.84
Sulawesi Tengah	20.56	8.83	4.86	1.12	1.16	1.25
Sulawesi Selatan	7.04	6.91	-0.70	3.08	3.14	3.20
Sulawesi Tenggara	6.40	6.50	-0.65	0.79	0.81	0.82
Gorontalo	6.49	6.40	-0.02	0.25	0.26	0.26
Sulawesi Barat	6.26	5.67	-2.42	0.29	0.29	0.29
Maluku	5.91	5.41	-0.92	0.29	0.29	0.29
Maluku Utara	7.86	6.10	4.92	0.24	0.25	0.27
Papua Barat	6.25	2.66	-0.77	0.53	0.53	0.53
Papua	7.32	-15.75	2.32	1.41	1.18	1.26

Catatan: * Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan dan kontribusi setiap wilayah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian provinsi-provinsi yang ada di wilayah tersebut. Di wilayah Sumatera, seluruh provinsinya mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif (kontraksi ekonomi). Provinsi Kepulauan Riau menjadi provinsi yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan tingkat pertumbuhan sebesar -3,80 persen. Pertumbuhan ekonomi negatif di Kepulauan Riau ini disebabkan

oleh sektor konstruksi yang memberikan andil kontraksi sebesar -1,19 persen, sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar -1,08 persen, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dengan andil kontraksi sebesar -0,97 persen. Selanjutnya, kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat pertumbuhan sebesar -2,30 persen. Pertumbuhan yang negatif ini karena sebagian besar sektor mengalami kontraksi dengan kontraksi tertinggi pada sektor transportasi dan pergudangan (-16,45 persen), sektor jasa perusahaan (-16,45 persen), dan sektor pertambangan dan penggalian (-9,23 persen). Apabila dilihat berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional di tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 5,14 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya 4,98 persen. Lalu, kontribusi terbesar kedua dan ketiga adalah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dengan kontribusi masing-masing sebesar 4,62 persen dan 2,90 persen.

Sama halnya dengan perekonomian nasional dan ekonomi wilayah Sumatera, perekonomian di Pulau Jawa juga mengalami kontraksi pertumbuhan. Bahkan, kontraksi ekonominya lebih besar dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera. Pertumbuhan ekonomi yang kontraksi ini didorong oleh semua provinsi di wilayah Jawa mengalami kontraksi ekonomi. Di tahun 2020, kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi di terjadi di Provinsi DI Yogyakarta dengan tingkat pertumbuhan sebesar -2,69 persen dan Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat pertumbuhan sebesar -2,65 persen. Kontraksi ekonomi di DI Yogyakarta disebabkan oleh menurunnya kinerja sebagian besar sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan dampak diberlakukannya seluruh kebijakan penanganan pandemi Covid-19 terutama pada sektor berbasis pariwisata. Sektor tersebut yang mengalami kontraksi terbesar yaitu diantaranya sektor Transportasi dan Pergudangan (-20,21 persen), sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (-16,91 persen), sektor jasa lainnya (-15,74 persen), serta sektor konstruksi (-15,64 persen). Sementara itu, kontraksi perekonomian di Provinsi Jawa tengah disebabkan oleh terjadinya kontraksi ekonomi pada sektor transportasi dan pergudangan (-33,15persen), sektor jasa lainnya (-8,01 persen) dan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (-7,98 persen).

Dilihat berdasarkan kontribusinya pada perekonomian nasional, kontributor terbesar di wilayah Jawa masih dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta dengan besar kontribusi 17,56 persen. Ekonomi Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; dan sektor jasa keuangan. Sedangkan di provinsi lainnya, perekonomian wilayahnya didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan.

Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, seluruh provinsi juga mengalami kontraksi perekonomian. Provinsi Bali merupakan provinsi dengan kontraksi perekonomian yang paling tinggi dengan tingkat pertumbuhan sebesar -9,31 persen dan dengan memiliki kontribusi sebesar 1,42 persen terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Bali yang negatif ini disebabkan oleh melemahnya kinerja

sektor yang berbasis pariwisata seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi dan pergudangan. Padahal kita ketahui bahwa kedua sektor itu merupakan sektor dengan kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian Provinsi Bali. Adanya beberapa kebijakan terkait pembatasan dan pengendalian mobilitas wisatawan menjadi pemicu menurunnya kinerja sektor-sektor tersebut. Pembatasan dan pengendalian mobilitas dalam upaya mengurangi penularan Covid-19 telah menyebabkan pembatalan para wisatawan untuk berkunjung ke Bali dan berdampak pada pembatalan *booking* transportasi angkutan udara, jasa BPW/APW, hotel dan restoran, serta tempat-tempat destinasi wisata. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat sedikit lebih baik kontraksi ekonominya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar -0,64 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar -0,83 persen.

Perekonomian wilayah Kalimantan juga tak luput dari dampak pandemi Covid-19 dengan ditunjukkan oleh kontraksi ekonomi di wilayah ini dan terjadi di seluruh provinsi. Secara keseluruhan, di tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur mengalami kontraksi ekonomi yang paling tinggi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,85 persen dan diikuti oleh Provinsi Kalimantan Barat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,82 persen. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Kalimantan Timur disebabkan oleh menurunnya kinerja sebagian besar sektor terutama sektor transportasi dan pergudangan yang terkontraksi sebesar -5,59 persen, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terkontraksi -5,32 persen, serta pertambangan dan penggalian terkontraksi -4,58 persen. Sementara itu kontraksi ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh kontraksi ekonomi pada 9 sektor, terutama pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (-19,26 persen) dan sektor transportasi dan pergudangan (-19,08 persen). Apabila dilihat berdasarkan kontribusi perekonomian provinsi terhadap perekonomian nasional, provinsi dengan kontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional di wilayah ini yaitu Provinsi Kalimantan Timur dengan besar kontribusi sebesar 3,85 persen. Sektor-sektor yang mendominasi perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, dan sektor konstruksi.

Di wilayah Sulawesi, terjadi hal yang menarik yaitu wilayah ini mampu menunjukkan kinerja ekonomi yang positif dengan tingkat pertumbuhan yang positif walaupun melambat dibandingkan tahun 2019. Hal ini didorong oleh salah satu provinsi di wilayah ini mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, tingkat pertumbuhannya relatif cukup tinggi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah (4,86 persen). Walaupun demikian, masih dikatakan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Masih positifnya kinerja perekonomian Sulawesi Tengah didukung oleh masih tetap tumbuhnya kinerja 9 sektor dari 17 sektor. Lima sektor dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sektor industri pengolahan (23,68 persen); sektor pertambangan dan penggalian (10,36 persen); sektor jasa keuangan dan asuransi (9,80 persen); sektor informasi dan komunikasi (8,56 persen); serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (6,11 persen). Sementara itu, kontraksi perekonomian tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar -2,42 persen. Kontraksi ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat disebabkan oleh 10 sektor dari

17 sektor mengalami kontraksi terutama sektor konstruksi (-13,31 persen), sektor administrasi pemerintah (-8,61 persen), dan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum (-7,19 persen). Dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian nasional, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan kontribusi tertinggi sebesar 3,20 persen. Secara umum memang sektor yang mendominasi di wilayah Sulawesi yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Begitu juga halnya dengan di Provinsi Sulawesi Selatan masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; kemudian sektor konstruksi serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Walaupun kontribusinya cukup besar, namun tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan terkontraksi sebesar -0,70 persen

Wilayah selanjutnya yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif yaitu wilayah Maluku dan Papua. Tidak seperti tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi ekonomi, pada tahun 2020 kinerja ekonomi di wilayah Maluku dan Papua cukup menggembirakan di tengah pandemi Covid-19. Tercatat dua provinsi yaitu Provinsi Maluku Utara dan Papua yang dapat mencapai pertumbuhan yang positif dengan masing-masing sebesar 4,92 persen dan 2,32 persen. Pertumbuhan ekonomi yang positif di Maluku Utara terutama didorong oleh sektor industri pengolahan yang mampu tumbuh cukup tinggi sebesar 59,07 persen diikuti sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 7,88 persen, serta sektor jasa informasi dan komunikasi sebesar 7,62 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara juga didorong oleh tumbuhnya kinerja ekspor luar negeri sebesar 61,19 persen. Sementara itu, perekonomian Papua yang tetap berkinerja baik terutama didorong oleh tumbuhnya sektor pertambangan dan penggalian sebesar 16,62 persen, sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,82 persen, serta sektor jasa informasi dan komunikasi sebesar 3,72 persen. Apabila dilihat berdasarkan kontribusi perekonomian provinsi terhadap perekonomian nasional di tahun 2020, rata-rata semua provinsi memberikan kontribusi di bawah 1 persen kecuali Provinsi Papua dengan kontribusi sebesar 1,26 persen. Secara umum, sektor ekonomi di wilayah Maluku dan Papua didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan. Namun, di Provinsi Papua sektor pertambangan dan penggalian menjadi yang paling dominan berkontribusi pada perekonomian Papua khususnya pada pertambangan emas, perak, tembaga, dan batu bara.

Pendapatan Per Kapita

Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita suatu negara, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut. Oleh karena itu, suatu negara akan terus meningkatkan pendapatan per kapitanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan pendapatan per kapita ini tidak lepas dari peningkatan kinerja perekonomian suatu negara.

Menurut BPS, PDB per kapita Indonesia selama tiga tahun terakhir mengalami perubahan yang berfluktuatif. Pada tahun 2019 PDB per kapita Indonesia mencapai Rp 59,1 juta atau sekitar US\$ 4 174,5. Angka ini naik dibandingkan tahun

sebelumnya yang hanya mencapai Rp 56,0 juta atau sekitar US\$ 3 927,3. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 yang menurunkan kinerja perekonomian juga berdampak pada penurunan pendapatan per kapita penduduk Indonesia. PDB per kapita Indonesia turun menjadi Rp 56,9 juta atau sekitar US\$ 3 911,7. Hal kondisi serupa terjadi pada pendapatan per kapita jika menggunakan indikator GNI per kapita dari Bank Dunia yang menurun di tahun 2020.

Tabel 4.6 PDB Per Kapita dan GNI Per Kapita Tahun 2018-2020

Tahun	PDB Per Kapita (Berlaku) ¹		GNI Per Kapita ²
	Nilai (Juta Rupiah)	Nilai (US\$)	Nilai (US\$)
2018	56,0	3927,3	3840
2019*	59,1	4174,5	4050
2020**	56,9	3911,7	3870

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : ¹ Badan Pusat Statistik (BPS), ² Bank Dunia

Bank Dunia mempunyai ketentuan mengenai suatu negara dapat dikelompokkan ke klasifikasi tingkat pendapatan setiap tahunnya berdasarkan GNI (*Gross National Income*) per kapita. Bank Dunia juga selalu melakukan update terkait perubahan klasifikasi tingkat pendapatan. Terakhir, Bank Dunia melakukan perubahan klasifikasi pada tingkat pendapatan negara di tanggal 1 Juli 2021 (Tabel 4.6). Klasifikasi pendapatan yang baru mempunyai rentang yang lebih panjang dengan batas bawah yang lebih tinggi dibandingkan dengan klasifikasi pendapatan yang lama. Perubahan klasifikasi ini mengubah posisi negara-negara yang pendapatannya berada di dekat batas atas atau batas bawah kelas klasifikasi. Berdasarkan Tabel 4.7, Bank Dunia menetapkan Indonesia yang sebelumnya di tahun 2019 berada pada kelompok pendapatan menengah atas (*upper-middle income*) harus bergeser turun menjadi kelompok pendapatan menengah bawah (*lower-middle income*). Hal ini disebabkan pendapatan per kapita Indonesia mengalami penurunan dari US\$ 4 050 di tahun 2019 menjadi US\$ 3 870 di tahun 2020.

Tabel 4.7 Klasifikasi Bank Dunia Berdasarkan Tingkat Pendapatan (US\$)

Klasifikasi	Lama (1 Juli 2020)	Baru (1 Juli 2021)
Pendapatan rendah (<i>low income</i>)	< 1035	< 1046
Pendapatan menengah bawah (<i>lower-middle income</i>)	1035 - 4045	1046 - 4095
Pendapatan menengah atas (<i>upper-middle income</i>)	4046 - 12535	4096 - 12695
Pendapatan tinggi (<i>high income</i>)	> 12535	> 12695

Sumber : World Bank

Bank Dunia (2021) pada saat menetapkan perubahan klasifikasi tingkat pendapatan, menetapkan juga beberapa negara yang mengalami perubahan status tingkat pendapatan baik yang mengalami peningkatan status tingkat pendapatan maupun penurunan tingkat pendapatan. Tiga negara berkembang yang mengalami perbaikan status tingkat pendapatan yaitu Haiti dan Tajikistan yang bergeser statusnya dari kelompok pendapatan bawah (*low income*) naik menjadi kelompok pendapatan menengah bawah (*lower-middle income*), serta Moldova dari kelompok pendapatan menengah bawah (*lower-middle income*) naik menjadi kelompok pendapatan menengah atas (*upper-middle income*). Sementara itu, ada 7 negara berkembang yang mengalami penurunan status tingkat pendapatan. Selain Indonesia, Belize dan Iran juga mengalami pergeseran status tingkat pendapatan dari kelompok pendapatan menengah atas (*upper-middle income*) turun menjadi kelompok pendapatan menengah bawah (*lower-middle income*). Sisanya empat negara yaitu Mauritius, Panama, Rumania, dan Samoa menurun status tingkat pendapatannya dari kelompok pendapatan tinggi (*high income*) menjadi kelompok pendapatan menengah atas (*upper-middle income*).

Ekonomi Indonesia Masih Terkontraksi di Triwulan I Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan I tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang negatif jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan IV tahun 2020 dengan tingkat pertumbuhan hanya sebesar -0,96 persen. Kondisi pertumbuhan ekonomi triwulan I yang dibandingkan dengan triwulan IV tahun sebelumnya dan bernilai negatif ini wajar mengingat pergerakan ekonomi di awal tahun belum terlalu banyak serta masih terdampak dari adanya Covid-19 yang masih belum mereda. Begitu pula jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I *Q to Q*, pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2021 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2020 masih mengalami pertumbuhan yang negatif. Tingkat pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2020 *Y on Y* sebesar -0,74 persen, berbeda dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi triwulan I *Y on Y* di tahun-tahun sebelumnya yang selalu positif 5 persen. Ditambah pula bahwa pertumbuhan yang negatif pada triwulan ini menambah rentetan kontraksi ekonomi nasional sejak triwulan II tahun 2020.

Dilihat dari PDB lapangan usaha kondisi *Y on Y* (dibandingkan dengan triwulan I tahun sebelumnya), pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor jasa informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 8,72 persen. Sektor ini masih tetap tumbuh positif disebabkan karena kebutuhan akan kuota internet dan pulsa sebagai sarana informasi bagi masyarakat yang bekerja maupun sekolah dari rumah. Kebutuhan akan internet tidak hanya untuk bekerja dan sekolah tetapi juga untuk melakukan belanja online maupun untuk akses media sosial dan media hiburan lainnya.

Tabel 4.8 Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha Triwulan I-2021

Lapangan Usaha	Nilai PDB (triliun rupiah)		Struktur PDB (persen)	Laju Pertumbuhan (persen)		Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2021 (yoy) (persen)
	Harga Berlaku	Harga Konstan		Tw I 2021 to TW IV 2020	Tw I 2021 to TW I 2020	
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	522.8	331.9	13.17	9.81	2.95	0.35
B. Pertambangan dan Penggalian	303.4	196.7	7.65	-1.56	-2.02	-0.15
C. Industri Pengolahan	787.4	558.9	19.84	0.61	-1.38	-0.29
D. Pengadaan Listrik dan Gas	46.7	28.2	1.18	0.98	1.68	0.02
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.9	2.4	0.07	-0.56	5.49	0.00
F. Konstruksi	428.7	271.5	10.80	-2.10	-0.79	-0.08
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	519.8	351.6	13.10	1.07	-1.23	-0.16
H. Transportasi dan Pergudangan	169.7	97.3	4.27	-6.05	-13.12	-0.54
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	101.5	76.8	2.56	-1.80	-7.26	-0.22
J. Informasi dan Komunikasi	181.8	169.6	4.58	0.89	8.72	0.50
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	181.8	117.1	4.58	-0.18	-2.99	-0.13
L. Real Estate	114.3	81.6	2.88	0.18	0.94	0.03
M, N. Jasa Perusahaan	74.8	49.2	1.88	-1.31	-6.10	-0.12
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	137.5	87.8	3.46	-9.86	-2.94	-0.10
P. Jasa Pendidikan	128.7	82.6	3.24	-13.04	-1.61	-0.05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	49.7	35.1	1.25	-10.10	3.64	0.04
R, S, T, U, Jasa Lainnya	76.9	49.7	1.94	-1.52	-5.15	-0.10
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS DASAR HARGA DASAR	3828.4	2588.0	96.46	-0.21	-1.03	-1.00
B. PAJAK DIKURANGI SUBSIDI ATAS PRODUK	140.7	95.1	3.54	-17.64	7.86	0.26
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	3969.1	2683.1	100.00	-0.96	-0.74	-0.74

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mampu menciptakan pertumbuhan yang positif (2,95 persen). Sektor ini masih dapat tumbuh positif karena didorong oleh tumbuhnya subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Subsektor tanaman pangan tumbuh didorong oleh peningkatan luas panen tanaman padi, baik padi sawah maupun padi ladang serta cuaca yang mendukung panen raya padi. Subsektor tanaman hortikultura dapat tumbuh karena peningkatan produksi buah dan sayur dengan adanya cuaca yang kondusif. Subsektor peternakan tumbuh didorong oleh tingginya permintaan domestik terhadap komoditas produksi ayam dan telur serta adanya optimalisasi produksi. Sementara itu, subsektor tanaman perkebunan tumbuh ditopang adanya peningkatan harga sawit dan diberlakukannya program Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Selanjutnya, empat sektor lainnya yang mampu menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (5,49 persen); sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (3,64 persen); sektor pengadaan listrik dan gas (1,68 persen); serta sektor real estate (0,94 persen) (BPS, 2021).

Sementara itu, sebelas sektor lainnya masih menunjukkan kontraksi ekonomi dengan kontraksi tertinggi pada sektor transportasi dan perdagangan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -7,26 persen karena adanya pembatasan mobilitas penduduk dan tutupnya sejumlah hotel dan restoran, sedangkan sektor transportasi dan perdagangan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 13,12 persen yang disebabkan adanya penurunan grafik penumpang berbagai moda transportasi dan jumlah perjalanan moda transportasi akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas selama pandemi berlangsung.

Sektor industri pengolahan juga mengalami kontraksi pertumbuhan yaitu sebesar -1,38 persen. Kontraksi sektor ini disebabkan oleh kontraksi pada subsektor industri tekstil dan pakaian jadi karena belum membaiknya permintaan produk industri tekstil dan pakaian jadi baik dari domestik maupun ekspor, serta penurunan produksi mobil dan sepeda motor serta perlengkapannya. Sementara itu, sektor perdagangan terkontraksi sebesar -1,23 persen yang disebabkan oleh adanya penurunan penjualan mobil dan motor serta ditutupnya sejumlah gerai-gerai ritel. Selanjutnya, enam sektor lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan dengan kisaran pertumbuhan antara -5,15 persen sampai -1,23 persen (BPS, 2021).

Sementara itu, struktur PDB triwulan I tahun 2021 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,84 persen dari total perekonomian. Selanjutnya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 13,17 persen dari total perekonomian. Berikutnya yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar 13,10 persen dari total perekonomian. Sisanya 14 sektor lainnya memberikan kontribusi berkisar antara 0,07 persen sampai 10,80 persen terhadap total PDB.

Dilihat dari PDB pengeluaran, pada triwulan I tahun 2021 pertumbuhan komponen pengeluaran tertinggi ada di komponen pengeluaran pemerintah dengan laju pertumbuhan sebesar 2,96 persen bila dibandingkan triwulan I tahun 2020. Kondisi ini disebabkan karena meningkatnya pengeluaran pemerintah terkait dengan belanja penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana seperti bencana pandemi Covid-19. Berbagai macam bantuan dari pemerintah bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Bantuan sosial baik dalam bentuk uang maupun bantuan sembako banyak diperlukan oleh sebagian besar masyarakat. Tidak lupa bantuan keringanan bagi pelaku usaha baik UMKM maupun pelaku usaha lain. Bantuan untuk pelaku usaha baik berupa keringanan pajak, subsidi listrik maupun penurunan suku bunga pinjaman dan fleksibilitas pembayaran utang. Pemerintah terus bertekad untuk membantu perekonomian nasional dan memperhatikan kondisi masyarakat dan pelaku usaha. Kebijakan terkait bantuan selama pandemi tercakup dalam program PEN yang telah menunjukkan berbagai macam keberhasilan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat. Tidak lupa tingkat kesehatan masyarakat juga terjaga dengan pengadaan obat-obatan dan vaksin. Tidak lupa bantuan tunjangan bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan pandemi menjadi fokus

pemerintah. Dari sisi Pendidikan, bantuan kuota data bagi para pelajar dan mahasiswa yang sedang melaksanakan *online school* atau pembelajaran secara daring turut membantu anak-anak agar dapat tetap mengakses pendidikan. Secara umum, komponen pengeluaran pemerintah memberikan kontribusi sebesar 6,70 persen terhadap perekonomian nasional.

Komponen selanjutnya adalah komponen konsumsi rumah tangga yang berkontraksi sebesar -2,23 persen (*Q to Q*). Kondisi ini lebih tinggi kontraksinya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan triwulan I *Y on Y* di tahun 2020 yang sebesar -0,58 persen. Kontraksi komponen pengeluaran rumah tangga ditandai dengan penjualan eceran yang mengalami kontraksi pada seluruh kelompok penjualan, antara lain makanan, minuman, dan tembakau; sandang; suku cadang dan aksesoris; bahan bakar kendaraan; barang budaya dan rekreasi; serta barang lainnya. Bahkan penjualan *whole sale* mobil penumpang dan sepeda motor juga mengalami kontraksi. Dari sisi angkutan, penurunan jumlah penumpang angkutan rel, laut, dan udara turut mendorong berkontraksinya komponen pengeluaran rumah tangga. Meskipun demikian, komponen ini masih mendominasi perekonomian dengan kontribusi sebesar 56,93 persen terhadap total PDB.

Tabel 4.9 Nilai, Struktur, Laju dan Sumber Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Menurut Pengeluaran Triwulan I-2021

Lapangan Usaha	Nilai PDB (triliun rupiah)		Struktur PDB (persen)	Laju Pertumbuhan (persen)		Sumber Pertumbuhan Triwulan I-2021 (persen)
	Harga Berlaku	Harga Konstan		Tw I 2021 to TW IV 2020	Tw I 2021 to TW I 2020	
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2259.4	1450.3	56.93	-0.58	-2.23	-1.22
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	48.7	31.1	1.23	-4.62	-4.53	-0.05
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	265.9	164.3	6.70	-43.35	2.96	0.17
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	1269.5	874.3	31.98	-2.21	-0.23	-0.07
5. Perubahan Inventori	109.7	61.4	2.76	-	-	-
6. Ekspor Barang dan Jasa	761.1	584.2	19.18	7.83	6.74	1.36
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	718.1	496.5	18.09	6.47	5.27	0.92
Diskrepansi Statistik	-27.1	14.0	-0.69	-	-	-
A. PRODUK DOMESTIK BRUTO	3969.1	2683.1	100.00	-0.96	-0.74	-0.74

Sumber : Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik

Komponen pengeluaran selanjutnya yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Komponen PMTB yang berkontribusi terhadap perekonomian sebesar 31,98 persen mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -0,23 persen. Hal ini didorong oleh berkontraksinya barang modal jenis peralatan lainnya baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor, serta berkontraksinya investasi bangunan karena output konstruksi yang menurun. Kondisi yang berbeda dialami komponen ekspor barang dan jasa yang masih dapat tumbuh positif sebesar 6,74 persen dan berkontribusi sebesar 19,18 persen terhadap perekonomian nasional. Ekspor dapat tumbuh didorong oleh meningkatnya kinerja ekspor nonmigas dan

migas. Ekspor nonmigas tumbuh sejalan dengan meningkatnya nilai dan volume komoditas utama, seperti lemak dan minyak hewan/nabati; besi dan baja; serta mesin/peralatan listrik. Sementara itu, ekspor migas tumbuh sejalan dengan meningkatnya nilai, volume ekspor, serta harga komoditas migas. Kinerja ekspor ini juga didukung dengan kondisi perekonomian sebagian besar negara mitra dagang utama Indonesia yang membaik terutama Tiongkok yang dapat tumbuh sebesar 18,3 persen.

Terakhir, komponen impor mengalami pertumbuhan sebesar 5,27 persen dan berkontribusi sebesar 18,09 persen terhadap perekonomian nasional. Tumbuhnya komponen impor didorong oleh membaiknya impor nonmigas karena peningkatan nilai dan volume komoditas utama, seperti mesin/peralatan listrik; plastik dan barang dari plastik; bahan kimia organik; serta besi dan baja. Walaupun demikian, terjadi kontraksi pada impor migas karena penurunan nilai dan volume impor migas serta terkontraksinya impor jasa karena menurunnya jumlah wisatawan nasional (wisnas) yang berwisata keluar negeri.

Dengan semakin membaiknya perekonomian nasional dengan ditandai semakin kecilnya kontraksi pertumbuhan di awal tahun, diharapkan proses perbaikan dan pemulihan kinerja ekonomi akan terus berlangsung pada triwulan II hingga akhir tahun 2021. Perkiraan ekonomi dunia yang semakin membaik dan didukung dengan adanya perbaikan dan pemulihan kondisi dalam negeri, diharapkan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional pada akhir tahun 2021. Berbagai macam kebijakan pemerintah telah dilakukan dan akan terus dilakukan dalam upaya pemulihan ekonomi dan penanganan akibat pandemi Covid-19. Salah satu upayanya yaitu terus digulirkannya program PEN termasuk di dalamnya bantuan sosial bagi masyarakat dan bantuan bagi para pelaku usaha. Selain itu upaya pencegahan meluasnya Covid-19 dengan adanya program vaksinasi dan menjamin akan tersedianya vaksin bagi masyarakat yang telah dimulai pemerintah sejak pada awal tahun 2021 dapat mendukung proses pemulihan ekonomi. Namun demikian, seiring dengan berjalannya vaksinasi yang terus berlangsung, masyarakat diharapkan agar tetap patuh dan terus menerapkan protokol kesehatan (5M) dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kondisi demikian, Bank Indonesia optimis bahwa perekonomian nasional pada akhir tahun 2021 diperkirakan akan berkisar antara 4,8-5,8 persen (Bank Indonesia, 2020). Sementara itu, lembaga internasional juga memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di kisaran empat persen, antara lain IMF (4,3 persen), ADB (4,5 persen), dan World Bank (4,4 persen).

Kondisi UMKM Di Saat Pandemi

5



Jumlah UMKM di Indonesia mencapai **65,47 juta** pada tahun 2019

91,87 persen tenaga kerja bekerja di sektor **usaha mikro**

87,5 persen UMKM terdampak pandemi dan **93,2 persen** diantaranya terdampak dari sisi **penjualan**

40 persen UMKM mengalami penurunan penjualan antara **25 hingga 50 persen**



<https://www.bps.go.id>

Sebagai roda penggerak perekonomian nasional, sektor UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Besarnya sumbangan UMKM dalam PDB membuktikan bahwa lebih dari setengah kegiatan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor ini. Selain sebagai wadah dalam penyedia dan penyerapan lapangan kerja, UMKM juga berperan sebagai jaring pengaman bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Hal ini karena sektor UMKM bersentuhan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.

UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam UU tersebut, yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kemudian usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dalam UU tersebut juga dijelaskan kriteria dari UMKM. Usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 300 juta. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar. Kemudian usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Sektor UMKM hingga saat ini masih terus berkembang. Pada tahun 2015, total unit UMKM sebanyak 59,26 juta unit dan pada tahun 2019, jumlah unit UMKM mencapai 65,46 juta unit atau setara dengan 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia. Peningkatan ini juga sejalan dengan peningkatan pada penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM. Pada tahun 2015, UMKM mampu menyerap 123,23 juta tenaga kerja dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 119,56 juta tenaga kerja.

Besarnya peran UMKM dalam struktur ekonomi nasional mendasari Pemerintah dalam mendukung UMKM melalui kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam program bantuan, kredit, produk hukum terkait UMKM, dan

pembentukan lembaga yang menangani UMKM. Salah satu program yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan adalah dengan meningkatkan kapasitas UMKM khususnya untuk ekspor. Hal itu merupakan wujud dukungan Pemerintah agar produk-produk yang dihasilkan UMKM dapat dikenal lebih luas dan memiliki daya saing di pasar global. Pada *Brilianpreneur* 2019, Kementerian Perdagangan melalui perwakilan perdagangan di luar negeri mendatangkan 82 buyers internasional. Para buyers berasal dari Amerika Serikat, Meksiko, Kanada, Chile, Vietnam, Jepang, Tiongkok, Filipina, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Spanyol, Italia, Belanda, Prancis, Inggris, dan Australia. Upaya ini sekaligus merupakan bagian dari promosi produk UKM agar memperoleh pasar ekspor yang lebih luas.

Memasuki awal Maret 2020, Pemerintah mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Saat itu, 2 orang terkonfirmasi positif setelah berinteraksi dengan warga negara Jepang yang positif terkena corona. Tak perlu waktu lama, hanya 38 hari pandemi Covid-19 sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia, yakni pada tanggal 9 April 2020. Berbagai upaya pencegahan dilakukan, mulai dari gerakan 3M, stay at home hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hampir semua sektor ekonomi terpukul selama pandemi. Dampak paling terasa terjadi di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Himbauan menjaga jarak membuat roda perekonomian di sektor ini melambat.

Di masa pandemi ini, UMKM mengalami berbagai permasalahan seperti penurunan pendapatan, modal, terhambatnya distribusi barang, kesulitan bahan baku, dan menurunnya produksi barang. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi perekonomian nasional. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi sedang menghadapi penurunan produktivitas dan penurunan profit yang signifikan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan BI, terdapat 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, 93,2 persen terdampak dari sisi penjualan. Sebanyak 16,2 persen UMKM terdampak mengalami penurunan penjualan hingga 25 persen. Selanjutnya, 40 persen UMKM mengalami penurunan penjualan sebesar 25 hingga 50 persen, 28 persen UMKM mengalami penurunan penjualan 51 hingga 75 persen, dan 15,6 persen UMKM penjualannya anjlok hingga di atas 75 persen.

Perkembangan UMKM

Dari tahun ke tahun, jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Jumlah unit usaha yang masuk ke dalam sektor UMKM sebesar 65,46 juta usaha pada tahun 2019. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 1,98 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 64,19 juta usaha. Meskipun jumlah tersebut mengalami peningkatan, namun pertumbuhan sektor UMKM pada tahun 2019 merupakan pertumbuhan terendah jika dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat, pada tahun 2016 unit usaha UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 4,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 5.1. Jumlah Unit Usaha UMKM, Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018*	2019**
Total Unit Usaha	59 267 759	61 656 547	62 928 077	64 199 607	65 471 134
Total UMKM	59 262 772	61 651 177	62 922 617	64 194 057	65 465 497
- Usaha Mikro (Umi)	58 521 987	60 863 578	62 106 900	63 350 222	64 601 352
- Usaha Kecil (UK)	681 522	731 047	757 090	783 132	798 679
- Usaha Menengah (UM)	59 263	56 551	58 627	60 702	65 465

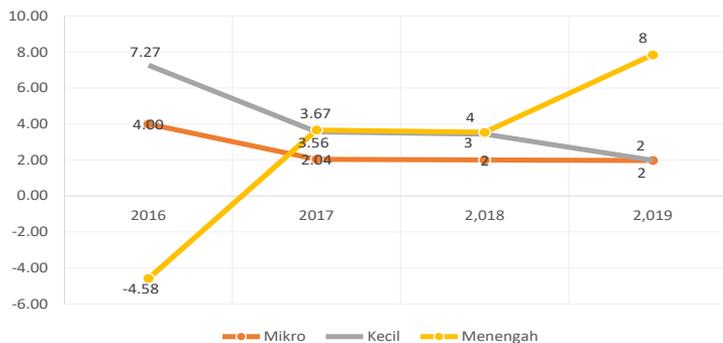
Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Penurunan pertumbuhan unit usaha terjadi pada sektor usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2019, unit usaha mikro mengalami pertumbuhan sebesar 1,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berbeda cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2016 yang memiliki pertumbuhan sebesar 4,0 persen. Serupa dengan unit usaha mikro, penurunan pertumbuhan juga terjadi pada unit usaha kecil. Pada tahun 2019, pertumbuhan unit usaha kecil hanya sebesar 1,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan ini cukup tajam jika dibandingkan pertumbuhan yang terjadi di tahun sebelumnya sebesar 3,54 persen. Hal yang berbeda terjadi pada unit usaha menengah, terjadi kenaikan pertumbuhan pada beberapa tahun terakhir. Di tahun 2019, pertumbuhan unit usaha menengah mencapai 7,85 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan di sektor ini mengindikasikan adanya pergeseran unit usaha dari usaha mikro kecil, ke menengah. Pergeseran ini disebabkan karena pelaku usaha mengembangkan usahanya dengan menambah modal, kapasitas produksi serta karyawan yang digunakan.

Gambar 5.1 Pertumbuhan Unit Usaha UMKM, Tahun 2016-2019



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Sektor UMKM masih memiliki peran yang besar dalam kontribusinya menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran. Terbukti pada tahun 2019, sektor UMKM mampu berkontribusi sebesar 99,99 persen dari total tenaga kerja di Indonesia yaitu sebesar 119,56 juta jiwa. Dari tahun ke tahun, tenaga kerja di sektor UMKM cenderung mengalami peningkatan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2016, tenaga kerja yang terserap pada sektor ini kembali mengalami peningkatan di tahun berikutnya. Jika dilihat lebih jauh, tenaga kerja di sektor UMKM paling banyak terdapat pada unit usaha mikro. Pada tahun 2019, unit usaha mikro mampu menyerap 109,84 juta tenaga kerja. Hal ini karena unit usaha mikro merupakan unit usaha yang berhadapan langsung dengan masyarakat, banyak menggunakan produk lokal, serta memiliki perputaran uang yang relatif kecil dan cepat dibandingkan unit usaha kecil maupun menengah.

Tabel 5.2. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Sektor UMKM, Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018*	2019**
Total Tenaga Kerja	127 423 438	116 273 356	120 260 177	120 598 138	123 368 672
Total Tenaga Kerja UMKM	123 229 387	112 828 610	116 431 224	116 978 631	119 562 843
- Tenaga Kerja Usaha Mikro (Umi)	110 807 864	103 839 015	105 509 631	107 376 540	109 842 384
- Tenaga Kerja Usaha Kecil (UK)	7 307 503	5 402 073	6 546 742	5 831 256	5 930 317
- Tenaga Kerja Usaha Menengah (UM)	5 114 020	3 587 522	4 374 851	3 770 835	3 790 142

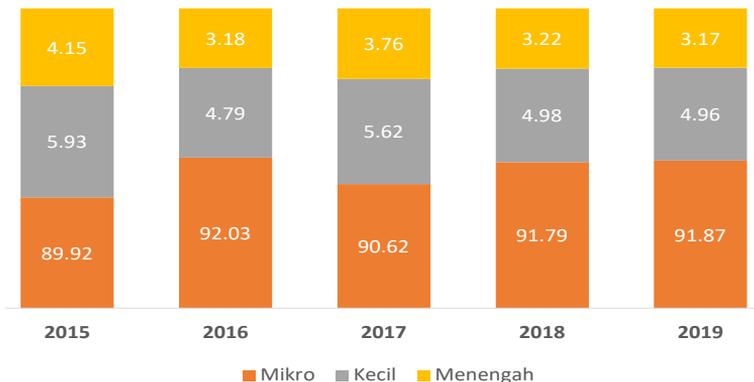
Catatan: *Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Pada tahun 2015, tenaga kerja pada unit usaha mikro mampu berkontribusi sebesar 89,92 persen dari total tenaga kerja pada sektor UMKM. Kontribusi tenaga kerja pada unit usaha ini mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi 92,03 persen dan mampu bertahan diatas 90 persen

Gambar 5.2 Kontribusi Tenaga Kerja Unit Usaha UMKM, Tahun 2015-2019



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

hingga tahun 2019. Sebagai unit usaha yang berhadapan langsung dengan masyarakat, unit usaha mikro mampu menjadi penyerap tenaga kerja yang paling baik dibandingkan unit usaha lainnya pada sektor UMKM.

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDB. Pada tahun 2015, UMKM menyumbang sekitar 61 persen dari total PDB Nasional. PDB sektor UMKM juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, PDB UMKM sebesar Rp 6 228,3 triliun dan meningkat hingga sebesar Rp 9.580,8 triliun pada tahun 2019. Sejalan dengan jumlah unit usahanya, unit usaha mikro memiliki kontribusi PDB yang paling besar. Pada tahun 2019 tercatat PDB unit usaha mikro sebesar Rp 5 913,2 triliun. Sedangkan unit usaha kecil hanya sebesar Rp 1 508,9 triliun.

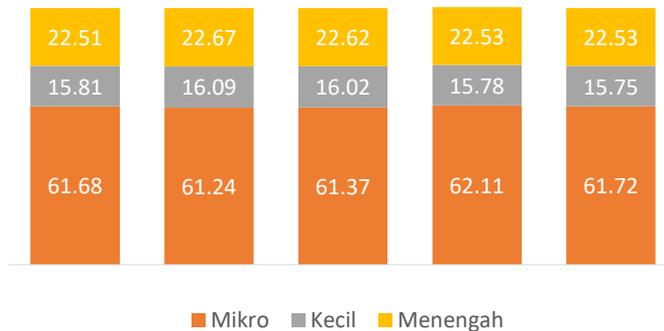
Tabel 5.3. PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor UMKM, Tahun 2015-2019 (miliar rupiah)

Indikator	2015	2016	2017	2018*	2019**
PDB	10 141 340,0	11 712 450,6	12 840 859,0	14 002 598,5	15 832 535,4
PDB UMKM	6 228 285,0	7 009 283,0	7 704 635,9	8 537 895,3	9 580 762,7
- PDB Usaha Mikro (Umi)	3 841 836,0	4 292 287,8	4 727 989,4	5 303 075,7	5 913 246,7
- PDB Usaha Kecil (UK)	984 489,0	1 128 056,8	1 234 210,7	1 347 104,3	1 508 970,1
- PDB Usaha Menengah (UM)	1 401 960,0	1 588 938,3	1 742 435,7	1 923 715,4	2 158 545,8

Catatan: *Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Pada tahun 2019, kontribusi PDB unit usaha mikro mencapai 61.72 persen dari total PDB sektor UMKM. Porsi ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 62,11 persen dari total PDB sektor UMKM. Penurunan porsi PDB di sektor UMKM juga terjadi pada unit

Gambar 5.3 Kontribusi PDB Unit Usaha UMKM, Tahun 2015-2019



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

usaha kecil dari sebelumnya 15,78 persen pada tahun 2018 turun menjadi 15,75 persen pada tahun 2019. Jika dilihat dari tahun ke tahun, PDB yang dihasilkan dari unit usaha menengah memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan unit usaha kecil. Unit usaha menengah memiliki kontribusi mencapai 22.53 persen dari total PDB sektor UMKM pada tahun 2019.

Sebagai unit usaha yang berhadapan langsung dengan masyarakat, nyatanya sektor UMKM juga mampu berkontribusi pada ekspor non migas di Indonesia. Total ekspor non migas sektor UMKM pada tahun 2015 mencapai Rp 186,0 triliun dan mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga sebesar Rp 339,2 triliun pada tahun 2019. Kenaikan nilai ekspor sektor UMKM ini memberi harapan bahwa sektor UMKM juga memiliki daya saing pada pasar global.

Tabel 5.4 Total Ekspor Nonmigas Menurut Sektor UMKM, Tahun 2015-2019 (miliar rupiah)

Indikator	2015	2016	2017	2018*	2019**
Ekspor non migas	1 182 643,0	1 774 626,9	2 073 824,9	2 044 490,8	2 167 079,7
Ekspor non migas UMKM	185 975,0	255 126,1	301 629,8	293 840,9	339 190,5
- Ekspor non migas Usaha Mikro (Umi)	15 562,0	22 719,3	25 834,4	25 006,4	30 289,7
- Ekspor non migas Usaha Kecil (UK)	31 289,0	45 536,4	49 709,0	47 099,7	56 407,4
- Ekspor non migas Usaha Menengah (UM)	139 124,0	186 870,4	226 086,5	221 734,8	252 493,4

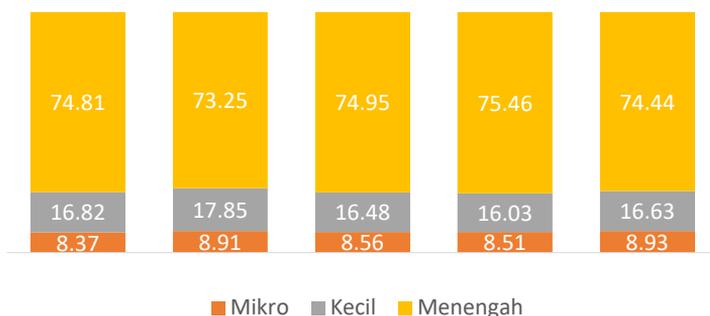
Catatan: * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Unit usaha menengah memiliki kontribusi yang paling besar dibanding unit usaha lainnya pada sektor UMKM. Tercatat, pada tahun 2019 unit usaha menengah mampu berkontribusi sebesar 74,44 persen dari total ekspor sektor UMKM. Selain unit usaha menengah, unit usaha kecil juga mampu memiliki kontribusi sekitar 16 persen setiap tahunnya, sedangkan unit usaha mikro hanya mampu berkontribusi sekitar 8 persen dari total ekspor sektor UMKM.

Gambar 5.4 Kontribusi Ekspor Nonmigas Unit Usaha UMKM, Tahun 2015-2019

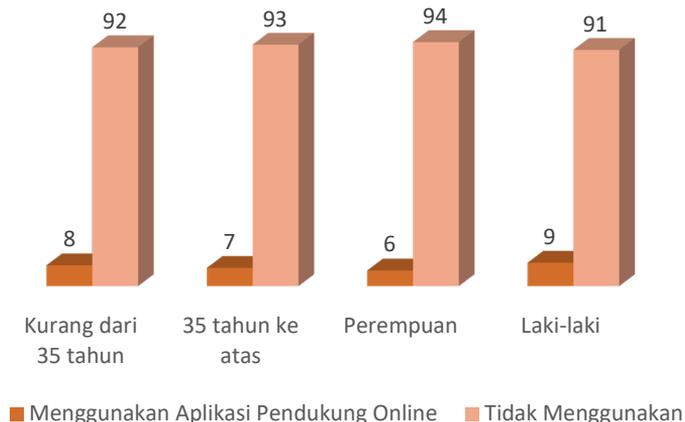


Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM

Transformasi Digital

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia mengakibatkan sistem perekonomian terganggu. Roda perekonomian terhambat akibat terbatasnya akses perdagangan dan diberlakukannya pembatasan pada aktivitas masyarakat. Pada masa ini, tidak banyak sektor ekonomi yang mampu bertahan, termasuk sektor UMKM. Hasil survei *Asian Development Bank* menyatakan, 88 persen pelaku usaha kecil kehabisan modal untuk keberlangsungan bisnisnya. Sekitar 60 persen UMKM sudah mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Dalam menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak pasti ini, seluruh sektor ekonomi dipaksa memutar otak untuk mencari berbagai cara agar dapat bertahan di masa pandemi ini. Sejumlah tantangan masih akan dihadapi oleh sektor UMKM, salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat yang diakibatkan pembatasan aktivitas masyarakat, selain itu masyarakat lebih memilih membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Berbagai cara dilakukan pelaku usaha UMKM untuk tetap bertahan. Salah satunya adalah dengan melakukan transformasi digital. Transformasi digital ini dilakukan agar pelaku UMKM dapat tetap berinteraksi dengan pembeli meskipun dibatasi oleh jarak. Di era digitalisasi saat ini, transformasi UMKM dari offline ke kombinasi *offline* dan *online* akan sangat menguntungkan. Pelaku usaha harus mulai beradaptasi dengan memanfaatkan berbagai *marketplace* untuk mempertahankan usahanya. Apabila transformasi ini berhasil dilakukan, kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian akan sangat positif. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha UMKM untuk melakukan transformasi digital.

Gambar 5.5 Penggunaan Aplikasi Pendukung Online Menurut Usia dan Jenis Kelamin, Tahun 2018



Keterangan: Aplikasi Pendukung *Online* meliputi *Software Development, Language, Human Resources Management, Marketing, Financial Literacy, Market Access* dan lainnya.

Sumber: *Asian Pacific Foundation of Canada, Survey of Entrepreneurs and MSMEs in Indonesia* (2018)

Jauh sebelum pandemi melanda, kesadaran pelaku UMKM terhadap literasi digital dapat dikatakan masih cukup rendah. Berdasarkan hasil *Survey of Entrepreneurs and MSMEs in Indonesia* yang dilakukan oleh *Asian Pacific Foundation of Canada* pada tahun 2018, didapatkan bahwa secara keseluruhan, pelaku usaha UMKM di Indonesia belum menggunakan aplikasi *online* dalam mendukung bisnisnya. Dari survei tersebut juga didapatkan bahwa pelaku usaha berusia 35 tahun keatas dan pelaku usaha perempuan cenderung kurang tertarik mengakses aplikasi belajar daring dalam mendukung bisnisnya. Hanya 7 persen pelaku usaha berusia 35 tahun ke atas dan 6 persen pelaku usaha perempuan yang mengakses aplikasi *online* dalam mendukung bisnisnya. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 98,7 persen pelaku usaha UMKM belum menggunakan website dalam menjalankan usahanya. Secara umum, responden pada survei ini melaporkan bahwa mereka tidak memiliki akses yang baik ke layanan pendukung tersebut.

Kondisi pandemi membuat usaha UMKM harus pandai-pandai melihat peluang usaha dengan cara berganti sektor agar dapat bertahan. Selain itu pentingnya literasi digital memaksa pelaku usaha UMKM untuk beradaptasi di masa pandemi ini. Pelaku usaha UMKM perlu melakukan transformasi digital pada unit usahanya agar mereka dapat mempertahankan usahanya. Semakin besarnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya transformasi digital, membuat banyak pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya pada berbagai *marketplace* selama masa pandemi. Platform Gojek mencatat lebih dari 250 ribu pelaku usaha bergabung dengan GoFood selama Bulan Maret hingga Oktober 2020. Berdasarkan riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia mengenai dampak sosial ekonomi Gojek selama Covid-19, 94 persen mitra baru GoFood merupakan pelaku UMKM. Sebanyak 43 persen dari total *merchant* baru GoFood itu baru pertamakali menjalankan bisnisnya.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM juga mencatat terjadi kenaikan jumlah pelaku UMKM yang menggunakan teknologi digital sebesar lebih dari 12 juta usaha pada Bulan Februari 2021. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 10 juta usaha di akhir tahun 2020. Peningkatan ini terjadi karena adanya dukungan pemerintah melalui pelatihan dan pendampingan yang bekerja sama dengan pelaku ekosistem digital atau *founder platform digital*. Pemerintah bersama stakeholder lainnya juga terus berupaya untuk mendorong pelaku UMKM agar melakukan transformasi digital dalam proses bisnisnya.

Kebijakan Masa Pandemi

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk melindungi sektor UMKM dari dampak pandemi Covid-19. Salah satunya melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional. Berdasarkan PP 23 No 2020, Program

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Program PEN juga sebagai respon Pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak langsung pada melemahnya sistem ekonomi. Program PEN juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan sistem perekonomian secara menyeluruh. Tujuan dengan adanya program PEN, diharapkan sistem perekonomian dapat bergerak menuju arah yang positif.

Pada tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,20 triliun untuk biaya penanganan Covid-19 yang terbagi ke dalam beberapa sektor, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, dan sektoral K/L dan Pemda. Dalam perkembangannya, pemerintah melalui kementerian keuangan melakukan klusterisasi ulang agar program PEN tetap relevan dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat sesuai kondisi terkini. Alokasi klaster untuk UMKM berubah dari semula Rp 114,82 triliun menjadi Rp 116,31 triliun. Klusterisasi ulang ini menunjukkan fokus pemerintah melalui optimalisasi APBN dalam menangani pandemi agar bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui program PEN dengan memberikan subsidi bunga bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non KUR. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan stimulus ekonomi bagi UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian dalam bentuk subsidi bunga/subsidi margin agar pelaku UMKM dapat bertahan dari dampak pandemi Covid-19. Program ini diberikan kepada pelaku UMKM yang memiliki pinjaman produktif dengan plafon maksimal Rp 10 miliar. Selain kebijakan terkait subsidi bunga, dukungan Pemerintah pada sektor UMKM juga dilakukan dengan memberikan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres PUM). Pada program ini, Pemerintah menyasar 12 juta pelaku usaha mikro.

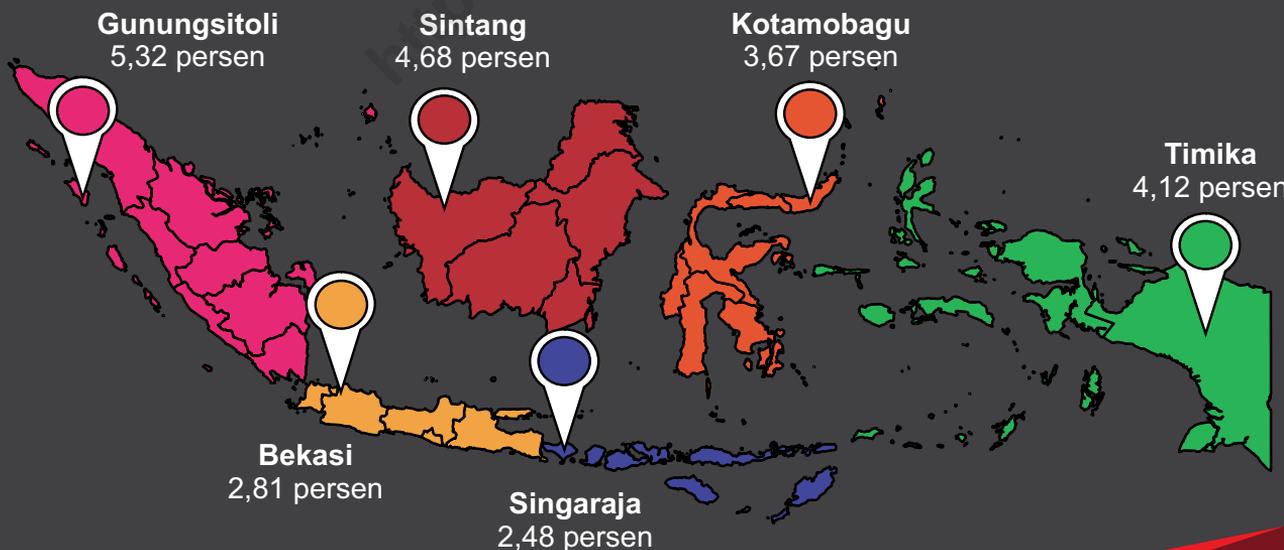
Inflasi dan Daya Beli Masyarakat

6



Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di tahun 2020 dengan andil sebesar **0,91 persen**

Kota dengan Laju Inflasi Tertinggi menurut Pulau



<https://www.bps.go.id>

Terjadinya inflasi disebabkan karena meningkatnya harga-harga yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok pengeluaran, semakin tinggi tingkat kenaikan harga maka nilai inflasi yang terjadi semakin tinggi pula. Pemerintah selalu menjaga agar nilai inflasi dapat dikendalikan dan tidak semakin tinggi, salah satunya dengan cara menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat di pasaran. Selain itu angka inflasi juga sebagai salah satu indikator makroekonomi untuk mengukur tingkat daya beli masyarakat yang terjadi dalam kondisi perekonomian didalam negeri. Dari angka inflasi dapat diperoleh informasi yang terjadi pada saat itu.

Inflasi dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga di tingkat konsumen. Pada tahun 2020 terjadi perubahan dalam penghitungan IHK yang berdasarkan pada hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2018. Hasil tersebut selanjutnya digunakan untuk penghitungan inflasi dengan tahun dasar 2018. SBH tahun 2018 dengan SBH tahun-tahun sebelumnya otomatis terjadi perubahan dari segi cakupan, komoditas, klasifikasi pengelompokan komoditas dan metodologi penghitungan IHK serta cakupan kota. BPS melakukan perubahan penghitungan yang disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Karena penghitungan dengan model lama tidak lagi sesuai sudah terjadi pergeseran kebutuhan yang terjadi di masyarakat pada saat ini. Pada tahun 2020 cakupan kota menjadi sebanyak 90 kota dari sebelumnya 82 kota, pengelompokan komoditasnya berubah dari 7 kelompok menjadi 11 kelompok dan 43 subkelompok.

Gambaran kondisi angka inflasi yang terjadi di tahun 2020 disaat kondisi negara dilanda wabah Covid 19 yang terjadi dari awal tahun sampai akhir tahun dan terus berlanjut sampai memasuki tahun 2021 dapat dilihat dari uraian dibawah ini.

Pergerakan Inflasi Inti dan Non Inti

Angka inflasi yang terjadi berdasarkan disagregasinya dibagi menjadi inflasi inti dan non inti. Angka inflasi non inti sendiri dibagi menjadi 2 bagian yaitu inflasi yang disebabkan harga bergejolak dan inflasi yang disebabkan oleh harga yang diatur oleh pemerintah. Inflasi harga bergejolak yang biasanya terjadi karena kondisi alam, pengaruh cuaca/iklim, misalnya pada saat musim penghujan dimana beberapa komoditas seperti sayur-sayuran akan cepat/mudah rusak/busuk atau gagal panen menyebabkan harga naik karena barang menjadi langka. Harga naik karena menghadapi hari Raya keagamaan. Kalau inflasi berdasarkan harga yang diatur pemerintah biasanya lebih stabil karena harga dikendalikan oleh pemerintah seperti harga BBM, Listrik, PDAM yang sebagian diberikan subsidi oleh pemerintah.

Jika dilihat secara komponen, laju inflasi menggambarkan terjadinya perbaikan dalam 3 tahun terakhir dilihat dari komponen-komponen yang

menurun, Pada tahun 2018 tingkat inflasi yang terjadi pada komponen inti mencapai 3,07 persen dan sumbangannya terhadap angka inflasi sebesar 1,87 persen. Pemerintah selalu menjaga agar angka inflasi tetap terjaga, angka inflasi inti di tahun 2019 tercatat 3,02 persen sedikit lebih rendah dari tahun 2018 dan sumbangan terhadap inflasi sebesar 1,85 persen. Kondisi di dalam negeri yang masih dihantui oleh wabah Covid 19 di tahun 2020 membuat daya beli masyarakat menurun, yang terjadi inflasi inti melambat dengan angka inflasi tercatat 1,60 dan andil terhadap inflasi sebesar 1,05 persen. Penurunan inflasi pada komponen inti disebabkan karena permintaan di dalam negeri yang menurun dan juga didukung oleh kebijakan pemerintah.

Penurunan juga terjadi pada komponen inflasi pada harga yang diatur pemerintah, pada tahun 2018 yaitu dari 3,36 persen turun drastis hingga mencapai 0,51 persen di tahun 2019 dengan andil inflasi hanya 0,10 persen. Penurunan disebabkan pengaruh kebijakan pemerintah sangat tinggi sekali pada komponen ini, dimana pada tahun 2019 pemerintah tidak menaikkan tarif dari beberapa komoditas yang harganya diatur pemerintah. Pemerintah tidak menaikkan harga BBM non subsidi bahkan harganya diturunkan dan pemerintah menambah subsidi untuk harga BBM bersubsidi. Pada tahun 2020 inflasi komponen harga yang diatur pemerintah hanya mencapai 0,25 persen dan sumbangannya terhadap angka inflasi hanya 0,04 persen. Penurunan komponen harga yang diatur pemerintah disebabkan karena penurunan tarif angkutan udara, dan karena Covid-19 banyak masyarakat yang mulai mengurangi/membatasi untuk bepergian antar kota/wilayah untuk berwisata. Selain itu harga solar dan bensin non subsidi juga diturunkan. Pemerintah menaikkan harga cukai rokok yang mengakibatkan kenaikan pada harga rokok kretek, rokok putih, rokok filter di pasaran yang berdampak pada penurunan konsumsi.

Dalam 3 tahun terakhir pergerakan barang bergejolak sangat berfluktuasi, disebabkan karena bahan makanan tertentu harganya sewaktu-waktu dapat melambung tinggi. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam menekan agar inflasi barang bergejolak tidak terlalu tinggi melakukan koordinasi dan penguatan kerjasama dengan dan antar daerah, pemerintah fokus untuk selalu menjaga pasokan bahan makanan sepanjang waktu dan menjaga kelancaran distribusi antar daerah. Pada tahun 2019 komponen inflasi barang bergejolak mencapai 4,30 persen dan sumbangannya terhadap inflasi sebesar 0,77 persen lebih tinggi dibanding tahun 2018 dengan angka inflasi hanya sebesar 3,39 persen. Covid-19 menjadi tantangan terberat bagi pemerintah dalam menangani perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan. Namun pemerintah mampu mengendalikan inflasi bahkan untuk inflasi dengan komponen barang bergejolak pemerintah mampu menekan hingga mencapai 3,62 persen dan sharenya sebesar 0,59 persen.

Tabel 6.1 Inflasi dan Sumbangan Inflasi Inti dan Non Inti, tahun 2018-2020

Tahun	Inflasi Inti		Bergejolak		Harga Diatur Pemerintah	
	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan	Inflasi	Sumbangan
2018	3.07	1.87	3.39	0.59	3.36	0.67
2019	3.02	1.85	4.30	0.77	0.51	0.10
2020	1.60	1.05	3.62	0.59	0.25	0.04

Sumber: Badan Pusat Statistik

Fenomena wabah Covid-19 yang masih berlanjut di tahun 2021 membuat komponen inflasi pergerakannya sangat berfluktuasi setiap bulannya. Pada Januari 2021 komponen barang bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,15 persen, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,14 persen dan komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi 0,19 persen. Kondisi di bulan Maret 2021 komponen inti mengalami deflasi 0,03 persen sedangkan komponen barang bergejolak dan harga yang diatur pemerintah masing-masing mencapai 0,56 persen dan 0,02 persen.

Memasuki triwulan ke dua ditahun 2021 pemerintah semakin membatasi kegiatan masyarakat karena wabah Covid-19 belum reda bahkan penularannya semakin cepat, karena munculnya varian baru yang lebih berbahaya. Terbatasnya aktivitas dan mobilitas masyarakat membuat kondisi perekonomian menurun dan terjadinya kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut membuat komponen inflasi yaitu komponen inti mengalami inflasi 0,14 persen dan untuk komponen barang bergejolak dan harga yang diatur pemerintah masing-masing mengalami deflasi sebesar 1,23 persen dan 0,21 persen.

Gambar 6.1 Inflasi Inti dan Non Inti



Sumber : Badan Pusat Statistik

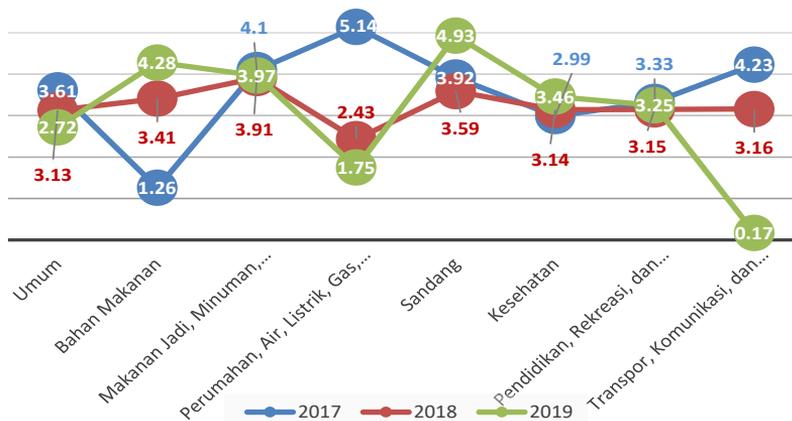
Pergerakan Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Inflasi yang terjadi di tahun 2017 mencapai 3,61 persen, masih terkendali dan berada pada kisaran target yang ditetapkan oleh pemerintah dan BI yaitu sebesar 4 persen \pm 1. Angka inflasi di tahun 2017 sebagian besar di pengaruhi oleh tingginya angka inflasi pada kelompok pengeluaran Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar yang mencapai 5,14 persen. Selain itu juga inflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan serta kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau cukup tinggi masing-masing mencapai 4,23 persen dan 4,10 persen.

Target atau sasaran inflasi yang ditetapkan oleh BI pada tahun 2018 yaitu 3,5 \pm 1, kondisi perekonomian di dalam negeri harus terus dijaga agar stabil begitu juga dengan segala kebutuhan masyarakat selalu menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan, keterjangkauan harga di masyarakat, serta kelancaran distribusi. Realisasi inflasi yang terjadi di tahun 2018 sedikit lebih rendah dari target BI yaitu mencapai 3,13 persen. Pada tahun 2018 semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi, inflasi tertinggi adalah pada kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau (3,91 persen) dan inflasi terbesar kedua adalah pada kelompok pengeluaran sandang (3,59 persen). Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terendah pada tahun 2018 adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar (2,43 persen).

Pada tahun 2019 realisasi inflasi yang terjadi 2,72 persen merupakan yang terendah selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Angka inflasi tersebut juga dibawah dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 3 persen. Jika dilihat dari kelompok pengeluaran, semua mengalami inflasi di tahun 2019. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran sandang dengan angka inflasi mencapai 4,93 persen dan diikuti oleh kelompok bahan makanan sebesar 4,28 persen. Inflasi terendah terjadi pada kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan dengan angka inflasi 0,17 persen.

Grafik 6.2. Laju Inflasi Indonesia Gabungan 82 Kota Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), Tahun 2017-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Mulai tahun 2020 terjadi perubahan penghitungan inflasi, yang sebelumnya hanya mengelompokkan pengeluaran dalam 7 kelompok dirubah menjadi 11 kelompok pengeluaran, selain itu cakupan wilayah juga berubah dari 82 kota menjadi 90 kota. Perubahan penghitungan inflasi dengan metode baru ternyata disambut dengan kondisi perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2020 yang di hantui oleh wabah Covid-19, yang berdampak begitu besar. Target inflasi yang ditetapkan pemerintah di tahun 2020 sebesar 3 persen, sedangkan inflasi yang dicapai dengan metode baru dan dengan kondisi yang terjadi saat itu hanya mencapai 1,68 persen dibawah dari target pemerintah. Rendahnya realisasi inflasi didukung oleh capaian inflasi seluruh kelompok pengeluaran yang terkendali. Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pada penurunan pendapatan yang pada gilirannya berimbas pada penurunan tingkat konsumsi masyarakat. Pasokan bahan makanan di dalam negeri sangat memadai, dan harga juga cukup stabil.

Jika dilihat perkembangan inflasi per bulan, sempat mengalami deflasi di Bulan Juli, Agustus dan September. Deflasi yang terjadi di bulan Juli, dan Agustus disebabkan perkembangan harga beberapa komoditas mengalami penurunan dan juga penurunan tarif angkutan udara membuat komponen pengeluaran makanan, minuman dan tembakau serta komponen pengeluaran transportasi mengalami deflasi. Sedangkan deflasi yang terjadi di Bulan September terjadi karena penurunan harga yang menyebabkan beberapa kelompok pengeluaran mengalami deflasi yaitu kelompok pengeluaran untuk Makanan, Minuman dan Tembakau, kelompok Pakaian dan Alas Kaki, kelompok Transportasi dan kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

IHK Desember 2020 meningkat sesuai pola musiman akhir tahun membuat inflasi naik. IHK Desember 2020 secara bulanan mengalami inflasi sebesar 0,45% (*m to m*), lebih tinggi dibandingkan realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,28% (*m to m*). Perkembangan inflasi yang lebih tinggi di bulan Desember tersebut dipengaruhi oleh pergerakan kelompok inflasi barang bergejolak disebabkan peningkatan harga sejumlah bahan pangan, antara lain cabai merah, cabai rawit, daging dan telur ayam ras, minyak goreng. Selain itu juga dipengaruhi harga yang diatur pemerintah yaitu meningkatnya tarif aneka angkutan.

Konsumsi masyarakat sepanjang tahun 2020 melemah cukup dalam seiring dengan penurunan daya beli masyarakat. Memasuki tahun 2021 konsumsi masyarakat masih relatif lambat akibat daya beli masyarakat rendah walaupun masih didukung oleh program bantuan sosial penanganan Covid-19 yang masih terus berjalan. Inflasi Januari 2021 lebih rendah dibanding bulan Desember tahun 2020 yaitu mencapai 0,26 persen. Hampir semua kelompok pengeluaran mengalami penurunan kecuali pada kelompok pengeluaran transportasi mengalami deflasi sebesar 0,30 persen. Penurunan angka inflasi terus berlanjut sampai Bulan Maret 2021 dengan angka inflasi hanya mencapai 0,08 persen.

Inflasi yang terjadi di Bulan Mei mencapai 0,32 persen lebih tinggi dibanding inflasi di Bulan April 2021 yang hanya sebesar 0,13 persen. Tingginya inflasi di Bulan Mei disebabkan adanya kenaikan permintaan dibulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri terutama untuk komoditas makanan. Semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi di Bulan Mei, Kelompok Pengeluaran Makanan mengalami inflasi sebesar 0,38 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran untuk transportasi mencapai 0,71 persen disusul kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,59 persen. Selain itu kelompok pengeluaran Pakaian dan Alas Kaki juga mengalami inflasi cukup tinggi mencapai 0,52 persen, serta kelompok pengeluaran Penyedia Makan dan Minuman/Restoran dengan inflasi sebesar 0,44 persen.

Pada Bulan Juni 2021 terjadi deflasi sebesar 0.16 persen, disebabkan karena pasca ramadhan dan hari raya Idul Fitri menyebabkan beberapa komoditas berang mengalami penurunan harga. Beberapa kelompok pengeluaran juga mengalami deflasi yaitu kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, kelompok Pakaian dan Alas Kaki dan Kelompok Transportasi masing-masing sebesar 0,71 persen, 0,12 persen dan 0,35 persen.

Tabel 6.2. Laju Inflasi Indonesia Gabungan 90 Kota Menurut Kelompok Pengeluaran Januari 2020 - Juni 2021 (2018=100)

Tahun/Bulan	Makanan, Minuman, dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi
2020	3.63	1.01	0.35	1.03	2.79	-0.85
Januari	1.62	0.12	0.13	0.09	0.42	-0.89
Februari	0.95	0.21	0.09	0.06	0.34	-0.37
Maret	0.10	0.12	0.02	0.28	0.21	-0.43
April	0.09	0.04	0.09	0.09	0.23	-0.42
Mei	-0.32	0.09	0.04	0.10	0.27	0.87
Juni	0.47	0.02	-0.04	-0.03	0.13	0.41
Juli	-0.73	0.09	-0.01	0.10	0.29	-0.17
Agustus	-0.86	0.07	0.02	0.08	0.06	-0.14
September	-0.37	-0.01	0.07	0.15	0.16	-0.33
Oktober	0.29	0.09	-0.04	-0.03	0.15	-0.14
November	0.86	0.14	-0.04	0.08	0.32	0.30
Desember	1.49	0.03	0.03	0.08	0.19	0.46
2021	0.89	0.17	0.07	0.51	0.38	0.00
Januari	0.81	0.11	0.03	0.15	0.19	-0.30
Februari	0.07	0.06	0.04	0.36	0.19	0.30
Maret	0.40	0.02	0.04	0.10	0.08	-0.25
April	0.20	0.19	0.07	0.26	0.18	0.00
Mei	0.38	0.52	0.03	0.27	0.07	0.71
Juni	-0.71	-0.12	0.07	0.17	0.03	-0.35

Tahun/Bulan	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	Umum
2020	-0.35	0.73	1.40	2.26	5.80	1.68
Januari	0.04	0.18	-0.14	0.19	0.46	0.39
Februari	-0.01	0.07	0.02	0.17	0.41	0.28
Maret	-0.09	0.02	0.00	0.36	0.99	0.10
April	-0.34	0.03	0.00	0.18	1.20	0.08
Mei	0.08	0.06	0.00	0.08	0.12	0.07
Juni	-0.06	0.13	0.00	0.28	-0.08	0.18
Juli	0.02	0.15	0.16	0.15	0.93	-0.10
Agustus	0.03	0.05	0.57	0.13	2.02	-0.05
September	-0.01	0.00	0.62	0.13	0.25	-0.05
Oktober	-0.02	0.02	0.04	0.19	-0.11	0.07
November	0.02	0.04	0.12	0.11	-0.23	0.28
Desember	-0.01	-0.01	0.00	0.27	-0.29	0.45
2021	0.01	0.11	0.04	0.61	0.09	0.36
Januari	0.04	0.05	0.04	0.33	0.23	0.26
Februari	-0.03	0.06	0.00	0.28	-0.14	0.10
Maret	-0.03	0.05	0.01	0.17	-0.39	0.08
April	0.00	0.20	0.01	0.21	0.29	0.13
Mei	0.01	0.12	0.01	0.44	0.59	0.32
Juni	-0.01	0.23	0.03	0.24	0.35	-0.16

Catatan : Sejak Januari 2020, IHK berdasarkan pola konsumsi didapat dari Survei Biaya Hidup 2018 (2018=100) di 90 kota

Sumber : Badan Pusat Statistik

Ketidakpastian yang tinggi dibidang perekonomian membawa kekhawatiran pemerintah dalam menangani inflasi di tahun 2020, namun pemerintah tetap berusaha agar inflasi dapat dikendalikan dan masih berada pada kisaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan BI. Berdasarkan angka inflasi yang terjadi di tahun 2020, ternyata sumbangan terbesar berasal dari kelompok makann, minuman dan tembakau yang menyumbang sebesar 0,91 persen dengan angka inflasi pada kelompok pengeluaran tersebut sebesar 3,63 persen.

Sumbangan terbesar kedua adalah kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mencapai 0,35 persen dengan angka inflasi sebesar 5,80 persen. Selain itu untuk kelompok pengeluaran Penyedia makan, dan minum/restoran menyumbang angka inflasi sebesar 0,20 persen dengan angka inflasi sebesar 2,26 persen. Pada tahun 2020 kelompok pengeluaran transportasi dan kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,85 persen dan 0,35 persen.

Beberapa kelompok pengeluaran di tahun 2020 mengalami deflasi yaitu kelompok pengeluaran transportasi mencapai 0,85 persen dan sumbangannya terhadap angka inflasi -0,11 persen. Kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami deflasi adalah kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,35 persen dan sumbangannya pada angka inflasi nasional -0,02 persen.

Tabel 6.3 Sumbangan Kelompok Pengeluaran Terhadap Inflasi Nasional (persen) tahun 2020

Kelompok Pengeluarn	Inflasi	Sumbangan terhadap Inflasi
Makanan, Minuman, dan Tembakau	3.63	0.91
Pakaian dan Alas Kaki	1.01	0.05
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.35	0.07
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.03	0.06
Kesehatan	2.79	0.07
Transportasi	-0.85	-0.11
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.35	-0.02
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0.73	0.02
Pendidikan	1.40	0.08
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	2.26	0.20
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5.80	0.35
Umum	1.68	

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS)

Laju Inflasi yang Terjadi di Kota IHK di Saat Pandemi

Laju inflasi yang terjadi di 82 kota di Indonesia pada tahun 2018, sebagian besar kota atau sekitar 32 kota mengalami inflasi lebih tinggi dari inflasi nasional dan 50 kota dengan nilai inflasi dibawah angka inflasi nasional. Kota-kota di Pulau Sumatera sebagian besar mengalami inflasi dibawah angka inflasi nasional dan hanya ada 2 kota yang angka inflasinya diatas angka inflasi nasional yaitu Kota Batam dan Pangkal Pinang. Namun ada beberapa Kota dengan angka inflasi cukup tinggi dengan angka inflasi diatas 5 persen adalah Kota Tarakan, Merauke, Manokwari, Palu dan Papua. Jakarta sendiri sebagai pusat ibukota negara pada tahun 2018 mengalami inflasi melebihi inflasi nasional yaitu mencapai 3,27 persen.

Angka Inflasi nasional tahun 2019 adalah yang terendah dalam beberapa tahun terakhir tapi inflasi yang rendah tidak diikuti oleh 82 kota di Indonesia. Ternyata masih ada 22 kota dengan angka inflasi diatas angka inflasi nasional. Bahkan di tahun 2019 ada satu kota yang mengalami deflasi yaitu Kota Merauke (-0,65 persen). Kota yang mengalami inflasi tertinggi di tahun 2019 adalah Kota Manokwari (4,76 persen) diikuti oleh Kota Meulaboh dan Banjarmasin masing-masing dengan angka inflasi 4,28 persen dan 4,15 persen. Sedangkan Kota Jakarta sebagai pusat ibukota negara mengalami angka inflasi masih diatas angka inflasi nasional yaitu 3,23 persen.

Penyebaran wabah Covid-19 yang makin cepat dan mulai merambah seluruh wilayah Indonesia membuat pemerintah mulai melakukan pembatasan kegiatan dimasyarakat sehingga di tahun 2020 mulai berkurangnya mobilitas dan aktivitas masyarakat, konsumsi, produksi, dan distribusi menjadi terbatas. Namun pemerintah terus berupaya menjaga harga komoditas dimasyarakat dengan cara menjaga ketersediaan pasokan bahan makanan dimasyarakat, meningkatkan kelancaran arus produksi dan distribusi bahan pangan. Pada tahun 2020 cakupan kota dari 82 kota menjadi 90 kota ada penambahan 8 kota. Pulau Jawa menjadi pulau yang paling rawan dan sangat tinggi penyebaran wabah Covid-19, dari 26 kota di Pulau Jawa 10 kota mengalami inflasi dibawah angka inflasi nasional. Bahkan Kota Jakarta yang selalu mengalami inflasi diatas angka nasional ditahun 2020 mengalami inflasi dibawah angka nasional yaitu hanya mencapai 1,59 persen.

Selain itu ada 2 kota di tahun 2020 yang mengalami deflasi yaitu Kota Manado (-0,18 persen) dan Kota Manokwari (-0,89 persen). Namun, di tengah angka inflasi nasional yang rendah masih terjadi di beberapa kota mengalami inflasi cukup tinggi. Kota-kota dengan angka inflasi diatas 4 persen yaitu Kota Gunung Sitoli (5,32 persen), Kota Sintang (4,68 persen), Kota Meulaboh (4,24 persen), dan Kota Timika (4,12 persen).

Tabel 6.4 Laju Inflasi 90 Kota di Indonesia (2018=100) Tahun 2018-2021 (Januari-Juni)

Kota	2018	2019	2020	2021					
				Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni
Meulaboh	0.96	4.28	4.24	0,83	-0,95	-0,57	-0.16	0.63	-0.06
Banda Aceh	1.93	1.38	3.46	0,77	-0,56	-0,45	0.28	0.45	-0.05
Lhokseumawe	2.05	1.20	3.55	0,80	-0,70	-0,09	0.42	0.61	-0.07
Sibolga	2.86	2.58	2.42	0,74	-0,68	-0,29	0.11	-0.19	0.31
Pematang Siantar	2.15	1.54	2.78	1,13	-0,46	-0,23	0.50	0.59	0.23
Medan	1.00	2.43	1.76	0,38	-0,33	-0,03	0.07	0.31	0.03
Padangsidepuan	2.22	2.15	3.27	0,38	-0,28	-0,57	0.14	0.45	-0.26
Gunungsitoli	-	-	5.32	1,08	-1,55	-0,54	-0.44	-0.72	-0.28
Padang	2.55	1.72	2.12	0,10	-0,42	0,32	-0.04	0.15	-0.16
Bukittinggi	2.99	1.31	2.02	0,30	-0,11	0,31	0.69	0.94	-0.26
Tembilahan	2.64	2.40	3.30	0,30	-0,10	-0,07	0.52	0.53	-0.32
Pekanbaru	2.54	2.56	2.24	0,47	-0,33	0,15	0.39	0.35	0.01

Lanjutan

Kota	2018	2019	2020	2021					
				Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni
Dumai	1.85	1.28	2.88	0,40	-0,38	-0,04	0.23	0.88	0.02
Bungo	2.46	2.61	2.32	0,50	-0,46	0,35	0.12	0.33	-0.39
Jambi	3.02	1.27	3.09	0,68	-0,47	0,33	0.19	0.58	-0.20
Palembang	2.78	2.06	1.50	0,43	-0,08	0,17	0.86	0.84	-0.01
Lubuklinggau	2.42	2.10	1.97	0,30	-0,10	-0,03	0.49	0.84	-0.08
Bengkulu	2.35	2.91	0.89	0,39	0,14	0,23	0.87	0.99	0.31
Bandar Lampung	2.92	3.53	1.93	0,80	0,12	-0,19	0.55	0.65	0.20
Metro	1.64	2.97	2.53	0,53	0,29	-0,33	0.35	0.99	0.07
Tanjung Pandan	2.72	3.19	2.11	1,03	0,28	-0,18	1.12	1.64	0.36
Pangkal Pinang	3.45	2.31	0.52	1,17	-0,33	-0,12	1.02	1.25	0.23
Batam	3.65	1.97	1.12	0,68	-0,60	-0,02	0,21	0.47	-0.15
Tanjung Pinang	2.36	2.40	1.66	0,56	-0,59	-0,42	-0.81	-0.78	-0.02
Jakarta	3.27	3.23	1.59	0,14	0,18	0,06	0.46	0.88	-0.27
Bogor	3.69	3.02	2.18	0,19	0,24	0,06	0.73	1.13	-0.17
Sukabumi	2.95	2.33	1.84	0,26	0,07	0,19	0.81	0.91	-0.12
Bandung	3.76	2.78	1.75	0,10	0,09	0,15	0.53	0.94	-0.09
Cirebon	2.80	2.00	1.16	0,08	0,07	0,07	0.54	0.88	-0.17
Bekasi	4.23	4.28	2.81	0,19	0,23	-0,10	0.45	0.70	-0.33
Depok	2.86	3.29	1.78	0,14	0,20	0,05	0.71	1.37	-0.29
Tasikmalaya	2.30	1.72	1.61	0,25	0,02	-0,06	0.59	0.69	-0.05
Cilacap	3.21	2.19	1.71	0,27	0,12	0,03	0.47	0.72	-0.25
Purwokerto	2.98	2.28	1.90	0,35	0,15	0,06	0.60	0.79	-0.20
Kudus	3.11	3.02	1.24	0,27	0,20	0,08	0.48	0.69	-0.09
Surakarta	2.45	2.94	1.38	0,68	0,26	0,16	1.12	1.18	-0.22
Semarang	2.76	2.93	1.49	0,14	0,16	0,08	0.43	0.60	-0.14
Tegal	3.08	2.56	2.36	-0,17	0,25	-0,03	0.12	0.38	-0.36
Yogyakarta	2.66	2.77	1.40	0,54	0,14	0,08	0.77	0.84	0.05
Jember	2.95	2.04	2.08	0,25	0,12	0,45	0.91	1.02	-0.10
Banyuwangi	2.04	2.32	1.74	0,18	0,09	0,31	0.60	0.87	-0.30
Sumenep	2.82	2.04	2.37	0,06	0,02	0,12	0.73	1.15	-0.58
Kediri	1.97	1.83	1.93	0,16	0,07	0,15	0.69	0.83	-0.10
Malang	2.98	1.93	1.42	0,06	-0,01	0,08	0.22	0.37	0.08
Probolinggo	2.18	1.99	1.88	0,28	0,05	0,18	0.59	0.70	-0.17
Madiun	2.71	2.20	1.86	0,60	0,08	0,19	0.93	0.98	-0.21
Surabaya	3.03	2.21	1.33	0,37	0,29	0,09	0.84	1.17	-0.17
Tangerang	3.46	3.31	1.18	0,32	0,26	0,01	0.74	0.96	-0.22
Cilegon	2.73	3.54	2.62	0,34	0,25	0,29	1.10	1.30	-0.02
Serang	3.78	3.06	1.91	0,46	0,19	0,12	0.96	1.32	-0.05
Singaraja	1.88	2.42	2.48	0,94	0,22	0,81	1.84	1.33	-0.52
Denpasar	3.40	2.37	0.55	0,77	-0,20	0,47	1.50	0.90	-0.36
Mataram	3.15	1.76	0.58	0,86	0,34	0,34	1.30	1.57	-0.31

Kota	2018	2019	2020	2021					
				Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni
Bima	3.22	2.27	0.64	0,10	-0,14	0,19	0.45	1.29	-0.32
Waingapu	-	-	1.51	0,24	0,57	-0,47	1.25	1.92	-0.63
Maumere	2.00	1.84	2.24	-0,57	0,85	-0,27	0.04	-0.17	0.53
Kupang	3.23	0.50	0.29	0,55	0,37	-0,35	1.48	2.23	-0.89
Sintang	-	-	4.68	-0,43	-0,13	-0,39	-0.84	-0.96	0.25
Pontianak	3.99	2.64	2.11	-0,01	0,09	-0,05	0.13	0.04	0.82
Singkawang	3.18	1.08	2.72	-0,04	0,25	-0,50	-0.12	-0.02	1.36
Sampit	6.02	2.02	1.62	0,09	-0,02	0,04	0.56	0.96	0.54
Palangka Raya	3.68	2.70	0.71	0,09	0,33	0,18	0.54	1.00	0.08
Kotabaru	-	-	1.44	0,25	0,09	0,68	1.25	1.95	-0.42
Tanjung	2.60	2.15	2.05	0,03	0,33	0,21	0.50	0.81	0.36
Banjarmasin	2.63	4.15	1.67	-0,23	0,59	0,01	0.14	1.11	-0.41
Balikpapan	3.13	1.88	0.65	0,02	0,28	0,16	0.48	0.74	0.47
Samarinda	3.32	1.49	0.86	0,24	0,11	0,24	0.84	1.07	0.28
Tanjung Selor	-	-	1.96	0,49	-0,13	0,64	0.85	1.41	0.01
Tarakan	5.00	1.47	1.15	-0,85	-0,01	-0,19	-0.32	0.87	-0.18
Manado	3.83	3.52	-0.18	0,58	0,04	0,17	1.75	1.45	0.07
Kotamobagu	-	-	3.67	0,23	-0,21	-0,33	0.99	1.31	-0.09
Luwuk	-	-	0.83	0,21	-0,06	0,13	0.38	1.16	0.12
Palu	6.46	2.30	1.81	0,25	0,16	0,21	0.71	1.39	-0.86
Bulukumba	3.85	2.25	2.30	0,07	0,24	0,11	0.85	1.26	-0.04
Watampone	4.69	1.64	1.89	0,08	0,53	-0,10	1.30	1.66	0.09
Makassar	3.48	2.43	2.13	0,31	0,34	0,44	1.35	1.61	-0.31
Parepare	1.96	2.45	1.61	0,27	0,31	0,10	1.61	2.49	-0.04
Palopo	4.19	1.91	1.21	0,26	0,11	-0,01	0.78	1.78	-0.05
Kendari	2.55	3.22	1.37	-0,24	-0,11	0,39	0.25	1.41	0.28
Bau-Bau	2.92	1.35	1.25	-0,92	0,53	-0,99	-0.58	0.44	-0.51
Gorontalo	2.15	2.87	0.81	0,61	0,22	0,60	1.79	2.10	0.08
Mamuju	1.80	1.43	1.78	1,43	1,12	0,36	2.72	4.11	0.35
Ambon	3.53	2.06	0.09	0,02	-0,43	0,38	0.13	0.91	0.84
Tual	1.62	2.34	2.06	-0,03	-0,08	0,20	0.61	0.72	0.63
Ternate	4.12	2.02	2.13	-0,51	0,54	0,08	0.36	0.80	-0.22
Manokwari	6.02	4.76	-0.89	-0,58	-0,21	0,93	-0.15	1.67	0.99
Sorong	4.95	1.01	1.17	0,41	-0,53	0,74	0.81	1.65	1.12
Merauke	5.42	-0.65	1.06	-0,09	0,46	0,85	1.19	1.29	0.28
Timika	-	-	4.12	-0,07	0,13	-0,41	0.91	0.07	0.35
Jayapura	6.70	0.60	0.75	-0,42	0,72	1,07	0.10	-0.24	-0.38
Indonesia	3.13	2.72	1.68	0,26	0,10	0,08	0.13	0.32	-0.16

Catatan : Mulai Tahun 2020, digunakan tahun dasar 2018, IHK dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil SBH di 90 kota tahun 2018 (2018=100)

Sumber : Badan Pusat Statistik

Memasuki tahun 2021 kondisi di dalam negeri masih disibukkan penularan wabah Covid-19 yang makin cepat. Belum terkendali wabah tersebut membuat pemerintah melakukan langkah vaksinasi bagi semua penduduk tapi tidak serta merta dapat dilakukan serempak. Vaksinasi Covid-19 sementara dilakukan secara bertahap, karena Indonesia belum mampu membuat vaksinasi sendiri sehingga harus mengimpor dari beberapa negara, pertama vaksinasi diimpor dari negara Tiongkok.

Kondisi ini membuat angka inflasi didalam negeri bergerak lambat, dimana pada Januari 2021 inflasi hanya mencapai 0,26 persen. Secara wilayah dari 90 kota ternyata 14 kota mengalami deflasi, dengan deflasi tertinggi terjadi di Kota Bau-Bau mencapai 0,92 persen dan kedua adalah Kota Tarakan dengan deflasi mencapai 0,85 persen. Sedangkan untuk inflasi tertinggi terjadi di Kota Mamuju sebesar 1,43 persen, Selain itu juga di Kota Pangkal Pinang dan Kota Pematang siantar masing-masing sebesar 1,17 persen dan 1,13 persen.

Pada Bulan Februari 2021 dari 90 kota ternyata 34 kota mengalami deflasi dan sisanya mengalami inflasi. Dari 26 Kota IHK di Pulau Sumatera sebagian besar kota yaitu sebanyak 20 kota mengalami deflasi. Deflasi terbesar terjadi di Kota Gunungsitolo sebesar 1,55 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Mamuju sebesar 1,12 persen. Kalau dilihat dari 90 IHK Kota di Bulan Maret 2021 ternyata 58 kota mengalami inflasi dan kota sisanya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Jayapura sebesar 1,07 persen dan deflasi tertinggi terjadi di Kota Bau-Bau -0,99.

Inflasi di bulan April dan Mei 2021 mulai merangkak naik, kenaikan ini disebabkan pengaruh periodik yang terjadi setiap tahun disaat menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri beberapa bahan komoditi harganya merangkak naik dan permintaan masyarakat juga meningkat. Inflasi Kota-kota IHK juga mengalami kenaikan dari 90 kota, di Bulan April 72 kota mengalami inflasi diatas angka nasional dan ada 9 kota yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Mamuju. Pada Bulan Mei 2021 dari 90 kota IHK sebagian besar mengalami inflasi, dimana 79 kota mengalami inflasi diatas angka inflasi nasional dan 7 kota mengalami deflasi. Bulan Juni 2021 setelah selesai perayaan Hari Raya Idul Fitri barang-barang mulai mengalami penurunan harga kembali dan permintaan masyarakat juga kembali menurun, masyarakat mulai menyimpan/menabung uangnya, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya deflasi. Deflasi juga terjadi di kota-kota IHK, dimana dari 90 kota sebanyak 56 kota mengalami deflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang mencapai 0,89 persen, selain itu beberapa kota masih mengalami inflasi dan inflasi tertinggi terjadi di Kota Singkawang mencapai 1,36 persen.

Inflasi, Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi

Diawal tahun 2020 pemerintah sangat optimis akan pertumbuhan ekonomi yang akan lebih baik dibandingkan tahun 2019, dimana indikator

ekonomi global menunjukkan arah perbaikan diperkirakan dapat menjadi faktor positif pendorong kinerja perekonomian nasional di tahun 2020. Namun baru berjalan 3 bulan kondisi di dalam negeri mulai dihantui oleh masuknya wabah Covid-19 yang secara drastis merubah target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena wabah ini dengan cepat memberikan dampak negatif pada kondisi perekonomian di dalam negeri. Secara cepat perekonomian global yang diharapkan berjalan positif ternyata terkena imbas dari wabah Covid-19, aktivitas pariwisata terhenti banyak negara yang menutup negaranya untuk dikunjungi termasuk Indonesia, kegiatan ekspor-impor berjalan lambat, investasi, serta sektor keuangan terganggu. Gangguan ekonomi baik dari sisi permintaan maupun penawaran memberikan tekanan berat terhadap perekonomian nasional, terutama sektor-sektor produksi dan menurunnya tingkat konsumsi masyarakat.

Pandemi Covid-19 menciptakan kondisi luar biasa sulit diperkirakan karena belum pernah terjadi sebelumnya dan dampak yang ditimbulkan sangat signifikan terhadap aktivitas perekonomian. Membuat pemerintah terus memantau baik dari segi kesehatan masyarakat juga dari sisi kondisi perekonomian. Kondisi di tahun 2020 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mengalami kontraksi hingga mencapai 2,07 persen. Hampir semua sektor mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Namun ada sektor yang masih mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor informasi dan komunikasi.

Sektor informasi dan komunikasi tumbuh positif karena adanya pembatasan *physical distancing* dimana sebagian besar kegiatan dilakukan dirumah sehingga banyak masyarakat mengandalkan handphone sebagai alat komunikasi dan informasi yang membuat permintaan dan pembelian pulsa meningkat. Begitu juga yang terjadi pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang juga mengalami peningkatan disebabkan karena banyak masyarakat yang sakit akibat wabah Covid-19 membuat sektor tersebut mengalami peningkatan yang tinggi.

Memasuki tahun 2021 kondisi perekonomian Indonesia belum pulih masih dihantui wabah Covid-19 yang belum pergi dan masih terus berlanjut. Bahkan terjadi gelombang ke dua kasus Covid-19 yang menunjukkan lonjakan penyebarannya. Membuat pemerintah kembali mengeluarkan pembatasan bagi masyarakat yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan percepat proses vaksinasi bagi masyarakat.

Tantangan ekonomi global sangat mempengaruhi perdagangan internasional, karena banyak negara yang terkena dampak Covid-19 mengalami krisis baik krisis kesehatan sampai ke krisis ekonomi dan keuangan. Kesenjangan output yang cukup besar, tingginya Indeks Harga Konsumen untuk barang-barang tertentu dan kemampuan pemerintah untuk mengelola harga juga bisa mengakibatkan lambatnya tingkat inflasi

Pemerintah selalu berusaha agar inflasi yang terjadi setiap tahun berada pada koridor yang telah disepakati oleh pemerintah dan BI. Agar inflasi dapat terjaga dan dapat terkendali maka dibangunlah komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan pasokan bahan makanan, dan pendistribusiannya. Pemerintah pusat dan daerah selalu menjaga agar pasokan bahan makanan selalu tersedia atau terpenuhi di masing-masing wilayah, pengendalian harga untuk setiap bahan makanan dan komoditas barang tertentu selalu dijaga, serta pendistribusian yang selalu dapat berjalan lancar.

Penyebaran virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* di tahun 2020 memang berdampak sangat signifikan, Pemerintah dituntut untuk dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Di tengah kondisi yang sulit pemerintah berusaha meningkatkan kinerja investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan menjaga ekspor. Namun sepanjang pertumbuhan ekonomi masih negatif, biasanya inflasi akan rendah. Disepanjang tahun 2021 sampai pertengahan tahun atau disemester I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan pertumbuhan positif secara *m to m* atau *Y o Y*, pertumbuhan ekonomi yang mulai positif dan daya beli masyarakat masih belum membaik karena masih dipengaruhi oleh pandemi yang belum pergi sehingga membuat inflasi yang terjadi masih rendah dibawah 1 persen. Bahkan memasuki bulan ke enam di tahun 2021 kembali terjadi deflasi.

Perdagangan Indonesia

7



Total Nilai Ekspor Indonesia 2020 adalah
US\$ 163.191,8 juta
▼ **2,68%**
dibanding 2019



Nilai Ekspor Indonesia 2020 Menurut Negara Tujuan Utama (Juta US\$)



Nilai Impor Indonesia 2020 Menurut Negara Asal Utama (Juta US\$)



Total Nilai Impor Indonesia 2020 adalah
US\$ 141.568,8 juta
▼ **17,34%**
dibanding 2019

<https://www.bps.go.id>

Perdagangan internasional berperan penting pada aktivitas ekonomi suatu negara. Selain menjadi komponen dalam pertumbuhan ekonomi, kinerja ekspor impor juga memengaruhi posisi cadangan devisa negara. Selain itu, perdagangan internasional juga berperan dalam menjaga pasokan komoditas yang diperlukan dalam negeri. Tantangan dalam aktivitas perdagangan internasional di tahun 2020 meningkat dengan adanya pandemi Covid-19 yang dialami hampir seluruh negara di dunia. Penyebaran pandemi Covid-19 memaksa banyak negara melakukan pembatasan seperti *lockdown*, larangan bepergian, dan *physical distancing* demi menjamin kesehatan masyarakatnya. Hal tersebut tentu berpengaruh pada aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan internasional.

Kinerja ekspor impor antar negara terganggu, terutama pada masa awal pandemi Covid-19. Pada Bulan April 2020, WTO menginformasikan bahwa setidaknya terdapat 80 negara yang melakukan pembatasan dan larangan ekspor akibat pandemi Covid-19. Antara lain negara membatasi bahkan melarang ekspor alat-alat kesehatan seperti masker serta kebutuhan tambahan seperti tisu toilet.

Pemerintah Indonesia juga sempat memberlakukan pelarangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, Alat Pelindung Diri (APD), dan masker pada awal Bulan April 2020 melalui Permendag Nomor 23 Tahun 2020 jo. Permendag Nomor 34 Tahun 2020. Larangan sementara tersebut diterbitkan guna menjamin pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di dalam negeri. Namun seiring dengan penyesuaian produksi dari industri alat kesehatan di dalam negeri, Kementerian Perdagangan kembali menerbitkan Persetujuan Ekspor (PE) untuk komoditas tersebut melalui Permendag Nomor 57 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD).

Pemerintah tentu tidak tinggal diam dalam pengendalian penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres No. 12 Tahun 2020. Pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal pandemi dan dilanjutkan PSBB transisi dengan penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, berbagai upaya juga dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi nasional, salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus baik berupa insentif fiskal maupun non fiskal bagi industri dalam negeri untuk menghadapi tekanan ekonomi di masa pandemi.

Dari segi fiskal, pemerintah memberikan insentif pajak untuk dunia usaha, termasuk usaha yang merupakan Wajib Pajak yang menerima Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Wajib Pajak Kawasan Berikat, dan sektor lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020. Bentuk insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah antara lain: insentif pajak PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (sebesar 30 persen

berdasarkan PMK sebelumnya dan sebesar 50 persen berdasarkan PMK Nomor 110/PMK.03/2020), serta pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

Kebijakan non fiskal juga diupayakan pemerintah untuk memberikan dorongan terhadap pemulihan serta peningkatan aktivitas ekspor impor. Kebijakan fasilitasi ekspor yang dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19, antara lain: Penyederhanaan larangan dan/atau pembatasan (lartas) ekspor dan percepatan proses ekspor melalui *national logistics ecosystem*; pemberian bantuan dana stimulus ke perbankan yang selama ini menyalurkan ke petani guna pemanfaatan resi gudang untuk penyimpanan hasil panen komoditas ekspor; *business matching* secara virtual oleh perwakilan perdagangan Indonesia; usulan insentif berupa asuransi/kredit ekspor/pembiayaan lainnya kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bagi eksportir terdampak Covid-19; dan mengadakan *showcase* produk ekspor serta memberikan informasi pasar bagi eksportir nasional dan pembeli luar negeri. Selain itu, pemerintah juga melakukan penyederhanaan dan pengurangan lartas untuk kegiatan impor khususnya bahan baku guna meningkatkan kelancaran ketersediaan bahan baku dalam negeri.

Secara garis besar, kinerja ekspor impor Indonesia terdampak adanya pandemi Covid-19. Penurunan ekspor impor mulai terjadi pada Bulan April 2020 dan mencapai titik terendah di Bulan Mei 2020. Namun dengan adanya perbaikan penanganan kesehatan serta pelonggaran pembatasan aktivitas ekonomi dengan penerapan protokol kesehatan, aktivitas ekspor impor kembali mulai bergeliat. Kebijakan fiskal berupa insentif pajak juga berperan penting dalam pemulihan ekonomi. Kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, mengingat hasil survei BPS bahwa sekitar 4 dari 10 perusahaan UMB membutuhkan bantuan berupa penundaan pembayaran pajak. Selain itu, berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat mendorong daya beli masyarakat. Aktivitas ekonomi kembali berjalan dengan penerapan protokol kesehatan berhasil mendorong pertumbuhan ekspor impor hingga akhir tahun 2020. Memasuki tahun 2021, dengan adanya program vaksinasi dan penanganan kesehatan yang jauh lebih baik, diharapkan perekonomian Indonesia dapat terus tumbuh.

Neraca Perdagangan Surplus di Masa Pandemi

Neraca perdagangan Indonesia selama tahun 2020 tercatat mengalami surplus hingga US\$ 21,62 miliar, pencapaian tertinggi sejak sembilan tahun terakhir (cnbcindonesia.com, 2021). Kondisi tersebut meningkat tajam dibanding tahun 2019 yang mengalami defisit hingga US\$ 3,59 miliar. Seperti di tahun sebelumnya, neraca non migas berkontribusi pada perbaikan neraca perdagangan Indonesia. Di tahun 2020 neraca non migas tercatat surplus hingga US\$ 27,63 miliar, meningkat tajam dibanding tahun 2019 yang tercatat surplus sebesar US\$ 6,50 miliar. Sedangkan neraca migas mengalami defisit US\$ 6,01 miliar. Meskipun demikian, defisit neraca migas lebih baik dibandingkan tahun 2019 yang defisitnya mencapai US\$ 10,10 miliar.

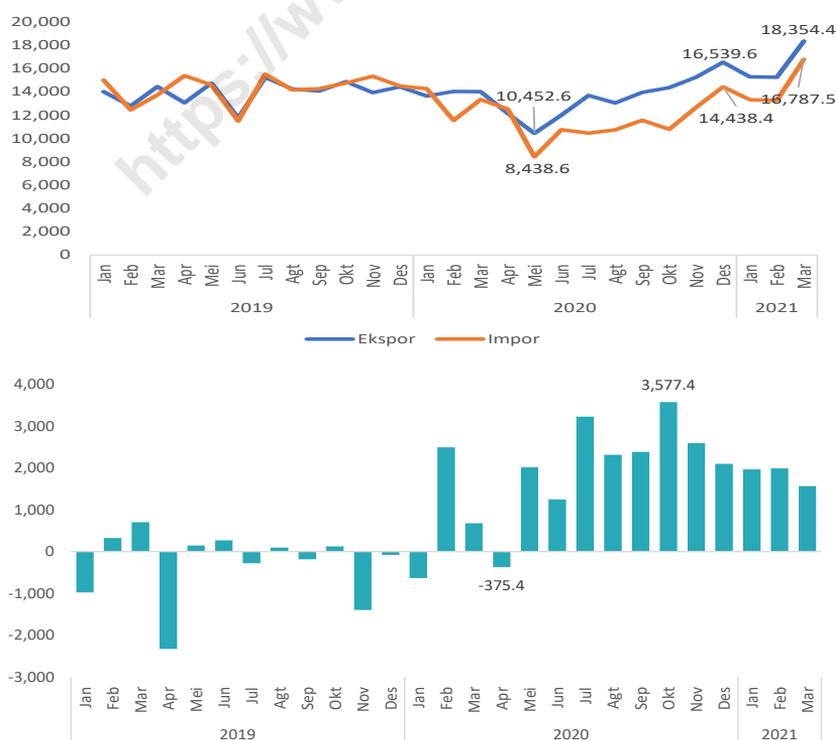
Tabel 7.1 Neraca Perdagangan Indonesia (Juta US\$) Tahun 2017-2020

Komoditas	2017	2018	2019	2020
Migas	- 8 571.8	- 12 697.2	- 10 096.0	- 6 005.7
Non Migas	20 414.5	3 998.7	6 503.3	27 628.7
Jumlah	11 842.7	- 8 698.5	- 3 592.7	21 623.0

Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Hampir di sepanjang bulan pada 2020, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus, kecuali pada Bulan Januari dan Maret 2020. Namun demikian, dilihat dari kinerja ekspor dan impor, surplus perdagangan selama tahun 2020 cenderung diakibatkan oleh merosotnya nilai impor yang lebih tajam dibandingkan penurunan nilai ekspor. Meskipun memberikan surplus pada neraca perdagangan dan menurunkan komponen pengurang pada perhitungan PDB, penurunan nilai impor juga bisa saja menjadi sinyal penurunan gairah aktivitas industri di dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan impor Indonesia masih didominasi oleh impor bahan baku dan modal.

Gambar 7.1 Nilai Ekspor-Impor dan Neraca Perdagangan Indonesia (Juta US\$) Bulanan 2019-2021



Sumber: Indikator Ekonomi, BPS

Dilihat dari nilainya, ekspor dan impor Indonesia menurun semenjak ditemukannya kasus pertama Covid-19 di Indonesia pada Bulan Maret 2020. Demi mengutamakan kesehatan masyarakat dan upaya percepatan penanganan Covid-19, pemerintah mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur melalui PP Nomor 21 Tahun 2020. Pemberlakuan PSBB secara langsung berpengaruh pada hampir seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Pembatasan sosial membuat masyarakat untuk tetap di rumah saja dan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak. Sehingga, baik sisi *supply* dan *demand* dalam aktivitas ekonomi terpengaruh. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga banyak negara di dunia juga menerapkan lockdown, berpengaruh pada penurunan permintaan global.

Pelemahan ekspor dan impor mencapai titik terendah dirasakan Indonesia pada Bulan Mei 2020. Ekspor pada Bulan Mei 2020 tercatat hanya sebesar US\$ 10,45 miliar sedangkan nilai impor sebesar US\$ 8,44 miliar. Nilai ekspor tersebut tercatat terendah sejak Juli 2016 (Ekonomi.bisnis.com, 2020). Memasuki Bulan Juni 2020, pemerintah memberlakukan PSBB transisi dan mulai mengizinkan pembukaan rumah ibadah, kantor, dan tempat usaha dengan pembatasan dan pemberlakuan protokol kesehatan. Sejak saat itu, kinerja ekspor tercatat terus membaik, begitu pula dengan kinerja impor. Pada Desember 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai US\$ 16,54 miliar dan nilai impor Indonesia mencapai US\$ 14,44 miliar. Nilai ekspor tersebut meningkat 14,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Desember 2019) dan meningkat 8,39 persen dibandingkan bulan sebelumnya (November 2020). Peningkatan impor dan ekspor di Bulan Desember 2020 pada masa pandemi tersebut menunjukkan tren berbeda apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya secara musiman nilai ekspor menunjukkan penurunan saat akhir tahun (ekonomi.bisnis.com, 2021).

Memasuki tahun 2021, neraca perdagangan Indonesia masih tercatat surplus. Hingga triwulan I 2021, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US\$ 5,52 miliar. Pemerintah memprediksi tren surplus neraca perdagangan Indonesia masih akan terus berlanjut. Prediksi tersebut diperkuat dengan terus meningkatnya permintaan global serta peningkatan harga komoditas di pasar global yang akan memicu peningkatan nilai ekspor. Di sisi lain, kinerja impor juga diprediksi akan terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan industri akan impor bahan baku. Meskipun nilai impor diperkirakan meningkat, neraca perdagangan diprediksi tetap surplus karena keseluruhan nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan nilai impor (ekonomi.bisnis.com, 2021).

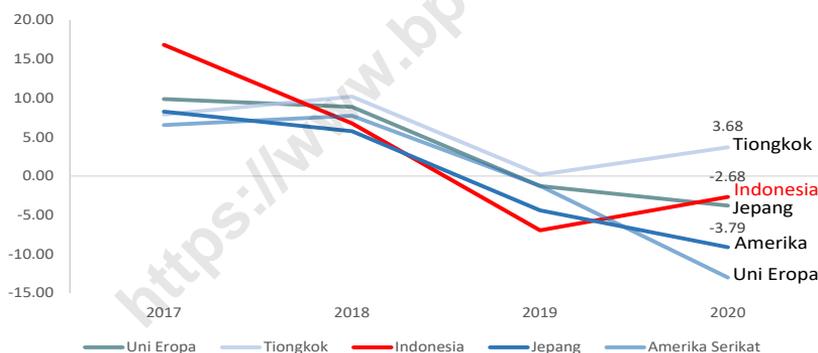
Ekspor Indonesia Turun di Masa Pandemi

Kinerja ekspor Indonesia sepanjang tahun 2020 berkontraksi 2,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di tengah merebaknya pandemi Covid-19 hampir di seluruh dunia serta ketidakpastian perekonomian global. Baik ekspor migas maupun ekspor non migas mengalami kontraksi.

Pertumbuhan nilai ekspor di tahun 2020 pada sektor nonmigas terkontraksi sebesar 0,61 persen sedangkan sektor migas terkontraksi lebih dalam sebesar 30,01 persen. Sebelumnya, Kemendag menetapkan target ekspor nonmigas tahun 2020 tumbuh positif pada kisaran 5,2 persen. Meskipun belum mampu untuk memenuhi target yang ditetapkan pemerintah, pertumbuhan ekspor non migas perlu diapresiasi karena kontraksi pertumbuhannya tidak sedalam tahun sebelumnya yang mencapai 4,27 persen, terlebih pertumbuhan tersebut dicapai saat pandemi Covid-19.

Pertumbuhan nilai ekspor yang dicapai Indonesia pada tahun 2020 masih lebih baik kondisinya dibanding dengan beberapa negara lain. Pada Gambar 7.2, pertumbuhan nilai ekspor di Jepang, Amerika dan negara di Uni Eropa terkontraksi lebih dalam dibandingkan Indonesia. Berbeda dengan negara lain yang nilai ekspornya tumbuh negatif, Tiongkok yang merupakan negara ditemukannya kasus Covid-19 pertama kali di dunia pada akhir 2019 lalu, menorehkan pertumbuhan nilai ekspor naik hingga 3,68 persen.

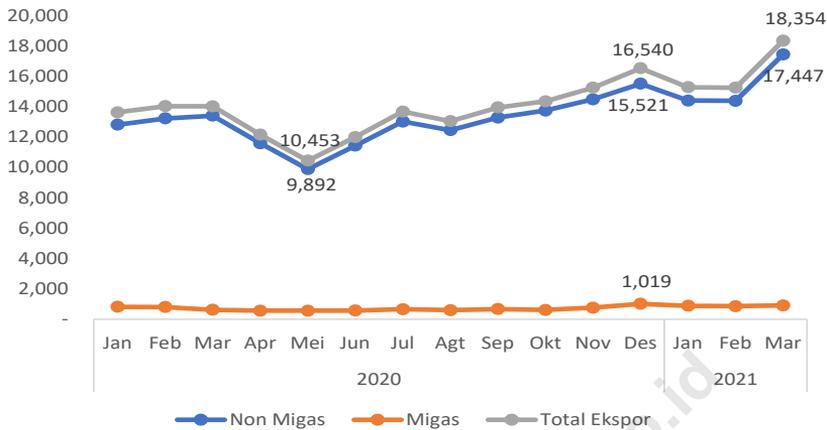
Gambar 7.2 Pertumbuhan Nilai Ekspor (persen) Negara-Negara di Dunia Tahun 2017-2020



Sumber: UN Comtrade

Nilai ekspor sepanjang tahun 2020 tercatat terendah pada Bulan Mei 2020 senilai US\$ 10,45 miliar. Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 melalui program PSBB serta *lockdown* di berbagai negara berpengaruh pada kontraksi di Bulan Mei 2020 yang mencapai 29,13 persen (*y-o-y*). Namun, dengan pemberlakuan PSBB transisi serta berbagai adaptasi kebiasaan baru yang diberlakukan di hampir seluruh tatanan kehidupan berhasil membawa ekspor Indonesia tumbuh signifikan menjelang akhir tahun 2020. Bulan Desember 2020, ekspor Indonesia tumbuh positif 14,62 persen (*y-o-y*) dan mencapai nilai ekspor US\$ 16,54 miliar. Memasuki tahun 2021, nilai ekspor mencapai US\$ 18,35 miliar pada Bulan Maret. Penanganan pandemi yang membaik serta program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah memberikan harapan kinerja perekonomian Indonesia termasuk ekspor dapat terus membaik.

Gambar 7.3 Perkembangan Nilai Ekspor Migas dan Nonmigas Januari 2020-Maret 2021 (Juta US\$)



Sumber: Indikator Ekonomi BPS

Pemerintah juga memberlakukan relaksasi PPh 25 dengan skema pengurangan 30% (pada peraturan terbaru PMK Nomor 110/PMK.03/2020 sebesar 50%) kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE-IKM selama enam bulan sejak April 2020. Total pengurangan pada relaksasi tersebut diperkirakan mencapai Rp 4,2 triliun. Relaksasi tersebut diharapkan memberikan ruang cashflow industri untuk mengubah negara tujuan ekspor guna mendukung peningkatan ekspor.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 6,3 persen di tahun 2021. Target tersebut disusun berdasarkan proyeksi dari IMF, yaitu pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,5 persen serta volume perdagangan global diproyeksikan tumbuh 8,3 persen pada tahun 2021. Selain vaksinasi, baik di Indonesia maupun di negara-negara tujuan ekspor, pelaksanaan dan akselerasi Undang-undang Cipta Kerja menjadi perhatian Kemendag untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan (bisnis.tempo.co, 2021). Bukan tanpa strategi, pemerintah telah menetapkan lima strategi penguatan ekspor, antara lain: pemeliharaan pasar ekspor dan produk utama, memberikan fokus pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang berorientasi ekspor, penetrasi pasar nontradisional, pemanfaatan perjanjian dagang antar negara, serta reformasi regulasi khususnya turunan dari UU Cipta Kerja (Kemendag, 2021).

Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2020 mencapai US\$ 163,19 miliar. Tidak jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ekspor Indonesia didominasi oleh ekspor nonmigas. Nilai ekspor nonmigas di tahun 2020 tercatat sebesar US\$ 154,94 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan tipis sebesar 0,61 persen dibandingkan tahun 2019. Meskipun turun, kontribusi ekspor nonmigas terhadap total ekspor naik dari 92,97 persen menjadi 94,94 persen di tahun 2020.

**Tabel 7.2 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Migas dan Nonmigas (Juta US\$)
Tahun 2017-2020**

Ekspor	2018	2019	2020	2021 (tw-1)
Migas	17 171,7	11 789,3	8 251,1	2 652,4
Minyak Mentah	5 151,9	1 726,6	1 396,9	921,8
Hasil Minyak	1 642,6	1 801,6	1 456,5	393,0
Gas	10 377,2	8 261,1	5 397,7	1 337,6
Non Migas	162 841,0	155 893,7	154 940,7	46 251,9
Sektor Pertanian	3 431,0	3 612,4	4 119,0	1 044,2
Sektor Industri	130 118,1	127 377,7	131 087,0	38 952,5
Sektor Tambang dan Lainnya	29 291,9	24 903,6	19 734,7	6 255,2
Jumlah	180 012,7	167 683,0	163 191,8	48 904,3

Sumber: Indikator Ekonomi BPS

Sektor Industri masih berperan dominan pada kinerja ekspor Indonesia. Pada tahun 2020, nilai ekspor sektor industri tercatat mencapai US\$ 131,09 miliar, mengalami peningkatan 2,91 persen dibandingkan tahun 2019 yang nilainya tercatat sebesar US\$ 127,38 miliar. Angka ekspor sektor industri di tahun 2020 tersebut setidaknya menyumbang 80,33 persen terhadap total ekspor Indonesia, membuktikan bahwa sektor industri tetap memegang sektor strategis pada perekonomian Indonesia. Peningkatan ekspor pada sektor industri memberikan sinyal positif bahwa struktur ekonomi Indonesia bergeser pada sektor yang tidak bergantung pada sumber daya alam kepada sektor yang memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.

Selain sektor industri, sektor pertanian juga masih tumbuh positif 14,02 persen di tahun 2020, tertinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor sektor lain. Pada tahun tersebut, tercatat nilai ekspor sektor pertanian sebesar US\$ 4,12 miliar. Meskipun nilai ekspor pertanian mengalami pertumbuhan paling tinggi, hal tersebut tidak signifikan berpengaruh pada total ekspor Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kontribusi ekspor sektor pertanian yang masih rendah, yaitu sekitar 2,52 persen. Meskipun demikian, pertumbuhan positif pada sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19 patut diapresiasi. Sedangkan sektor lain, selain industri dan pertanian, mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2020.

Nilai ekspor migas di tahun 2020 sebesar US\$ 8,25 miliar, turun 30,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan nilai ekspor migas juga mengakibatkan turunnya kontribusi ekspor migas pada total ekspor. Dari total ekspor, ekspor migas hanya berkontribusi sebesar 5,06 persen. Baik pada nilai ekspor minyak mentah, hasil minyak, maupun gas, masing-masing mengalami pertumbuhan negatif. Sektor dengan pertumbuhan negatif terdalam tercatat dialami oleh sektor gas, mencapai minus 34,66 persen senilai US\$ 5,40 miliar. Penurunan tajam pada nilai ekspor gas dikarenakan penurunan permintaan

global yang juga menyebabkan anjloknya harga gas alam (market.bisnis.com, 2020).

Pertumbuhan Ekspor Hasil Pertanian Tertinggi di Masa Pandemi

Komoditas unggulan ekspor Indonesia di sektor pertanian antara lain kopi, tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah, serta buah-buahan. Kopi masih menjadi primadona ekspor dari sektor pertanian dengan nilai ekspor pada tahun 2020 mencapai US\$ 809,2 juta. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai US\$ 872,4 juta. Sedangkan tanaman obat, aromatik, rempah-rempah dan buah-buahan masing-masing mencapai US\$ 618,3 juta dan US\$ 438,1 juta, naik dibanding tahun sebelumnya. Ekspor komoditas hasil pertanian lainnya tercatat sebesar US\$ 2,05 miliar. Angka tersebut tumbuh positif dibanding tahun 2019, berkontribusi signifikan pada pertumbuhan nilai ekspor di sektor pertanian pada tahun 2020 yang mencapai 14,02 persen.

Di sektor industri, nilai ekspor komoditas hasil industri logam dasar tercatat tertinggi dibanding komoditas lainnya, mencapai US\$ 19,89 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan 38,44 persen dibanding tahun 2019. Komoditas tersebut menggeser komoditas unggulan hasil industri sebelumnya, yaitu minyak kelapa sawit yang nilai ekspornya tercatat sebesar US\$ 18,45 miliar. Meskipun demikian, nilai ekspor hasil industri kelapa sawit sebenarnya mengalami kenaikan 18,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain kedua komoditas tersebut, ekspor komoditas hasil industri lainnya seperti pakaian jadi dari tekstil, alat-alat listrik, karet remah, dan industri lainnya mengalami penurunan pada tahun 2020.

Ekspor hasil tambang di tahun 2020 masih didominasi oleh komoditas batu bara yang tercatat sebesar US\$ 14,53 miliar. Angka tersebut menyumbang 73,66 persen dari nilai total ekspor hasil tambang (tidak termasuk migas). Meski masih menjadi komoditas unggulan ekspor hasil tambang, ekspor batu bara mengalami penurunan 23,33 persen dibanding tahun sebelumnya. Turunnya nilai ekspor batu bara disebabkan oleh merosotnya permintaan dan harga batu bara itu sendiri. Pembatasan ekspor yang dilakukan India dan Tiongkok yang mendominasi pasar ekspor batu bara Indonesia juga menjadi salah satu faktor turunnya ekspor komoditas batu bara (kontan.co.id, 2020). Penurunan ekspor batu bara tersebut berpengaruh pada penurunan ekspor hasil tambang secara total, mengingat komoditas tersebut sangat mendominasi. Ekspor komoditas bijih tembaga pada tahun 2020 meningkat drastis hingga 88,44 persen. Meskipun demikian, peningkatan ekspor bijih tembaga yang nilainya mencapai US\$ 2,41 miliar di tahun 2020 tidak berpengaruh signifikan karena hanya menyumbang sekitar 12 persen pada ekspor hasil tambang secara total.

**Tabel 7.3 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Komoditas Penting (Juta US\$)
Tahun 2018- tw 1 2021**

Komoditas Ekspor	2018	2019	2020	2021 (tw-1)
Ekspor Hasil Pertanian	3 431,0	3 612,4	4 119,0	1 044,2
Kopi	806,9	872,4	809,2	192,7
Tanaman Obat, Aromatik dan Rempah-rempah	601,2	592,5	618,3	202,7
Buah-buahan	297,8	323,5	438,0	103,9
Biji Kakao	72,5	80,6	75,8	9,2
Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap	105,8	125,1	125,8	33,8
Hasil Pertanian Lainnya	1 546,8	1 618,3	2 051,9	501,9
Ekspor Hasil Industri	130 118,1	127 377,7	131 087,0	38 952,5
Minyak Kelapa Sawit	17 898,8	15 574,4	18 444,0	6 167,3
Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	7 322,5	7 072,2	5 856,5	1 641,1
Alat-alat Listrik	5 071,0	5 267,2	5 111,3	1 519,4
Karet Remah	3 836,7	3 426,1	2 900,9	988,6
Hasil Industri Logam Dasar	11 922,8	14 369,6	19 893,2	5 097,3
Ekspor Industri Lainnya	84 066,3	81 668,2	78 881,1	23 538,8
Ekspor Hasil Tambang (Tidak Termasuk Migas)	29 286,0	24 897,0	19 729,8	6 253,6
Batu Bara	20 631,4	18 957,2	14 534,0	4 447,6
Bijih Tembaga	4 186,7	1 280,1	2 412,2	754,2
Hasil Tambang Lainnya	4 467,9	4 659,7	2 783,6	1 051,8

Sumber: Indikator Ekonomi BPS

Produk atau barang yang diperdagangkan secara internasional juga digolongkan menggunakan sistem penggolongan Standard International Trade Classification (SITC). Ekspor dari golongan barang Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb (SITC 3) mendominasi ekspor Indonesia di tahun 2017 hingga 2019. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dominasi ekspor Indonesia berdasarkan penggolongan SITC di tahun 2020 didominasi oleh Hasil Industri Menurut Bahan (SITC 6).

Nilai ekspor golongan barang Hasil Industri Menurut Bahan (SITC 6) di tahun 2020 mencapai US\$ 28,59 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan 8,26 persen di banding tahun sebelumnya. Golongan barang yang mengalami peningkatan signifikan di tahun 2020 adalah Bahan dan Transaksi Khusus Lainnya (SITC 9). Pertumbuhan nilai ekspor golongan barang tersebut mencapai 56,05 persen dengan nilai sebesar US\$ 5,67 miliar. Komoditas yang termasuk dalam golongan SITC 9 adalah koin (selain koin emas), bukan alat pembayaran yang sah dan emas nonmoneter (tidak termasuk bijih emas dan konsentrasinya). Selain SITC 6 dan SITC 9, golongan barang Minyak/Lemak Nabati dan Hewani (SITC 4) dan Bahan Makanan dan Binatang Hidup (SITC 0)

juga mengalami pertumbuhan positif dengan kenaikan masing-masing 17,46 persen dan 10,13 persen.

Golongan barang Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb (SITC 3) nilai ekspornya tercatat mencapai US\$ 25,51 miliar. SITC 3 mengalami penurunan ekspor terdalem dibanding golongan barang lainnya, mencapai 25,22 persen. Meskipun demikian, SITC 3 berkontribusi tertinggi terhadap total ekspor Indonesia setelah SITC 6. Termasuk dalam golongan barang SITC 3 antara lain batu bara, minyak bumi dan produknya, gas alam, dsb yang memang mengalami penurunan ekspor di tahun 2020 akibat turunnya permintaan global. Selain SITC 6 dan SITC 3, golongan barang Mesin dan Alat Pengangkutan (SITC 7) mendominasi ekspor Indonesia ketiga. Nilai ekspor SITC 7 mencapai US\$ 21,42 miliar, turun 7,86 persen dibanding tahun 2019.

**Tabel 7.4 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (juta US\$)
Tahun 2018- tw 1 2021**

SITC	Golongan Barang	2018	2019	2020	2021 (tw-1)
0	Bahan Makanan dan Binatang Hidup	13 105	13 225	14 565	3 814
1	Minuman dan Tembakau	1 338	1 332	1 244	296
2	Bahan Mentah	17 629	14 896	14 034	4 094
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb	41 778	34 103	25 502	8 566
4	Minyak/Lemak Nabati dan Hewani	19 329	16 780	19 710	6 612
5	Bahan Kimia	14 238	13 079	12 659	3 850
6	Hasil Industri Menurut Bahan	26 337	26 409	28591	8 603
7	Mesin dan Alat Pengangkutan	22 615	23 244	21416	6 714
8	Hasil Industri Lainnya	21 563	20 984	19805	5 861
9	Bahan dan Transaksi Khusus Lainnya	2 081	3 631	5666	494
		180 013	167 683	163192	48 904

Sumber: Indikator Ekonomi BPS

Ekspor ke Tiongkok Meningkat di Masa Pandemi

Negara Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang merupakan tiga negara tujuan utama dari pasar ekspor Indonesia. Kontribusi ketiga negara tersebut terhadap total ekspor Indonesia di tahun 2020 mencapai 39,26 persen. Ekspor Indonesia paling tinggi ke negara tujuan Tiongkok. Tercatat pada tahun 2020 nilainya mencapai US\$ 31,78 miliar. Angka tersebut terus mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi ekspor ke Tiongkok terhadap total ekspor sendiri mencapai 19,48 persen, naik dibandingkan tahun lalu yang kontribusinya tercatat 16,68 persen.

Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2020 mencapai US\$ 18,62 miliar, naik 4,36 persen dibandingkan tahun 2019 yang nilainya tercatat US\$ 17,84 miliar. Berbeda dengan ekspor pada kedua negara

tersebut yang mengalami peningkatan, ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga 14,61 persen dengan nilai ekspor tercatat sebesar US\$ 31,78 miliar. Tren ekspor Indonesia ke Jepang terus mengalami penurunan sejak tiga tahun terakhir. Hal ini diakibatkan oleh perlambatan ekonomi yang dialami Jepang terlebih ditambah dengan adanya pandemi Covid-19.

Negara-negara di ASEAN juga tak luput dari pandemi Covid-19 yang tak hanya berdampak pada kondisi kesehatan masyarakatnya tetapi juga pada kondisi perekonomian negara. Terguncangnya perekonomian negara-negara ASEAN membawa pengaruh pada permintaan barang dari Indonesia.

Tabel 7.5 Nilai Ekspor Indonesia Menurut Negara Tujuan (juta US\$) Tahun 2018-tw 1 2021

Negara Tujuan	2018	2019	2020	2021 (tw-1)
1. ASEAN	41 913,2 (23,28)	41 464,5 (24,73)	36 420,2 (22,32)	11 010,1 (22,51)
(Malaysia)	9 271,6 (5,15)	8 801,8 (5,25)	8 098,8 (4,96)	2 693,1 (5,51)
(Thailand)	6 820,9 (3,79)	6 218,4 (3,71)	5 110,3 (3,13)	1 851,0 (3,78)
(Singapura)	12 915,0 (7,17)	12 916,7 (7,70)	10 661,8 (6,53)	2 584,1 (5,28)
2. Tiongkok	27 132,2 (15,07)	27 961,9 (16,68)	31 781,8 (19,48)	10 208,5 (20,87)
3. Jepang	19 465,6 (10,81)	16 003,3 (9,54)	13 664,7 (8,37)	4 113,1 (8,41)
4. Asia Lainnya	40 934,1 (22,74)	35 679,2 (21,28)	32 641,1 (20,00)	9 283,6 (18,98)
5. Amerika Serikat	18 439,8 (10,24)	17 844,6 (10,64)	18 622,5 (11,41)	5 601,1 (11,45)
6. Amerika Lainnya	4 512,7 (2,51)	4 190,1 (2,50)	4 021,7 (2,46)	1 308,7 (2,68)
7. Australia dan Oceania Lainnya	3 579,8 (1,99)	3 065,9 (1,83)	3 290,2 (2,02)	1 026,1 (2,10)
8. Afrika	4 782, (2,66)	4 603,4 (2,75)	4 614,7 (2,83)	1 586,7 (3,24)
9. Inggris ¹	1 465,3 (0,81)	1 351,5 (0,81)	1 283,4 (0,79)	326,3 (0,67)
10. Uni Eropa	15 621,8 (8,68)	13 265,2 (7,91)	11 797,0 (7,23)	3 753,4 (7,68)
(Belanda)	3 896,6 (2,16)	3 205, (1,91)	3 113,7 (1,91)	971,8 (1,99)
(Jerman)	2 708,2 (1,50)	2 405,8 (1,43)	2 456,3 (1,51)	711,3 (1,45)
11. Eropa Lainnya	2 166,0 (1,20)	2 253,4 (1,34)	5 054,5 (3,10)	686,6 (1,40)
	180 012,7 (100,00)	167 683, (100,00)	163 191,8 (100,00)	48 904,2 (100,00)

Sumber: Indikator Ekonomi BPS

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap total

¹Sejak Januari 2020, Inggris bukan bagian dari Uni Eropa

Ekspor Indonesia ke negara-negara di ASEAN mengalami penurunan hingga 12,17 persen dengan nilai ekspor tercatat sebesar US\$ 36,42 miliar. Ekspor ke Singapura, Malaysia, dan Thailand, yang juga menjadi pasar utama ekspor Indonesia di ASEAN, ketiganya mengalami penurunan masing-masing sebesar 17,46 persen, 17,82 persen, dan 7,99 persen.

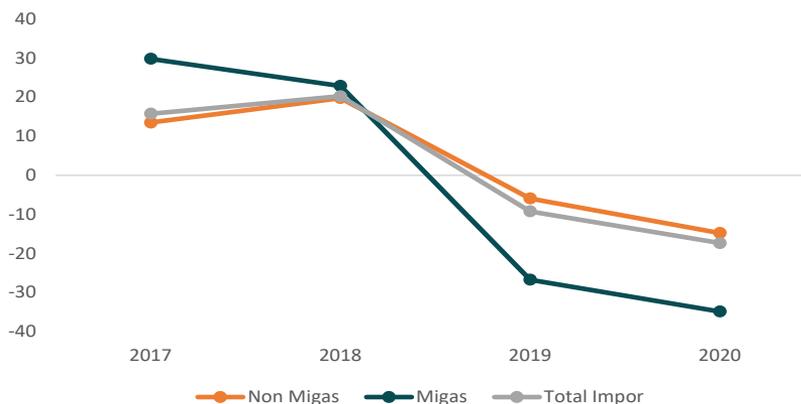
Memasuki 2021 dengan perbaikan kondisi kesehatan serta dimulainya program vaksinasi di beberapa negara diharapkan juga mendorong kinerja ekspor Indonesia. Pemerintah juga telah menetapkan target ekspor nonmigas ke beberapa negara sebagai pasar utama ekspor Indonesia. Melalui Kemendag pemerintah menargetkan ekspor non migas ke Tiongkok tumbuh 7,87 persen, Amerika Serikat tumbuh 3,87 persen, dan Jepang tumbuh 2,97 persen. Selain itu, pemerintah juga berharap pertumbuhan ekspor positif juga terjadi ke negara-negara di ASEAN dan negara lainnya (bisnis.tempo.co, 2021).

Kinerja Impor Turun Terdampak Pandemi

Kinerja impor juga memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Banyak industri yang menggantungkan ketersediaan bahan baku dan modalnya dari impor luar negeri akibat pasar dalam negeri yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Di tengah pandemi Covid-19 selama satu tahun terakhir pertumbuhan total impor Indonesia di tahun 2020 berkontraksi sebesar 17,34 persen, baik impor non migas maupun impor migas keduanya mengalami kontraksi. Kontraksi impor migas sebesar 14,78 persen sedangkan impor non migas berkontraksi lebih dalam sebesar 34,86 persen. Kontraksi pada kinerja impor berkontribusi pada surplus neraca perdagangan dan menurunkan komponen pengurang pada perhitungan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, penurunan nilai impor di tahun 2020 tidak bisa dipandang keseluruhan positif

Gambar 7.4 Pertumbuhan Nilai Impor (persen) Indonesia Tahun 2017-2020



Sumber: Indikator Ekonomi BPS

karena merupakan dampak dari terganggunya rantai pasokan global akibat pandemi Covid-19. Tidak hanya rantai supply, rantai demand juga terpengaruh akibat penerapan pembatasan sosial dan lockdown yang diberlakukan untuk memutus penyebaran Covid-19.

Nilai impor Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebesar US\$ 141,57 miliar. Kontribusi impor non migas dan impor migas masing-masing sebesar US\$ 127,31 miliar dan US\$ 14,26 miliar. Impor migas di tahun 2020 tercatat sebesar US\$ 171,28 miliar, nilai ini lebih rendah dibanding dengan tahun lalu. Penurunan impor migas diakibatkan oleh turunnya impor minyak mentah, dari US\$ 5,71 miliar di tahun 2019 menjadi US\$ 3,39 miliar di tahun 2020. Komponen impor hasil minyak, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), juga mengalami penurunan dari US\$ 13,67 miliar menjadi US\$ 8,28 miliar di tahun 2020. Sedangkan nilai impor gas mengalami kenaikan tipis dari US\$ 2,51 miliar menjadi 2,58 miliar di tahun 2020.

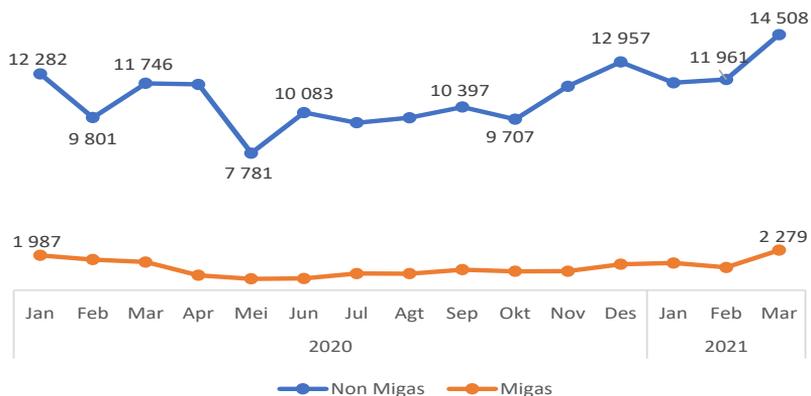
Tabel 7.6 Nilai Impor Indonesia Menurut Migas dan Nonmigas (juta US\$)

Impor	2017	2018	2019	2020
Migas	24 316,2	29 868,9	21 885,3	14 256,8
Non Migas	132 669,3	158 842,3	149 390,4	127 312,0
Jumlah	156 985,5	188 711,2	171 275,7	141 568,8

Sumber: Indikator Ekonomi BPS

Di sepanjang 2020, baik kinerja impor migas maupun impor nonmigas tercatat dengan nilai terendah pada Bulan Mei 2020. Pada periode waktu tersebut, impor migas tercatat senilai US\$ 0,66 miliar dan impor nonmigas

Gambar 7.5 Perkembangan Nilai Impor Migas dan Non Migas Januari 2020-Maret 2021 (Juta US\$)

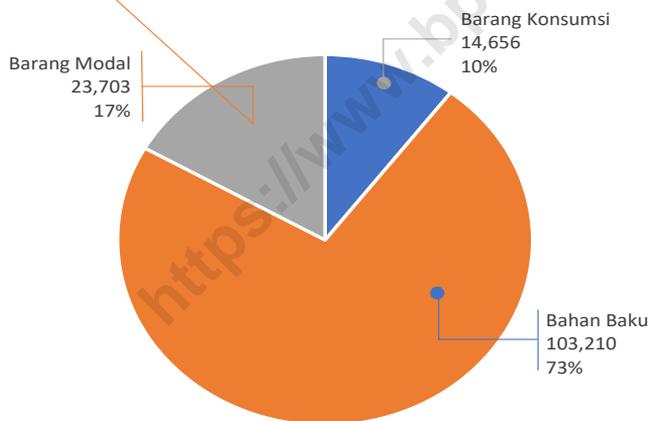


Sumber: Indikator Ekonomi BPS

senilai US\$ 7,78 miliar. Memasuki Bulan Juni, kinerja impor non migas kembali membaik. Pada akhir tahun 2020, nilai impor non migas Indonesia mencapai US\$ 12,96 miliar. Pada Maret 2021, nilai impor non migas mencapai US\$ 14,51 miliar, mengalami kenaikan 23,51 persen dibandingkan bulan yang sama di tahun 2020. Kondisi tersebut dapat menjadi sinyal geliat industri dalam negeri yang mulai membaik.

Menurut golongan barang ekonomi, Impor Indonesia masih didominasi oleh impor bahan baku. Kontribusi impor golongan barang tersebut terhadap total impor Indonesia mencapai 73 persen pada tahun 2020. Sedangkan kontribusi golongan barang ekonomi barang modal dan barang konsumsi terhadap total impor masing-masing sebesar 17 persen dan 10 persen. Sejak lama industri dalam negeri masih bergantung pada bahan baku impor. Kedepannya, Indonesia perlu melakukan substitusi dengan buatan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dan barang modal impor.

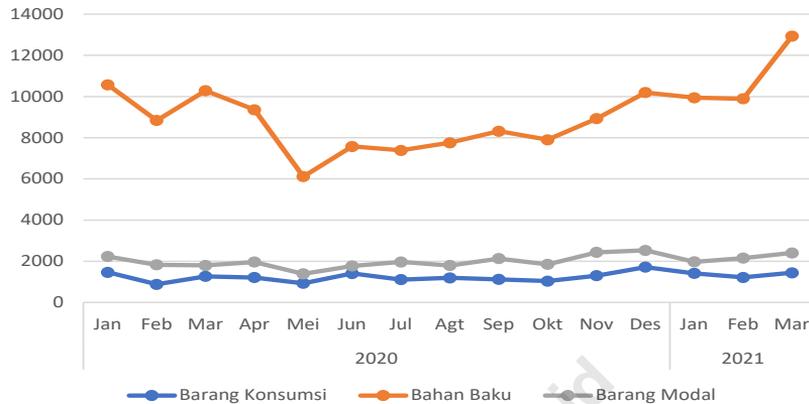
Gambar 7.6 Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi (Juta US\$) Tahun 2020



Sumber: Indikator Ekonomi BPS

Masih tingginya ketergantungan impor bahan baku dan barang modal oleh industri di Indonesia dapat menjadi indikasi kinerja industri di dalam negeri. Turunnya permintaan hasil industri di masa pandemi memaksa pelaku usaha industri untuk mengurangi produksinya. Selain itu, pandemi Covid-19 juga membuat industri kesulitan untuk melakukan impor bahan baku dan barang modal. Kondisi tersebut berpengaruh pada terganggunya produksi industri dalam negeri. Selama 2020, nilai impor bahan baku terendah tercatat pada Bulan Mei 2021 senilai US\$ 6,11 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan hingga 34,7 persen dibanding bulan sebelumnya.

Gambar 7.7 Perkembangan Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang Ekonomi (Juta US\$) Jan 2020-Maret 2021



Sumber: Indikator Ekonomi BPS

Selain stimulus fiskal melalui relaksasi pajak PPh 21 yang diterima industri, pemerintah juga memberlakukan relaksasi PPh 22 Impor kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE IKM. Total pembebasan Rp 8,15 triliun diberikan selama enam bulan sejak Bulan April 2020 guna memberikan ruang bagi industri switching cost sehubungan perubahan negara asal impor. Selain itu, pemerintah juga memberikan relaksasi bea masuk impor pada 19 sektor industri. Termasuk dalam 19 sektor industri yang mendapat relaksasi antara lain industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia, industri alat angkutan lainnya, serta industri makanan.

Pemberlakuan PSBB Transisi serta kebijakan relaksasi oleh pemerintah mendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan demand ekonomi. Impor bahan baku mulai mengalami kenaikan pada Bulan Juni 2020. Mendekati akhir tahun 2020, impor bahan baku kembali naik hingga mencapai US\$ 10,19 miliar pada Desember 2020. Peningkatan ini menjadi indikasi mulai pulihnya aktivitas ekonomi Indonesia. Memasuki 2021, impor bahan baku dapat dikatakan stabil dan mengalami kenaikan tajam pada Bulan Maret 2021 hingga mencapai US\$ 12,94 miliar.

Di tahun 2020 impor seluruh golongan barang SITC mengalami pertumbuhan negatif, kecuali golongan barang Bahan dan Transaksi Khusus Lainnya (SITC 9) yang tumbuh positif sebesar 7,48 persen. Penurunan impor tertinggi dialami golongan barang Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb (SITC 3) hingga 32,80 dengan nilai US\$ 15,78 miliar. Salah satu komoditas pada SITC 3 yang mengalami penurunan impor adalah impor BBM bensin. Volume impor bensin sepanjang 2020 turun menjadi 91 juta barel dari 119 juta barel di tahun 2019 (cnbcindonesia.com, 2021). Hal ini juga sejalan dengan penurunan penjualan BBM oleh PT Pertamina. Penurunan kebutuhan BBM dalam negeri berkaitan erat dengan menurunnya mobilitas penduduk saat pandemi Covid-19.

Impor Hasil Industri Menurut Bahan (SITC 6) juga mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2020, penurunannya mencapai 24,10 persen dibanding tahun sebelumnya. Termasuk dalam SITC 6 adalah besi dan baja yang mengalami penurunan impor dari US\$ 10,39 miliar tahun 2019 menjadi US\$ 6,86 miliar tahun 2020. Kondisi tersebut seiring dengan volume impor besi dan baja yang mengalami penurunan hingga 36 persen, dari 6,96 juta ton tahun 2019 menjadi 4,47 juta ton pada tahun 2020. (cnbcindonesia.com, 2021). Di sisi lain industri baja nasional mengalami peningkatan hingga 30,25 persen untuk baja jenis slab, billet, dan bloom. Melalui kebijakannya, pemerintah berhasil mengatur *supply* dan *demand* yang terstruktur dan disesuaikan dengan kapasitas industri nasional.

Sebagaimana tahun sebelumnya, golongan barang Mesin dan Alat Pengangkutan (SITC 7) masih mendominasi impor Indonesia. Kontribusi impor SITC 7 terhadap total impor mencapai 33,02 persen di tahun 2020 dengan nilai US\$ 46,74 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan 16,35 persen dibanding tahun sebelumnya yang nilainya mencapai US\$ 55,88 miliar.

**Tabel 7.7 Nilai Impor Indonesia Menurut Golongan Barang SITC (Juta US\$)
Tahun 2018-tw 1 2021**

SITC	Golongan Barang	2018	2019	2020	2021 (tw-1)
0	Bahan Makanan dan Binatang Hidup	16 428	15 495	15 444	4 557
1	Minuman dan Tembakau	948	822	762	187
2	Bahan Mentah	9 944	9 059	7 298	2 341
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb	31 579	23 478	15 778	9 568
4	Minyak/Lemak Nabati dan Hewani	174	218	192	75
5	Bahan Kimia	26 684	24 144	21 491	7 280
6	Hasil Industri Menurut Bahan	30 970	29 998	22 768	6 897
7	Mesin dan Alat Pengangkutan	59 886	55 878	46 743	10 365
8	Hasil Industri Lainnya	9 969	10 413	9 189	1 518
9	Bahan dan Transaksi Khusus Lainnya	2 132	1 771	1 903	594
		188 714	171 276	141 568	43 382

Sumber: Indikator Ekonomi BPS

Impor Indonesia mengalami penurunan hampir dari seluruh negara asal impor, yang tidak luput dari pengaruh pandemi Covid-19. Nilai impor yang mengalami pertumbuhan positif berasal dari Eropa lainnya (tumbuh 13,04 persen) dan Amerika lainnya (tumbuh 5,05 persen). Mengingat kontribusi kedua wilayah tersebut terhadap total impor yang hanya berkisar 5 persen, pertumbuhan nilai impor tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan. Penurunan impor tertinggi dari negara di Afrika yang penurunannya mencapai 37,2 persen. Impor dari Jepang dan Thailand juga mengalami penurunan cukup signifikan, mencapai 31 persen. Impor Indonesia didominasi dari Negara

Tiongkok. Pada tahun 2020, nilai impor dari Tiongkok mencapai US\$ 39,63 miliar atau 28 persen dari total nilai impor Indonesia berasal dari Tiongkok. Angka tersebut mengalami penurunan 11,79 persen dibanding tahun 2019 yang nilainya mencapai US\$ 44,93 miliar.

Impor dari negara-negara tetangga di ASEAN ke Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 25,03 persen dengan nilai sebesar US\$ 29,83 miliar. Negara tetangga yang paling banyak melakukan impor ke Indonesia adalah Singapura. Nilai impor dari Singapura ke Indonesia pada 2020 mencapai US\$ 12,34 miliar. Meskipun mengalami penurunan hingga 29,84 persen dibanding tahun lalu, angka tersebut berkontribusi sebesar 8,72 persen terhadap total impor ke Indonesia.

Tabel 7.8 Nilai Impor Indonesia Menurut Negara Asal (Juta US\$) Tahun 2018-tw 1 2021

Negara Tujuan	2018	2019	2020	2021 (tw-1)
1. ASEAN	41 913,2 (23,28)	41 464,5 (24,73)	36 420,2 (22,32)	11 010,1 (22,51)
(Malaysia)	9 271,6 (5,15)	8 801,8 (5,25)	8 098,8 (4,96)	2 693,1 (5,51)
(Thailand)	6 820,9 (3,79)	6 218,4 (3,71)	5 110,3 (3,13)	1 851,0 (3,78)
(Singapura)	12 915,0 (7,17)	12 916,7 (7,70)	10 661,8 (6,53)	2 584,1 (5,28)
2. Tiongkok	27 132,2 (15,07)	27 961,9 (16,68)	31 781,8 (19,48)	10 208,5 (20,87)
3. Jepang	19 465,6 (10,81)	16 003,3 (9,54)	13 664,7 (8,37)	4 113,1 (8,41)
4. Asia Lainnya	40 934,1 (22,74)	35 679,2 (21,28)	32 641,1 (20,00)	9 283,6 (18,98)
5. Amerika Serikat	18 439,8 (10,24)	17 844,6 (10,64)	18 622,5 (11,41)	5 601,1 (11,45)
6. Amerika Lainnya	4 512,7 (2,51)	4 190,1 (2,50)	4 021,7 (2,46)	1 308,7 (2,68)
7. Australia dan Oceania Lainnya	3 579,8 (1,99)	3 065,9 (1,83)	3 290,2 (2,02)	1 026,1 (2,10)
8. Afrika	4 782, (2,66)	4 603,4 (2,75)	4 614,7 (2,83)	1 586,7 (3,24)
9. Inggris ¹	1 465,3 (0,81)	1 351,5 (0,81)	1 283,4 (0,79)	326,3 (0,67)
10. Uni Eropa	15 621,8 (8,68)	13 265,2 (7,91)	11 797,0 (7,23)	3 753,4 (7,68)
(Belanda)	3 896,6 (2,16)	3 205, (1,91)	3 113,7 (1,91)	971,8 (1,99)
(Jerman)	2 708,2 (1,50)	2 405,8 (1,43)	2 456,3 (1,51)	711,3 (1,45)
11. Eropa Lainnya	2 166,0 (1,20)	2 253,4 (1,34)	5 054,5 (3,10)	686,6 (1,40)
	180 012,7 (100,00)	167 683, (100,00)	163 191,8 (100,00)	48 904,2 (100,00)

Sumber: Indikator Ekonomi BPS

Catatan: Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap total

¹Sejak Januari 2020, Inggris bukan bagian dari Uni Eropa

Investasi

8



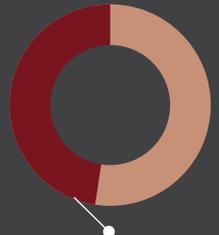
PMDN



51,86%

Pada tahun 2020, realisasi PMDN dan PMA didominasi di **Pulau Jawa**
Realisasi **PMDN** sebesar **51,86 persen**.
Sedangkan **PMA** sebesar **47,09 persen**

PMA



47,09%

Realisasi Investasi **PMA** menurut asal Benua (Miliar USD)



AMERIKA

1.566,1



EROPA

2.232,5



ASIA

24.297,4



AUSTRALIA

390,1



AFRIKA

180,2

<https://www.bps.go.id>

Kegiatan investasi masih berjalan sejalan dengan kegiatan perekonomian yang terjadi di dalam negeri. Investasi termasuk salah satu penerimaan atau pemasukkan bagi Negara yang dapat membantu jalannya roda pembangunan perekonomian. Dimasa pandemi pemerintah mencoba untuk bisa terus menggairahkan kegiatan investasi agar dapat terus berjalan dan tidak terlalu mengganggu kondisi yang terjadi saat ini.

Investasi yang terkumpul dapat direalisasikan pada proyek-proyek tertentu yang dapat menunjang kegiatan pembangunan di dalam negeri. Selain itu dengan investasi dapat membiayai proyek-proyek pembangunan agar dapat tetap berjalan dan dengan investasi dapat menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

Sejarah kegiatan investasi di Indonesia di mulai dengan di buatnya Undang-Undangan No. 1 Tahun 1967 yang berisi tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya dengan berkembangnya kegiatan investasi baru pada tahun 1973 Indonesia membentuk suatu instansi yang mengelola kegiatan investasi menjadi sebuah badan yaitu BKPM. Investasi di Indonesia terus berkembang dan dapat diandalkan dalam pembangunan perekonomian dan membantu program-program pemerintah.

Harapan kedepannya dengan berkembangnya investasi mampu membantu program pembangunan, seperti dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimana didalamnya mendorong dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang tujuannya dapat mendorong tumbuhnya investasi di sektor riil dan mampu membuka lapangan kerja baru.

Namun kita tidak boleh hanya mengandalkan sepenuhnya kepada investasi yang menjadi roda perekonomian dan pembangunan Negara kedepannya. Harapannya investasi hanya sebagai modal pendamping dalam membantu mempercepat pekerjaan proyek-proyek tertentu bagi Indonesia. PMN (Penyertaan Modal Negara) saat terjadinya Covid-19 yang merupakan policy respond pemerintah sebagai bagian dari program PEN untuk pengembangan pariwisata di Indonesia, untuk pembinaan usaha, untuk penjaminan KUR, meningkatkan pemberian kredit kepada UMKM, selain itu juga untuk mempercepat pekerjaan proyek infrastruktur. Selanjutnya, PMN juga digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik pembuatan vaksin dan fasilitas produksi bahan baku obat primer di dalam negeri.

Kekuatan Investasi Dalam Negeri di Masa Pandemi Covid-19

BKPM sebagai badan yang berwenang dalam kegiatan investasi selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan

dalam berinvestasi serta memberikan keyakinan kepada pihak investor. Program dan kebijakan pemerintah dibidang investasi di tahun 2018 membuat berkembangnya kinerja investasi, maka di tahun 2019 membuat pemerintah optimis dengan memasang target total investasi sebesar Rp 792 triliun. Kinerja BKPM menunjukkan keberhasilan di tahun 2019 telah mampu mengumpulkan investasi total (PMDN dan PMA) sebesar Rp 809,6 triliun, telah mampu melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Investasi di dalam negeri sendiri mencapai Rp 386,50 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 17,62 persen dari tahun sebelumnya. Hasil investasi domestik yang dicapai di tahun 2019 berkontribusi sebesar 47,7 persen dari total investasi yang terkumpul dan sisanya sekitar 52,3 persen adalah investasi asing. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian di dalam negeri yang sangat kondusif dan kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah yang mencoba memberikan kemudahan dalam berinvestasi.

Selanjutnya dengan berjalannya waktu, dimana wabah Covid-19 yang pertama kali terjadi di Wuhan salah satu wilayah bagian Negara Tiongkok dan dengan cepat menyebar hampir ke seluruh dunia di tahun 2020. Wabah ini membawa dampak buruk dibidang kesehatan dan juga dampaknya meluas kesemua bidang/sector, termasuk kondisi perekonomian dan keuangan Negara. Kondisi yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri membuat pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan target investasi di tahun 2020. Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi, pemerintah mencoba optimis dengan menetapkan target investasi di tahun 2020 sebesar Rp 817,2 triliun. Pemerintah berharap dengan program PEN kegiatan investasi masih dapat diandalkan.

Ternyata rasa optimis pemerintah membuahkan hasil, ternyata masih banyak investor dalam negeri yang peduli dan mau menginvestasikan dananya. Keyakinan investor disebabkan kebijakan dan program pemerintah dalam melakukan percepatan kemudahan berusaha, pemberian kemudahan pinjaman dan insentif pajak, serta kemudahan-kemudahan lainnya yang dilakukan pemerintah dimasa pandemi. Total investasi yang terkumpul di tahun 2020 mencapai Rp 826,3 triliun, dimana nilai tersebut sudah melebihi dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 817,2 triliun. PMDN sendiri mencapai nilai sebesar Rp 413,5 triliun, jika dibandingkan tahun 2019 investasi domestik mengalami pertumbuhan, namun terjadi pelemahan hanya mencapai 7 persen sedangkan di tahun 2019 kenaikan bisa mencapai 17,62 persen. Kontribusi nilai investasi domestik di tahun 2020 mencapai 50,1 persen sudah menggeser atau lebih tinggi dibanding investasi asing. Namun ditengah kondisi yang serba sulit ini, kegiatan investasi Indonesia di dalam negeri boleh dibilang tidak terpengaruh, terbukti dari kinerja BKPM yang mampu melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2020.

Tabel 8.1 Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Sektor (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2020

Sektor	2018		2019		2020	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	800	3 432,9 (10,45)	1 979	53 213,0 (13,77)	4 675	33 824,9 (8,18)
Pertambangan	325	33 100,0 (10,07)	799	25 675,2 (6,64)	1 717	13 755,1 (3,33)
Industri	5 080	83 644,4 (25,45)	7 709	72 673,4 (18,80)	18 300	82 817,7 (20,03)
Listrik, Gas dan Air	560	37 264,9 (11,34)	921	37 164,2 (9,62)	1 921	35 518,8 (8,59)
Konstruksi	401	44 979,7 (13,69)	1 690	55 090,8 (14,25)	6 549	68 289,3 (16,51)
Perdagangan dan Reparasi Hotel dan Restoran	2 090	15 526,1 (4,72)	11 200	29 825,9 (7,72)	44 258	26 951,5 (6,52)
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	384	58 739,8 (17,88)	1 423	68 082,6 (17,62)	4 115	93 282,8 (22,56)
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	561	15 471,1 (4,71)	1 728	27 797,5 (7,19)	4 347	44 852,8 (10,85)
Jasa Lainnya	614	5 551,3 (1,69)	3 002	18 977,7 (4,91)	10 741	14 242,7 (3,44)
Jumlah	10 815	328 604,9 (100,00)	30 451	386 498,4 (100,00)	96 623	413 535,5 (100,00)

Sumber: Indikator Ekonomi

Investasi domestik yang terkumpul di Indonesia sepanjang tahun 2018 dan 2019 sebagian besar masih terserap disektor industri, dimana pada tahun 2018 sektor industri mampu menyerap investasi domestik sebesar Rp 83,64 triliun dan di tahun 2019 sebesar Rp 72,67 triliun atau turun sekitar 13,12 persen. Sektor ke dua yang mampu menyerap investasi domestik adalah sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi dengan nilai investasi sebesar Rp 68,08 triliun di tahun 2019 atau terjadi peningkatan 15,90 persen dari tahun 2018 dengan nilai investasi sebesar Rp 58,74 triliun.

Selanjutnya, di tahun 2019 yang cukup tinggi juga menyerap investasi domestik yaitu sektor konstruksi dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dengan kontribusi masing-masing 14,25 persen dan 13,77 persen. Nilai investasi di sektor konstruksi sebesar Rp 55,09 triliun yang tersebar di 1.690 proyek dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mampu menyerap investasi domestik sebesar Rp 53,21 triliun yang tersebar di 1.979 proyek.

Pada tahun 2020 di tengah masa pandemi Covid-19 secara total investasi meningkat tapi jika dilihat persektor sebagian besar sektor mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi di sektor pertambangan dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masing-masing turun sebesar 46,43 persen dan 36,43 persen dibanding tahun lalu. Selain itu juga terjadi pergeseran penyerapan investasi domestik, dimana sektor industri yang selalu menjadi incaran para investor untuk menanamkan modalnya, ternyata mulai beralih dan melirik ke sektor lain yaitu sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi. Nilai investasi yang terkumpul disektor ini sebesar Rp 93,28 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 37,01 persen. Sektor yang sangat tinggi kenaikannya dibanding tahun 2019 adalah sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran yaitu mencapai 61,36 persen dengan nilai investasi mencapai Rp 44,85 triliun. Sedangkan sektor industri di tahun 2020 masih mengalami kenaikan sebesar 13,96 persen dengan nilai investasi sebesar Rp 82,82 triliun.

Pandemi Covid-19 di tahun 2021 belum berakhir, namun melihat kekuatan investasi Indonesia di tahun 2020 membuat pemerintah semakin optimis jika investasi masih dapat berkembang. Pemerintah memasang target total investasi sebesar Rp 856 triliun di tahun 2021. Nilai investasi domestik yang terkumpul selama bulan Januari-Maret 2021 mencapai Rp 108,02 triliun yang tersebar di 39 334 proyek. Memasuki triwulan II (April-Juni 2021) di tengah kondisi gelombang ke dua pandemi Covid-19 dengan varian baru yang terus merebak, membuat pemerintah memberlakukan PPKM membuat kegiatan ekonomi mulai dibatasi kembali. Kondisi tersebut membuat kinerja investasi agak terganggu, membuat investasi domestik yang terkumpul di triwulan II tahun 2021 mengalami penurunan dari triwulan sebelumnya sebesar 1,63 persen atau hanya mencapai Rp 106,25 triliun. Gambaran yang terjadi di triwulan I –II tahun 2021 ini semoga masih memberikan semangat bagi investor domestik sampai diakhir tahun 2021.

Gambar 8.1. Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Sektor (Miliar Rupiah), Tahun 2021



Sumber: BKPM

Memasuki Triwulan I tahun 2021, realisasi nilai PMDN sebagian besar terserap di sektor Industri dengan nilai investasi sebesar Rp 22,97 triliun yang tersebar di 6 091 proyek. Sektor terbesar kedua yang mampu menyerap investasi domestik adalah sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran dengan nilai sebesar Rp 21,61 triliun dan tersebar di 1 538 proyek. Kinerja sektor lainnya hanya mampu menyerap investasi domestik antara 3-12 persen saja.

Dalam kondisi gelombang ke dua pandemi, sebagian besar investasi domestik masih terserap di sektor industri dengan nilai investasi mencapai Rp 23,33 triliun atau naik sekitar 1,57 persen dari triwulan sebelumnya dan tersebar di 6.376 proyek. Sektor terbesar kedua yang mampu menyerap investasi domestik adalah sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran dengan nilai investasi mencapai Rp 20,54 triliun atau turun sebesar 4,96 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Perkembangan investasi domestik berdasarkan pulau masih menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi wilayah yang dilirik oleh para investor. Keunggulan Pulau Jawa karena sudah tersedianya infrastruktur yang sangat memadai. Jadi lebih dari 50 persen investasi domestik berada di Pulau Jawa, walaupun setiap tahun kontribusi investor yang berinvestasi mulai menurun tapi penurunan masih sangat lambat. Tahun 2018 investasi yang terserap di Pulau Jawa mencapai 53,85 persen dengan Nilai investasi sebesar Rp 176,95 triliun. Pulau Jawa di tahun 2019 mampu menyerap investasi sebesar Rp 202,49 triliun atau terjadi kenaikan sebesar 14,43 persen dibanding tahun lalu.

Selanjutnya, posisi ke dua pulau yang mampu menyerap investasi domestik adalah Pulau Sumatera dari nilai investasi domestik sebesar Rp 57,82 triliun pada tahun 2018 secara signifikan naik hingga 56,50 persen dengan nilai mencapai Rp 90,49 triliun di tahun 2019. Investasi yg diserap di pulau Kalimantan pada tahun 2018 mencapai Rp 56,96 triliun, namun di tahun 2019 investasi yang terserap hanya mencapai Rp 52,70 triliun saja atau mengalami penurunan sebesar 7,47 persen dari tahun sebelumnya.

Disaat Indonesia dilanda pandemi Covid-19 pada tahun 2020, dimana Pulau Jawa dinyatakan sebagai zona merah berarti banyak penduduk di Pulau Jawa yang terpapar atau terjangkit wabah Covid-19. Namun kondisi ini tidak menurunkan niat investor untuk berinvestasi di Pulau Jawa. Karena fasilitas infrastruktur dan fasilitas lainnya yang ada di Pulau Jawa masih dapat mendukung dan masih menjadi daya tarik para investor untuk berinvestasi. Pada tahun 2020 Pulau Kalimantan dan Sulawesi mengalami penurunan nilai investasi dari tahun sebelumnya. Pulau Jawa, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua mengalami peningkatan nilai investasi, bahkan Pulau Maluku dan Papua mengalami kenaikan yang sangat signifikan mencapai 200 persen lebih. Namun, nilai investasi yang terserap di Pulau Maluku dan Papua masih yang terkecil dibanding pulau lainnya dengan nilai

investasi masih jauh dibawah Rp 10 triliun. Kenaikan nilai investasi terbesar pada tahun 2020 adalah Pulau Sumatra mencapai 23,35 persen dengan nilai investasi mencapai Rp 111,62 triliun.

Tabel 8.2. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Pulau (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2020

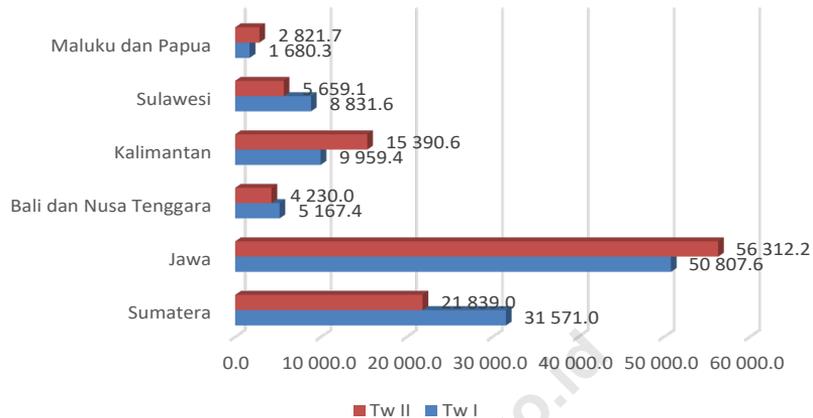
Pulau	2018		2019		2020	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Sumatera	2 293	57 820,4 (17,60)	5 762	90 491,8 (23,41)	18 988	111 623,2 (26,99)
Jawa	6 350	176 952,9 (53,85)	17 691	202 493,6 (52,39)	58 826	214 451,0 (51,86)
Bali dan Nusa Tenggara	357	9 93,0 (3,02)	1 428	14 664,7 (3,79)	4 474	15 043,6 (3,64)
Kalimantan	1 087	56 957,0 (17,33)	3 694	52 704,9 (13,64)	8 818	45 422,0 (10,98)
Sulawesi	634	23 499,4 (7,15)	1 660	24 229,7 (6,27)	4 500	21 211,2 (5,13)
Maluku dan Papua	94	3 445,2 (1,05)	216	1 913,7 (0,50)	1 017	5 784,5 (1,40)
Jumlah	10 815	328 604,9	30 451	386 498,4	96 623	413 535,5

Sumber: Indikator Ekonomi

Menginjak tahun 2021, dimana wabah Covid 19 masih menyelimuti Indonesia tidak membuat kinerja investasi Indonesia melemah, masih mampu bertahan dan bergerak untuk mengajak investor dalam negeri ikut berperan. Persebaran investasi pada triwulan I tahun 2021 di luar Pulau Jawa mencapai Rp 57,21 triliun (52,97 persen), melebihi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 50,81 triliun (47,04 persen). Investasi yang terserap di Pulau Sumatra pada triwulan I 2021 mencapai Rp 31,57 triliun (29,23 persen) sedangkan Pulau lainnya investasi domestik yang terserap di triwulan I 2021 masih dibawah Rp 10 triliun. Investasi masih menjadi andalan pemerintah disaat pandemi karena kerjanya masih menunjukkan pergerakan positif

Memasuki triwulan II tahun 2021 investasi domestik yang terkumpul sebagian besar masih terserap di Pulau Jawa mencapai 53,00 persen dengan nilai investasi mencapai Rp 56,31 triliun. Investasi yang terserap di Pulau Jawa mengalami kenaikan 10,83 persen dibanding triwulan I 2021. Kenaikan investasi di triwulan II 2021 juga terjadi di Pulau Kalimantan serta Pulau Maluku dan Papua masing-masing naik sebesar 54,53 persen dan 67,92 persen. Nilai investasi yang terserap di Pulau Kalimantan mencapai Rp 15,39 triliun (14,48

Gambar 8.2 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Pulau (Miliar Rupiah), Tw I dan Tw II 2021



Sumber: BKPM

persen) dan investasi yang terserap di Pulau Maluku dan Papua mencapai Rp 2,82 triliun (2,66 persen).

Penanaman Modal Asing (PMA) yang Bertahan di Masa Pandemi Covid-19

Selain investasi domestik atau PMDN, BKPM juga menghimpun investasi yang berasal dari investor luar negeri yang biasa disebut PMA. Selama ini investasi yang terkumpul dari luar negeri lebih besar dari investasi domestik. Pada tahun 2018 investasi PMA yang masuk ke Indonesia mencapai US\$ 29,31 miliar yang tersebar di 21.972 proyek. Investasi PMA yang masuk ke Indonesia di tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 3,75 persen dari tahun lalu dengan nilai investasi hanya mencapai US\$ 28,21 miliar, namun proyek yang menyerap investasi asing lebih banyak dari tahun lalu mencapai 30.352 proyek.

Di tengah krisis kesehatan akibat hantaman Covid-19 dan berakibat ke krisis ekonomi, BKPM berusaha menjaga investor asing agar tetap bertahan berinvestasi di Indonesia. Pada tahun 2020 realisasi PMA yang dapat dikumpulkan sebesar US\$ 28,67 miliar lebih tinggi dibanding tahun 2019 atau naik sebesar 1,62 persen walaupun nilai investasi tersebut masih rendah jika dibanding tahun 2018.

Kondisi investasi asing yang masuk ke Indonesia di awal tahun 2021 (Januari-Maret) hanya sebesar US\$ 7,65 miliar yang tersebar di 13.010 proyek. Memasuki triwulan II 2021 investasi asing yang terealisasi mencapai US\$ 8,00 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 4,50 persen yang tersebar di 13.375 proyek. Kondisi ini memberikan harapan bagi Indonesia kedepannya, modal asing dapat terus masuk ke Indonesia.

Investasi asing yang terealisasi di tahun 2019 berdasarkan sektor menunjukkan bahwa sektor industri masih memiliki magnet tersendiri bagi investor asing. Dari total investasi asing 78,70 persen terserap disektor industri, dengan nilai investasi sebesar US\$ 22,20 miliar. Perkembangan realisasi investasi asing pada tahun 2019 hampir di semua sektor mengalami penurunan hanya 3 sektor yang mengalami peningkatan. Kenaikan tertinggi terjadi disektor Industri dengan kenaikan lebih dari 100 persen tepatnya sebesar 114,55 persen. Kenaikan juga terjadi di sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi serta sektor listrik, Gas dan Air masing-masing naik sebesar 56,18 persen dan 35,07 persen. Penurunan tertinggi terjadi pada sektor Pertanian mencapai 42,01 persen dengan nilai investasi PMA hanya sebesar US\$ 1,04 miliar.

Secara total investasi asing di tahun 2020 naik, namun jika dilihat persektor seperti tahun lalu sebagian besar mengalami penurunan. Sektor industri pada tahun 2019 mengalami kenaikan paling tinggi, namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding sektor lainnya yaitu mencapai 40,53 persen. Walaupun mengalami penurunan nilai

Tabel 8.3. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Sektor (Juta US\$) Tahun 2018-2020

Sektor	2018		2019		2020	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	847	1 788,7 (6,10)	1 255	1 037,3 (3,68)	2 294	1 275,0 (4,45)
Pertambangan	606	3 038,6 (10,37)	758	2 256,3 (8,00)	1 199	2 005,1 (6,99)
Industri	7 843	10 347,6 (35,31)	9 874	22 201,9 (78,70)	19 359	13 202,4 (46,06)
Listrik, Gas dan Air	515	4 383,8 (14,96)	646	5 921,2 (20,99)	846	4 613,9 (16,0)
Konstruksi	301	2 48,1 (0,85)	430	161,6 (0,57)	856	189,5 (0,66)
Perdagangan dan Reparasi Hotel dan Restoran	7 247	1 478,2 (5,04)	10 171	1 047,1 (3,71)	18 582	875,2 (3,05)
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	578	3 027,2 (10,33)	805	4 727,8 (16,76)	1 588	3 580,4 (12,49)
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	941	4 302,7 (14,68)	1 308	2 888,5 (10,24)	2 209	2 191,4 (7,64)
Jasa Lainnya	3 094	692,9 (2,36)	5 107	617,9 (2,19)	9 793	733,3 (2,56)
Jumlah	21 972	29 307,9 (100,00)	30 354	28 208,8 (100,00)	56 726	28 666,3 (100,00)

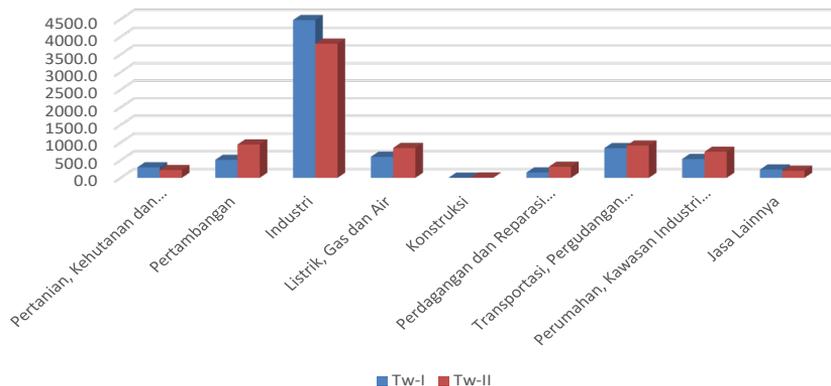
Sumber: Indikator Ekonomi

investasi, tetapi sektor industri masih yang diminati oleh investor asing dan mampu menyerap investasi sebesar US\$ 13,20 miliar. Sektor yang mengalami kenaikan tertinggi nilai investasi asing di tahun 2020 adalah sektor pertanian yaitu mencapai 22,92 persen dengan nilai investasi sebesar US\$ 1,28 miliar. Realisasi nilai investasi asing juga mengalami kenaikan di sektor Konstruksi (17,25 persen) dan sektor Jasa Lainnya (18,67 Persen) dengan nilai investasi masing-masing sebesar US\$ 0,19 miliar dan US\$ 0,73 miliar.

Pemerintah dimasa pandemi melakukan berbagai upaya strategis pada sektor industri dalam rangka meningkatkan daya saing untuk ekspor dan investasi. Program pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri dengan melakukan percepatan dalam mengimplementasikan teknologi digital dalam proses produksi agar lebih efisien dan kompetitif. Kekuatan sektor industri di dalam negeri mampu menarik investasi asing US\$ 4,47 miliar atau sekitar 58,46 persen dari total investasi asing yang masuk ke Indonesia di triwulan I 2021. Sektor yang juga menjadi incaran para investor asing adalah sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi dengan nilai investasi sebesar US\$ 0,88 miliar (11,02 persen). Di luar ke dua sektor tersebut nilai investasi asing yang terserap masih dibawah US\$ 0,6 miliar.

Memasuki triwulan II tahun 2021 sektor industri hanya mampu menyerap investasi asing sebesar US\$ 3,80 miliar (47,56 persen) lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya atau turun sebesar 14,98 persen. Sektor Pertambangan dan sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi masing-masing mampu menyerap investasi asing sebesar US\$ 0,94 miliar (11,80 persen) dan 0,92 miliar (11,46). Sektor-sektorlainnya hanya mampu menyerap investasi asing US\$ 0,20 miliar – US\$ 0,85 miliar.

Gambar 8.3. Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Sektor (Miliar US\$), TW-I & Tw_II 2021



Sumber: BKPM

Salah satu syarat mutlak bagi investor dalam melakukan investasi adalah tersedianya infrastruktur yang memadai membuat distribusi menjadi lancar. Syarat tersebut membuat investor merasa nyaman dalam berinvestasi, terbukti dalam 3 tahun terakhir dari Table 8.4 terlihat bahwa Pulau Jawa masih menjadi wilayah yang paling diminati oleh investor asing, walaupun kontribusinya dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada tahun 2019 investasi asing yang terserap di Pulau Jawa mencapai 54,86 persen dari total investasi asing, dengan nilai investasi asing sebesar US\$ 15,48 miliar. Investasi asing yang terserap di Pulau Jawa di Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9,21 persen dibanding tahun 2018 yang nilai investasinya mencapai US\$ 17,05 miliar.

Kebijakan dan program-program yang dibuat pemerintah di bidang investasi agar kedepannya investasi yang terkumpul baik PMDN maupun PMA dapat berkualitas semakin merata ke luar Pulau Jawa, dimana investor tidak hanya berpusat di Jawa. Pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan dan yang sedang dilakukan di luar Pulau Jawa semoga mampu membawa investor asing merasa nyaman berinvestasi ke daerah-daerah yang selama ini belum dijamah secara maksimal. Ternyata usaha pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa, seperti pembangunan trans Sumatera, trans Kalimantan, trans Maluku dan trans Papua mulai terlihat dengan masuknya investasi asing ke luar Pulau Jawa. Pulau yang mulai dilirik investor asing adalah Pulau Sumatera dan wilayah Timur Indonesia (Maluku Utara dan Papua).

Tabel 8.4. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Pulau (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2020

Pulau	2018		2019		2020	
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Sumatera	2 356	4 839,4 (16,51)	3 809	4 251,3 (15,07)	6 665	6 188,8 (21,59)
Jawa	15 533	17 046,0 (58,16)	19 801	15 476,3 (54,86)	39 529	13 499,3 (47,09)
Bali dan Nusa Tenggara	2 316	1 354,4 (4,62)	4 029	823,5 (2,92)	6 263	676,6 (2,36)
Kalimantan	914	1 954,4 (6,67)	1 438	2 131,4 (7,56)	2 328	1 624,2 (5,67)
Sulawesi	608	2 323,9 (7,93)	918	3 497,2 (12,40)	1 393	3 513,4 (12,26)
Maluku dan Papua	245	1 789,9 (6,11)	359	2 028,7 (7,19)	548	3 164,0 (11,04)
Jumlah	21 972	29 307,9 (100,00)	30 354	28 208,8 (100,00)	56 726	28 666,3 (100,00)

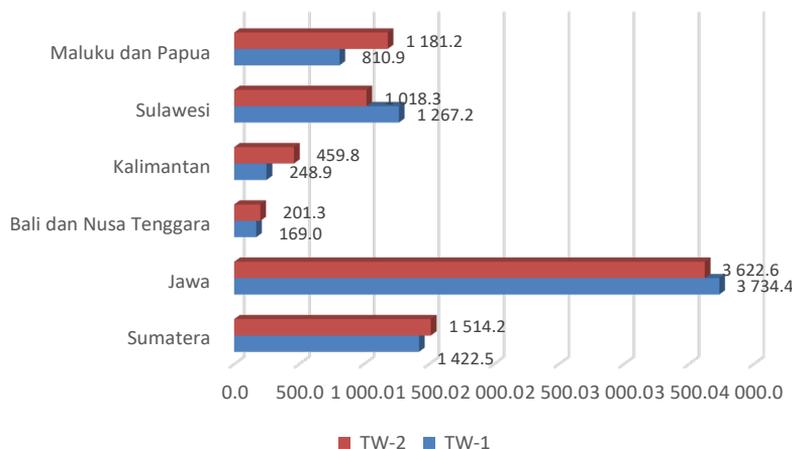
Sumber: Indikator Ekonomi

Investasi asing yang terkumpul di tahun 2020 mencapai US\$ 28,67 miliar mengalami kenaikan 1,62 persen dibanding tahun 2019. Pulau Jawa masih menjadi incaran investor asing, namun kontribusinya terus mengalami penurunan. Investasi asing yang terserap di Pulau Jawa hanya sebesar 47,09 persen dengan nilai investasi mencapai US\$ 13,50 miliar atau turun sekitar 12,77 persen.

Pulau yang menyerap investasi asing di tahun 2020 dan mengalami kenaikan adalah Pulau Sumatera yang mampu menyerap investasi asing sebesar US\$ 6,19 miliar (21,59 persen) mengalami kenaikan sekitar 45,57 persen. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi serta Pulau Maluku dan Papua masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,46 persen (US\$ 3,51 miliar) dan 59,96 persen (US\$ 3,16 miliar).

Bahkan setahun pandemi Covid-19 di Indonesia membuat kegiatan ekonomi masih terus dibatasi oleh aturan protokol kesehatan dan pembatasan yang bisa memicu terjadinya kerumunan orang. Terutama kondisi Covid-19 yang terjadi di Pulau Jawa masih cukup tinggi dibanding pulau lainnya, namun dengan dukungan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum yang memadai masih mampu menangani pandemi tersebut. Sehingga PMA yang terealisasi sepanjang triwulan I 2021 yang terserap di Pulau Jawa masih tinggi mencapai 48,80 persen dengan nilai investasi sebesar Rp 50,81 triliun. Investasi di luar Pulau Jawa mencapai 51,20 persen. Pulau di luar Pulau Jawa yang mampu menyerap investasi asing terbesar adalah Pulau Sumatera dengan nilai investasi sebesar US\$ 1,42 miliar (18,59 persen) dan Pulau Sulawesi dengan nilai investasi sebesar US\$ 1,27 (16,56 persen).

Gambar 8.4 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menurut Pulau (miliar rupiah), Tw I dan Tw II 2021



Sumber: BKPM

Investasi asing yang terkumpul di triwulan II tahun 2021 sebagian besar masih terserap di Pulau Jawa sebesar 45,30 persen dengan nilai investasi mencapai US\$ 3,62 miliar. Pulau Sumatera mampu menyerap investasi asing sebesar US\$ 1,51 miliar dengan kontribusi sebesar 18,93 persen. Pada triwulan II tahun 2021 kemajuan terjadi di Pulau Maluku dan Papua yang mampu menyerap investasi asing sebesar US\$ 1,18 miliar dengan kontribusi mencapai 14,77 persen. Kinerja investasi daerah dalam menarik investor asing cukup membanggakan karena mampu mengalahkan investasi yang terserap di Pulau Kalimantan dan Sulawesi.

Pemerintah berharap dengan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja, diharapkan dapat mendorong meningkatnya arus modal yang masuk ke Indonesia, sehingga dapat mendorong tumbuhnya investasi di sektor riil dan membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Tersedianya lapangan kerja baru dapat mengurangi tingkat pengangguran, dan kondisi perekonomian Indonesia perlahan akan pulih.

Investasi asing yang masuk ke Indonesia sebagian besar berasal dari Negara-negara yang berada di Benua Asia, dimana investasi yang terkumpul dari negara-negara di Benua Asia mencapai 77,51 persen. Negara yang paling banyak melakukan investasi yaitu dari Negara tetangga Singapura, Jepang, Tiongkok dan Hongkong, total dari ke 4 negara tersebut mencapai US\$ 18,53 miliar atau sekitar 63,24 persen dari total investasi asing yang masuk ke Indonesia. Pada tahun 2019 investasi dari 4 negara tersebut mencapai US\$ 18,46 miliar mengalami sedikit penurunan sekitar 0,42 persen, penurunan terjadi karena investasi yang berasal dari negara Singapura dan Jepang turun masing-masing sebesar 29,19 persen dan 12,96 persen sedangkan Negara Tiongkok dan Hongkong mengalami peningkatan.

Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit bagi semua negara yang terkena wabah Covid-19, Negara Tiongkok sebagai wilayah pertama ditemukannya wabah Covid-19 ternyata tidak menyurutkan kegiatan investor dari negara tersebut untuk berinvestasi ke Indonesia disaat pandemi. Investasi asing yang masuk dari negara Tiongkok pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun 2019 yaitu sekitar 2,06 persen dengan nilai mencapai US\$ 4,84 miliar. Kenaikan investasi asing tertinggi berasal dari Negara Singapura mencapai 50,23 persen dengan nilai investasi mencapai US\$ 9,78 miliar dan investasi dari Negara Hongkong naik sekitar 22,31 persen (US\$ 3,54 miliar). Investasi yang berasal dari Negara Jepang kembali turun hingga 39,97 persen dengan nilai investasi hanya US\$ 2,59 miliar.

Indonesia boleh berbangga, walaupun belum meredanya kasus Covid-19 di tahun 2021, tapi kegiatan investasi masih terus berjalan. Bahkan Indonesia masih menjadi incaran investor asing. Investasi asing yang masuk ke Indonesia di tahun 2021 sebagian besar didominasi negara-negara yang berasal dari benua Asia, yaitu lebih dari 50 persen. Lima negara asal terbesar

Tabel 8.5. Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menurut Negara Asal (Miliar US\$) Tahun 2018-2020

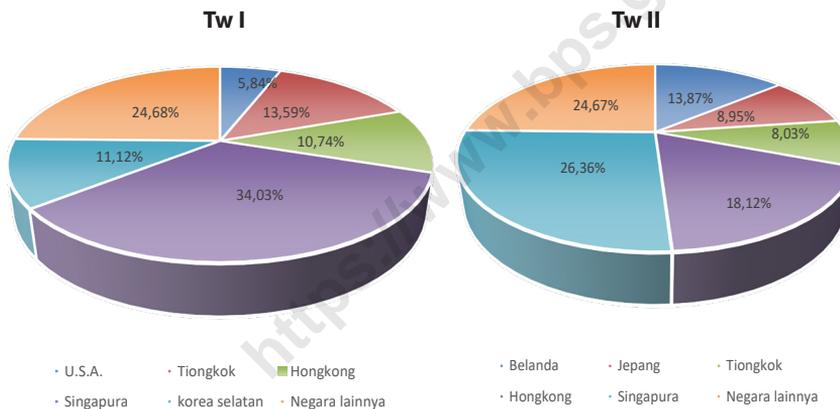
Negara Asal	2018		2019		2020
	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek
AMERIKA/AMERICA	2 031	3 568,4	2 556	2 139,1	3 590
U,S,A,	572	1 217,6	788	989,3	1 471
Amerika Lainnya / Rest Of America	1 459	2 350,8	2 260	1 894,9	3 139
EROPA/EUROPE	3 346	2 321,0	5 286	3 655,5	9 275
Belanda / Netherlands	840	943,1	1,345	2 596,8	2 537
Jerman / Germany	361	280,4	533	189,3	1 008
Inggris / United Kingdom	483	271,1	757	142,1	1 386
Swiss / Switzerland	225	243,3	324	150,7	554
Eropa Lainnya / Rest of Europe	1437	583,1	2327	576,6	3 790
A S I A	15 877	22 716,8	20 869	21 567,4	41 310
Jepang / Japan	3 166	4 952,8	3 835	4 310,9	8 817
Tiongkok / China	1 562	2 376,5	2 130	4 744,5	3 027
Hongkong	1 072	2 011,4	1 508	2 891,0	2 789
Singapura / Singapore	4 946	9 193,2	7 020	6 509,6	15 088
Asia Lainnya / Rest of Asia	5 131	4 182,9	6 376	3 111,3	11 589
AUSTRALIA	779	1 010,8	1 247	519,9	1 908
Australia	635	597,4	1 049	348,3	1 562
Selandia Baru / New Zealand	60	9,3	108	3,2	169
Australia Lainnya / Rest of Australia	84	404,1	90	168,4	177
AFRIKA/AFRICA	299	373,9	396	326,9	643
Nigeria	20	0,5	26	0,2	10
Afrika Lainnya / Rest Of Africa	279	373,5	370	326,6	633
NEGARA LAINNYA / OTHER COUNTRIES	4 777	4 385,9	4 777	4 385,9	4 777
Jumlah	21 972	29 307,9	30 354	28 208,8	56 726

Sumber: Indikator Ekonomi

investasi asing yang masuk ke Indonesia pada triwulan I 2021, adalah Negara Singapura dengan investasi mencapai US\$ 2,60 miliar (34,03 persen), Tiongkok dengan nilai investasi mencapai US\$ 1,04 miliar (13,59 persen), Korea Selatan dengan nilai investasi mencapai US\$ 0,85 miliar (11,12 persen), dan Hong Kong dengan nilai investasi mencapai US\$ 0,82 miliar (10,74 persen). Salah satu negara di luar Benua Asia dengan nilai investasi yang cukup besar adalah Amerika dengan nilai investasi mencapai US\$ 0,45 miliar (5,84 persen).

Investasi asing yang masuk ke Indonesia di triwulan II tahun 2021 masih didominasi negara-negara di Benua Asia. Negara Singapura masih menjadi yang tertinggi walaupun investasi dari investor Singapura yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan dibanding triwulan I 2021, penurunan investasi asing juga terjadi yang berasal dari negara Tiongkok. Investasi asing yang berasal dari negara Hongkong mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2021 terlihat bahwa investor dari Jepang dan Belanda banyak yang mulai berinvestasi di Indonesia, investasi dari ke dua negara ini masing-masing mencapai US\$ 0,72 miliar (8,95 persen) dan US\$ 1,11 miliar (13,87 persen). Semoga wabah Covid-19 segera berlalu tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara mitra dagang Indonesia dan negara-negara asal investasi yang masuk di Indonesia, sehingga kedepannya mampu meningkatkan kegiatan ekspor dan kinerja investasi ke depan.

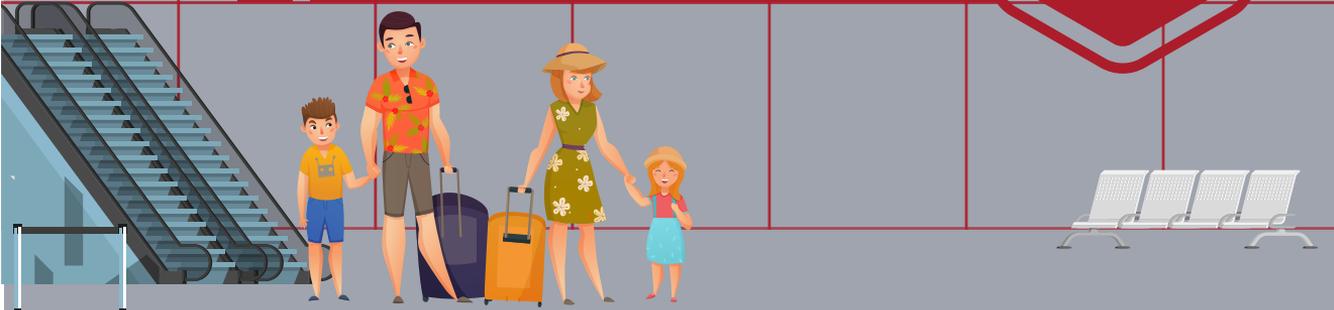
Gambar 8.5. Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) menurut 5 Besar Negara Asal (Miliar US\$), Tw I dan Tw-II 2021



Sumber: BKPM



Pariwisata



Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (kunjungan)



Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia pada 2020 Turun **74,84%** Dibanding 2019



Kunjungan wisman ke Indonesia didominasi oleh wisman berkebangsaan Malaysia. Pada tahun 2020 kunjungan dari Malaysia sebanyak **980,12 ribu kunjungan.**

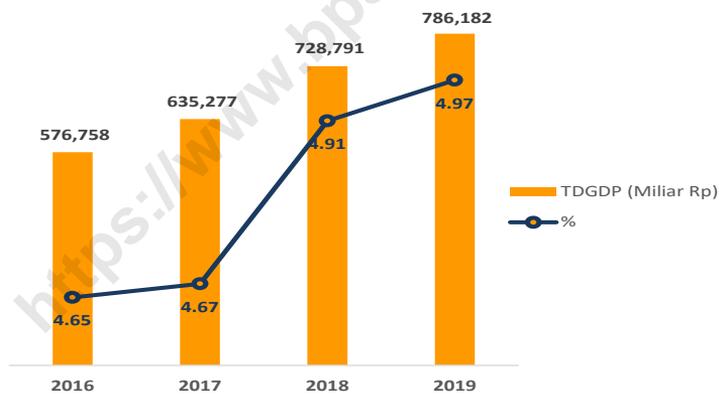
Kunjungan Wisatawan Mancanegara Terbanyak Menurut Kebangsaan (ribu kunjungan)



<https://www.bps.go.id>

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan dan berperan penting dalam perekonomian nasional. Pariwisata sangat berkaitan sekaligus memberikan multiplier effect terhadap pendapatan dan permintaan tenaga kerja di sektor-sektor lain seperti penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa transportasi. Sektor pariwisata secara global merupakan salah satu pencipta lapangan kerja terbesar dan menyumbang hingga 10 persen dari output ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir sektor pariwisata menjadi sumber pertumbuhan ekonomi penting bagi banyak negara (WTO, 2020). Di Indonesia sendiri, hasil dari *Tourism Satellite Account* (TSA) BPS menyebutkan kontribusi sektor pariwisata mencapai Rp 786 miliar. Angka tersebut berkontribusi 4,97 persen terhadap total PDB Indonesia dengan tren meningkat tiap tahunnya. Sektor pariwisata juga memberikan sumbangan besar dalam penerimaan devisa negara, mencapai US\$ 15 miliar per tahun (money.kompas.com, 2020).

Gambar 9.1 Perkembangan kontribusi pariwisata terhadap PDB Indonesia, 2016-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Menyebarnya virus corona ke berbagai negara termasuk Indonesia pada awal tahun 2020 mempengaruhi kinerja sektor pariwisata. Bahkan menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dampak pandemi Covid-19 paling berat di sektor pariwisata (money.kompas.com, 2020). Kebijakan pembatasan penerbangan internasional oleh banyak negara mengakibatkan kunjungan wisatawan mancanegara merosot tajam. Ditjen Imigrasi mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2020 hanya 4 juta kunjungan, menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai 15 juta kunjungan. Hal ini tentu berdampak pada perekonomian nasional dan daerah, khususnya untuk daerah yang pendapatannya bertumpu pada sektor pariwisata, misalnya Provinsi Bali.

Akibat berkurangnya turis asing di Indonesia, Kemenparekraf memperkirakan penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata turun drastis menjadi US\$ 3 hingga US\$ 4 miliar. Tingkat hunian pada hotel bintang pada tahun 2020 sebesar 34,23 persen, turun cukup tajam dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 53,13 persen. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat hingga semester I 2020, pandemi Covid-19 menyebabkan 2000 hotel dan restoran tutup yang berdampak pada dirumahnya 1 juta pekerja di sektor tersebut (cnbcindonesia.com, 2020).

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata. Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (*New Normal*) membawa dampak pada perbaikan angka wisatawan khususnya wisatawan domestik dan tingkat hunian hotel meskipun belum sepenuhnya pulih. Kemenparekraf memastikan penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha di sektor pariwisata melalui program sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*). Program tersebut memberikan jaminan aman dan nyaman kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan oleh usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya (chse.kemenparekraf.go.id).

Pemerintah, melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), memberikan beberapa stimulus atau insentif untuk mendorong pemulihan ekonomi, termasuk sektor pariwisata. Anggaran pemerintah dalam program PEN untuk stimulus sektor pariwisata sebesar Rp 3,8 Triliun, terinci menjadi hibah pariwisata untuk insentif pajak hotel dan restoran (Rp 3,3 Triliun), insentif tambahan untuk membangun kepercayaan dan minat pasar melalui program sertifikasi CHSE secara gratis oleh Kemenparekraf (Rp 70 Miliar), dan insentif penerbangan melalui Kemenhub (Rp 430 Miliar).

Dana hibah untuk sektor pariwisata ditujukan untuk membantu pemerintah daerah untuk memulihkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta industri hotel dan restoran yang terganggu finansialnya akibat pandemi. Penyaluran dana hibah diatur melalui PMK Nomor 46 tahun 2020 mengenai Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan KMK Nomor 23/KM.7/2020 tentang Tahapan Penyaluran Hibah Pariwisata dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020.

Dari total Rp 3,3 Triliun dana hibah sektor pariwisata, 30 persen ditujukan untuk pemerintah daerah untuk pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentunya tidak semua daerah mendapatkan dana hibah sektor pariwisata. Kriteria daerah penerima hibah pariwisata yaitu: daerah tersebut termasuk dalam 10 Destinasi Prioritas Pariwisata (DPP) dan 5 Destinasi Super Prioritas (DSP), daerah ibukota provinsi, destinasi branding, daerah yang menghasilkan minimal Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR) 15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2019, dan daerah yang termasuk dalam 100 *Calender of Event* (CoE) (Kemenkeu,

2020). Sedangkan 70 persen dana hibah akan disalurkan kepada pelaku usaha hotel dan restoran guna membantu dalam penerapan protokol kesehatan CHSE dalam operasional sehari-hari (travel.kompas.com, 2020).

Hingga akhir tahun 2020, realisasi penyaluran dana hibah pariwisata mencapai Rp 2,26 triliun atau 70 persen dari total anggaran. Dana tersebut disalurkan untuk 6.818 hotel dan 7.625 restoran (travel.detik.com, 2021). Melanjutkan upaya pemulihan sektor pariwisata, pemerintah dalam APBN 2021 menyiapkan anggaran Rp 14,2 Triliun untuk mendorong pemulihan geliat pariwisata Indonesia. Ditjen Anggaran melalui media sosialnya menjelaskan bahwa arah kebijakan di sektor pariwisata di tahun 2021 meliputi: pemulihan pariwisata khususnya pada 5 destinasi super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang), pengembangan aspek 3A (atraksi, aksesibilitas, dan amenitas) serta peningkatan pada 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta), pendekatan *storynomics tourism* yang mengedepankan narasi, konten kreatif, *living culture*, kekuatan budaya, serta skema KPBUs dalam membangun pusat-pusat hiburan (Kemenkeu, 2021).

Pemerintah di tahun 2021 juga akan melanjutkan program-program yang sudah berjalan seperti subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan KUR pariwisata. Program Kartu Pekerja di 2021 juga akan diperluas untuk pekerja di sektor pariwisata (Kemenkeu, 2021). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perlunya pergeseran target untuk membidik wisatawan domestik. Upaya-upaya pemerintah melalui kebijakan dan stimulus di bidang pariwisata diharapkan memberikan rasa aman, nyaman, dan mendapatkan kepercayaan dari para wisatawan untuk kembali meramaikan pariwisata Indonesia. Memasuki kuartal terakhir 2020, pariwisata mengalami sedikit kenaikan dilihat dari naiknya wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel khususnya di akhir tahun 2020. Meskipun demikian, untuk kembali benar-benar pulih, sektor pariwisata masih membutuhkan banyak waktu dan tenaga mengingat sektor ini mengalami dampak dari pandemi Covid-19 paling besar dibandingkan sektor lain.

Gambar 9.2 Laju Pertumbuhan Triwulanan (*y-on-y*), Tahun 2018-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik

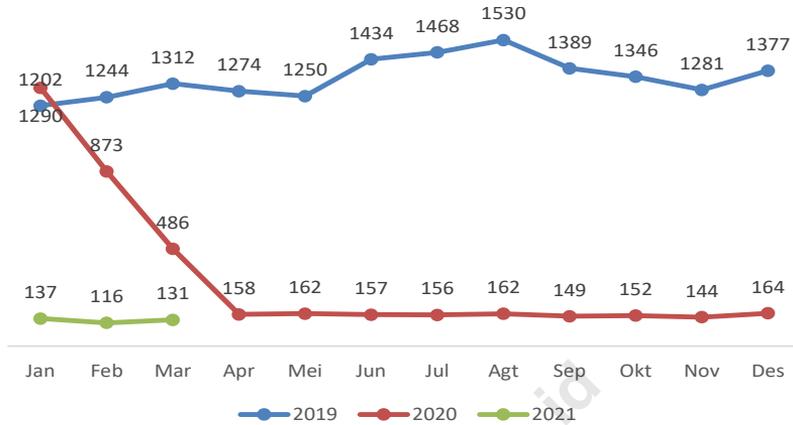
Akibat pandemi Covid-19, Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 berkontraksi 2,7 persen. Sektor transportasi dan perdagangan serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang terkait langsung dalam bidang pariwisata, mengalami kontraksi terdalam dibanding sektor lain masing-masing sebesar 15,04 persen dan 10,22 persen (Berita Resmi Statistik, BPS). Kedua sektor terkait pariwisata tersebut sangat terpuruk di triwulan kedua 2020 (sektor transportasi dan perdagangan berkontraksi 30,8 persen dan sektor penyediaan akomodasi makan minum berkontraksi 22,02 persen), mengingat adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah. Memasuki triwulan ketiga, pemerintah memberlakukan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru serta PSBB transisi. Sektor-sektor ekonomi kembali dibuka dengan pemberlakuan protokol kesehatan. Kebijakan tersebut berdampak pada perbaikan pertumbuhan ekonomi meskipun masih terjadi kontraksi dibandingkan triwulan yang sama di tahun 2019.

Masih Adakah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Saat Wabah Covid-19?

Sektor pariwisata sangat terpuruk akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, hal ini terlihat dari turunnya kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Jumlah kunjungan wisman hingga akhir tahun 2020 hanya mencapai 4 juta kunjungan, menurun 74,84 persen dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 16,11 juta kunjungan. Kondisi tersebut membuat target yang dipasang pemerintah di tahun 2020 tidak dapat tercapai. Sebelumnya, pemerintah menargetkan kunjungan wisman di tahun 2020 sejumlah 18 juta kunjungan. Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia menjadi hambatan aktivitas pariwisata, karena adanya larangan dari beberapa negara yang melarang warganya untuk bepergian ke luar negeri. Bercermin dari kondisi tahun lalu memaksa Kemenparekraf untuk menyesuaikan proyeksi target kunjungan wisman menjadi 4-7 juta kunjungan pada tahun 2021 (travel.kompas.com, 2021). Untuk merealisasikan angka tersebut, Kemenparekraf akan berfokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur terutama di lima destinasi super prioritas, memperkuat fasilitas 3A pariwisata, mendorong investasi sektor pariwisata, serta memperkuat promosi pariwisata melalui teknologi digital.

Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di awal tahun 2020 masih normal, justru jumlah kunjungan wisman mencapai 7,32 persen lebih tinggi jika dibandingkan Januari 2019 (*y-o-y*). Namun, dengan semakin menyebarnya virus corona, banyak negara mulai membatasi penerbangan internasional bahkan melakukan lockdown wilayahnya. Data historis menunjukkan puncak kunjungan wisatawan umumnya terjadi pada Bulan Juni- Agustus. Di tahun 2019, jumlah kunjungan wisman di tiga bulan tersebut mencapai 4,43 juta kunjungan. Sedangkan di tahun 2020 selama Bulan Juni- Agustus tercatat hanya 481,41 ribu kunjungan.

Gambar 9.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia 2019-2021 (Ribu Kunjungan)



Sumber: Dirjen Imigrasi (diolah kembali Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Pada Desember 2020, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat 164,09 ribu kunjungan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 13,88 dibandingkan bulan sebelumnya. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan Desember 2019 angka tersebut merosot tajam hingga 88,09 persen. Berdasarkan keterangan Kepala BPS, kenaikan wisman pada akhir tahun 2020 juga bukan berarti untuk keperluan pariwisata, tetapi untuk bisnis dan kunjungan kerja internasional (nasional.kontan.com, 2021). Memasuki Bulan Januari 2021, kunjungan wisman mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak negara yang memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri, bahkan beberapa negara juga memberlakukan *second wave lockdown*.

Secara historis, kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia paling banyak melalui bandara khususnya Bandara Ngurah Rai di Provinsi Bali. Bali dengan pariwisatanya menjadi salah satu daya tarik wisatawan asing datang ke Indonesia. Namun, adanya pandemi juga berdampak langsung pada pariwisata di Bali. Kunjungan wisatawan mancanegara yang datang melalui Bandara Ngurah Rai sepanjang 2020 hanya mencapai 1,06 juta kunjungan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, angka tersebut mengalami penurunan 83,02 persen. Bulan Juli-Agustus biasanya menjadi puncak kunjungan wisatawan asing ke Bali, tetapi di periode tersebut hanya terdapat 28 kunjungan di tahun 2020. Kondisi tersebut merosot tajam dibanding Bulan Juli-Agustus 2019 yang tercatat 1,21 juta kunjungan. Namun demikian, kunjungan wisman di Bali masih berkontribusi tertinggi sekitar 26,13 persen dari total wisman Indonesia (turun dari 38,74 tahun 2019). Memasuki tahun 2021, kunjungan wisman ke Bali belum juga normal mengingat negara-negara lain juga masih berjuang untuk mengatasi pandemi.

Tabel 9.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Pintu Masuk Utama 2018-2021 (kunjungan)

Tahun	Pintu Masuk					Jumlah
	Pintu Udara Soekarno-Hatta (Jakarta)	Pintu Udara Ngurah Rai (Bali)	Pintu Udara Juanda (Surabaya)	Pintu Laut Batam	Lainnya	
2018	2 814 586	6 025 760	320 529	1 887 284	4 762 146	15 810 305
2019	2 419 196	6 239 543	243 899	1 947 943	5 256 373	16 106 954
2020	435 139	1 059 198	35 035	295 336	2 228 215	4 052 923
Januari	186 793	533 392	17 119	154 464	398 643	1 290 411
Februari	132 490	358 929	11 706	94 684	274 956	872 765
Maret	53 124	166 388	5 765	43 853	217 025	486 155
April	420	273	25	230	157 118	158 066
Mei	396	34	12	214	161 186	161 842
Juni	909	10	97	94	155 451	156 561
Juli	3 119	16	76	54	152 477	155 742
Agustus	4 469	12	24	50	156 994	161 549
September	7 468	8	20	341	141 147	148 984
Oktober	9 830	7	37	427	141 992	152 293
November	14 309	2	69	454	129 642	144 476
Desember	21 812	127	85	471	141 584	164 079
2021 x						
Januari	1 238	2	20	260	135 710	137 230
Februari	5 958	12	69	157	110 804	117 000
Maret	10 188	3	52	343	120 347	130 933

Catatan: xAngka Sementara

Sumber: Ditjen Imigrasi (diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Tidak jauh berbeda dari Bandara Ngurah Rai, pintu masuk lain yang biasanya ramai oleh wisatawan asing juga sepi kunjungan. Bandara Soekarno-Hatta menerima 0,44 juta kunjungan wisman pada tahun 2020 (turun 82,01 persen dibanding 2019). Kedatangan wisman melalui Bandara Soekarno-Hatta menjelang akhir tahun 2020 cukup mengalami peningkatan dibanding pintu masuk lain. Hal tersebut dikarenakan wisman yang melakukan kunjungan bukan untuk melakukan wisata, tetapi lebih untuk mengurus pekerjaan maupun bisnis yang lebih banyak dilakukan di Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi Indonesia.

Tabel 9.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia Menurut Kebangsaan 2018-2020 (kunjungan)

Negara	Wisman (Orang)		
	2018	2019	2020x
Malaysia	2 503 344	2 980 753	980 118
Singapura	1 768 744	1 934 445	280 492
J a p a n	530 573	519 623	92 228
Korea, Rep.	358 885	388 316	75 562
Taiwan	208 317	207 490	35 680
Tiongkok	2 139 161	2 072 079	239 768
Australia	1 301 478	1 386 803	256 291
Amerika Serikat	387 856	457 832	91 782
Jerman	274 166	277 653	46 361
Belanda	209 978	215 287	53 495
Inggris	392 112	397 624	69 997
Lainnya	5 735 691	5 269 049	1 831 149
Jumlah	15 810 305	16 106 954	4 052 923

Catatan: xAngka Sementara

Sumber: Ditjen Imigrasi (diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Kunjungan wisman ke Indonesia didominasi oleh wisman berkebangsaan Malaysia. Sebanyak 980,12 ribu kunjungan berasal dari Malaysia atau sekitar 24,18 persen dari jumlah kunjungan wisman sepanjang tahun 2020. Namun jika dibandingkan tahun 2019 kunjungan wisman berkebangsaan Malaysia turun 67,12 persen. Penurunan tersebut termasuk yang terendah dibanding dengan kebangsaan lain. Kunjungan wisman berkebangsaan Singapura, yang juga negara tetangga Indonesia, di tahun 2020 merosot tajam hingga 85,50 persen. Kunjungan wisman berkebangsaan Singapura di tahun 2020 tercatat 280,49 ribu kunjungan dan berkontribusi 6,92 persen terhadap total kunjungan wisman.

Penurunan kunjungan paling dalam dialami kunjungan wisman kebangsaan Tiongkok. Penurunannya mencapai 88,43 persen menyisakan 239,77 ribu kunjungan saja di tahun 2020. Padahal di tahun 2019, kunjungan wisman kebangsaan Tiongkok mencapai 2,07 juta kunjungan, kunjungan wisman terbanyak kedua setelah kebangsaan Malaysia. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah melalui Kemenhub untuk pelarangan penerbangan dari dan menuju Tiongkok lebih awal diberlakukan, yaitu pada Bulan Februari 2020 (finance.detik.com, 2020). Keputusan tersebut diambil akibat virus corona yang lebih dahulu menyebar di Tiongkok (dari akhir 2019). Sehingga, penurunan wisman dari Tiongkok terlihat sangat drastis dari 208 ribu kunjungan di Bulan Januari 2020 menjadi 12 ribu kunjungan di Bulan Februari 2020 (Gambar 9.4).

Gambar 9.4 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tertinggi Menurut Kebangsaan, 2020-2021 (ribu kunjungan)

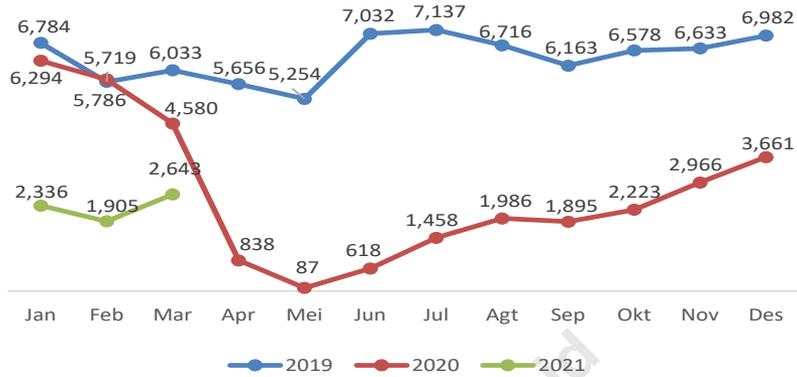


Sumber: Ditjen Imigrasi (diolah kembali oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Kunjungan wisman ke Indonesia di tahun 2020 paling banyak oleh wisman berkebangsaan Malaysia, Singapura, Tiongkok dan Australia. Total kontribusi keempat kebangsaan tersebut tercatat sebesar 43,34 persen terhadap total wisman. Perkembangan kunjungan dari keempatnya dari awal tahun 2020 ditunjukkan pada Gambar 9.4. Secara umum kunjungan wisman mengalami penurunan yang tajam dari Bulan Januari hingga April, kecuali kebangsaan Tiongkok yang menunjukkan tren penurunan sangat tajam pada Bulan Februari. Memasuki Bulan Mei dan seterusnya hingga awal tahun 2021, kunjungan dengan kebangsaan Malaysia mengalami penurunan dengan lebih landai. Sedangkan mulai Bulan April hingga awal tahun 2021 tercatat tidak ada kunjungan wisman kebangsaan Australia (kecuali Desember 2020 tercatat 1 kunjungan wisman kebangsaan Australia). Tidak jauh berbeda untuk wisman kebangsaan Singapura yang hanya mencapai 1 atau 2 kunjungan per bulannya.

Masih mewabahnya Covid-19 hingga awal tahun 2021 mengakibatkan kunjungan wisatawan mancanegara sulit untuk dipulihkan. Setiap negara masih terus berjuang untuk memutus rantai penularan pandemi Covid-19. Bahkan beberapa negara telah atau sedang memasuki gelombang kedua pandemi yang mengakibatkan pembatasan penerbangan ke luar negeri terus diberlakukan.

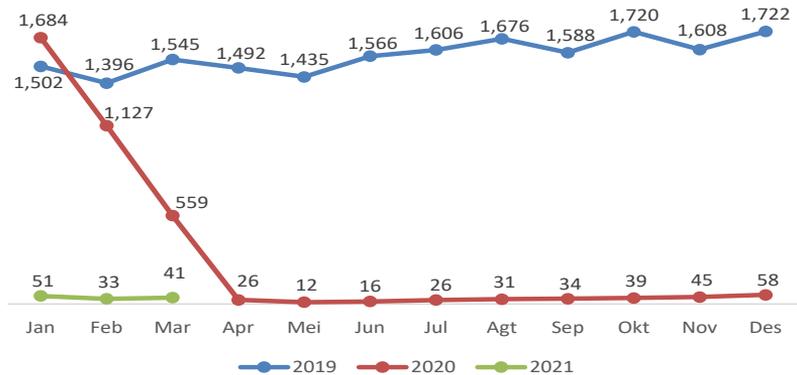
Gambar 9.5 Jumlah keberangkatan penumpang penerbangan internasional (ribu orang)



Sumber: Indikator Ekonomi BPS

Dilihat dari perkembangan transportasi udara, jumlah penumpang yang berangkat pada penerbangan internasional menurun drastis dari Bulan Januari hingga Mei 2020. Pada Bulan Mei 2020, jumlah penumpang yang berangkat pada penerbangan internasional tercatat hanya 12 ribu orang. Angka tersebut mengalami kenaikan secara lambat hingga Desember 2020 mencapai 58 ribu orang. Namun, memasuki tahun 2021 angka tersebut kembali turun. Di sisi lain, penerbangan domestik Indonesia mengalami pemulihan dengan tren yang lebih cepat dibandingkan penerbangan internasional. Jumlah penumpang penerbangan domestik mencapai angka terendah pada Bulan Mei 2020, tercatat hanya 87 ribu orang. Pada Desember 2020, angka tersebut membaik menjadi 3,66 juta orang. Memasuki awal tahun 2021 jumlah penumpang penerbangan domestik kembali turun tetapi dinilai wajar mengingat data historis dengan tren yang cenderung sama.

Gambar 9.6 Jumlah keberangkatan penumpang penerbangan domestik, (ribu orang)



Sumber: Indikator Ekonomi BPS

Walaupun belum sepenuhnya normal, penerbangan domestik telah mengalami pemulihan yang cukup baik. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menjadikan wisatawan domestik sebagai tumpuan untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata Indonesia. Sejak diberlakukannya pelonggaran PSBB, geliat wisata domestik mulai terlihat. Perkembangan angkutan udara domestik mulai meningkat dan wisatawan domestik memilih destinasi wisata dengan penerapan protokol kesehatan (kompas.id, 2020). Sangat penting bagi pelaku usaha di sektor pariwisata untuk menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan operasional usahanya. Selain untuk melindungi pekerjanya, hal tersebut dapat memberikan rasa aman dan menarik minat pengunjung.

Tingkat Hunian Kamar Merosot, Provinsi Bali Paling Terpuruk

Akomodasi menjadi komponen penting dan sarana bagi perkembangan pariwisata. Konsep usaha akomodasi merupakan usaha bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan khusus untuk menginap. Sebagian besar wisatawan tidak terlepas dari kegiatan menginap baik pada akomodasi hotel berbintang, hotel tidak berbintang, dan akomodasi lainnya. Jumlah akomodasi hotel berbintang di Indonesia pada tahun 2020 tercatat sebanyak 3.475 akomodasi. Angka tersebut mengalami penurunan 1,17 persen dibanding tahun 2019. Ketersediaan jumlah kamar dan tempat tidur pada hotel berbintang juga mengalami penurunan seiring penurunan jumlah akomodasi.

Penurunan jumlah akomodasi paling drastis terjadi di Provinsi Bali, di mana tercatat dari 507 akomodasi di tahun 2019 dan di tahun 2020 tersisa 380 akomodasi, turun sekitar 25,05 persen. Ketersediaan kamar dan tempat tidur di Provinsi Bali juga turun drastis, masing-masing sebesar 61,02 persen dan 43,60 persen. Selain Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengalami penurunan jumlah akomodasi dari 72 menjadi 60 akomodasi

Tabel 9.3 Jumlah Akomodasi, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi, 2019-2020

Provinsi	Akomodasi		Kamar		Tempat Tidur	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Aceh	23	24	1 854	1 441	3 114	3 270
Sumatera Utara	130	139	11 568	12 006	20 465	18 563
Sumatera Barat	82	79	4 648	3 202	7 344	7 159
Riau	90	96	7 838	6 587	21 148	11 801
Jambi	36	36	2 567	1 193	3 756	2 988
Sumatera Selatan	85	79	7 259	5 385	10 216	10 052
Bengkulu	10	15	591	668	899	1 385
Lampung	22	27	2 410	1 658	3 448	3 858
Kep. Bangka Belitung	53	55	3 461	3 601	5 508	5 792

Lanjutan

Provinsi	Akomodasi		Kamar		Tempat Tidur	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Kepulauan Riau	127	116	14 978	4 473	19 834	16 216
DKI. Jakarta	397	396	55 800	55 129	69 236	73 246
Jawa Barat	495	514	48 755	51 125	75 098	78 493
Jawa Tengah	311	323	25 630	23 747	40 846	40 772
DI. Yogyakarta	163	162	16 231	7 806	28 552	25 457
Jawa Timur	258	285	27 485	21 453	40 373	43 375
Banten	125	129	12 094	4 315	17 675	17 755
B a l i	507	380	70 146	27 344	97 099	54 762
Nusa Tenggara Barat	72	60	5 173	4 425	7 991	7 047
Nusa Tenggara Timur	30	34	2 243	2 071	3 766	4 172
Kalimantan Barat	42	44	4 390	2 794	6 493	6 401
Kalimantan Tengah	19	19	1 534	1 450	2 242	2 257
Kalimantan Selatan	57	60	4 655	4 754	6 954	6 915
Kalimantan Timur	70	70	7 527	5 069	10 599	10 228
Kalimantan Utara	6	7	323	342	518	364
Sulawesi Utara	42	40	3 821	1 283	5 605	5 147
Sulawesi Tengah	10	11	786	867	1 154	1 322
Sulawesi Selatan	142	151	11 932	5 227	17 636	17 347
Sulawesi Tenggara	21	23	1 634	1 601	2 505	2 562
Gorontalo	7	8	527	525	787	993
Sulawesi Barat	7	7	429	425	679	632
Maluku	20	20	1 254	1 298	1 849	1 812
Maluku Utara	4	9	394	575	671	955
Papua Barat	18	19	1 293	1 099	1 871	2 128
Papua	35	38	2 519	1 934	3 902	4 044
Indonesia	3 516	3 475	363 749	266 872	539 830	489 270

hotel berbintang. Namun, tidak semua provinsi mengalami penurunan jumlah akomodasi, kamar, dan tempat tidur pada hotel berbintang. Beberapa provinsi mengalami kenaikan, seperti Provinsi Maluku utara yang naik dari 4 menjadi 9 akomodasi hotel bintang serta Provinsi Bengkulu naik dari 10 menjadi 15 akomodasi hotel bintang.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu akomodasi hotel di suatu daerah diminati oleh pengunjung melalui indikator Tingkat Penghunian Kamar (TPK) atau *occupancy rate*. Semakin tinggi TPK menunjukkan tingginya minat pengunjung untuk menginap di akomodasi hotel suatu daerah. TPK membandingkan banyaknya malam kamar terpakai dengan

banyaknya malam kamar yang tersedia. Sejalan dengan indikator lain, TPK di tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tercatat TPK di tahun 2020 sebesar 34,23 persen, sedangkan di tahun 2019 TPK mencapai 53,13 berarti terjadi penurunan sebesar 35,57 persen.

Tabel 9.4 Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi 2016-2020 (persen)

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020*
Aceh	46.03	48.58	43.58	42.92	20.40
Sumatera Utara	54.19	55.22	56.87	47.46	31.95
Sumatera Barat	54.32	55.03	56.18	55.10	31.88
Riau	48.51	47.24	48.71	47.78	31.13
Jambi	48.20	46.10	43.44	43.92	27.98
Sumatera Selatan	52.81	60.16	58.88	52.41	36.45
Bengkulu	60.45	58.35	58.91	62.15	38.99
Lampung	50.43	56.08	59.55	59.17	44.11
Kep. Bangka Belitung	39.97	39.40	40.02	35.34	21.59
Kepulauan Riau	49.41	52.84	57.33	50.11	28.93
DKI Jakarta	57.89	67.66	66.65	58.58	44.42
Jawa Barat	55.14	56.80	58.76	52.90	36.18
Jawa Tengah	46.76	49.17	45.49	45.71	27.59
DI Yogyakarta	58.55	59.06	57.24	57.46	38.24
Jawa Timur	59.57	56.54	55.82	55.56	35.76
Banten	53.88	54.47	54.11	48.68	34.00
Bali	61.74	64.24	64.72	59.58	28.71
Nusa Tenggara Barat	42.75	47.91	43.85	41.62	24.14
Nusa Tenggara Timur	53.65	54.67	56.62	51.14	27.83
Kalimantan Barat	51.11	47.43	53.34	46.27	33.65
Kalimantan Tengah	55.76	57.74	59.59	55.21	37.58
Kalimantan Selatan	43.10	48.57	54.99	49.23	37.65
Kalimantan Timur	50.06	50.39	51.34	55.40	41.37
Kalimantan Utara	41.31	31.60	43.01	43.36	36.68
Sulawesi Utara	71.12	62.62	67.51	63.16	40.03
Sulawesi Tengah	59.07	60.56	47.26	47.23	36.94
Sulawesi Selatan	44.68	45.75	50.75	48.67	38.28
Sulawesi Tenggara	40.43	39.37	48.31	40.04	28.41
Gorontalo	47.64	46.19	46.90	48.53	31.02
Sulawesi Barat	45.71	38.41	46.67	47.64	22.78
Maluku	37.50	40.20	39.21	37.10	27.27
Maluku Utara	45.86	51.00	46.13	49.70	27.01
Papua Barat	49.95	59.03	54.20	50.02	38.28
Papua	60.80	56.68	53.28	48.25	30.68
Indonesia	54.29	56.69	58.75	53.13	34.23

Catatan: * Angka Sementara

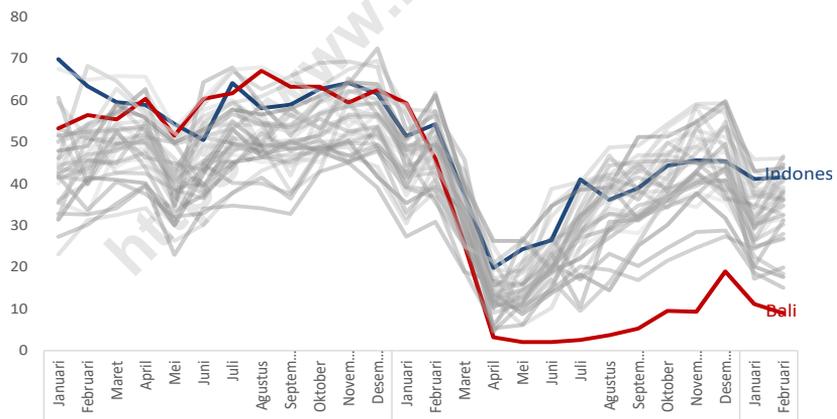
Sumber: Statistik Indonesia

Dilihat berdasarkan provinsi, 34 provinsi di Indonesia semuanya mengalami penurunan TPK di tahun 2020. TPK hotel berbintang tertinggi pada tahun 2020 dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta (44,42 persen), Provinsi Lampung (44,11 persen), dan Provinsi Kalimantan Timur (41,37 persen). Sedangkan

provinsi dengan TPK hotel berbintang paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Barat (22,78 persen), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (21,59 persen), dan Provinsi Aceh (20,40 persen). Secara umum, seluruh hotel berbintang mengalami penurunan TPK paling drastis pada Bulan April 2020. Memasuki triwulan ketiga 2020, TPK hotel berbintang mulai mengalami kenaikan akibat pelonggaran PSBB dan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Memasuki triwulan ketiga 2020, masyarakat kembali menjalankan aktivitas ekonominya tentu dengan penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan pelaku usaha bidang akomodasi serta sertifikasi CHSE yang dikeluarkan pemerintah memberikan rasa aman dan nyaman, serta menarik minat para pengunjung untuk menginap di hotel. Wisatawan domestik memilih melakukan perjalanan dengan destinasi wisata domestik, atau bahkan hanya melakukan *staycation* atau menginap singkat di hotel untuk menghilangkan penat setelah PSBB dilonggarkan. Kenaikan TPK mengalami puncaknya di akhir tahun saat libur natal dan tahun baru 2020 berlangsung.

Gambar 9.7 Perkembangan Tingkat Penghunian Kamar pada Hotel Berbintang Menurut Provinsi Bulanan, 2020-2021

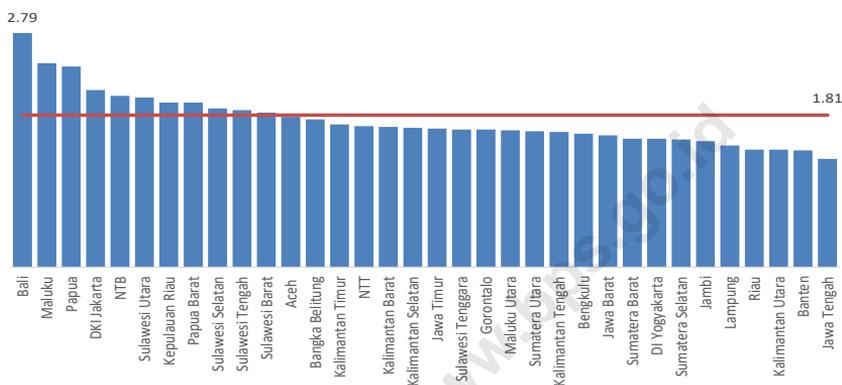


Sumber: Badan Pusat Statistik

Okupansi hotel berbintang di Provinsi Bali, dengan daya tarik pariwisatanya, pada periode waktu sebelumnya tergolong tinggi. Namun di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 TPK hotel berbintang di provinsi tersebut turun sangat drastis. TPK pada hotel berbintang di Provinsi Bali 2020 hanya mencapai 28,71 persen, turun 51,81 persen dibandingkan di tahun 2019 yang mencapai 59,58 persen. Penurunan TPK di Provinsi telah dimulai dari awal tahun 2020, saat kasus Covid-19 belum ditemukan di Indonesia, dan mencapai titik terendah pada Bulan Mei hingga Juni 2020 yang tercatat hanya mencapai 2,07 persen. Di akhir tahun 2020, TPK hotel bintang di Bali hanya 19 persen, terendah di bandingkan provinsi-provinsi lain. Kondisi tersebut dipengaruhi

oleh sedikitnya wisman yang berwisata ke Bali akibat masih diberlakukannya pembatasan penerbangan di berbagai negara. Selain itu, pengetatan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga berpengaruh pada berkurangnya wisatawan. Sebagaimana yang telah disebutkan, wisatawan domestik lebih memilih wisata atau *staycation* di dekat daerahnya dibanding harus ke Bali yang memerlukan penerbangan atau jalur darat lebih lama (kompas.id, 2020).

Gambar 9.8 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Indonesia pada Hotel Berbintang menurut Provinsi, 2020^x



Catatan: ^xAngka Sementara
Sumber: Statistik Indonesia

Rata-rata lama menginap tamu di hotel berbintang, baik tamu asing maupun domestik, pada tahun 2020 adalah 1,81 hari. Artinya, tamu asing dan domestik secara rata-rata menginap di akomodasi hotel berbintang selama kurang lebih 2 hari. Rata-rata lama menginap di beberapa provinsi lebih lama dibandingkan angka nasional. Misalnya rata-rata lama menginap tamu di Provinsi Bali selama 2,79 hari. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dari 2,85 hari di tahun 2019, tetapi rata-rata lama menginap tamu di Bali tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Selain Bali, provinsi lain yang rata-rata lama menginap tamunya lebih lama dari angka nasional adalah Provinsi Maluku (2,43 hari) dan Provinsi Papua (2,39 hari). Sedangkan provinsi dengan rata-rata lama menginap tamu terendah adalah Provinsi Jawa Tengah (1,29 hari).

Secara ringkas, pariwisata Indonesia di tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 sangat terpuruk, dampaknya lebih terasa dibandingkan sektor-sektor lain. Pembatasan sosial, pembatasan penerbangan, dan anjuran untuk tetap di rumah saja sangat berdampak pada sepihnya aktivitas wisata. Namun, dengan upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti pelonggaran PSBB, ajakan berwisata domestik, penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru, sertifikasi CHSE, serta stimulus yang digelontorkan pemerintah melalui

program PEN untuk pemulihan pariwisata berbuah baik dengan meningkatnya aktivitas wisata yang mencapai puncaknya di akhir tahun 2020. Inovasi dan adopsi penerapan protokol kesehatan dalam industri pariwisata menjadi kunci pemulihan sektor ini. Meskipun belum sepenuhnya pulih dan kembali normal, geliat pariwisata mulai kembali terlihat.

Meskipun demikian, untuk memulihkan pariwisata kembali normal seperti sebelum pandemi masih menjadi tantangan untuk berbagai pihak. Pernyataan kepala K/L di pemerintahan seperti Kemenko Perekonomian, Menteri Kemenparekraf, dan Kepala BPS sependapat bahwa pemulihan sektor pariwisata masih membutuhkan waktu yang panjang. Pemulihan bergantung pada penanganan pandemi Covid-19, tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara lain. Untuk saat ini pemulihan pariwisata mengandalkan wisatawan nusantara. Anggaran pemerintah pada tahun 2021 sebanyak Rp 14,2 Triliun diarahkan untuk kegiatan prioritas pemulihan pariwisata terutama pengembangan sarana dan prasarana pendukung di daerah destinasi wisata.

Ketenagakerjaan

10



Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat tajam pada Agustus 2020



Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2020 (dalam persen)

7,46

Laki-laki



8,98

Perkotaan

6,46

Perempuan



4,71

Perdesaan

3 Provinsi dengan TPT tertinggi

10,95

DKI Jakarta

10,64

Banten

10,46

Jawa Barat

Indikator pembangunan ekonomi dapat dilihat melalui kesempatan kerja yang memadai. Tersedianya lapangan kerja baru juga dapat menandakan tercapainya pembangunan ekonomi. Banyaknya masyarakat yang terserap dalam pasar tenaga kerja menjadi kunci dalam pembangunan. Tenaga kerja memiliki peranan penting sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam teori klasik Adam Smith, sumber daya manusia adalah faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu negara.

Selain itu, lapangan kerja yang cukup juga dapat menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Partisipasi kerja yang meningkat akan menaikkan tingkat pendapatan. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat seiring dengan produktivitas masyarakat yang meningkat yang mendorong naiknya tingkat pendapatan. Kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan akan mengangkat derajat ekonomi baik dirinya sendiri maupun keluarganya. Dengan kata lain, kesempatan kerja yang memadai merupakan salah satu wujud dalam mencapai masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Penciptaan lapangan pekerjaan menjadi salah satu langkah yang paling tepat dalam mengurai masalah ketenagakerjaan, terutama dalam rangka proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Akan tetapi penciptaan lapangan pekerjaan masih menjadi tantangan yang cukup besar bagi Indonesia. Hal ini terlihat dari peringkat kemudahan berusaha di Indonesia berada di posisi ke-73, atau jauh berada di bawah negara-negara tetangga (liputan6.com, 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih efektif dalam upaya pemulihan sektor ketenagakerjaan yang terdampak pandemi. Data statistik kondisi ketenagakerjaan dapat menjadi dasar dalam pemantauan ekonomi makro, pembuatan kebijakan, dan pemantauan kemajuan menuju tujuan pembangunan, serta evaluasi pemulihan sektor ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-19.

Angkatan Kerja di Indonesia

Ketersediaan sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan dapat terlihat dari angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (berumur 15 tahun dan ke atas) yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Jumlah angkatan kerja menggambarkan ketersediaan pasokan bagi pasar tenaga kerja dan berpotensi untuk memproduksi barang dan jasa. Ketersediaan tenaga kerja ini menjadi salah satu faktor penting dalam kegiatan produksi, terutama dalam hal menggerakkan faktor produksi lainnya seperti modal dan sumber daya alam.

Selama periode 2017-2020, jumlah angkatan kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2017 tercatat sebesar 128,06 juta orang dan pada Agustus 2020 tercatat sebesar 138,22 juta orang. Hal tersebut menunjukkan laju pertumbuhan jumlah angkatan kerja di Indonesia rata-rata sebesar 2,58 persen setiap tahunnya. Besarnya jumlah angkatan kerja ini dapat menjadi modal pembangunan. Penduduk yang produktif akan mendorong

perekonomian negara dengan cepat. Namun demikian, hal tersebut harus didukung dengan adanya lapangan kerja yang memadai. Sebaliknya, respon yang tidak tepat terhadap pertumbuhan angkatan kerja akan menjadi masalah timbulnya pengangguran dan akan berdampak tidak hanya bagi perekonomian, tetapi juga bagi keadaan sosial dan politik.

Angkatan kerja juga dapat diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin. Angkatan kerja di Indonesia didominasi oleh kaum laki-laki dari tahun ke tahun. Meski demikian, persentase angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki cenderung mengalami penurunan selama tahun 2017-2020. Pada Agustus 2017, sebesar 61,78 persen angkatan kerja di Indonesia adalah laki-laki, tetapi persentase tersebut menurun menjadi 60,79 persen pada agustus 2020. Dengan kata lain, perbandingan antara angkatan kerja laki-laki dan perempuan tercatat sekitar 6:4. Selama tahun 2017-2020, jumlah angkatan kerja, baik laki-laki maupun perempuan juga terus mengalami peningkatan. Selama periode tersebut, jumlah angkatan kerja meningkat rata-rata setiap tahunnya sebesar 2,03 persen untuk laki-laki dan 3,45 persen untuk perempuan.

Selanjutnya, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia selama tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari 121,02 juta orang pada Agustus 2017 menjadi 128,75 juta orang pada Agustus 2019. Akan tetapi, jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan pada Agustus 2020 menjadi 128,45 juta orang atau turun sebesar 0,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya jumlah penduduk yang bekerja merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19. Pandemi tersebut menyebabkan banyak terjadinya pengurangan jam kerja, pemberhentian kerja sementara, hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meski demikian, jumlah penduduk yang bekerja kembali meningkat pada Februari 2021 menjadi 131,06 juta orang.

Penurunan jumlah penduduk yang bekerja juga terjadi pada penduduk berjenis kelamin laki-laki. Pada Agustus 2019, penduduk berjenis kelamin laki-laki yang bekerja tercatat sebanyak 79,36 juta orang, kemudian menurun menjadi 77,75 juta orang. Hal tersebut berarti bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk laki-laki yang bekerja sebesar 2,02 persen. Meski demikian, sebagian besar penduduk yang bekerja di Indonesia adalah laki-laki. Selama tahun 2017-2020, lebih dari 60 persen penduduk yang bekerja berjenis kelamin laki-laki. Sementara itu, penduduk berjenis kelamin perempuan yang bekerja terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Agustus 2017, penduduk perempuan yang bekerja tercatat sebesar 46,28 juta orang dan terus meningkat hingga 50,70 juta orang pada Agustus 2020. Meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja ini menunjukkan bahwa di masa pandemi Covid-19 ini, banyak perempuan ingin memperbaiki kondisi perekonomian keluarga mereka dengan masuk ke dalam dunia kerja, padahal sebelumnya mereka bukan angkatan kerja. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah perempuan bukan angkatan kerja pada Agustus 2020.

Selain penduduk yang bekerja, angkatan kerja juga mencakup penduduk yang berstatus pengangguran. Peningkatan angkatan kerja perlu diimbangi dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja. Ketidakseimbangan dua hal tersebut dapat

berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Tidak imbangnya permintaan tenaga kerja ini dapat terlihat dari jumlah pengangguran di Indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada Agustus 2017, jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 7,04 juta orang dan terus meningkat hingga 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Dengan kata lain, laju pertumbuhan jumlah pengangguran selama periode tahun tersebut secara rata-rata sebesar 11,53 persen setiap tahunnya. Meski demikian, jumlah pengangguran berhasil ditekan menjadi 8,77 juta orang pada Februari 2021.

Tidak berbeda dengan jumlah pengangguran secara keseluruhan, jumlah pengangguran baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan selama tahun 2017-2020. Pada Agustus 2017, jumlah pengangguran berjenis kelamin laki-laki ada sebanyak 4,37 juta orang kemudian meningkat sebesar 43,47 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,27 juta orang. Kemudian, peningkatan jumlah pengangguran berjenis kelamin perempuan sebesar 31,31 persen, yaitu dari 2,66 juta orang (Agustus 2017) menjadi 3,50 juta orang (Agustus 2020).

Perkembangan tenaga kerja di Indonesia juga dapat dilihat dari ketiga indikator pokok yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Ketiga indikator ketenagakerjaan tersebut dibedakan juga menurut daerah tempat tinggal yaitu perkotaan dan perdesaan. Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan saat ini dan dapat menjadi penentu arah kebijakan.

TPAK dapat berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi. Selama tahun 2017-2020. TPAK

Tabel 10.1 Jumlah Angkatan Kerja Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2017– 2021

Tahun	Jenis Kelamin	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
2017 (Agustus)	L	74.736.546	4.375.251	79.111.797	16.770.866
	P	46.285.877	2.665.072	48.950.949	47.245.804
	L+P	121.022.423	7.040.323	128.062.746	64.016.670
2018 (Agustus)	L	77.675.311	4.377.777	82.053.088	17.039.717
	P	48.606.875	2.695.608	51.302.483	47.731.265
	L+P	126.282.186	7.073.385	133.355.571	64.770.982
2019 (Agustus)	L	79.357.851	4.385.795	83.743.646	16.846.705
	P	49.397.420	2.718.629	52.116.049	48.478.614
	L+P	128.755.271	7.104.424	135.859.695	65.325.319
2020 (Agustus)	L	77.755.026	6.268.364	84.023.390	17.933.872
	P	50.699.158	3.499.390	54.198.548	47.816.650
	L+P	128.454.184	9.767.754	138.221.938	65.750.522
2021 (Februari)	L	78.566.170	5.745.322	84.311.492	18.329.321
	P	52.498.135	3.000.686	55.498.821	47.220.802
	L+P	131.064.305	8.746.008	139.810.313	65.550.123

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

di Indonesia mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 66,67 persen menjadi 67,77 persen. Peningkatan nilai TPAK ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya bagian dari penduduk usia kerja yang tersedia untuk aktif terlibat dalam memproduksi barang dan jasa. Hal tersebut juga mengindikasikan berkurangnya penawaran tenaga kerja (labour supply). TPAK di Indonesia pun terus meningkat hingga 68,08 persen pada Februari 2021.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki di Indonesia mengalami peningkatan dari 82,51 persen pada Agustus 2017 menjadi 83,25 persen pada tahun 2019. Akan tetapi, TPAK laki-laki di Indonesia mengalami penurunan pada Agustus 2020 menjadi 82,41 persen. Sementara itu, TPAK perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2017-2020, TPAK perempuan di Indonesia naik sebanyak 2,24 persen poin, yaitu dari 50,89 persen (Agustus 2017) menjadi 53,13 persen (Agustus 2020).

Di sisi lain, tingkat pengangguran pada Agustus 2020 mengalami peningkatan yang cukup tajam. Padahal selama tahun 2017-2019, tingkat pengangguran terbuka berhasil ditekan dari 5,5 persen menjadi 5,23 persen. Kemudian, pada Agustus 2020 tingkat pengangguran naik sebesar 1,84 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu menjadi 7,07 persen. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka terlihat cukup signifikan pada penduduk laki-laki, yaitu dari 5,24 persen (Agustus 2019) menjadi 7,46 persen (Agustus 2020). Sementara itu, TPT perempuan meningkat dari 5,22 persen (Agustus 2019) menjadi 6,46 persen (Agustus 2020).

Pandemi Covid-19 telah mengguncang kondisi seluruh negara, termasuk Indonesia. Selain perekonomian, sektor ketenagakerjaan menjadi aspek yang paling nyata terdampak akibat adanya wabah yang disebabkan oleh Corona Virus Disease ini. Pembatasan aktivitas sosial yang dilakukan untuk mengurangi penularan virus tersebut menyebabkan sempat berhentinya kegiatan perekonomian. Permintaan atau konsumsi domestik pun menurun. Kondisi tersebut mendorong para perusahaan dan pelaku usaha harus merumahkan sementara atau bahkan memberhentikan pekerjanya (Kompas.com, 2021). Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran di Indonesia.

Selain dari TPT, peluang tenaga kerja juga dapat dilihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Angka TKK menggambarkan peluang penduduk yang termasuk angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Di tahun 2020, nilai TKK di Indonesia adalah 92,93 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja, 92 atau 93 orang memiliki pekerjaan. Kesempatan kerja tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 94,77 persen.

Selama tahun 2017-2020, TKK perempuan lebih tinggi daripada TKK laki-laki. TKK laki-laki pada tahun 2017 adalah 94,47 persen meningkat menjadi 94,66 persen pada tahun 2018, kemudian meningkat lagi menjadi 94,76 persen pada tahun 2019, dan mengalami penurunan menjadi 92,54 persen pada tahun 2020. Sama halnya dengan TKK laki-laki, TKK perempuan juga mengalami peningkatan selama 2017-2019 kemudian menurun dari 94,78 persen (Agustus 2019) menjadi 93,54 persen (Agustus 2020).

Tabel 10.2 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2017–2021

Jenis Kelamin	2017 (Agustus)	2018 (Agustus)	2019 (Agustus)	2020 (Agustus)	2021 (Februari)
TPAK					
Laki-Laki	82,51	82,80	83,25	82,41	82,14
Perempuan	50,89	51,80	51,81	53,13	54,03
Total	66,67	67,31	67,53	67,77	68,08
TPT					
Laki-Laki	5,53	5,34	5,24	7,46	6,81
Perempuan	5,44	5,25	5,22	6,46	5,41
Total	5,50	5,30	5,23	7,07	6,26
TKK					
Laki-Laki	94,47	94,66	94,76	92,54	93,19
Perempuan	94,56	94,75	94,78	93,54	94,59
Total	94,50	94,70	94,77	92,93	93,74

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan kerja di Indonesia, BPS

Indikator ketenagakerjaan juga dapat dianalisis berdasarkan daerah tempat tinggal. Persentase penduduk usia kerja yang berpotensi aktif secara ekonomi di wilayah perdesaan lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan. Fakta tersebut ditunjukkan dengan lebih besarnya TPAK di perdesaan. TPAK di daerah perdesaan pun terus mengalami peningkatan. TPAK di perdesaan meningkat dari 69,42 persen (2019) menjadi 70,20 persen (2020). Di sisi lain, TPAK di perkotaan sedikit mengalami penurunan, yaitu dari 66,06 persen (2019) menjadi 65,91 persen (2020).

Selanjutnya, perkembangan TPT di daerah perkotaan dan perdesaan memiliki pola yang sama dengan perkembangan TPT secara agregat. Selama periode 2017-2019, TPT baik di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan. Akan tetapi, tingkat pengangguran mengalami peningkatan pada Agustus 2020 baik di perkotaan maupun perdesaan. Peningkatan TPT cukup signifikan untuk daerah perkotaan, yaitu meningkat sebesar 2,69 persen poin. Pada Agustus 2019, TPT di perkotaan tercatat sebesar 6,29 persen naik menjadi 8,98 persen di Agustus 2020. Meningkatnya tingkat pengangguran ini menunjukkan bahwa lapangan kerja di daerah perkotaan belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada.

Pengangguran yang meningkat menandakan kesempatan kerja yang memburuk. TKK di daerah perkotaan menurun dari 93,71 persen pada 2019 menjadi 91,02 persen pada tahun 2020. Begitu pula di daerah perdesaan, TKK menurun dari 96,08 persen pada tahun 2019 menjadi 95,29 persen pada tahun 2020.

Akan tetapi, tingkat pengangguran di perdesaan terlihat lebih dapat dikontrol dibandingkan tingkat pengangguran di perkotaan. Program Jaring Pengaman Desa menjadi langkah yang tepat dalam menekan angka pengangguran yang muncul di perdesaan selama pandemi Covid-19. Padat Karya Tunai Desa (PKTD), sebagai salah satu kegiatan terkait Jaring Pengaman Sosial, ditujukan untuk pendayagunaan sumber alam, teknologi tepat guna, dan sumber daya manusia. PKTD ini juga melibatkan pekerja dengan prioritas keluarga miskin, pengangguran atau setengah pengangguran, serta masyarakat marjinal lainnya (liputan6.com, 2021). Dengan begitu, kondisi dana desa ini dapat menekan pengangguran di perdesaan.

Tabel 10.3 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2017–2021

Daerah Tempat Tinggal	2017 (Agustus)	2018 (Agustus)	2019 (Agustus)	2020 (Agustus)	2021 (Februari)
TPAK					
Perkotaan	64,83	65,17	66,06	65,91	65,69
Perdesaan	68,92	70,00	69,42	70,20	71,29
Jumlah	66,67	67,31	67,53	67,77	68,08
TPT					
Perkotaan	6,79	6,44	6,29	8,98	8,00
Perdesaan	4,01	3,97	3,92	4,71	4,11
Jumlah	5,50	5,30	5,23	7,07	6,26
TKK					
Perkotaan	93,21	93,56	93,71	91,02	92,00
Perdesaan	95,99	96,03	96,08	95,29	95,89
Jumlah	94,50	94,70	94,77	92,93	93,74

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi

Kondisi ketenagakerjaan juga harus diperhatikan untuk setiap wilayah. Hal ini dikarenakan Setiap daerah memiliki potensi dan tantangan ketenagakerjaan yang berbeda. Dengan demikian, kebijakan ketenagakerjaan perlu disusun pada tingkat regional untuk mencapai pembangunan di wilayah itu sendiri. Selain itu, kebijakan ketenagakerjaan juga perlu menyelesaikan permasalahan kesenjangan antarwilayah yang menjadi salah satu sumber terjadinya kemiskinan.

Pada Agustus 2020, jumlah provinsi dengan TPAK di atas angka nasional ada sebanyak 20 provinsi. Provinsi dengan TPAK tertinggi pada tahun tersebut adalah Bali, yaitu sebesar 74,32 persen. Posisi provinsi dengan TPAK tertinggi ini mengalami pergeseran dimana selama tahun 2017-2019, Papua merupakan provinsi dengan TPAK tertinggi.

Di sisi lain, provinsi dengan TPAK terendah berbeda-beda pada setiap tahunnya. Pada tahun 2017, provinsi dengan TPAK terendah adalah Maluku (60,18 persen), kemudian bergeser ke Jawa Barat (62,84 persen) pada tahun 2018, dan tahun 2019 bergeser lagi ke Provinsi Aceh (63,13 persen). Selanjutnya, pada tahun 2020 provinsi dengan TPAK terendah adalah Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 63,40 persen. TPAK di Sulawesi Selatan ini juga terus mengalami sedikit penurunan dimana pada tahun 2018 tercatat sebesar 63,93 persen dan menurun menjadi 63,80 persen pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan turunnya pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, setiap provinsi juga memiliki peluang kesempatan kerja yang berbeda-beda. Selama tahun 2017-2019, Bali menjadi provinsi dengan tingkat kesempatan kerja tertinggi di Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 2020, provinsi dengan peluang kesempatan kerja tertinggi diduduki oleh Sulawesi Barat dengan TPK sebesar 96,68 persen. Posisi ini juga masih diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat pada Februari 2021, yaitu sebesar 96,72 persen. Angka ini berarti, dari 100 penduduk

angkatan kerja di Sulawesi Barat, ada sebanyak 96 atau 97 orang diantaranya yang dapat terserap ke dalam pasar tenaga kerja.

Sementara itu, provinsi dengan TKK terendah berganti-ganti dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, Banten adalah provinsi dengan TKK terendah, yaitu 91,53 persen. Kemudian di tahun 2019, posisi tersebut bergeser ke Provinsi DKI Jakarta dengan TKK sebesar 91,89 persen. Selanjutnya pada Februari 2021, provinsi dengan TKK terendah adalah Kepulauan Riau, yaitu sebesar 89,88 persen.

Tabel 10.4 Indikator Ketenagakerjaan Menurut Provinsi, 2017–2021

Provinsi	TPAK					TKK					TPT				
	2017 (Agt)	2018 (Agt)	2019 (Agt)	2020 (Agt)	2021 (Feb)	2017 (Agt)	2018 (Agt)	2019 (Agt)	2020 (Agt)	2021 (Feb)	2017 (Agt)	2018 (Agt)	2019 (Agt)	2020 (Agt)	2021 (Feb)
Aceh	63,74	64,04	63,13	65,10	65,14	93,43	93,66	93,83	93,41	93,70	6,57	6,34	6,17	6,59	6,30
Sumatera Utara	68,88	71,97	70,37	68,67	69,39	94,40	94,45	94,61	93,09	93,99	5,60	5,55	5,39	6,91	6,01
Sumatera Barat	66,29	67,56	67,88	69,01	68,41	94,42	94,34	94,62	93,12	93,33	5,58	5,66	5,38	6,88	6,67
Riau	64,00	65,24	64,94	65,24	65,81	93,78	94,02	94,24	93,68	95,04	6,22	5,98	5,76	6,32	4,96
Jambi	67,52	68,21	65,79	67,79	67,30	96,13	96,27	95,94	94,87	95,24	3,87	3,73	4,06	5,13	4,76
Sumatera Selatan	69,50	68,45	67,67	68,65	69,95	95,61	95,73	95,47	94,49	94,83	4,39	4,27	4,53	5,51	5,17
Bengkulu	69,30	70,27	70,09	71,73	71,74	96,26	96,65	96,74	95,93	96,28	3,74	3,35	3,26	4,07	3,72
Lampung	67,83	69,62	69,06	70,16	71,73	95,67	95,96	95,97	95,33	95,46	4,33	4,04	4,03	4,67	4,54
Kep.Bangka Belitung	66,72	67,26	67,10	66,89	67,99	96,22	96,39	96,42	94,75	94,96	3,78	3,61	3,58	5,25	5,04
Kepulauan Riau	66,41	64,33	64,69	66,28	66,39	92,84	91,96	92,50	89,66	89,88	7,16	8,04	7,50	10,34	10,12
DKI Jakarta	61,97	62,92	63,90	63,81	65,12	92,86	93,35	93,46	89,05	91,49	7,14	6,65	6,54	10,95	8,51
Jawa Barat	63,34	62,84	64,99	64,53	64,83	91,78	91,77	91,96	89,54	91,08	8,22	8,23	8,04	10,46	8,92
Jawa Tengah	69,11	68,81	68,85	69,43	69,38	95,43	95,53	95,56	93,52	94,04	4,57	4,47	4,44	6,48	5,96
D.I. Yogyakarta	71,52	73,12	72,72	71,12	72,81	96,98	96,63	96,82	95,43	95,72	3,02	3,37	3,18	4,57	4,28
Jawa Timur	68,78	69,56	69,61	70,33	69,75	96,00	96,09	96,18	94,16	94,83	4,00	3,91	3,82	5,84	5,17
Banten	62,32	62,95	63,83	64,48	64,28	90,72	91,53	91,89	89,36	90,99	9,28	8,47	8,11	10,64	9,01
Bali	75,24	76,56	73,77	74,32	73,71	98,52	98,60	98,43	94,37	94,58	1,48	1,40	1,57	5,63	5,42
Nusa Tenggara Barat	68,49	66,68	69,47	70,45	71,32	96,68	96,42	96,72	95,78	96,03	3,32	3,58	3,28	4,22	3,97
Nusa Tenggara Timur	69,09	71,75	70,34	73,11	73,29	96,73	97,15	96,86	95,72	96,62	3,27	2,85	3,14	4,28	3,38
Kalimantan Barat	68,63	68,86	68,51	68,83	70,38	95,64	95,82	95,65	94,19	94,27	4,36	4,18	4,35	5,81	5,73
Kalimantan Tengah	67,74	69,69	69,29	68,40	69,44	95,77	96,09	95,96	95,42	95,75	4,23	3,91	4,04	4,58	4,25
Kalimantan Selatan	70,06	69,74	68,77	69,33	69,08	95,23	95,65	95,82	95,26	95,67	4,77	4,35	4,18	4,74	4,33
Kalimantan Timur	63,75	64,55	65,96	65,50	67,46	93,09	93,59	94,06	93,13	93,19	6,91	6,41	5,94	6,87	6,81
Kalimantan Utara	68,24	66,87	65,59	66,51	66,17	94,46	94,89	95,51	95,03	95,33	5,54	5,11	4,49	4,97	4,67
Sulawesi Utara	60,85	63,09	63,94	63,42	63,28	92,82	93,39	93,99	92,63	92,72	7,18	6,61	6,01	7,37	7,28
Sulawesi Tengah	67,14	69,76	67,80	69,44	68,93	96,19	96,63	96,89	96,23	96,27	3,81	3,37	3,11	3,77	3,73
Sulawesi Selatan	60,98	63,93	63,80	63,40	65,36	94,39	95,06	95,38	93,69	94,21	5,61	4,94	4,62	6,31	5,79
Sulawesi Tenggara	68,70	69,75	69,11	69,83	70,76	96,70	96,81	96,48	95,42	95,78	3,30	3,19	3,52	4,58	4,22
Gorontalo	64,78	67,94	67,38	66,46	67,37	95,72	96,30	96,24	95,72	96,59	4,28	3,70	3,76	4,28	3,41
Sulawesi Barat	66,96	69,27	69,89	70,19	71,71	96,79	96,99	97,02	96,68	96,72	3,21	3,01	2,98	3,32	3,28
Maluku	60,18	63,87	63,97	65,07	64,40	90,71	93,05	93,31	92,43	93,27	9,29	6,95	6,69	7,57	6,73
Maluku Utara	63,65	65,73	65,05	64,28	64,31	94,67	95,37	95,19	94,85	94,94	5,33	4,63	4,81	5,15	5,06
Papua Barat	67,47	67,30	67,71	69,55	68,11	93,51	93,55	93,57	93,20	93,82	6,49	6,45	6,43	6,80	6,18
Papua	76,94	79,02	76,93	72,16	73,47	96,38	97,00	96,49	95,72	96,23	3,62	3,00	3,51	4,28	3,77
Indonesia	66,67	67,31	67,53	67,77	68,08	94,50	94,70	94,77	92,93	93,74	5,50	5,30	5,23	7,07	6,26

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS

Kemampuan penyerapan tenaga kerja juga dapat dianalisis melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan TPT dari tahun 2019 ke tahun 2020. Peningkatan TPT tertinggi berada di DKI Jakarta dengan peningkatan sebesar 4,41 persen poin. Kemudian diikuti oleh Bali (4,06 persen) dan Kepulauan Riau (2,84 persen).

Sebagai ibu kota yang pastinya menjadi wilayah terdampak akibat pandemi Covid-19, DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling merasakan permasalahan tingkat pengangguran karena pandemi Krisis kesehatan menjadi salah satu alasan tingginya pengangguran di DKI Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta sangat fokus dalam pengendalian krisis kesehatan di ibu Kota dengan melaksanakan 3T (*tesing, tracing, and treatment*). Pemerintah yakin bahwa pengendalian masalah kesehatan yang tuntas akan memulihkan perekonomian di DKI Jakarta, sehingga pasar tenaga kerja dapat menyerap kembali tenaga kerja yang ada (Kompas.com, 2020).

Penyelesaian permasalahan sektor ketenagakerjaan di tengah pandemi Covid-19 ini membutuhkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak, seperti pemerintah, institusi pendidikan, kesehatan, akademisi, dukungan swasta dan masyarakat. Dukungan dari seluruh pihak dapat mempercepat stabilisasi ekonomi dan menggerakkan kembali sektor ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga telah mengupayakan penciptaan peluang kesempatan kerja. Pelaksanaan Digital Karir Expo menjadi salah satu langkah bagi pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya itu, perusahaan juga dapat memperoleh pekerja yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai (Kompas.com, 2021).

Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja adalah modal penting dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif. Sebagai pemeran utama dalam pembangunan negara, SDM harus mampu berdaya saing dengan negara lainnya. Pembangunan negara dapat terealisasi dengan adanya dukungan kualitas SDM yang baik dan andal.

Tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh pekerja lulusan SD ke bawah. Masih banyaknya tenaga kerja dengan pendidikan rendah menandakan bahwa kualitas tenaga kerja di Indonesia juga rendah dan dapat berdampak pada hasil produktivitas pekerja yang kurang baik. Meski demikian, persentase pekerja lulusan SD mulai berkurang secara perlahan, yaitu dari 42,12 persen pada tahun 2017 menjadi 40,82 persen pada tahun 2018, kemudian menurun kembali menjadi 39,83 persen pada tahun 2019, lalu menurun menjadi 38,89 persen pada tahun 2020, dan terus menurun hingga 37,41 persen pada Februari 2021.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja merupakan salah satu modal, tidak hanya untuk pembangunan tetapi juga untuk mencapai peningkatan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah telah melakukan program peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, pemagangan,

Tabel 10.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2017-2021

Tingkat Pendidikan	2017 (Agustus)	2018 (Agustus)	2019 (Agustus)	2020 (Agustus)	2021 (Februari)
SD ke bawah	42,12	40,82	39,83	38,89	37,41
SMP	17,94	18,04	17,85	18,27	18,54
SMA	27,86	28,98	29,95	30,51	31,13
Diploma I/II/III	2,72	2,77	2,69	2,70	2,74
Universitas	9,36	9,38	9,69	9,63	10,18

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS (diolah)

pelatihan produktivitas, dan sertifikasi kompetensi. Pengembangan kualitas tenaga kerja ini juga didukung dengan adanya Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia. BLK bertujuan sebagai pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja agar tenaga kerja memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan dua langkah lainnya yaitu relationship dan rebranding agar masyarakat memiliki ketertarikan dan BLK mendapatkan kepercayaan publik (beritasatu.com, 2021).

Sementara itu, kualitas tenaga kerja di Indonesia cenderung semakin membaik yang ditunjukkan dengan meningkatnya distribusi tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Dari tahun 2019 ke tahun 2020, distribusi tenaga kerja dengan pendidikan SMA memiliki peningkatan yang paling besar dibandingkan tingkat pendidikan lainnya, yaitu dari 29,95 persen menjadi 30,51 persen, atau meningkat sebesar 0,56 persen poin. Selanjutnya, distribusi terendah terdapat pada tenaga kerja dengan lulusan Diploma I/II/III, yaitu sebesar 2,70 persen pada tahun 2020.

Peralihan Sektor Pekerjaan di Masa Pandemi

Penyerapan tenaga kerja di Indonesia tersebar di seluruh jenis lapangan usaha. Sebagian besar tenaga kerja terserap ke lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada Agustus 2020, lapangan usaha tersebut mampu menyerap 29,76 persen tenaga kerja. Dengan kata lain, dari 100 penduduk yang bekerja, 29 atau 30 diantaranya bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persentase ini juga mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di Bulan Agustus 2019 yang tercatat sebesar 27,53 persen.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang tetap tangguh selama pandemi Covid-19. Selain pertumbuhan perekonomian yang masih positif, penerapan tenaga kerja di sektor ini juga meningkat. Pandemi ini telah menyebabkan ada peralihan pekerjaan atau pergeseran tenaga kerja ke sektor pertanian.

Meskipun demikian, kontribusi lapangan usaha ini terhadap perekonomian nasional bukanlah yang terbesar. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap produk domestik bruto di Indonesia pada tahun 2020 adalah

tertinggi kedua, yaitu 13,70 persen (www.bps.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja tertinggi bukan berarti memiliki produktivitas yang tinggi pula (liputan6.com, 2020).

Selanjutnya, penyerapan tenaga kerja terbanyak kedua terdapat pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Penyerapan pada lapangan usaha ini terus meningkat dari tahun ke tahun, mulai dari 18,57 persen (2017) menjadi 19,23 persen (2020). Dari data tersebut terlihat bahwa serapan tenaga kerja perdagangan perlahan mulai menguat. Penyerapan tenaga kerja di Indonesia di sektor tersebut bisamenjadi andalan sebagai peluang terciptanya lapangan kerja yang baru.

Selain itu, meningkatnya distribusi tenaga kerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di masa pandemi ini menunjukkan daya tahan lapangan usaha ini di tengah pandemi dan guncangan perekonomian. Terganggunya perekonomian akibat pandemi menyebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat penurunan pendapatan perusahaan tempat mereka bekerja. Survei yang dilakukan oleh Danareksa Research Institute (DRI) memperoleh hasil bahwa sektor perdagangan menjadi sektor yang paling banyak dipilih masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan baru selama pandemi. Dari survei tersebut, sektor perdagangan menjadi pilihan bagi 1,86 persen responden yang beralih profesi akibat pandemi (merdeka.com, 2021). Peningkatan

Tabel 10.6 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2017–2021

Lapangan Pekerjaan	2017 (Agt)	2018 (Agt)	2019 (Agt)	2020 (Agt)	2021 (Feb)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,68	28,97	27,53	29,76	29,79
B. Pertambangan dan Penggalian	1,15	1,16	1,11	1,05	1,04
C. Industri Pengolahan	14,51	14,68	14,91	13,61	13,69
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,25	0,27	0,28	0,24	0,21
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,34	0,38	0,39	0,38	0,38
F. Konstruksi	6,72	6,70	6,74	6,28	6,09
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,57	18,58	18,77	19,23	19,33
H. Transportasi dan Pergudangan	4,18	4,35	4,39	4,35	4,08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,71	6,15	6,65	6,65	7,04
J. Informasi dan Komunikasi	0,68	0,72	0,72	0,73	0,14
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,42	1,44	1,38	1,21	1,16
L. Real Estate	0,25	0,31	0,31	0,31	0,36
M,N. Jasa Perusahaan	1,37	1,33	1,51	1,40	1,45
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,79	3,77	3,84	3,56	3,58
P. Jasa Pendidikan	4,94	4,88	4,98	4,69	4,99
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,47	1,49	1,54	1,56	1,77
R,S,T,U. Jasa lainnya	4,96	4,82	4,94	4,99	4,88

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (diolah), BPS

distribusi tenaga kerja juga tercatat pada lapangan usaha jasa lainnya, yaitu dari 4,94 persen (2019) menjadi 4,99 persen (2020).

Penurunan Upah Pekerja Di Tengah Pandemi

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak bagi pekerja/buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukannya. Kesejahteraan tenaga kerja tidak hanya dilihat dari peluang kesempatan kerja yang besar tetapi juga besaran upah yang diperoleh, karena upah sangat menentukan keadaan ekonomi pekerja. Selain itu, upah juga dapat memengaruhi kinerja pekerja. Upah yang sesuai dengan jasa yang telah diberikan akan mendorong pekerja untuk bekerja lebih giat lagi sehingga mampu meningkatkan produktivitas.

Perlindungan pekerja dalam hal upah dilakukan melalui kebijakan upah minimum. Upah minimum adalah salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi setiap pekerja/buruh. Upah minimum adalah sistem pengupahan agar nilai upah yang diterima cukup dan layak untuk menghidupi kehidupan bagi setiap pekerja dan keluarganya. Kebijakan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Upah minimum adalah besaran upah pokok (termasuk tunjangan tetap) terendah dalam sebulan yang ditetapkan oleh gubernur. Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah terendah yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah satu provinsi. Formula penghitungan Upah minimum mempertimbangkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 membawa dampak pada seluruh sektor, termasuk perekonomian perusahaan. Dengan pertimbangan kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam SE tersebut, pemerintah memutuskan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia yang terguncang di masa pandemi ini dan perlunya pemulihan ekonomi nasional. Penerbitan SE ini juga menjadi salah satu upaya perlindungan bagi pekerja/buruh serta menjamin keberlangsungan usaha (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2020). Namun terdapat beberapa provinsi yang memutuskan untuk menaikkan UMP 2021.

Rata-rata UMP 2021 untuk 34 Provinsi diperoleh sekitar Rp 2,69 juta. Rata-rata UMP 2021 tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 0,57 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan provinsi, UMP di Indonesia berada pada rentang Rp 1,4 juta hingga Rp 4,5 juta. Provinsi dengan upah minimum 2021 tertinggi adalah Jawa Barat, yaitu sebesar Rp 4.416.186,55. Sementara itu, UMP terendah adalah provinsi Bengkulu yaitu sebesar Rp 1 765 000,00.

Tabel 10.7 Rata-Rata UMP (ribu rupiah) dan Pertumbuhan Rata-Rata UMP (persen), 2009–2021

Tahun	Rata-Rata UMP	Pertumbuhan Rata-Rata UMP (%)
2009	841,53	13,24
2010	908,82	8,00
2011	988,83	8,80
2012	1 088,90	10,12
2013	1 296,91	19,10
2014	1 584,39	22,17
2015	1 790,34	13,00
2016r	1 967,57	9,90
2017r	2 074,15	5,42
2018	2 268,87	9,39
2019	2 455,66	8,23
2020	2 672,37	8,82
2021	2 687,72	0,57

Catatan : * Angka revisi

Sumber : Kementerian Ketenagakerjaan RI (diolah)

<https://satudata.kemnaker.go.id/data>

Kesejahteraan pekerja salah satunya dapat diukur melalui upah yang diterima. Upah yang didapatkan oleh pekerja harus cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik untuk diri sendiri maupun keluarga yang ditanggungnya. Kebijakan pengupahan juga berdampak pada besaran upah yang diterima pekerja. Pada Agustus 2020, rata-rata upah yang diterima pekerja mengalami penurunan sebesar 6,90 persen, yaitu dari Rp 2,63 juta (2019) menjadi Rp 2,45 juta (2020).

Dampak dari pandemi yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease* dirasakan di seluruh aspek ketenagakerjaan, khususnya upah yang diterima pekerja. Upah yang diterima pekerja mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Penurunan upah ini menunjukkan melemahnya kegiatan produksi sebagai sebab kebijakan pembatasan sosial. Pembatasan sosial ini berdampak pada terhambatnya mobilitas bahan, produksi, serta barang yang dijual oleh perusahaan (Kompas.com, 2021).

Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, rata-rata upah yang diterima pekerja perkotaan selalu lebih besar dari yang diterima pekerja perdesaan dari tahun ke tahun. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasio rata-rata upah antara daerah perkotaan dan perdesaan bernilai lebih besar dari satu. Meskipun demikian, rasio tersebut mengalami penurunan selama tahun 2018-2020, yaitu dari 1,58 (2018) menjadi 1,52 (2020). Akan tetapi, rasio upah tersebut meningkat kembali menjadi 1,56 persen pada Februari 2021. Tingginya upah di daerah perkotaan dapat mendorong terjadinya perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke perkotaan. Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya pekerjaan informal dan bahkan pengangguran.

Kemudian, indikator distribusi pekerja menurut upah yang diterima juga dapat menggambarkan kondisi pengupahan pekerja. Kesejahteraan pekerja mengalami penurunan pada Agustus 2021. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya

Tabel 10.8 Distribusi Pekerja* Menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal (persen), 2018–2021

Daerah Tempat Tinggal	Upah (Rp) ^r				Rata- Rata Upah (Rp)
	< 1 000 000	1 000 000 - 1 499 999	1 500 000 - 1 999 999	2 000 000 +	
Tahun 2018 (Agt)					
Perkotaan	14,54	11,40	14,42	59,64	2 930 707
Perdesaan	28,55	16,52	17,96	36,97	1 851 062
Perkotaan+Perdesaan	19,52	13,22	15,68	51,58	2 546 849
Tahun 2019 (Agt)					
Perkotaan	13,52	10,75	13,75	61,99	3 006 230
Perdesaan	27,10	15,59	16,53	40,78	1 962 576
Perkotaan+Perdesaan	18,35	12,48	14,74	54,43	2 634 525
Tahun 2020 (Agt)					
Perkotaan	16,52	11,74	13,73	58,01	2 797 912
Perdesaan	30,78	15,21	15,95	38,06	1 841 889
Perkotaan+Perdesaan	21,66	13,00	14,53	50,80	2 452 818
Tahun 2021 (Feb)					
Perkotaan	14,21	11,31	13,09	61,39	2 931 319
Perdesaan	29,99	15,60	15,15	39,27	1 877 032
Perkotaan+Perdesaan	19,58	12,77	13,79	53,86	2 572 373

Catatan: *Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di nonpertanian
Sumber: Publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS (diolah)

distribusi pekerja yang menerima upah minimal Rp 2 juta. Pada tahun 2019, pekerja yang menerima upah Rp 2 juta atau lebih ada sebesar 54,43 persen kemudian menurun menjadi 50,80 persen pada tahun 2020. Sementara itu, pekerja yang menerima upah kurang dari Rp 1 juta meningkat dari 18,35 persen pada tahun 2019 menjadi 21,66 persen pada tahun 2020. Akan tetapi, distribusi pekerja menurut upah pada Februari 2021 menunjukkan adanya peningkatan persentase pekerja yang menerima upah lebih dari Rp 2 juta, yaitu menjadi 53,86 persen.

Selanjutnya, kesejahteraan pekerja baik di perkotaan maupun di perdesaan juga menurun pada tahun 2020. Untuk daerah perkotaan, distribusi pekerja yang menerima upah Rp 2 juta atau lebih menurun dari sebanyak 61,99 persen (2019) menjadi 58,01 persen (2020). Untuk daerah perdesaan, distribusi pekerja yang menerima upah Rp 2 juta atau lebih juga menurun dari 40,78 persen (2019) menjadi 38,06 persen (2020). Bahkan, pada tahun 2020, 1 dari 3 pekerja di perdesaan menerima upah kurang dari Rp 1 juta setiap bulannya.

Selain berdasarkan daerah tempat tinggal, analisis upah juga dapat dilakukan berdasarkan jenis kelamin. Rata-rata upah yang diterima pekerja laki-laki lebih tinggi daripada rata-rata upah yang diterima perempuan. Rasio antara rata-rata upah pekerja laki-laki dan rata-rata upah pekerja perempuan mengalami penurunan yaitu dari 1,27 pada tahun 2019 menjadi 1,24 pada tahun 2020. Angka rasio upah antara pekerja laki-laki dan perempuan yang menurun ini menunjukkan mulai memudarnya kesenjangan atau diskriminasi untuk memberikan balas jasa bagi pekerja laki-laki dan perempuan.

Tabel 10.9 Distribusi Pekerja* Menurut Upah dan Jenis Kelamin (persen), 2018–2021

Jenis Kelamin	Upah (Rp) ^r				Rata- Rata Upah (Rp)
	< 1 000 000	1 000 000 - 1 499 999	1 500 000 - 1 999 999	2 000 000 +	
Tahun 2018 (Agt)					
Laki-Laki	13,01	12,95	17,15	56,90	2 729 220
Perempuan	32,94	13,78	12,66	40,63	2 171 325
Laki-Laki+Perempuan	19,52	13,22	15,68	51,58	2 546 849
Tahun 2019 (Agt)					
Laki-Laki	12,17	11,91	15,77	60,15	2 835 977
Perempuan	30,86	13,62	12,66	42,87	2 227 119
Laki-Laki+Perempuan	18,35	12,48	14,74	54,43	2 634 525
Tahun 2020 (Agt)					
Laki-Laki	15,62	12,73	15,65	56,00	2 620 832
Perempuan	33,93	13,54	12,26	40,26	2 111 992
Laki-Laki+Perempuan	21,66	13,00	14,53	50,80	2 452 818
Tahun 2021 (Feb)					
Laki-Laki	13,65	12,07	14,78	59,51	2 753 192
Perempuan	31,28	14,16	11,83	42,73	2 215 664
Laki-Laki+Perempuan	19,58	12,77	13,79	53,86	2 572 373

Catatan: *Pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian
^rAngka direvisi

Sumber: Publikasi Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS (diolah)

Penurunan penerimaan upah pada tahun 2020 juga terjadi baik laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2020, rata-rata upah yang diterima pekerja laki-laki menurun sebesar 7,59 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, penurunan rata-rata upah yang diterima pekerja perempuan lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki, yaitu sebesar 5,17 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang lebih besar bagi pekerja laki-laki, terutama dalam hal upah yang mereka terima.

Distribusi pekerja baik laki-laki maupun perempuan yang menerima upah Rp 2 juta atau lebih juga mengalami penurunan selama tahun 2019-2020. Pekerja laki-laki yang menerima upah Rp 2 juta atau lebih ada sekitar 60,15 persen (2019) dan menurun menjadi 56,00 persen (2020). Sementara itu, pekerja perempuan yang menerima upah Rp 2 juta atau lebih ada sekitar 42,87 persen (2019) dan menurun menjadi 40,26 persen (2020).

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja

Ketersediaan lapangan pekerjaan sangat bergantung pada eksistensi keberlangsungan usaha/perusahaan. Tenaga kerja menjadi salah satu modal dalam memproduksi barang atau jasa. Produksi barang dan jasa yang tinggi dan baik akan meningkatkan perekonomian dan mendukung kegiatan pembangunan. Dengan begitu, penyerapan angkatan kerja yang optimal menjadi salah satu aspek untuk

mencapai pembangunan.

Namun demikian, penyerapan tenaga kerja ini bergantung pada permintaan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan kerja yang baru erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi akan mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan antara kedua indikator ini dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

Selama tahun 2018-2020, elastisitas kesempatan kerja di Indonesia hanya sebesar 0,61 persen. Angka elastisitas kesempatan kerja yang di bawah satu persen tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum mampu memperluas kesempatan kerja. Angka tersebut berarti setiap satu persen kenaikan PDB hanya mampu meningkatkan 0,61 persen kesempatan kerja. Pemerintah dan para pemangku kebijakan perlu memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penciptaan lapangan kerja baru. Dengan demikian, pembangunan dapat terlaksana di segala bidang, salah satunya ketenagakerjaan.

Selain ditinjau dari keseluruhan perekonomian, elastisitas juga dapat ditinjau dari masing-masing lapangan usaha. Hampir sebagian kategori lapangan usaha memiliki angka elastisitas kesempatan kerja yang inelastis. Tidak hanya itu, terdapat delapan lapangan usaha di Indonesia yang angka elastisitas kesempatan kerja selama periode tahun 2018-2020 bernilai negatif. Dari kedelapan kategori tersebut, kategori industri pengolahan merupakan kategori dengan nilai elastisitas negatif terbesar, yaitu 7,65 persen. Angka tersebut berarti bahwa setiap peningkatan PDB di kategori lapangan usaha industri pengolahan sebesar 1 persen, akan mengurangi 7,65 persen ketersediaan lapangan pekerjaan.

Namun laju kesempatan kerja dan laju pertumbuhan PDB yang positif, serta angka elastisitas kesempatan kerja yang tinggi, terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu 7,34 persen, artinya setiap peningkatan satu persen PDB pada kategori lapangan usaha tersebut akan meningkatkan 7,34 persen ketersediaan lapangan pekerjaan. Sementara itu, lapangan usaha pertambangan dan penggalian juga memiliki angka elastisitas kesempatan kerja yang sangat tinggi, yaitu sebesar 10,46 persen. Akan tetapi lapangan usaha ini mengalami penurunan kesempatan kerja dan penurunan nilai PDB selama tahun 2018-2020.

Tingginya elastisitas tenaga kerja sektor perdagangan ini merupakan salah satu langkah pembuka dalam upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Dalam menghadapi tantangan di sektor perdagangan, pemerintah akan melaksanakan berbagai langkah dan kebijakan. Langkah-langkah tersebut antara lain menjaga stabilitas harga atau inflasi, membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menembus pasar ekspor, dan meningkatkan ekspor melalui perjanjian kerja sama perdagangan internasional (pressrelease.id, 2021).

Tabel 10.10 Elastisitas Tenaga Kerja Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2018–2020

Lapangan Usaha	Rata-Rata Laju		Elastisitas Kesempatan Kerja
	Kesempatan Kerja (%)	Pertumbuhan PDB (%)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,23	2,68	0,83
B. Pertambangan dan Pengalihan	-3,97	-0,38	10,46
C. Industri Pengolahan	-2,88	0,38	-7,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-6,08	0,80	-7,61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,20	5,88	0,20
F. Konstruksi	-2,34	1,15	-2,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,61	0,36	7,34
H. Transportasi dan Pergudangan	0,91	-4,93	-0,18
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,89	-2,54	-1,92
J. Informasi dan Komunikasi	1,58	10,00	0,16
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-7,48	4,92	-1,52
L. Real Estate	-0,01	4,03	0,00
M,N. Jasa Perusahaan	3,27	2,10	1,55
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,08	2,29	-0,91
P. Jasa Pendidikan	-1,14	4,45	-0,26
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,29	10,14	0,32
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,62	2,98	0,88
Jumlah	0,86	1,41	0,61

Produktivitas tenaga kerja di Indonesia

Produktivitas dan daya saing tenaga kerja merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan. Produktivitas ini sangat erat kaitannya dengan konsep ekonomis. Produktivitas menjadi ukuran suatu usaha untuk menghasilkan barang atau jasa. Tenaga kerja sebagai salah satu input dalam proses produksi adalah faktor penting dalam mengukur produktivitas. Oleh karena itu produktivitas tenaga kerja merupakan aspek penting untuk dianalisis dan dibuat kebijakan oleh pemerintah.

Produktivitas tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, yaitu dari 117,50 juta per tenaga kerja menjadi 122,97 juta per tenaga kerja. Kemudian pada tahun 2020, produktivitas tenaga kerja di Indonesia menurun menjadi 120,15 juta per tenaga kerja. Dengan kata lain, produktivitas tenaga kerja di Indonesia menurun sebesar 2,29 persen pada tahun 2020. Fakta tersebut dapat menandakan bahwa kualitas pekerja di Indonesia yang menurun sehingga nilai dari barang dan jasa yang dihasilkannya pun menurun. Selain itu, kondisi ini juga menjadi salah satu dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Penurunan produktivitas tenaga kerja ini terjadi akibat menurunnya jam kerja selama pandemi. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di Indonesia ini sejalan

dengan hasil pemantauan *International Labour Organization* (ILO) yang menyatakan bahwa tingkat produktivitas pekerja Indonesia berada di bawah rata-rata negara penghasil menengah bawah. Sementara itu, Indonesia harus melewati tantangan produktivitas ini dalam rangka pemulihan pertumbuhan ekonomi yang terhambat selama pandemi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menyelesaikan masalah ini melalui regulasi yang mendukung reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Pemerintah juga melaksanakan kebijakan melalui UU Cipta Kerja yang akan menyederhanakan, memberi sinkronisasi, dan memangkas regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja (cnnindonesia.com, 2020).

Tabel 10.11 Produktivitas Menurut Provinsi (juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2018– 2020

Provinsi	2018r	2019	2020
Aceh	69,49	72,75	70,50
Sumatera Utara	105,31	114,03	118,57
Sumatera Barat	92,87	96,84	93,79
Riau	260,27	257,54	241,21
Jambi	120,52	128,93	118,95
Sumatera Selatan	104,70	113,05	112,05
Bengkulu	67,22	71,95	71,07
Lampung	79,84	85,22	82,86
Kep. Bangka Belitung	105,56	107,98	107,92
Kepulauan Riau	265,27	270,69	250,10
DKI Jakarta	548,61	580,42	595,03
Jawa Barat	93,64	96,27	96,33
Jawa Tengah	72,83	77,35	76,90
DI Yogyakarta	60,35	64,87	65,08
Jawa Timur	105,07	111,53	109,69
Banten	114,71	119,16	112,83
Bali	92,50	102,12	92,52
Nusa Tenggara Barat	54,58	52,50	51,83
Nusa Tenggara Timur	37,60	40,81	39,07
Kalimantan Barat	80,10	86,77	87,05
Kalimantan Tengah	106,43	113,73	115,46
Kalimantan Selatan	84,20	88,26	85,99
Kalimantan Timur	392,05	385,10	358,77
Kalimantan Utara	271,78	301,65	304,27
Sulawesi Utara	107,23	113,30	116,58
Sulawesi Tengah	112,93	126,69	130,21
Sulawesi Selatan	115,26	124,26	125,91
Sulawesi Tenggara	94,14	102,35	100,98
Gorontalo	66,24	71,82	73,39
Sulawesi Barat	67,81	70,19	68,22
Maluku	57,87	60,87	59,64
Maluku Utara	66,62	71,94	76,28
Papua Barat	189,65	193,15	181,92
Papua	116,95	105,74	117,59
Indonesia	117,50	122,97	120,15

Catatan: ^r Angka revisi sesuai data PDB terbaru

Data PDB tahun 2019 adalah angka sementara dan data PDB tahun 2020 adalah angka sangat sementara

Sumber: Diolah dari Sakernas dan PDB

Hampir seluruh provinsi di Indonesia juga mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja selama tahun 2019 ke tahun 2020. Hanya terdapat 13 provinsi yang mengalami peningkatan produktivitas tenaga kerja pada tahun 2020. Provinsi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Papua, yaitu dari 105,74 juta per tenaga kerja (2019) menjadi 117,59 juta per tenaga kerja (2020) atau meningkat sebesar 11,21 persen. Kemudian, provinsi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja tertinggi selanjutnya adalah Maluku Utara (6,03 persen) dan Sumatera Utara (3,98 persen). Sementara itu, provinsi dengan penurunan produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Bali, yaitu dari 102,12 juta per tenaga kerja (2019) menjadi 92,52 juta per tenaga kerja (2020) atau menurun sebesar 9,40 persen. Kemudian, provinsi dengan penurunan produktivitas tenaga kerja tertinggi selanjutnya adalah Jambi (7,74 persen) dan Kepulauan Riau (7,61 persen)

Ditinjau dari masing-masing lapangan usaha, terdapat tujuh lapangan usaha yang mengalami penurunan produktivitas tenaga kerja dari tahun 2019-2020. Lapangan usaha dengan penurunan produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan, yaitu dari 155,85 juta per tenaga kerja (2019) menjadi 123,34 juta per tenaga kerja (2020) atau menurun sebesar 20,86 persen. Kemudian, lapangan usaha dengan penurunan produktivitas tenaga kerja tertinggi selanjutnya adalah penyediaan akomodasi dan makan minum (10,25 persen). Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum ini juga merupakan lapangan usaha dengan produktivitas tenaga kerja terendah kedua setelah lapangan usaha pengadaan air dan pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang.

Kebijakan pembatasan mobilitas memberikan dampak keberlangsungan sektor transportasi, dimana pekerja pada sektor ini menjadi yang langsung merasakan dampaknya. Selain pembatasan perjalanan, keengganan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik juga berdampak pada jumlah pekerja sektor ini. Dengan demikian, pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan publik pasca pembatasan mobilitas. Upaya yang akan dilakukan pemerintah antara lain solusi digital untuk penggunaan transportasi dengan aman, memperbesar sektor higienitas dan kesehatan di transportasi publik, hingga memperbesar keamanan dan keselamatan di transportasi publik (ekonomi.bisnis.com, 2020).

Sementara itu, lapangan usaha dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Jasa Keuangan dan Asuransi, yaitu dari 378,21 juta per tenaga kerja (2019) menjadi 446,79 juta per tenaga kerja (2020) atau meningkat sebesar 18,13 persen. Kemudian, lapangan usaha dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja tertinggi selanjutnya adalah Pengadaan Listrik dan Gas (16,32 persen). Di sisi lain, real estate masih menjadi lapangan usaha dengan produktivitas tenaga kerja tertinggi, bahkan selalu melebihi angka satu miliar rupiah. Selama tahun 2018-2020, produktivitas tenaga kerja di lapangan usaha real estate juga terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,73 persen setiap tahunnya. Hal ini dapat menandakan bahwa sektor real estate memiliki prospek yang menjanjikan ditambah dengan produktivitas tenaga kerjanya yang sangat tinggi. Dengan demikian, prioritas utama pemerintah untuk peningkatan produktivitas dan daya saing di sektor real estate akan sangat mudah dicapai.

**Tabel 10.12 Produktivitas Menurut Kategori Lapangan Usaha
(juta rupiah per penduduk yang bekerja), 2018–2020**

Kategori Lapangan Usaha	2018 ^r	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51,96	56,78	55,33
B. Pertambangan dan Penggalian	817,74	804,95	734,74
C. Industri Pengolahan	159,02	162,50	175,49
D. Pengadaan Listrik dan Gas	513,30	509,07	592,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,91	21,38	23,02
F. Konstruksi	184,73	196,16	204,88
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	82,34	85,27	80,78
H. Transportasi dan Pergudangan	145,27	155,85	123,34
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53,14	51,41	46,14
J. Informasi dan Komunikasi	617,93	680,13	745,59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	338,67	378,21	446,79
L. Real Estate	1031,12	1088,02	1152,71
M,N. Jasa Perusahaan	158,53	156,60	163,77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	113,65	115,53	126,95
P. Jasa Pendidikan	78,11	81,41	91,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84,09	88,13	100,30
R,S,T,U. Jasa lainnya	44,12	48,55	47,21

Catatan: ^r Angka revisi sesuai data PDB terbaru

Data PDB Tahun 2019 adalah angka sementara dan Data PDB tahun 2020 adalah angka sangat sementara

Sumber: Diolah dari Sakernas dan PDB

Dominasi Pekerja Informal Di Pasar Tenaga Kerja

Pertumbuhan angkatan kerja yang cepat berdampak pada banyaknya pasokan tenaga kerja. Akan tetapi, kesempatan kerja yang tersedia belum mampu menyerap penawaran kerja yang tinggi. Jika hal itu terus terjadi, pengangguran akan terus meningkat atau banyaknya pekerajan sektor informal. Jumlah pekerja informal di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2019. Akan tetapi, jumlah pekerja informal meningkat cukup tajam pada tahun 2020, yaitu dari 71,95 juta orang (2019) menjadi 77,68 juta orang (2020), atau meningkat sebesar 7,97 persen. Peningkatan ini terus terjadi mencapai 78,15 juta orang pada Februari 2021. Di sisi lain, jumlah pekerja formal juga mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 56,80 juta orang menjadi 50,77 juta orang. Akan tetapi, jumlah pekerja formal mengalami peningkatan pada Februari 2021, yaitu menjadi 52,92 juta orang.

Menurunnya pekerja formal dan meningkatnya pekerja informal ini menggambarkan dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama pandemi Covid-19. PHK yang dialami oleh mantan pekerja di perusahaan atau mantan pekerja formal mendorong mereka untuk berpindah bekerja ke sektor informal, seperti pekerja keluarga, berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan pekerja bebas.

Tabel 10.13 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Sektor Formal/Informal dan Jenis Kelamin, 2017–2021

Jenis Kelamin	Formal	Informal
Tahun 2017 (Agt)		
Laki-Laki	34 121 708	40 614 838
Perempuan	17 879 989	28 405 888
Laki-Laki+Perempuan	52 001 697	69 020 726
Tahun 2018 (Agt)		
Laki-Laki	35 808 711	41 866 600
Perempuan	18 519 350	30 087 525
Laki-Laki+Perempuan	54 328 061	71 954 125
Tahun 2019 (Agt)		
Laki-Laki	37 445 385	41 912 466
Perempuan	19 358 922	30 038 498
Laki-Laki+Perempuan	56 804 307	71 950 964
Tahun 2020 (Agt)		
Laki-Laki	33 206 582	44 548 444
Perempuan	17 565 267	33 133 891
Laki-Laki+Perempuan	50 771 849	77 682 335
Tahun 2021 (Feb)		
Laki-Laki	34 342 465	44 223 705
Perempuan	18 575 440	33 922 695
Laki-Laki+Perempuan	52 917 905	78 146 400

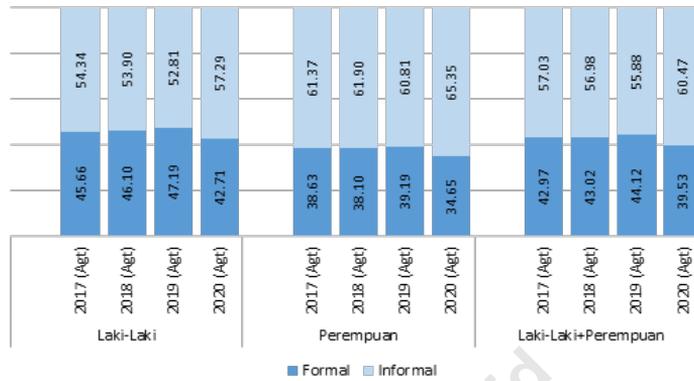
Sumber : Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional

Dengan kata lain, berkurangnya penyerapan tenaga kerja akibat hilangnya lapangan pekerjaan di masa pandemi ini meningkatkan pekerja di sektor informal.

Selanjutnya, ditinjau berdasarkan jenis kelamin, peningkatan pekerja informal pada tahun 2020 juga terjadi baik pada pekerja laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja informal sudah mencapai 44,55 juta orang untuk laki-laki dan 33,13 juta orang untuk perempuan. Sementara itu, jumlah tenaga kerja formal terdapat 33,21 juta orang untuk laki-laki dan 17,57 juta orang untuk perempuan.

Selama periode 2019-2020, persentase pekerja informal laki-laki meningkat dari 52,81 persen menjadi 57,29 persen. Sementara itu, persentase pekerja informal perempuan meningkat dari 60,81 persen menjadi 65,35 persen pada periode yang sama. Fakta ini memperlihatkan bahwa pekerja informal makin mendominasi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada tahun 2020. Persentase tersebut juga menunjukkan lebih besarnya kecenderungan perempuan untuk terjun ke sektor informal.

Gambar 10.1. Persentase Pekerja Sektor Formal dan Informal Menurut Jenis Kelamin, 2017-2020



Sumber: Diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional

DAFTAR PUSTAKA

ADB. 2021. Asian Development Outlook 2021: Financing A Green and Inclusive Recovery. Edisi April 2021.

Agatha Olivia Victoria. (2021, Maret 26). Hanya 12,5% UMKM di Indonesia yang Kebal dari Pandemi Covid-19. Diakses pada Juni 24, 2021, melalui Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/605d9f635fdf7/hanya-12-5-umkm-di-indonesia-yang-kebal-dari-pandemi-covid-19>

Antonius Purwanto. (2020, September 16). Potret dan Tantangan UMKM di Indonesia. Diakses pada Juli 4, 2021, melalui Kompaspedia. kompas.id: <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/potret-dan-tantangan-umkm-di-indonesia>

Asia Pacific Foundation of Canada. (2018). Survey of Entrepreneurs and MSMEs in Indonesia: Building the Capacity of MSMEs Through Human Capital. Canada. APF Canada

Bank Dunia. 2021. GNI per capita, Atlas method (current US\$) - Indonesia. Diakses pada tanggal 13 Juli 2021 dari <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=ID>

Bank Dunia. 2021. Indonesia Economic Prospect: Boosting The Recovery. Edisi Juni 2021.

Bank Dunia. 2021. New World Bank country classifications by income level: 2021-2022. Diakses pada tanggal 13 Juli 2021 dari <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2021-2022>.

Bank Indonesia. 2021. Laporan Perekonomian Indonesia 2020: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi. Jakarta: Bank Indonesia.

Berita Resmi Statistik, BPS. 5 Februari 2021. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>, diakses pada 21 April 2021.

BPS. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XXIV, 5 Februari 2021.

BPS. 2021. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021. Berita Resmi Statistik No. 36/05/Th. XXIV, 5 Mei 2021.

BPS. 2018. Potensi Usaha Mikro Kecil. Jakarta: Badan Pusat Statistik

BPS. 15 Januari 2020. Berita Resmi Statistik Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2020.

BPS. 2020. Analisis Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

BRS, edisi dengan judul “Inflasi 2019 Rendah, Bagaimana Andil Pemerintah?” (Bisnis.com) <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200102/9/1186323/inflasi-2019-rendah-bagaimana-andil-pemerintah>. September Deflasi 0,05 Persen, Ini Penyebabnya <https://pasardana.id/news/2020/10/1/september-deflasi-0-05-persen-ini-penyebabnya/>

CNN Indonesia. (2020, Desember 12). Menaker Ungkap Keluhan soal Produktivitas Pekerja RI Rendah. Diakses pada Juli 7, 2021, melalui CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201222143314-92-585205/menaker-ungkap-keluhan-soal-produktivitas-pekerja-ri-rendah>

CNBC Indonesia. 11 Februari 2021. Impor Baja RI Turun, Pangsa Pasar Krakatau Steel Meningkat. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210211134756-17-222738/impor-baja-ri-turun-pangsa-pasar-krakatau-steel-meningkat>, diakses pada 9 Juni 2021.

CNBC Indonesia. 1 November 2020. Kemenparekraf Sebut Devisa Wisata 2020 Hanya Mencapai USD 3 M, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201027165234-19-197491/kemenparekraf-sebut-devisa-wisata-2020-hanya-mencapai-usd-3-m>, diakses pada 19 April 2021.

Direktorat Jenderal Anggaran, Kemenkeu. 2021. Anggaran Bidang Pariwisata 2021. <https://twitter.com/DitjenAnggaran/status/1356214818001174529>, diakses pada 20 April 2021.

Elena, Maria. 15 Januari 2021. Mantap! Ekspor Desember 2020 Capai US\$ 14,63 Miliar, Tertinggi sejak 2013. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210115/9/1343383/mantap-ekspor-desember-2020-capai-us1463-miliar-tertinggi-sejak-2013>, diakses pada 3 Juni 2021.

Elena, Maria. 12 April 2021. Pemerintah Prediksi Surplus Neraca Dagang Bakal Berlanjut. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210412/9/1379571/pemerintah-prediksi-surplus-neraca-dagang-bakal-berlanjut>, diakses pada 3 Juni 2021.

Fauzia, M. (2021, Maret 2). Satu Tahun Pandemi: Jumlah Pengangguran Nyaris 10 Juta, Angka Kemiskinan Tembus 10 Persen. Diakses pada Juli 7, 2021, melalui Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/03/02/161627926/satu-tahun-pandemi-jumlah-pengangguran-nyaris-10-juta-angka-kemiskinan-tembus?page=all>

Fahmi Abidin. (2020, Oktober 9). Apa Saja Peran UMKM Bagi Perekonomian Indonesia. Diakses pada Juni 4, 2021, melalui IDX Channel: <https://www.idxchannel.com/market-news/foto/apa-saja-peran-umkm-bagi-perekonomian-indonesia>

Gajimu.com. (2021, Januari 11). Program Dukungan PEN bagi UMKM. Diakses pada Juli 7, 2021 melalui Gajimu.com: <https://gajimu.com/tips-karir/usaha-mikro-kecil-menengah-umk>

Grahadyarini, Lukita. 3 November 2020. Wisatawan Domestik Menjadi Penghela Kebangkitan Pariwisata. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/11/03/wisatawan-domestik-menjadi-penghela/>, diakses pada 22 April 2021.

Harmony. (2021, Februari 24). Apa Saja Jenis UMKM di Indonesia dan Bagaimana Perkembangannya?. Diakses pada Juni 4, 2021, melalui Harmony.co.id: <https://www.harmony.co.id/blog/apa-saja-jenis-umkm-di-indonesia-dan-bagaimana-perkembangannya>

Hidayat, Ali A.N. 29 Januari 2021. Mendag Targetkan Ekspor Non Migas Tumbuh 6,3 Persen pada 2021. <https://bisnis.tempo.co/read/1427848/mendag-targetkan-ekspor-non-migas-tumbuh-63-persen-pada-2021>, diakses pada 4 Juni 2021.

Hikam, Herdi Alif Al. 2 Februari 2020. Instruksi Jokowi, Kemenhub Larang Maskapai Terbangi China. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4882730/instruksi-jokowi-kemenhub-larang-maskapai-terbangi-china>, diakses pada 22 April 2021.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210401/9/1375433/bps-catat-inflasi-maret-2021-008-persen>

<https://analisis.kontan.co.id/news/memaknai-kontraksi-ekonomi-indonesia> “Tahun 2021, Ekonomi Indonesia Diproyeksi Hanya Tumbuh 4,7 persen <https://money.kompas.com/read/2021/06/20/090400726/tahun-2021-ekonomi-indonesia-diproyeksi-hanya-tumbuh-4-7-persen?page=all>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemerintah-realisasikan-dukungan-pmn-dan-investasi-pada-tahun-2020-untuk-percepatan-pemulihan-ekonomi-nasional-dan-mengatasi-dampak-covid-19/>

<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2413001/68601>)

<https://nasional.kontan.co.id/news/melebihi-target-realisis-investasi-sepanjang-2019-capai-rp-8096-triliun#:~:text=Nah%2C%20untuk%20tahun%20ini%2C%20BKPM,44%25%20dari%20realisasi%20investasi%202019.>)

<https://ksp.go.id/jalan-trans-maluku-dibangun-untuk-pemerataan-dan-keadilan-sosial.html>

IMF. 2021. World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries. Edisi April 2021.

Indonesia.go.id. (2021, Maret 14). Berkah Pandemi, UMKM Semakin Go Digital. Diakses pada Juli 7, 2021, melalui Indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2597/berkah-pandemi-umkm-semakin-go-digital>

Indra Cahya. (2020, Oktober 19). Gofood Catat 250 ribu Merchant Baru Selama Pandemi. Diakses pada Juli 6, 2021, melalui Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/teknologi/gofood-catat-250-ribu-merchant-baru-selama-pandemi.html?page=2>

Indikator Ekonomi, edisi Desember 2020, Edisi Maret dan Juni 2021

Inflasi Mei Sebesar 0,32 persen <https://mediaindonesia.com/ekonomi/408967/bps-inflasi-mei-2021-sebesar-032>

Indonesia Alami Deflasi 0,16 Persen di Juni 2021 <https://www.merdeka.com/uang/indonesia-alami-deflasi-016-persen-di-juni-2021.html>

Karunia, A. M. (2021, Juni 18). Menaker Sebut Upah Buruh Turun 5,2 Persen Selama Pandemi Covid-19. Diakses pada Juli 7, 2021, melalui Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/06/18/183800826/menaker-sebut-upah-buruh-turun-5-2-persen-selama-pandemi-covid-19>

Karunia, Ade Miranti. 25 September 2020. Akibat Pandemi, Pendapatan Devisa Sektor Pariwisata Turun hingga 90 Persen, <https://money.kompas.com/read/2020/09/25/135500926/akibat-pandemi-pendapatan-devisa-sektor-pariwisata-turun-hingga-90-persen>, diakses pada 19 April 2021.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2020. Bangkit dari Pandemi. <https://kinerja.ekon.go.id/publikasi/download/laporan-kinerja-satu-tahun-kemenko-perekonomian-2019-2020>, diakses pada 02 Juni 2021

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2020. Mendorong Kinerja Sektor Riil Strategis melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2021. Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap Perekonomian Daerah. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2271/dampak-program-pemulihan-ekonomi-nasional-terhadap-perekonomian-daerah>, diakses pada 06 Juli 2021.

Kementerian Keuangan. 2020. Langkah Penguatan Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi Menghadapi Dampak Covid-19. <https://www.kemenkeu.go.id/media/14790/materi-konferensi-pers-1-april-2020.pdf>, diakses pada 02 Juni 2021.

Kemenkeu. 2020. Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf>, diakses pada 02 Juni 2021.

Kemenkeu. 2021. Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 Mampu Menjaga Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/pressrelease/2021/SP-Kemiskinan.pdf>, diakses pada 19 Juli 2021.

Kemenkeu & UNICEF. 2020. Dampak Covid-19 terhadap Kemiskinan dan Mobilitas Anak di Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/media/8461/file/Dampak%20COVID-19%20terhadap%20kemiskinan%20dan%20mobilitas%20anak%20di%20Indonesia.pdf>, diakses pada 23 Juli 2021.

Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2020, Oktober 27). Menaker Ida Terbitkan SE Penetapan Upah Minimum Tahun 2021. Diakses pada Juli 6, 2021, melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI: <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-terbitkan-se-penetapan-upah-minimum-tahun-2021>

Kemendag. 4 Maret 2021. Pra-Raker: Kemendag Tetapkan Strategi Peningkatan Ekspor.

Kemendag. 16 Juni 2021. Dukung Produktivitas Industri Nasional dan Kinerja Ekspor, Mendag Terbitkan Pengaturan Persetujuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri.

Kemenperin. 4 Maret 2021. Kemenperin: Impor Baja Turun 34 Persen, Produksinya Melonjak 30 Persen. <https://kemenperin.go.id/artikel/22331/Kemenperin:-Impor-Baja-Turun-34-Persen,-Produksinya-Melonjak-30-Persen>, diakses pada 10 Juni 2021.

Kemenperin. 13 Maret 2020. Atasi Dampak COVID-19, Pemerintah Beri Stimulus Industri Agar Terus Tergerak. <https://kemenperin.go.id/artikel/21619/Atasi-Dampak-COVID-19,-Pemerintah-Beri-Stimulus-Industri-Agar-Terus-Bergerak>, diakses pada 10 Juni 2021.

Kementerian PPN/Bappenas. 14 Agustus 2020. Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia.

Kemenkeu, 2020. Pemerintah Siapkan Rp 3,3 Triliun untuk Hibah Pariwisata. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-siapkan-rp3-3-triliun-untuk-hibah-pariwisata/>, diakses pada 20 April 2021.

Kemenkeu. 2021. Stimulus Pemulihan Sektor Pariwisata Dilanjutkan di Tahun 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/stimulus-pemulihan-sektor-pariwisata-dilanjutkan-di-tahun-2021/>, diakses pada 20 April 2021.

Kemenparekraf. 2020. Mengenal Apa Itu Sertifikasi CHSE?, <https://chse.kemenparekraf.go.id/>, diakses pada 19 April 2021.

Kementerian Keuangan RI. (2020, Juni 19). Pemerintah Siapkan Subsidi Bunga UMKM Total Rp35,2 Triliun. Diakses pada Juli 7, 2021, melalui Kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-siapkan-subsidi-bunga-umkm-total-rp35-2-triliun/>

Kementerian Keuangan RI. (2020). APBN Kita Edisi Desember 2020. Jakarta. BI

Kementerian UMKM dan Koperasi RI. (2017). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2015-2016. Jakarta. Kemenkopukm

Kementerian UMKM dan Koperasi RI. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2016-2017. Jakarta. Kemenkopukm

Kementerian UMKM dan Koperasi RI. (2019). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2017-2018. Jakarta. Kemenkopukm

Kementerian UMKM dan Koperasi RI. (2020). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar Tahun 2018-2019. Jakarta. Kemenkopukm

Khairunnisa, Syifa Nuri. 1 Januari 2021. Sandiaga Targetkan Kunjungan Wisman hingga 7 Juta pada 2021. <https://travel.kompas.com/read/2021/01/01/080500027/sandiaga-targetkan-kunjungan-wisman-hingga-7-juta-pada-2021>, diakses pada 21 April 2021.

Koran Sindo. (2021, Februari 18). Saatnya UMKM Go Digital. Diakses pada Juli 6, 2021, melalui Sindonews.com: <https://nasional.sindonews.com/read/338486/16/saatnya-umkm-go-digital-1613566956>

Kristianus, A. (2021, Februari 11). 2020, Pemerintah Tingkatkan Kompetensi 901.177 Tenaga Kerja. Diakses pada Juli 7, 2021, melalui Beritasatu: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/731611/2020-pemerintah-tingkatkan-kompetensi-901177-tenaga-kerja>

Kuswaraharja, Dadan. 2021. Tahun Lalu Dana Hibah Pariwisata Tak Semuanya Terserap, Hanya 70%, <https://travel.detik.com/travel-news/d-5376086/tahun-lalu-dana-hibah-pariwisata-tak-semuanya-terserap-hanya-70>, diakses pada 20 April 2021.

Lisnawati. Skema Penyelamatan BUMN pada Masa Pandemi Covid-19. Info Singkat Vol.XII, No.14/IIPuslit/Juli/2020.Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Liputan6.com. (2020, Desember 7). Selama Pandemi, Serapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Tumbuh 2,23 Persen. Diakses pada Juli 7, 2021, melalui Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4427317/selama-pandemi-serapan-tenaga-kerja-sektor-pertanian-tumbuh-223-persen>

Liputan6.com. (2021, April 22). Selama Pandemi, Tingkat Pengangguran di Desa Lebih Rendah Dibanding Kota. Diakses pada Juli 7, 2021, melalui Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4539572/selama-pandemi-tingkat-pengangguran-di-desa-lebih-rendah-dibanding-kota>

Manihuruk, Herbin. 2020. Jaring Pengaman Sosial Stimulus EKonomi Dampak Covid-19. <http://www.tnp2k.go.id/downloads/jaring-pengaman-sosial-stimulus-ekonomi-dampak-covid-19>, diakses pada 12 Juli 2021.

Mulyana, Ridwan N. 20 Desember 2020. Penurunan Volume dan Harga Bikin Nilai Ekspor Batubara Anjlok 25%. <https://newssetup.kontan.co.id/news/penurunan-volume-dan-harga-bikin-nilai-ekspor-batubara-anjlok-25-1>, diakses pada 4 Juni 2021.

Pink, Bidara. 1 Februari 2021. BPS: Jumlah Kunjungan Wisman di Sepanjang Tahun 2020 hanya 4,02 Juta. <https://nasional.kontan.co.id/news/bps-jumlah-kunjungan-wisman-di-sepanjang-tahun-2020-hanya-402-juta>, diakses pada 21 April 2021.

Pressrelease.id. (2021, Januari 11). Sambut 2021, Kemendag Dukung Penuh Pemulihan Ekonomi dari Dampak Pandemi Covid-19. Diakses pada melalui Pressrelease.id: <https://pressrelease.kontan.co.id/release/sambut-2021-kemendag-dukung-penuh-pemulihan-ekonomi-dari-dampak-pandemi-covid-19?page=all>

Pusat Kajian Anggaran DPR RI. 2021. Insentif Pajak dalam Program PEN: Implementasi dan Tantangan Perpanjangannya Tahun 2021. Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief Vol 01/Ed 01. <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/bib/public-file/bib-public-3.pdf>, diakses pada 06 Juli 2021

Puspa, A. W. (2020, Oktober 16). ADB: 157 Juta Pekerja Transportasi Terdampak Pandemi Covid-19. Diakses pada Juli 7, 2021, melalui Bisnis.com: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201016/98/1306071/adb-157-juta-pekerja-transportasi-terdampak-pandemi-covid-19>

Putra, I. R. (2021, April 17). Survei: Sektor Perdagangan Jadi Pilihan Pencari Kerja Selama Pandemi Covid-19. Diakses pada Juli 7, 2021, melalui merdeka.com: <https://www.merdeka.com/uang/survei-sektor-perdagangan-jadi-pilihan-pencari-kerja-selama-pandemi-covid-19.html>

Publikasi Indikator Ekonomin Edisi Desember 2020

Publikasi Indikator Ekonomin Edisi Maret 2021

Ramadhani, P. I. (2020, Desember 22). Menaker Ida Fauziah Ungkap Berbagai Masalah Tenaga Kerja di Indonesia. Diakses pada melalui LIPUTAN6: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4439658/menaker-ida-fauziah-ungkap-berbagai-masalah-tenaga-kerja-di-indonesia>

Realisasi PMDN berdasarkan sektor triwulan II 2021, BKPM

Realisasi PMDN berdasarkan lokaasi triwulan II 2021, BKPM

Realisasi PMA berdasarkan sektor triwulan II 2021, BKPM

Realisasi PMA berdasarkan lokasi triwulan II 2021, BKPM

Sari, Nursita. 4 Juni 2020. PSBB Transisi, Catat Tanggal Dibukanya Mal hingga Pantai di Jakarta. <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/06/04/14423431/psbb-transisi-catat-tanggal-dibukanya-mal-hingga-pantai-di-jakarta>, diakses pada 3 Juni 2021

Setiaji, Hidayat. 14 Januari 2021. Akibat Dagang 2020 Cetak Rekor, Tapi Kok Rasanya Sedih Ya. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210114112950-4-215872/neraca-dagang-2020-cetak-rekor-tapi-kok-rasanya-sedih-ya/1>, diakses pada 3 Juni 2021

Suwiknyo, Edi. 15 Juni 2020. Bos BPS: Kinerja Ekspor Mei Terendah Sejak Juli 2016. https://ekonomi.bisnis.com/read/20200615/9/1252756/bos-bps-kinerja-ekspor-mei-terendah-sejak-juli-2016-?utm_source=Desktop&utm_medium=Artikel&utm_campaign=BacaJuga_1, diakses pada 3 Juni 2021.

Ulfah, Finna U. 29 Juni 2020. Pandemi COVID-19 Bikin Harga Gas Alam Tak Kunjung Mengegas. <https://market.bisnis.com/read/20200629/94/1259217/pandemi-COVID-19-bikin-harga-gas-alam-tak-kunjung-mengegas>, diakses pada 4 Juni 2021.

Umah, Anisatul. 19 Januari 2021. Pandemi, Impor Bensin RI di 2020 Anjlok 23,5%. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210119160625-4-217191/pandemi-impor-bensin-ri-di-2020-anjlok-235>, diakses pada 9 Juni 2021.

Wiryono, S. (2020, November 6). Pengangguran Jakarta Meningkat 4,41 Persen, Anies: Karena Krisis Kesehatan Belum Tuntas. Diakses pada Juli 7, 2021, melalui Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/06/13365061/pengangguran-jakarta-meningkat-441-persen-anies-karena-krisis-kesehatan>

WTO. 23 April 2020. Export Prohibitions and Restrictions.

WTO, 20 Agustus 2020, Cross-Border Mobility, Covid-19 and Global Trade

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax: (021) 3857046

Email: bpsHQ@bps.go.id Homepage: <http://www.bps.go.id>

ISSN 1858-0963

